

Eksplorasi Kelapa Sawit di Asia Tenggara



Kecenderungan dan implikasi bagi
masyarakat lokal dan masyarakat
adat

Marcus Colchester dan Sophie Chao
(editor)

bersama Jonas Dallinger, H.E.P.
Sokhannaro,
Vo Thai Dan dan Jo Villanueva

Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan implikasi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat

Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara



Kecenderungan dan implikasi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat

Marcus Colchester dan Sophie Chao (editor)

**Bersama Jonas Dallinger, H.E.P. Sokhannaro,
Vo Thai Dan dan Jo Villanueva**



Buku ini adalah buku keenam dalam seri laporan yang diterbitkan oleh Forest Peoples Programme dan SawitWatch, dan mitra-mitra lainnya, tentang implikasi sosial dari ekspansi kelapa sawit. Yang pertama, *Promised Land: palm oil and land acquisition in Indonesia – implications for local communities and indigenous peoples* (Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Lahan di Indonesia - Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat), mendokumentasikan hukum Indonesia yang tidak adil yang memungkinkan tanah dirampas dari masyarakat lokal tanpa penghormatan pada hak-hak mereka. Yang kedua, *Ghosts on Our Own Land: oil palm smallholders in Indonesia and the Roundtable on Sustainable Palm Oil* (2006) (Hantu di Tanah Kami Sendiri: Petani Kelapa Sawit di Indonesia dan Pertemuan tentang Minyak Sawit Berkalanjutan), menyingkap masalah-masalah yang dihadapi petani kecil Indonesia dalam skema kemitraan kelapa sawit. Yang ketiga, *The Nagari Community, Business and the State* (2007), memberikan analisis rinci tentang bagaimana masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat berhadapan dengan perkebunan kelapa sawit yang didukung negara yang mengambil alih tanah mereka. Yang keempat, *Land is Life: Land Rights and Palm Oil Development in Sarawak* (2007), menunjukkan bagaimana ekspansi kelapa sawit di negara bagian Sarawak, Malaysia, secara sistematis merampas tanah masyarakat Dayak tanpa menghormati hak-hak adat mereka. Yang kelima, *HSBC and the Palm Oil Sector in South East Asia: towards accountability* (2008) HSBC dan Sektor Minyak Sawit di Asia Tenggara: menuju Akuntabilitas), mengungkap kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam meminta bank untuk menindak nasabahnya yang melanggar standar-standar yang semestinya ditegakkan pihak bank.

Eksansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan implikasi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat

Edisi Pertama: Juli 2011

Editor: Marcus Colchester dan Sophie Chao

Penulis: Marcus Colchester, Sophie Chao, Jonas Dallinger , H.E.P. Sokhannaro, Vo Thai Dan dan Jo Villanueva

Isi buku ini boleh direproduksi dan didistribusikan untuk keperluan non-komersial dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang hak cipta dan sumber dan para penulis.

Hak Cipta@FPP dan SW

Forest Peoples Programme

1c Fosseway Business Centre
Stratford Road
Moreton-in-Marsh
GL56 9NQ England
Tel: + 44 1608 652893
Fax: + 44 1608 652878
Web:

www.forestpeoples.org

Perkumpulan SawitWatch

Jalan Sempur Kaler No 28
16129 Bogor – Jawa Barat
Indonesia
Tel: + 62 251 352171
Fax: + 62 251 352047
Web:

www.sawitwatch.or.id

Foto sampul: Benih kelapa sawit yang sedang disiapkan untuk penanaman:

Marcus Colchester

Desain sampul: Sophie Chao

Daftir Isi

Ucapan Terima Kasih.....	4
Daftar Singkatan.....	6
Prakata.....	14
1. Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Sebuah Tinjauan <i>Marcus Colchester dan Sophie Chao</i>	17
2. Pengembangan kelapa sawit di Thailand: pertimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan <i>Jonas Dallinger</i>	43
3. Pengembangan Kelapa Sawit di Kamboja <i>H.E.P. Sokhannaro</i>	75
4. Pengembangan Kelapa Sawit di Vietnam <i>Vo Thai Dan</i>	107
Ekspansi kelapa sawit di Filipina: Analisis isu-isu keamanan hak atas tanah, lingkungan dan pangan <i>Jo Villanueva</i>	138
Daftar Pustaka.....	259
Daftar Kata.....	279
Tentang Penulis.....	288
Tentang Mitra.....	292

Ucapan Terima Kasih

Studi ini adalah hasil dari sebuah kolaborasi yang bermanfaat antara organisasi hak asasi manusia dari Inggris, yaitu *Forest Peoples Programme*, dan NGO pengamat sawit dari Indonesia, yaitu SawitWatch, NGO Filipina, *the Samdhana Institute* dan *the Centre for Peoples and Forests*, sebuah organisasi internasional yang berbasis di Bangkok. Studi ini adalah salah satu hasil dari sebuah proyek bersama, yang didanai oleh *the Rights and Resources Initiative*, yang ditujukan, pertama-tama, untuk mengkaji bagaimana perluasan sektor minyak sawit di Asia Tenggara dan, kedua, untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk terlibat dalam industri ini untuk menahan laju pembangunan destruktif dan memastikan pencapaian hasil yang berpihak pada masyarakat dan hutan, berdasarkan penghormatan pada hak-hak, mata pencarian dan cara hidup masyarakat lokal.

Meskipun para penulis yang disebutkan namanya dan pihak editor bertanggung jawab atas naskah akhir dan kesalahan pada fakta atau penafsiran yang ada di dalamnya, kerja ini tidak dapat diwujudkan tanpa adanya kolaborasi yang erat dari banyak pihak. Dari pihak-pihak tersebut, kami secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada: Yam Malla, James Bampton, Nguyen Quang Tan, Ganga Dahal dan Panisara Panupitak dari *the Centre for Peoples and Forests*; Abetnego Tarigan, Norman Jiwan, Vinna Saprina dan Rahmawati Retno Winarni dari SawitWatch; Nonette Royo dan Elizabeth Pua Villamor dari *the Samdhana Institute*, Sarah Roberts dan Julia Overton dari *Forest Peoples Programme*, serta anggota *the Nature and Poverty Alliance*. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta lokakarya atas partisipasi mereka yang berharga; Maria Lisa Alano, Normi Batula, Dr. Saturnino Borras Jr., Ganga Dahal, Jonas Dallinger, Raul de Granada, Maria Cristina Guerrero, Sokhannaro Hep, Thomas Jalong, Theiva Lingam, Greg I Macabodlod, Ibarra Malonzo, EdtTami Mansayagan, Grizelda “Gerthie” Mayo-Anda, Kenn Mondiai, Dedi Ratih, Shafi Suhami, Phaovanna Thippayanurusakul, Jo Villanueva, Dr. Vo Thai Dan, Dr. Wanun P dan Wong Meng Chuo.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak ini dan juga pihak-pihak lain yang telah berkolaborasi dengan kami untuk menjadikan kerja ini dapat dilaksanakan dan khususnya kepada rekan sejawat kami di *the Rights and Resources Group*.

Marcus Colchester dan Sophie Chao (editor)

Prakata

Adalah sebuah kegembiraan yang amat besar bahwa SawitWatch menyambut publikasi studi regional ini, yang difokuskan pada perluasan perkebunan kelapa sawit dan penguasaan lahan di beberapa negara penghasil minyak sawit di Asia Tenggara (Filipina, Thailand, Vietnam dan Kamboja) dan perbandingan antara pengalaman mereka dengan fakta dan mitos, cerita-cerita dan pelajaran yang didapat dari negara penghasil minyak sawit lain, khususnya Indonesia, Indonesia, Malaysia dan Papua Nugini.

Tergantung pada kerangka kerja hukum nasional dan peraturan pelaksanaan di negara-negara Asia yang disebutkan di atas, ekspansi cepat industri minyak sawit dan rencana pembukaan kebun kelapa sawit yang baru telah membawa akibat yang tidak diharapkan dan pastinya akan merubah sistem penguasaan tanah dan menimbulkan kerawanan pada mata pencarian subsisten, konflik dan kebencian, kehilangan lahan dan penggusuran, pengaturan kembali masalah kepemilikan, pengelolaan, pendudukan, eksplorasi dan pemanfaatan tanah, hutan, air, dan sumber daya alam lainnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu studi negara dalam publikasi ini:

...ketika pejabat pemerintah melaksanakan alokasi lahan dan perencanaan pemanfaatan lahan di wilayah masyarakat adat, anggapan bahwa kelompok-kelompok etnis minoritas yang mempraktekkan pertanian “tebang dan bakar” merusak kawasan hutan cenderung mendominasi. Bagi kebanyakan pejabat pemerintah, lahan bera hanya berarti “lahan yang tidak dimanfaatkan”. Dengan demikian masyarakat lokal kehilangan sebagian lahan garapan mereka saat lahan tersebut menjadi sasaran reboisasi. Jika lahan bera hanya ditanami dengan pohon, para petani tidak memiliki pilihan lain saat tiba saatnya untuk memanfaatkan kembali lahan tersebut selain membuka lahan lain untuk ladang mereka atau menebangi pohon-pohon yang sudah ditanam. Selain itu, peraturan penguasaan lahan yang berlaku tidak mengijinkan kepemilikan bersama oleh masyarakat. Oleh karena itu, lahan

bersama menghadapi risiko privatisasi lewat program alokasi lahan ...

(Lang 2002, Xanthaki 2003 dikutip dalam Dan 2011)

Jelas terlihat bahwa nilai penting pembangunan dari sebuah negara berdaulat dapat terbukti efektif ketika pembangunan tersebut menghasilkan sebuah realisasi yang lebih baik, dapat diterima dan progresif dari hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan masyarakat adat, masyarakat lokal, petani kecil, buruh dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Amatlah penting bahwa hak-hak ini dilindungi dalam menghadapi peningkatan permintaan minyak sawit global, ekspansi kebun kelapa sawit yang ekstraktif, moda operasi dan produksi yang eksplotatif saat ini dan akumulasi keuntungan yang tidak bertanggung jawab dari industri minyak sawit.

Salah satu laporan negara mengemukakan:

... ketidakseimbangan dalam kepemilikan lahan juga semakin meningkat, dan menciptakan kesenjangan yang kasat mata nyata antara kelompok miskin yang tidak memiliki tanah dan para pemilik tanah yang lebih kaya. Konsolidasi dan akumulasi lahan oleh keluarga dan individual yang lebih kaya selanjutnya telah meningkatkan jumlah rumah tangga pedesaan yang tidak memiliki lahan ...

(World Bank Vietnam 2000, Vietnam News 1999 dikutip dalam Dan 2011)

Jika dikumpulkan seluruhnya, studi kasus-studi kasus ini menunjukkan bagaimana reformasi terhadap undang-undang dan kebijakan pertanahan nasional, yang disertai dengan penegakan hukum yang kuat, menjadi sesuatu yang vital jika sektor minyak sawit diharapkan tidak menimbulkan kerugian. Sementara itu, aksi melampaui undang-undang menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu, dipandang semata-mata dari sudut pandang norma-norma internasional dan praktik terbaik, industri minyak sawit memiliki keterikatan moral untuk melaksanakan dan memenuhi undang-undang lokal dan nasional, hak asasi manusia dan norma-norma

serta standar buruh, kebijakan yang tidak merugikan, prinsip-prinsip yang tidak diskriminatif, transparansi, tata kelola yang baik, akuntabilitas dan tanggung jawab.

Mengingat kompleksitas investasi dan operasi industri minyak sawit, jelas bahwa industri ini telah berperan dan akan terus menimbulkan deforestasi, degradasi lingkungan yang tidak dapat dihindari, konflik lahan, konflik sosial, kerawanan kedaulatan pangan dan mata pencarian, serta pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia yang lebih jauh. Oleh karena itu, amatlah dianjurkan agar pemerintah negara penghasil minyak sawit segera memulai, mengembangkan, mengambil dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan untuk memperbaiki undang-undang yang cacat, praktik-praktek yang buruk, celah-celah hukum dan dampak pembangunan yang diskriminatif.

Terakhir namun tidak kalah penting artinya, SawitWatch ingin menyampaikan apreasiasi yang tinggi kepada para penulis dan editor studi negara, individu-individu yang telah memberikan dukungan dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat, khususnya *the Rights and Resource Initiatives* (RRI), *Forest Peoples Programme* (FPP), RECOFTC, Tenaganita, Sahabat Alam Malaysia (SAM), dan dukungan kapasitas dan sumber daya lainnya atas kontribusi mereka yang luar biasa bagi publikasi ini.

Bogor, 27 Juni 2011

Abetnego Tarigan

Direktur Eksekutif SawitWatch

Daftar Singkatan

5MHRP	5-Million Hectare Reforestation Program <i>Program Reforestasi Lima Juta Hektar</i>
A&D	Alienable and Disposable Land <i>Lahan yang dapat dialihkan dan sekali pakai</i>
ABERDI	A. Brown Energy Resources Development Inc.
ADB	Alienable and Disposable Land <i>Lahan yang dapat dialihkan dan sekali pakai</i>
AFRIM	Alternate Forum for Research in Mindanao
AGHIMICU	Agtulawon-Mintapod Higaonon Cumadon “Pure Higaonon tribe in Mintapod and Agtulawon Ancestral Domain” (<i>Suku Asli Higaonon di Mintapod dan Wilayah Leluhur Agtulawon</i>)
AGPI	Agumil Philippines Inc.
ALF	Agricultural Loan Fund <i>Dana Pinjaman Pertanian</i>
API	Agusan Plantations, Inc.
ARB	Agrarian Reform Beneficiaries <i>Penerima Manfaat Reforma Agraria</i>
ARC	Agrarian Reform Community <i>Masyarakat Reforma Agraria</i>
ARSP	Agrarian Reform Support Project <i>Proyek Pendukung Reforma Agraria</i>
ASEAN	Association of Southeast Nations <i>Persekutuan Negara-Negara Asia Tenggara</i>
BAAC	Bank of Agriculture and Cooperatives <i>Bank Pertanian dan Koperasi</i>
BDF	Bio-Diesel Fuel <i>Bahan Bakar Bio-Diesel</i>
CADT	Certificate of Ancestral Domain Title <i>Sertifikat Wilayah Leluhur</i>
CADT	Certificate of Ancestral Domain Title <i>Sertifikat Wilayah Leluhur</i>

CALT	Certificate of Ancestral Land Title/Ancestral Domain <i>Sertifikat Tanah Leluhur/Wilayah Leluhur</i>
CARBEMPCO	Cuevas Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative <i>Koperasi Multiguna Penerima Manfaat Reforma Agraria Cuevas</i>
CARL	Comprehensive Agrarian Reform Law <i>UU Reforma Agraria Komprehensif</i>
CARP	Comprehensive Agrarian Reform Program <i>Program Reforma Agraria Komprehensif</i>
CBFMA	Community-Based Forest Management Agreement <i>Kesepakatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan</i>
CBFMP	Community Based Forest Management Program <i>Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan</i>
CDCF	Cambodia Development Cooperation Forum <i>Forum Koperasi Pembangunan Kamboja</i>
CFP	Community Forestry Program <i>Program Kehutanan Masyarakat</i>
CLF	Countryside Loan Fund <i>Dana Pinjaman Desa</i>
CLOA	Certificate of Land Ownership Award <i>Sertifikat Kepemilikan Tanah</i>
CMEM	Colombia Multi-Sectoral Environmental Movement <i>Gerakan Lingkungan Multi-Sektoral Colombia</i>
CPO	Crude Palm Oil <i>Minyak Sawit Mentah</i>
CRMF	Community Resource Management Framework <i>Kerangka Kerja Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat</i>
CRP	Contract Reforestation Program <i>Program Reforestasi Kontrak</i>
CSO	Civil Society Organisation <i>Organisasi Masyarakat Sipil</i>
CUP	Cooperative Union of the Philippines <i>Serikat Koperasi Filipina</i>
DA	Department of Agriculture <i>Departemen Pertanian</i>
DAR	Department of Agrarian Reform <i>Departemen Reforma Agraria</i>

DARAB	Department of Agrarian Reform Adjudicatory Board <i>Departement Dewan Ajudikasi Reforma Agraria</i>
DENR	Department of Environment and Natural Resources <i>Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam</i>
DOE	Department of Energy <i>Departemen Energi</i>
DTI	Department of Trade and Industry <i>Departemen Perdagangan dan Industri</i>
ECAN	Environmentally Critical Areas Network <i>Jaringan Kawasan Ekologi Kritis</i>
ECC	Environmental Compliance Certificate <i>Sertifikat Kepatuhan Lingkungan</i>
EIA	Environmental Impact Assessment <i>Analisa Dampak Lingkungan</i>
ELAC	Environmental Legal Assistance Centre <i>Pusat Bantuan Hukum Lingkungan</i>
ELC	Economic Land Concession <i>Konsesi Lahan Ekonomis</i>
FDI	Foreign Direct Investments <i>Penanaman Modal Asing</i>
FFB	Fresh Fruit Bunch <i>Tandan Buah Segar (TBS)</i>
FLMP	Forest Land Management Program <i>Program Pengelolaan Kawasan Hutan</i>
FMS	Forest Management Services <i>Layanan Pengelolaan Hutan</i>
FPDL	Forest Protection and Development Law 2004 <i>UU Perlindungan dan Pengembangan Hutan tahun 2004</i>
FPIC	Free, Prior and Informed Consent <i>Keputusan Bebas, Didahului dan Diinformasikan</i>
FPIWU	Filipinas Palm Oil Workers Union <i>Serikat Buruh Minyak Sawit Filipina</i>
FPP	Forest Peoples Programme
FPPI	Filipinas Palm Oil Plantation, Inc.
GAP	Good Agricultural Practice <i>Praktek Pertanian yang Baik</i>
HCV	High Conservation Value Nilai Konservasi Tinggi

HGU	<i>Hak Guna Usaha:</i> business land use permit
HOPL	Hargy Oil Palms Limited
IFMA	Industrial Forest Management Agreement <i>Kesepakatan Pengelolaan Hutan Industri</i>
IFSP	Integrated Forest Stewardship Program <i>Program Pengelolaan Hutan Terpadu</i>
IPRA	Indigenous Peoples Rights Act <i>UU Hak-Hak Masyarakat Adat</i>
ISFP	Integrated Social Forestry Program <i>Program Kehutanan Sosial Terpadu</i>
JMI	Joint Monitoring Indicator <i>Indikator Monitoring Bersama</i>
JVA	Joint Venture Agreement <i>Kesepakatan Usaha Bersama</i>
KARBEMPCO	Kenram Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative <i>Koperasi Multiguna Penerima Manfaat Reforma Agraria Kenram</i>
KASAMAKA	Kapunungan sa Mga Mag-Uuma sa Kaanibungan “Association of Farmers in Kaanibungan” (<i>Asosiasi Petani Kaanibungan</i>)
KFI	Kasanyangan Foundation, Inc.
KIDI	Kenram Industrial & Development, Inc.
KPA	Consortium for Agrarian Reform <i>Konsorsium untuk Reformasi Agraria</i>
KUFTRIMPCO	Kabingwangan Upland Farmers Tribal Multi-Purpose Cooperative <i>Koperasi Multiguna Kesukuan Petani Dataran Tinggi Kabingwangan</i>
LBP	Land Bank of the Philippines <i>Bank Tanah Filipina</i>
LGU	Local Government Unit <i>Unit Pemerintah Daerah</i>
LTP	Land Titling Program <i>Program Sertifikasi Tanah</i>

MAFF	Ministry of Agriculture, Forestry dan Fisheries <i>Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</i>
MAPARBEMP CO	Mapantig Agrarian Reform Beneficiaries Multi-Purpose Cooperative <i>Koperasi Multiguna Penerima Manfaat Reformasi Agraria Mapantig</i>
MEEDO	Municipal Enterprise dan Economic Development Office <i>Dinas Pengembangan Ekonomi dan Usaha Kotamadya</i>
MLMUPC	Ministry of Land Management, Urban Planning dan Construction <i>Kementerian Pengelolaan Lahan, Perencanaan dan Pembangunan Perkotaan</i>
MNLF	Moro National Liberation Front <i>Front Pembelaan Nasional Moro</i>
MoA	Memorandum of Agreement <i>Memorandum Kesepakatan</i>
MRICOP	Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co.
MTPDP	Medium Term Philippine Development Plan <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Filipina</i>
NAFLU	National Federation Labour Union <i>Federasi Serikat Buruh Nasional</i>
NBB	National Biofuels Board <i>Dewan Biofuel Nasional</i>
NBPOL	New Britain Palm Oil Limited
NCIP	National Commission on Indigenous Peoples <i>Komisi Nasional Masyarakat Adat</i>
NCIP	National Commission on Indigenous Peoples <i>Komisi Nasional Masyarakat Adat</i>
NCR	Native Customary Rights <i>Hak Adat Pribumi</i>
NDC	National Development Corporation
NES	Nuclear Estate Scheme <i>Skema Inti-Plasma</i>
NGEI	NGEI-Guthrie Estates, Inc.
NGOs	Non Government Organisations <i>Organisasi Non-Pemerintah</i>
NGPI	NGPI-Guthrie Plantations, Inc.

NIPAS	National Integrated Protected Area System <i>Sistem Kawasan Lindung Terpadu Nasional</i>
NPA	New Peoples' Army <i>Angkatan Bersenjata Rakyat Baru</i>
NRIMP	National Road Improvement and Management Program <i>Program Pengelolaan dan Perbaikan Jalan Nasional</i>
NSDP	National Strategic Development Plan <i>Rencana Pembangunan Strategis Nasional</i>
OAE	Office of Agricultural Economics <i>Dinas Ekonomi Pertanian</i>
OER	Oil Extraction Rate <i>Tingkat Perasan Minyak</i>
OPIC	Oil Palm Industry Cooperation
PALM	Philippine Agricultural Land Development Mill
PCA	Philippine Coconut Authority <i>Otoritas Kelapa Filipina</i>
PCSD	Palawan Council for Sustainable Development <i>Dewan Palawan untuk Pembangunan Berkelanjutan</i>
PEO	Provincial/Urban Environmental Office <i>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Perkotaan</i>
PODO	Palm Oil Development Office <i>Dinas Pengembangan Minyak Sawit</i>
POPDC	Philippine Oil Palm Development Council <i>Dewan Pengembangan Kelapa Sawit Filipina</i>
PPDC	Philippine Palm Oil Development Council <i>Dewan Pengembangan Minyak Sawit Filipina</i>
PPOIC	Philippine Palm Oil Industry Council <i>Dewan Industri Minyak Sawit Filipina</i>
PPVOMI	Palawan Palm and Vegetable Oil Mills Inc.
PSU	Palawan State University
PWO	Public Warehouse Organization <i>Organisasi Gudang Publik</i>
QUEDANCOR	Quedan dan Rural Credit Guarantee Corporation <i>Korporasi Penjaminan Kredit Quedan dan Pedesaan</i>
<u>RAN</u>	Rainforest Action Network
RBD	Refined bleached deodorised palm oil <i>Minyak Sawit Suling tanpa Bau</i>

RECOFTC	Center for People and Forests
RFD	Royal Forestry Department <i>Departemen Kehutanan Kerajaan</i>
RGC	Royal Government of Cambodia <i>Pemerintah Kerajaan Kamboja</i>
RRI	Rights Resources Initiative
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SABL	Special Agricultural dan Business Lease <i>Sewa Usaha dan Pertanian Khusus</i>
SEP	Strategic Environmental Plan <i>Rencana Lingkungan Hidup Strategis</i>
SIA	Social Impact Assessment <i>Penilaian Dampak Sosial</i>
SIFMA	Socialised Industrial Forest Management Agreement <i>Kesepakatan Pengelolaan Hutan Industri Sosial</i>
SPDA	Southern Philippines Development Authority <i>Otoritas Pembangunan Filipina Selatan</i>
SRT	Oil Palm Self Reliant Loan Window <i>Jendela Pinjaman Mandiri Kelapa Sawit</i>
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats Analysis <i>Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman</i>
TGO	Thai Greenhouse Gas Management Organization <i>Organisasi Pengelolaan Gas Rumah Kaca Thailand</i>
TODO UNLAD	Total Development Options - Unified Land Bank Approach to Development <i>Pilihan Pembangunan Total – Pendekatan Bank Tanah Bersatu untuk Pembangunan</i>
UNDROP	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples <i>Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat</i>
UNOHCHR	United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights <i>Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB</i>
VOP	Village Oil Palm <i>Kelapa Sawit Desa</i>

Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Sebuah Tinjauan

Marcus Colchester¹ dan Sophie Chao²

Pengantar

Minyak sawit adalah komoditas yang terdapat di mana-mana. Tanaman ini merupakan bahan dasar banyak makanan olahan yang kita biasa makan. Sawit adalah minyak yang paling banyak digunakan dalam kosmetik dan pembersih rumah tangga. Secara global penggunaannya meningkat secara masif. Minyak sawit juga sering muncul dalam berita: para penentangnya menunjuk pada bukti-bukti hasil penelitian yang baik bahwa pengembangan kelapa sawit yang ceroboh merusak hutan, mengeringkan rawa gambut, memusnahkan spesies langka, mencemari udara dan air, memicu perubahan iklim, merampas milik masyarakat adat dan menyengsarakan masyarakat miskin pedesaan. Bank Dunia sedemikian terganggunya dengan cara perkembangan sektor minyak sawit sehingga antara tahun 2009 dan 2011 Bank Dunia menangguhkan seluruh pendanaan proyek-proyek minyak sawit di seluruh dunia, sambil meninjau kembali pengalaman-pengalaman Bank Dunia dan memikirkan bagaimana Bank Dunia seharusnya terlibat kembali dalam sektor tersebut untuk menjamin hasil yang baik.

Pengakuan atas masalah-masalah ini juga datang dari industri itu sendiri, yang, didorong oleh kepedulian konsumen, telah mengakui bahwa metode produksi harus berubah dan yang telah membentuk *the Roundtable on Sustainable Palm Oil* lewat mana perusahaan beroperasi melalui metode yang dapat diterima yang dapat dinilai dan disertifikasi. RSPO bertujuan untuk menjauhkan daerah perkebunan kelapa sawit dari hutan primer maupun kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan melarang perampasan tanah, dan mendesakkan bahwa semua tanah hanya dapat diperoleh dengan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk menghormati hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas pembelian atau sewa tanah.

Sampai saat ini, sebagian besar perhatian difokuskan terutama pada negara pengekspor minyak sawit utama, yaitu Malaysia dan Indonesia, yang memasok lebih dari 80% pasar global. Papua Nugini, eksportir urutan ketiga, juga telah mendapat perhatian. Tapi apa yang terjadi di tempat lain di Asia Tenggara? Apakah ekspansi sawit memiliki dampak yang sama di sana? Apakah negara-negara ini mengalami masalah perampasan tanah dan konflik sosial yang serupa atau apakah masyarakat adat dan petani kecil mendapatkan manfaat disana? Apa yang dapat kita pelajari dari negara-negara lain ini? Bagaimana kita bisa membantu masyarakat sipil di negara-negara ini terlibat dengan industri sawit dan membatasi atau mengurangi dampak negatifnya?

Publikasi ini adalah hasil awal dari sebuah proyek yang sedang dilakukan untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Sebagai sebuah kolaborasi antara *Forest Peoples Programme*, *SawitWatch*, *the Samdhana Institute* dan *Centre for People and Forests*, yang kesemuanya merupakan mitra dan kolaborator *the Rights and Resources Initiative*, proyek ini telah berupaya mengkonsolidasikan informasi yang tersedia dari Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini dan melengkapinya dengan penelitian baru dari Thailand, Kamboja, Vietnam dan Filipina, serta literatur yang lebih luas.

Metode dan Keterbatasan

Studi ini adalah hasil dari tahun pertama proyek kolaborasi ini, yang tujuannya, pertama, untuk menilai bagaimana perkembangan sektor minyak sawit di Asia Tenggara dan, kedua, untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terlibat dengan industri ini menahan pembangunan yang merusak dan memastikan adanya hasil yang menguntungkan bagi masyarakat dan hutan, berdasarkan penghormatan hak-hak, mata pencaharian dan cara hidup masyarakat lokal. Selama tahun pertama, usaha kami difokuskan pada mengumpulkan informasi tentang kecenderungan utama di sektor minyak sawit di Asia Tenggara, membahas masalah-masalah dan prospek, serta merencanakan cara yang tepat untuk terlibat di

masa depan. Lalu empat studi kasus nasional, yang membentuk bab-bab penting dari laporan ini, dilakukan di Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina, dan dua lokakarya diselenggarakan untuk mendiskusikan temuan-temuan awal dan menganalisis berbagai kecenderungan dan solusi-solusi. Lokakarya pertama yang diselenggarakan oleh *the Centre for People and Forests* di Bangkok tidak hanya mencakup peserta dari negara-negara ini, tetapi juga dari Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini, di mana peserta dapat menyoroti kecenderungan dan tantangan di negara mereka. Lokakarya kedua kemudian diadakan di desa Bayanga, di selatan Cagayan de Oro di pulau Mindanao Filipina, yang diselenggarakan oleh *the Samdhana Institute*, yang mengamati secara rinci situasi terkini di Filipina.³

Laporan yang dihasilkan menunjukkan sebuah gambaran dari apa yang bisa kita lihat tentang sektor minyak sawit lewat cara-cara ini. Keterbatasan waktu dan anggaran tidak memungkinkan studi lapang yang rinci tentang dearah setempat kecuali di Filipina. Di Thailand, kami tidak mampu mengidentifikasi perspektif badan penelitian nasional atau NGO independen tentang isu-isu tenurial di daerah-daerah di mana sawit sedang ekspansi. Di Kamboja tidak cukup data resmi tentang alokasi lahan. Di Vietnam, di mana kelapa sawit masih belum dikembangkan, implikasi ekspansi sawit bagi masyarakat tentunya masih belum jelas. Meskipun ada keterbatasan-keterbatasan ini kami merasa percaya diri bahwa banyak informasi yang berhasil kami kumpulkan sudah cukup sehingga menemukan berbagai kencenderungan dan masalah dapat dilakukan, dan kesimpulan penting sudah dapat ditarik tentang bagaimana sektor ini perlu diarahkan untuk mengurangi dampak negatif. Sementara itu, proyek itu sendiri terus berlanjut.

Kecenderungan pasar

Meningkatnya permintaan global untuk lemak nabati tetap menjadi faktor utama yang mendorong harga minyak sawit di pasar komoditas internasional dan hal ini mendorong investasi lebih jauh, mendorong perdagangan perusahaan minyak sawit di bursa saham dan mempercepat pengambil-alihan lahan.

Negara	Ekspor CPO (metrik ton)	Impor CPO	Total produksi CPO	Ranking dunia dalam produksi CPO
Indonesia	1.8 juta	21,000	19,7 juta	1
Malaysia	13,84 juta	1,047 juta	17,4 juta	2
PNG	405.000	5.000	425.000	6
Thailand	500.000	1.000	1,4 juta	3
Filipina	n/a	10.000	70.000	16
Kamboja	n/a	n/a	n/a	n/a
Vietnam	n/a	480.000	n/a	n/a

Tabel 1: Ekspor, impor dan produksi CPO tahun 2008⁴

Minyak sawit membukukan sepertiga dari total 130 juta ton per tahun lemak nabati yang diperdagangkan secara global per tahun.⁵ Produksi global total minyak sawit diperkirakan lebih dari 45 juta ton, dengan Indonesia dan Malaysia sebagai produsen dan ekspor utama dunia.⁶ Pasar utama bagi pertumbuhan industri minyak sawit adalah Eropa, India, Pakistan dan Cina untuk kebutuhan pangan, dengan permintaan di Amerika Serikat yang sekarang terus meningkat dengan cepat.

Investasi pada perluasan kelapa sawit juga didorong oleh kebijakan substitusi impor di negara-negara yang saat ini bergantung pada pasar global untuk impor lemak nabati seperti Filipina, India, dan Vietnam, dan negara-negara yang berharap dapat mengurangi ketergantungan mereka pada impor bahan bakar fosil dengan biodiesel. Dengan industri bahan bakar nabati global diperkirakan

akan meningkat dua kali lipat antara 2007 dan 2017, sebagai segmen pertumbuhan tercepat di pertanian komersial global⁷, baik Indonesia maupun Malaysia telah mengenalkan kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan industri bio-diesel sebagai sumber energi domestik maupun ekspor dan target untuk memproduksi minyak sawit sebesar 6 juta ton per tahun.⁸ Kantor Dewan Menteri Kamboja juga memprakarsai rencana promosi bio-energi yang jelas menunjuk ke arah ekspansi lebih lanjut perkebunan kelapa sawit di masa yang tidak terlalu lama lagi.

Kecenderungan penanaman

Negara	Luas Perkebunan (hektar)	Rencana Ekspansi (hektar)	Pola produksi
Malaysia	4,6 juta	60.000-100.000/tahun utamanya di Sabah dan Sarawak	Sewa yang dimediasi negara atas tanah negara atau tanah adat. Perkebunan besar dengan petani plasma menempati jumlah terbanyak dalam skema; sedikit petani mandiri (10%)
Indonesia	9,4 juta	10-20 juta+	Sewa yang dimediasi negara untuk perkebunan besar di atas tanah negara. Petani plasma menempati 40% dari total luasan, setengah dalam skema yang dikaitkan dengan perkebunan dan setengah lagi mandiri

PNG	0,5 juta	2 juta – 5 juta	Umumnya skema plasma “terkait” (90%), lewat SABL dan Model Inti-Plasma
Thailand	644.000	80.000/tahun	Umumnya petani kecil mandiri (70%)
Kamboja	118.000	n/a	Umumnya perkebunan besar lewat mekanisme ELC
Filipina	46.608 304.350	Potensi untuk	Skema sewa dan kesepakatan kemitraan antara koperasi dan agrobisnis
Vietnam	650	70.000- 100.000 menjelang 2015	Baru sebatas eksperimen

Tabel 2: Luas perkebunan kelapa sawit dan pola-pola produksi

Asia Tenggara sedang mengalami perluasan dan intensifikasi dalam konversi hutan dan ladang berpindah untuk perkebunan kelapa sawit. Rasio tanah terhadap produksi yang optimal dicapai melalui monokultur kelapa sawit di wilayah yang luas, biasanya disertai dengan pembangunan pabrik pengolahan dan jalan untuk membawa hasil panen. Ada 4,6 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan ekspansi sebagian besar terjadi di Sabah dan Sarawak. Tanah sekarang sudah semakin langka: pada tahun 2002, ekspansi di Semenanjung Malaysia menurun sampai 340.000 hektar konversi hutan yang terakhir.⁹ Meskipun demikian, pemerintah Sarawak merencanakan untuk melipat-gandakan kebun kelapa sawit dengan target 60.000-100.000 hektar per tahun di atas tanah adat. Modus ekspansinya adalah dalam bentuk perkebunan besar dengan petani plasma menempati jumlah terbanyak dalam skema dengan sewa yang dimediasi negara di atas tanah negara atau tanah adat.¹⁰ Hanya 10% merupakan petani mandiri.

Perkebunan kelapa sawit diperkirakan ada sekitar 9.4 juta hektar di Indonesia, di mana ekspansi yang paling dahsyat sedang berlangsung. Pemilik tanah adat menyerahkan tanah mereka kepada negara untuk dikembangkan oleh perusahaan swasta, biasanya namun tidak selalu, dengan skema-skema tertentu untuk petani kecil. Sekitar 600.000 hektar lahan dibuka setiap tahun dan ekspansi terjadi tanpa henti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat dan sekarang meningkat di pulau-pulau kecil seperti Siberut, Halmahera dan Yamdena.

Perkebunan kelapa sawit Papua Nugini mencapai sekitar 500.000 hektar dan terletak di daerah West New Britan, Oro, Milne Bay dan New Ireland baru. Baru-baru ini, telah ada penyebaran cepat daerah yang dialokasikan untuk perkebunan lewat SABL yang curang, yang meliputi 5,6 juta hektar tanah adat tanpa negosiasi yang layak dengan pemilik tradisionalnya.

Perkebunan kelapa sawit Kamboja, yang meliputi 118.000 hektar, telah berkembang sebagai perkebunan besar di atas wilayah luas yang disebut tanah 'kosong' di daerah hutan melalui penerbitan konsepsi lahan ekonomi (ELC) dimana alokasi tanah milik negara yang besar diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta atas nama investasi pertanian skala besar. Masyarakat yang memiliki hak informal atau hak adat adat di kawasan ini telah dikesampingkan.

Sebaliknya, perkebunan besar jarang terdapat di Thailand. Karakter skala kecil dari industri minyak sawit dan kelapa sawit Thailand memungkinkan distribusi penyewaan yang lebih luas daripada hal sejenis di negara-negara di mana sedikit perusahaan besar mendominasi industri ini dan kepemilikan tanah individu dibatasi. Perkebunan mencakup wilayah seluas 644.000 hektar; petani yang memiliki lahan kurang dari 50 hektar mengelola sekitar 70% dari total luas wilayah ditanami kelapa sawit, dan sebagian besar adalah petani mandiri.

Perkebunan kelapa sawit di Filipina menempati wilayah seluas 46.608 hektar, mewakili peningkatan sebesar 160% daerah perkebunan hanya dalam rentang waktu empat tahun. Ini

menunjukkan Filipina mungkin akan segera muncul sebagai pemain kunci dalam industri minyak sawit Asia Tenggara. Ekspansi diproyeksikan di Leyte dan Samar sementara ekspansi yang agresif sudah berlangsung di Maguindanao, Cotabato Utara, Davao, dan Misamis Oriental. Masalah produksi diatur dalam bentuk skema penyewaan kembali antara *Agrarian Reform Beneficiaries* (ARB), pihak agribisnis, dan kesepakatan kemitraan plasma antara petani dan pihak agribisnis.

Karena kelapa sawit baru-baru ini saja diperkenalkan di Vietnam, sektor ini masih dalam tahap perkebunan dan produksi eksperimental (non-komersial). Perkebunan diatur dalam bentuk bidang-bidang tanah kecil yang total luasnya mencapai 650 hektar. Tanah yang tersedia tidak banyak akibat produksi besar-besaran tanaman komersial lain: beras; kopi; jambu mete; karet. Namun, rencana untuk mengembangkan minyak nabati sedang dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan oleh pemerintah Vietnam sebagai bagian dari 'Pengembangan bahan bakar nabati untuk tahun 2015: visi untuk 2025' (2007) dengan proyeksi luas perkebunan yang akan dikembangkan mencapai 70.000-100.000 hektar di tahun 2015.

Perluasan perkebunan kelapa sawit dengan cepat menjadi fenomena global. Di India, diperkirakan luas perkebunan akan mencapai 1 juta hektar dalam lima tahun mendatang, dari 130.000 hektar saat ini.¹¹ Perkebunan semakin meluas di Nigeria, Ghana, Pantai Gading, Kongo, Guinea, DRC, Kamerun dan Sierra Leone bersama daerah-daerah yang lebih kecil di Benin, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuator, Gabon, Gambia, Guinea Bissau, Liberia, Senegal, Tanzania, Togo dan Uganda.¹² Di Amerika Latin, budidaya kelapa sawit skala industri sedang meluas di Ekuador, Kolombia, Honduras, Kosta Rika, Venezuela, Brasil, Peru Guatemala, Republik Dominika, Nikaragua dan Meksiko.¹³

Dampak lingkungan

Dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit skala besar termasuk hilangnya keanekaragaman hayati yang luar biasa, peningkatan emisi gas rumah kaca, deforestasi yang masif,

penipisan nutrisi tanah, kekeringan dan penandusan/penggurunan dan polusi air akibat limbah beracun. Paradoksnya, minyak sawit sering dipromosikan oleh pemerintah negara-negara Asia Tenggara penghasil minyak sawit sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim sebagai sumber energi terbarukan, meskipun semakin banyak terdapat bukti bahwa pengembangan kelapa sawit jauh dari ramah lingkungan, terutama akibat pembukaan lahan gambut yang kaya karbon untuk perkebunan.¹⁴

Di Indonesia, pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan kebakaran hutan yang merusak,¹⁵ sementara di Thailand, pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit ditunjuk sebagai penyebab terjadinya tanah longsor mengerikan yang menewaskan setidaknya empat puluh orang pada bulan April 2011.¹⁶ Di Sarawak (Malaysia), PNG dan Sumatera (Indonesia), perkebunan kelapa sawit telah berkontribusi terhadap pencemaran sungai-sungai setempat yang parah, yang mengancam mata pencarian dan kesejahteraan fisik dari masyarakat setempat.¹⁷ Di PNG, Kamboja dan Indonesia, terlihat pola yang mengkhawatirkan di mana perusahaan-perusahaan kelapa sawit mengeksplorasi hak mereka atas tanah perkebunan untuk melakukan pembalakan liar di luar daerah konsesi mereka, kadang-kadang merambah sampai ke zona konservasi. Di Indonesia, diperkirakan hingga 12 juta hektar tanah telah dialokasikan untuk kelapa sawit dan telah dibuka, namun tidak ditanami, yang mengindikasikan bahwa banyak perusahaan hanya menggunakan skema minyak sawit untuk mendapatkan akses kayu tanpa memerlukan rencana pengelolaan hutan.¹⁸

Hampir setengah dari perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dibangun pada beberapa jenis lahan hutan primer atau sekunder.¹⁹ Namun, implementasi yang aktif dari dan monitoring yang konsisten atas perlindungan lingkungan umumnya tidak menyertai ekspansi perkebunan kelapa sawit yang cepat. AMDAL (EIA) di Kamboja dan Malaysia, misalnya, secara rutin telah diabaikan atau dilakukan secara dangkal, dan kredibilitasnya pun dipertanyakan karena kurangnya transparansi monitoring proses dan hasil.²⁰

Penguasaan lahan dan kepastian atas lahan

Konvergensi krisis global (keuangan, lingkungan, energi, makanan) dalam beberapa tahun terakhir telah berkontribusi terhadap adanya evaluasi kembali yang dramatis dari dan serbuan untuk 'mengambil alih' tanah, terutama yang terletak di negara-negara Selatan.²¹ Di tingkat lokal, perampasan lahan dilakukan dalam berbagai bentuk dan biasanya dikaitkan dengan kurangnya jaminan yang dimiliki petani saat berhadapan dengan bukan kepentingan penduduk setempat yang lebih kuat yang menggunakan berbagai cara untuk mengambil alih hak untuk tanah yang sebelumnya dimiliki atau digunakan oleh masyarakat setempat. Kurangnya jaminan ini mungkin diakibatkan karena tidak adanya kejelasan dan penegakan hak atas kepemilikan tanah, atau akibat pengaturan sewa yang memungkinkan tuan tanah untuk mengambil tanah, atau akibat klaim negara atas kepemilikan tanah yang secara *de facto* dihuni atau digunakan petani kecil lokal yang menghadapi jual-beli tanah untuk kepentingan-kepentingan perusahaan raksasa.²²

Sistem penyewaan kembali (*leaseback*) di Filipina antara ARB dan perusahaan bisnis pertanian, dan kesepakatan inti-plasma antara petani dan perusahaan agribisnis telah banyak menuai kritik tajam karena bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan petani kecil. Beberapa pengaduan yang dilaporkan oleh anggota koperasi meliputi kurangnya dukungan finansial kepada petani-penerima manfaat, kerentanan petani kecil terhadap skema penyewaan kembali di mana mereka menerima biaya sewa yang rendah, dan janji-janji penyediaan lapangan kerja dan manfaat lain yang tak pernah direalisasikan. Akibatnya, banyak petani yang turut serta dalam skema tersebut tetap miskin sementara akses ke dan kendali atas tanah mereka telah hilang.

Di Kamboja, kontrak untuk ELC tampaknya tidak melanggar hak tanah dan hak guna petani karena kontrak ELC hanya diberikan pada tanah milik negara.²³ Namun, penggolongan suatu daerah sebagai tanah publik dan tanah milik negara tidak mencerminkan realitas. ELC yang ada umumnya mencakup sawah, ladang, lahan penggembalaan, sumber daya air dan sumber daya hutan masyarakat.²⁴ Selain itu, meskipun milik negara, publik dan pribadi dibedakan dalam UU Pertanahan tahun 2001, penduduk desa bisa

saja diusir secara legal untuk kepentingan ELC atau investasi swasta. Karena tidak ada informasi publik tentang apa persisnya yang disebut sebagai tanah publik, sulit bagi penduduk untuk mempertanyakan klaim negara bahwa mereka tinggal di atas hak negara.²⁵ Kerancuan definisi tanah negara ini serta mudahnya pengalihan tanah publik (seperti hutan, lahan bekas ladang atau tanah kolektif) menjadi tanah milik negara memudahkan terjadinya perampasan tanah di kawasan pedesaan Kamboja.

Di PNG, tanah yang dimiliki dan dikelola secara adat, secara umum dikatakan meliputi sebagian besar tanah wilayah daratan negara tersebut, di mana 97% merupakan angka yang dapat diterima. Namun, ada cara-cara di mana tanah-tanah ini dapat bahkan pernah dialih-tangankan, diluar jual-beli menurut UU.²⁶ UU Pertanahan (1996) mengijinkan sewa jangka panjang dikeluarkan oleh pemerintah atas tanah adat melalui proses sewa-disewakan kembali yang diatur dalam UU Pertanahan (1996) untuk periode hingga 99 tahun dan penerima hak sewa ini mungkin saja bukan perusahaan pribumi.²⁷ Kurangnya kejelasan dalam UU tentang proses negosiasi dan status hukum kelompok pemilik tanah, ditambah dengan fakta bahwa banyak kelompok memiliki sedikit pengalaman dengan perekonomian tunai, telah memungkinkan pengembang perkebunan untuk memanipulasi pemilik tanah lewat penyuapan, pembentukan asosiasi-asosiasi yang tidak mewakili masyarakat, dan janji-janji (sering kali tak dipenuhi) untuk mengelola tanah secara berhati-hati dan menyediakan layanan-layanan.²⁸

Antara Juli 2003 dan Januari 2011, hampir 5 juta hektar tanah adat (11 persen dari luas wilayah PNG) dialihkan ke entitas korporasi nasional dan asing lewat ‘skema sewa-disewakan kembali’ atau SABL.²⁹ Model tenurial lain yang umum di PNG adalah model inti-plasma dengan sebuah perusahaan kelapa sawit ‘inti’, yang umumnya milik asing. Menurut skema ini, para penanam/petani diorganisasikan menjadi *Village Oil Palm* (VOP) dan pemegang hak sewa. VOP dioperasikan oleh tuan tanah di tanah adat mereka sendiri. Pemegang hak sewa menyewa tanah dari tuan tanah lain untuk ditanami. Model ini telah dikritik sebagai sebuah praktek ‘outsourcing’ bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan pasokan dan keuntungan untuk pabrik-pabrik

pengolahan mereka sementara biaya dan risiko terkait industri ini ditanggung bersama dengan petani.

Terakhir, sebagai negara produsen minyak sawit yang sedang berkembang, Vietnam menyajikan sebuah kasus yang mengkhawatirkan dalam hal mekanisme penguasaan tanah dan kurangnya kepastian atas tanah yang diberikan kepada masyarakat setempat.³⁰ Kerumitan UU pertanahan merupakan hambatan serius bagi kemampuan orang-orang setempat untuk memahami dan bertindak berdasarkan hak-hak mereka serta untuk mencari ganti rugi dalam kasus pelanggaran hak.³¹ Sistem dokumen hukum normatif untuk pengelolaan hutan, misalnya, sering berubah-ubah. UU Pertanahan tahun 1993 belum dilaksanakan secara merata dan bervariasi antar daerah. Menjadi problematika bagi masyarakat adat yang secara tradisional mengandalkan dan menggunakan lahan secara komunal, KUHPerdata Vietnam tahun 2005 tidak mengakui masyarakat ini sebagai subyek dari hubungan hukum perdata meskipun peraturan perundang-undangan menyediakan bentuk kepemilikan bersama oleh masyarakat.

Masih terlalu dini untuk mengamati bagaimana pengembangan perkebunan minyak sawit untuk tujuan komersial akan mempengaruhi masyarakat setempat dan masyarakat adat Vietnam, tetapi pengalaman-pengalaman dari negara-negara Asia Tenggara lainnya memberikan indikator yang teramat jelas bagaimana sistem penguasaan tanah yang tidak sesuai dan kurangnya jaminan atas tanah bagi masyarakat lokal dapat merusak mata pencarian dan hak-hak adat mereka atas tanah ketika perusahaan berusaha untuk memperoleh daerah yang luas untuk mengembangkan tanaman seperti kelapa sawit.

Standar hak asasi manusia dan kenyataan

Daerah berhutan di Asia Tenggara adalah rumah bagi sejumlah besar masyarakat adat dan keanekaragaman kelompok-kelompok suku yang sangat kaya. Rejim hak asasi manusia internasional telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir untuk

memperjelas hak-hak masyarakat adat dalam hukum internasional. Konsensus saat ini tentang hak-hak masyarakat adat, yang berevolusi melalui penetapan standar di Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan berbagai sub-komisinya, juga telah tercermin dalam yurisprudensi badan-badan yang dibentuk untuk meninjau pelaksanaan berbagai perjanjian hak asasi manusia yang telah diratifikasi banyak negara. Norma-norma yang dihasilkan telah dikonsolidasikan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIIP) yang disepakati dalam Sidang Umum tahun 2007.

Diantara hak-hak kunci yang relevan dengan artikel ini adalah hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang secara tradisional mereka miliki, tempati atau gunakan, dan hak untuk memberikan atau tidak memberikan keputusan bebas tanpa paksaan, didahului dan diinformasukan (FPIC), yang dinyatakan lewat institusi perwakilan mereka sendiri atas tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka. Selain itu, Deklarasi PBB ini, di antara perjanjian internasional yang ada, menekankan pentingnya keputusan bebas tanpa tekanan, didahului dan diinformasikan dari masyarakat adat untuk proyek atau kegiatan yang direncanakan di tanah mereka:

Pasal 32 (2): Negara harus berkonsultasi dan bekerjasama dengan itikad baik dengan masyarakat adat bersangkutan melalui institusi perwakilan mereka sendiri untuk memperoleh *keputusan bebas tanpa paksaan dan dipahami mereka sebelum memberikeputusan* atas proyek mana pun yang mempengaruhi tanah atau wilayah dan sumber daya lain milik mereka, terutama sehubungan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya mineral, air atau sumber daya lainnya.
(penekanan ditambahkan)

Meskipun demikian, kecenderungan umum di negara-negara Asia Tenggara penghasil minyak sawit adalah sering terjadinya (*jika bukan disengaja*) pengabaian atau salah tafsir atas hak masyarakat setempat atas FPIC. Khusus dalam relevansinya dalam kasus pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah pelanggaran hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan hak-hak mereka atas tanah

dan penggunaan lahan, terutama karena banyak dari perkebunan sawit dulunya adalah daerah berhutan yang telah dihuni oleh masyarakat adat secara turun temurun menurut hukum adat dan tidak terlepas dari budaya mereka, yaitu jati diri dan kelangsungan hidup sebagai sebuah komunitas. Lebih buruk lagi, tanah yang digunakan atau ditargetkan untuk ekspansi kelapa sawit umumnya diklaim oleh Negara sebagai lahan kosong, lahan tidor atau lahan rusak, padahal sebagian besar daerah ini adalah lahan pertanian dan tanah masyarakat adat, yang memiliki hak adat di atasnya dan amat penting bagi mata pencaharian dan jati diri sosial-budaya masyarakat setempat.³²

Hak-hak adat atas tanah masyarakat adat di Sabah dan Sarawak (Malaysia) tetap tidak diakui oleh pemerintah, ditambah dengan kurangnya transparansi dalam proses alokasi konsesi lahan, dan dalam kerangka lahan dan tata kelola hutan dan fakta bahwa Hak Adat Pribumi (NCR) yang ditafsirkan oleh pemerintah sebagai hak guna (*usufruct*) yang lemah atas tanah negara.³³ Di Indonesia, hak adat atas tanah diakui oleh UUD Indonesia, tetapi tidak dijamin dan dilindungi secara efektif oleh undang-undang lain dan peraturan pelaksanaannya. UU Pokok Kehutanan tahun 1967 dan UU Kehutanan revisi tahun 1999 mengklaim kepemilikan negara atas semua kawasan hutan di Indonesia tanpa pertimbangan yang memadai akan hak-hak adat dan tradisi setempat.

Seringkali, hak dan lembaga masyarakat adat tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Di mana diakui, lembaga tingkat desa yang diakui negara mungkin dijalankan dengan cara yang menguntungkan kontrol negara dan dihalang-halangi untuk mewakili kepentingan masyarakat secara independen.³⁴ Di PNG, hak atas FPIC telah sangat dilemahkan karena rencana tata ruang dan ijin untuk kelapa sawit sering mengabaikan hak-hak adat atas tanah. Masyarakat setempat jarang diberikan informasi yang cukup atau informasi apa pun mengenai ekspansi kelapa sawit yang direncanakan atau yang telah dilakukan untuk menentukan pilihan dipahami sebelumnya.

Di negara bagian Sarawak, Malaysia, petani kecil perkebunan tidak memiliki suara langsung dalam manajemen skema karena Konsep Baru melarang negosiasi langsung antara masyarakat dan investor

dan konsep ini mensyaratkan lembaga-lembaga pemerintah untuk memediasi pencarian lahan masyarakat yang cocok dengan perusahaan. Di Vietnam, dilaporkan bahwa suku minoritas kurang mendapatkan jaminan atas lahan dan hutan dibandingkan dengan suku mayoritas nasional (*Kinh*).³⁵ Individualisasi penguasaan tanah dalam reforma agraria telah menyebabkan suku minoritas kehilangan akses ke lahan di tengah pasar tanah yang kuat yang tercipta kemudian, yang menurut laporan telah terjadi pada komunitas Hmong.³⁶ Hak untuk menggunakan tanah adat telah dibatasi dan pengaturan pembagian keuntungan secara adat tidak diakui secara resmi dalam hukum perundang-undangan.

UU yang paling progresif di Asia Tenggara yang mengakui penguasaan adat adalah UU Filipina tahun 1997 tentang Hak Masyarakat Adat (IPRA), yang mengijinkan sertifikasi atas wilayah leluhur masyarakat adat 'sebagai properti komunal yang dapat dialihkan'.³⁷ IPRA menawarkan masyarakat adat suatu cara untuk mengamankan kepemilikan atas tanah mereka yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu wilayah leluhur dan tanah leluhur. Namun, masyarakat adat di Filipina sangat rentan terhadap ekspansi kelapa sawit di dataran tinggi yang disebut kawasan hutan kosong yang kini diincar investor, meskipun sebagian daerah tersebut berada di bawah instrumen penguasaan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR) dan diakui di atas kertas sebagai wilayah leluhur masyarakat adat.³⁸

Masyarakat dataran tinggi di Thailand menghadapi ketidakpastian jaminan yang sama, karena sebagian besar tanah mereka diklasifikasikan sebagai hutan dan tidak diijinkan untuk dimiliki masyarakat.³⁹ Karena mobilisasi yang kuat dari penduduk dataran tinggi, ada seruan untuk memformalisasikan hak-hak kolektif, dan sebuah RUU Hutan Masyarakat saat ini setidaknya menyediakan sebuah kerangka kontrak terbatas untuk pengelolaan hutan partisipatif dan hak-hak akses dan pemanfaatan hutan terkait bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.⁴⁰ Namun, sampai saat ini, kelapa sawit telah berkembang di dataran rendah di bagian selatan Filipina di mana jaminan penguasaan relatif yang diberikan kepada masyarakat pedesaan lewat serangkaian reforma agraria telah memunculkan sistem pengembangan kelapa sawit berbasis petani

yang relatif mandiri yang lebih menguntungkan bagi masyarakat lokal.

Resistensi dan represi

Di mana perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit dilakukan tanpa FPIC dan di atas tanah adat tanpa mempedulikan pemanfaatan dan penguasaan lahan adat, penolakan dan penentangan dari masyarakat lokal dan masyarakat adat cenderung muncul. Konflik-konflik tersebut sedang bermunculan di Kamboja dan Filipina dan semakin meningkat di Indonesia dan Malaysia, di mana masyarakat setempat sedang mengadopsi berbagai pendekatan untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap perampasan tanah yang diijinkan negara. Teknik-teknik penentangan kolektif yang dijalankan mencakup pemogokan, petisi kepada instansi pemerintah dan non-pemerintah dan blokade sampai serangan fisik dan bersenjata.

Di Indonesia, Malaysia, PNG, Filipina dan Kamboja, masyarakat lokal telah berpaling pada tindakan hukum di pengadilan lokal dan nasional. Di Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa konflik sosial terkait perkebunan mencakup lebih dari sepertiga konflik tanah di Indonesia. Tahun 2010, SawitWatch mencatat lebih dari 663 masyarakat berkonflik dengan lebih dari 172 perusahaan, yang berujung pada penangkapan 106 anggota masyarakat.⁴¹ Pada tahun yang sama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima laporan tidak kurang dari 10 kasus konflik yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan saja, dan jumlah kasus yang sebenarnya dilaporkan jauh lebih tinggi. Badan Pertanahan Nasional telah mendaftar sekitar 3.500 konflik lahan terkait perkebunan kelapa sawit yang sedang berlangsung.

Sebagian dari kasus-kasus ini ditangani lewat intimidasi polisi atau militer dan kadang-kadang serangan fisik yang mematikan dan penembakan.⁴² Sama halnya, di Kamboja, lebih dari 60% ELC sedang dalam konflik, beberapa telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Warga desa secara rutin dintimidasi oleh penjaga keamanan bersenjata yang disewa pemegang konsesi jika berupaya memasuki kawasan hutan dan perkebunan, atau melakukan protes terhadap tindakan perusahaan yang merambah wilayah mereka.⁴³ Di beberapa

daerah, tindakan penjaga keamanan bersenjata telah mengakibatkan kekerasan, cedera dan kematian warga desa.⁴⁴

Penentangan serikat buruh terhadap kondisi kerja yang buruk dan pelanggaran kontrak kerja telah muncul di Filipina dalam bentuk pemogokan, naik banding dan kasus-kasus pengadilan, beberapa di antaranya tetap belum terselesaikan dan telah menyebabkan penghentian sementara produksi dan pemrosesan kelapa sawit. Beberapa dari koperasi ini telah berpaling ke NGO dan organisasi pendukung nasional dan internasional lain untuk meminta dukungan untuk kasus mereka melawan perusahaan-perusahaan investasi kelapa sawit.

Konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat lokal dan perusahaan kelapa sawit atau Negara. Konflik juga timbul dari peningkatan perpecahan dalam masyarakat lokal akibat negosiasi yang tidak transparan oleh tokoh masyarakat dengan perusahaan tanpa melibatkan anggota masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh konflik antar dan dalam marga-marga di PNG. Perselisihan tersebut sekarang menjadi masalah besar dengan adanya lebih dari 50% kasus-kasus pengadilan yang berkaitan dengan tanah. Konflik antara masyarakat setempat dan pekerja perkebunan dari luar (migran) juga telah dilaporkan di Indonesia, Malaysia, Kamboja dan Thailand.

Hak-hak petani kecil, pekerja dan perempuan

Pengembangan hubungan monopsonistik antara petani dan perusahaan kelapa sawit telah menyebabkan penyalah-gunaan dan pelanggaran hak-hak mereka yang meluas. Kerancuan tentang nilai tanah dan persyaratan sewa telah menyebabkan banyak petani kecil, dan khususnya masyarakat adat, menjual tanah mereka dengan harga amat rendah dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Konversi lahan pertanian yang ada menjadi perkebunan tanaman komersial memaksa petani masuk ke dalam ekonomi berbasis uang (*cash-based economy*) di mana ketahanan pangan mereka melemah dan pemanfaatan lahan mereka dibatasi oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Ketika dipaksa tergantung pada perusahaan karena kendala keuangan dan teknis, petani kecil adalah korban pertama dari fluktuasi harga CPO di pasar internasional. Tidak memiliki

modal dan likuiditas yang memadai untuk menyerap produksi dan kegagalan pasar, mereka dengan cepat terjerat dalam hutang.

Seperti yang ditunjukkan studi kasus-studi kasus di bawah ini, di Indonesia, Malaysia dan Kamboja, pekerja migran yang disubkontrak, terutama yang rentan terhadap pelanggaran kerja dan hak asasi manusia, sedang dipikat oleh perusahaan dengan janji-janji palsu akan tanah dan lapangan pekerjaan; ketika mereka akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan, mereka cenderung bekerja melebihi waktu dan dibayar di bawah standar.⁴⁵ Hal ini diperburuk oleh pembayaran upah yang tidak transparan dan tertunda-tunda dan fakta bahwa para pekerja secara tetap dikenakan biaya tambahan untuk transportasi dan pembayaran hutang. Mempekerjakan dan memecat pekerja tetap menjadi hak prerogatif perusahaan.

Pekerja perkebunan perempuan sangat dipengaruhi oleh meningkatnya ketergantungan pada uang tunai akibat menyempitnya lahan pertanian karena laki-laki cenderung untuk menerima dan mengontrol pendapatan tunai, sebagaimana dilaporkan di Indonesia, Filipina dan PNG.⁴⁶ Hak perempuan untuk mewarisi tanah, menurut hukum adat di Kalimantan Barat, telah dipersempit oleh sistem 'kepala rumah tangga' dalam pendaftaran bidang tanah/kapling petani kecil.⁴⁷ Di Filipina, sertifikasi kolektif tanah kepada koperasi telah melemahkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan dan menyebabkan pengucilan mereka dari kesempatan kerja.

Perempuan-perempuan yang berhasil menemukan pekerjaan di perkebunan cenderung dipekerjakan sebagai penyemprot pestisida dan pupuk, dan menghadapi bahaya kesehatan yang parah dari bahan kimia seperti paraquat.⁴⁸ Dengan pengecualian Thailand, nyaris tidak ada pelatihan tentang penggunaan yang aman dan risiko potensial dari bahan kimia ini untuk mereka, ditambah fasilitas medis yang buruk, kurangnya peralatan pelindung yang sesuai dan lemahnya atau tidak adanya implementasi regulasi keselamatan.⁴⁹ Akhirnya, tekanan pada perempuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka meskipun adanya konversi lahan pertanian tradisional menjadi perkebunan kelapa sawit memaksa mereka untuk mencari alternatif sumber pendapatan sebagai pekerja migran. Di Kamboja, Indonesia, PNG dan Filipina, prostitusi dilaporkan

terus meningkat, menyebabkan peningkatan prevalensi HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya di kalangan pekerja perkebunan perempuan.

Masalah di pabrik pengolahan

Pengolahan tandan buah kelapa sawit di pabrik pengolahan harus diselesaikan dalam waktu 48 jam untuk menjamin kualitas minyak yang diekstraksi. Petani sering kali bergantung pada perusahaan untuk masalah transportasi ke dan dari pabrik pengolahan dengan siapa mereka terikat kontrak, dan secara tetap dikenakan biaya untuk penggunaan fasilitas ini.⁵⁰

Kasus Thailand adalah sebuah pengecualian. Dalam sebagian besar kasus, petani kelapa sawit di Thailand benar-benar independen dari pabrik pengolahan kelapa sawit dan tidak terikat dengan kontrak atau pengaturan apa pun dengan pabrik. Dalam beberapa kasus, koperasi petani bahkan telah berhasil membangun pabrik pengolahan sendiri dengan dukungan pemerintah. Karena perkebunan besar tidak banyak, pabrik minyak Thailand sangat tergantung pada pembelian TBS dari petani kelapa sawit mandiri, yang kebanyakan adalah petani kecil. Ini mengakibatkan petani dan terutama pihak perantara berada dalam posisi penawaran yang baik untuk mendapatkan harga setinggi mungkin karena mereka bebas untuk memutuskan ke mana dan kepada siapa mereka akan menjual produk mereka.

Konflik dan ganti rugi

Yang menjadi inti dari rejim berbasis hak adalah penyediaan sarana ganti rugi kepada korban pelanggaran. Hak ini mencakup “kesadaran calon penggugat akan hak; akses ke penasihat hukum, kebijakan yang aktif dan tidak bias; adanya upaya-upaya peradilan, administratif, dan upaya formal lainnya; akses ke pengadilan, pengadilan yang independen; pelaksanaan sanksi/hukuman yang adil; dan tidak kalah penting dari lainnya, perlindungan atas penggugat dan saksi, serta pejabat pengadilan, hakim, pejabat pemerintah lainnya dari intimidasi dan kekerasan.”⁵¹ Sebaliknya, kurangnya sarana penyelesaian konflik yang tepat adalah yang

umumnya menjadi alasan paling jelas yang memicu perselisihan menjadi konflik.

Di beberapa negara, hak-hak masyarakat adat tidak cukup terjamin oleh undang-undang dan tidak cukup dilindungi dalam prakteknya. Bahkan ketika hak-hak adat mungkin diakui dalam Konstitusi, dalam peraturan nasional dan UNDRIP, mereka mungkin akan diturunkan ke posisi sekunder ketika tumpang tindih dengan UU lingkungan dan tanah nasional, seperti yang umumnya terjadi dalam kasus perkebunan kelapa sawit. Secara umum, pengakuan hak masyarakat adat dan/atau kepastian tenurial masyarakat lokal tetap lemah. Hal ini kemudian diperburuk dengan kurangnya penghormatan terhadap putusan pengadilan oleh perusahaan, pemerintah dan administrasi negara, dan korupsi yang merusak nilai dari mekanisme-mekanisme hukum ganti rugi ini.

Di PNG, di mana proses penyewaan tanah telah dimanipulasi, direkayasa atau dilakukan dengan curang, tidak ada jalan yang efektif untuk ganti rugi, sehingga tanah adat dapat dialih-tangankan sampai selama tiga generasi sementara masih digolongkan sebagai tanah yang dikuasai hak adat. Ada kekhawatiran yang nyata dan terus berkembang bahwa perlindungan yang diberikan Undang-Undang Tanah tidak memadai bagi pemilik adat yang memiliki sedikit akses ke sistem peradilan nasional.

Di Kamboja, warga desa telah mengajukan permohonan ke pemerintah setempat, pemerintah propinsi dan pemerintah nasional untuk bantuan, yang sayangnya belum mendapat tanggapan. Sebaliknya, pejabat publik umumnya menunjukkan keberpihakan terhadap perusahaan dan telah berusaha untuk mengintimidasi warga desa untuk berhenti membuat pengaduan.⁵²

Di negara bagian Sarawak, Malaysia, dari lebih dari 100 sengketa tanah, banyak yang merupakan sengketa dengan perusahaan kelapa sawit telah dibawa ke pengadilan lokal dan beberapa telah dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi. Dalam sejumlah kasus yang dibawa ke pengadilan tinggi ini, hakim telah menguatkan klaim tanah masyarakat adat sejalan dengan Konstitusi Malaysia dan prinsip-prinsip hukum adat. Bukannya mengakui hal ini, Hukum Pertanahan di Sarawak telah diamandemen beberapa kali dalam upaya untuk meng gagalkan klaim tanah masyarakat adat.⁵³

Banyak kasus yang berkaitan dengan konflik tanah dan perkebunan kelapa sawit berakhir tanpa tindak lanjut di pengadilan sampai selama lima belas sampai dua puluh tahun⁵⁴, memaksa masyarakat untuk menghabiskan waktu, uang dan energi untuk memperjuangkannya melalui pengadilan perdamaian.⁵⁵ Pemerintah juga telah lambat dalam mengamandemen hukum yang berpihak pada masyarakat adat. Koneksi politik dan korupsi terus melemahkan upaya masyarakat lokal untuk secara efektif memanfaatkan mekanisme ganti rugi dalam menghadapi investor dan perusahaan yang didukung pemerintah.

Tantangan dengan sertifikasi

Standar RSPO untuk sertifikasi minyak sawit berkelanjutan diadopsi pada tahun 2005. Standar tersebut dirancang untuk menjauhkan ekspansi kelapa sawit dari hutan primer dan kawasan dengan nilai konservasi tinggi, mensyaratkan pengakuan atas hak adat atas tanah, mewajibkan pihak penanam/pengembang untuk memperoleh tanah hanya lewat keputusan bebas tanpa paksaan, didahului dan diinformasikan dari pemegang hak sebelumnya, mewajibkan operasi perkebunan untuk menghormati hak-hak pekerja, migran dan perempuan dan memberikan harga yang adil untuk petani kecil.⁵⁶

Awalnya dikembangkan terutama untuk perkebunan kelapa sawit besar, standar-standar ini mengharuskan audit tahunan yang detil terhadap pabrik pengolahan dan basis pasokan mereka serta audit “rantai alir gudang penampungan (chain of custody)” untuk memastikan bahwa bahan baku yang berasal dari perkebunan yang tidak bersertifikasi tidak diterima dalam rantai pasokan bersertifikat. Namun baik pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyuarakan keprihatinan bahwa standar-standar sukarela RSPO terlalu tinggi dan berjanji untuk mengembangkan standar nasional wajib untuk negara masing-masing.⁵⁷ Di sisi lain, NGO telah mengeluhkan bahwa anggota RSPO mendapatkan sertifikasi saat tinjauan independen menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi standar RSPO.⁵⁸

Menyadari bahwa standar dan prosedur RSPO tidak cocok untuk petani kecil, RSPO membentuk sebuah Satuan Tugas untuk Petani Kecil yang melalui beberapa tahun konsultasi telah menyiapkan

perbaikan standar yang dirancang baik untuk petani dengan skema kontrak dengan pabrik pengolahan tertentu maupun untuk sertifikasi kelompok petani kecil mandiri. Standar untuk sertifikasi kelompok belum terbukti dapat berfungsi dan ada sejumlah langkah prosedural yang belum berhasil diselesaikan RSPO untuk memungkinkan petani mandiri penghasil kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan, sementara masih belum jelas apakah dan bagaimana RSPO akan menyediakan sarana untuk menjadikan tugas berat pengorganisasian dan sertifikasi kelompok ini terjangkau.⁵⁹ Seperti yang diteliti secara rinci oleh studi kasus di Thailand, ada alasan-alasan yang baik untuk diperhatikan bahwa jika hambatan biaya dan kelayakan tidak diturunkan, sertifikasi kelapa sawit dapat berakhir dengan pengucilan petani kelapa sawit kecil dari pasar global.

Kesimpulan dan rekomendasi

Sektor minyak sawit di seluruh dunia sedang berada dalam fase ekspansi yang cepat. Ekspansi ini sedang mendapat tantangan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional yang telah menunjukkan bahwa pembebasan lahan dan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit yang tak pandang bulu menimbulkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies secara cepat, emisi gas rumah kaca yang mengkhawatirkan, perampasan milik masyarakat adat, dan penyengsaraan masyarakat miskin di pedesaan.

Meningkatnya permintaan global atas lemak nabati dan bahan bakar nabati, perdagangan global, lonjakan harga komoditas dan arus investasi internasional adalah beberapa hal yang mendorong percepatan ekspansi sawit. Namun, pertimbangan-pertimbangan dalam negeri juga tak kalah penting. Pemerintah-pemerintah nasional sedang mempromosikan kelapa sawit untuk memenuhi lonjakan permintaan lemak nabati dalam negeri, untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar fosil dan untuk menahan hilangnya devisa. Selain itu, di mana situasinya mendukung, petani kecil sendiri juga lebih memilih menanam kelapa sawit sebagai tanaman yang menguntungkan.

Berbagai negara yang dikaji dalam tinjauan ini memiliki sistem penguasaan tanah yang sangat berbeda dan UU yang sangat beragam yang dimaksudkan untuk mengatur tata cara perolehan tanah oleh perusahaan. Negara-negara ini juga memiliki perbedaan dalam hal sejauh mana terdapat aturan hukum dan sejauh mana masyarakat memiliki akses atas keadilan.

Kombinasi dari pendorong ekspansi yang sama dengan berbagai konteks hukum dan penguasaan lahan dengan demikian menghasilkan pola yang sangat berbeda di negara yang berbeda dan konsekuensi dari ekspansi kelapa sawit untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat dengan demikian juga sangat bervariasi. Perbandingan dari pengalaman-pengalaman nasional ini menunjukkan bahwa jika, seperti di Thailand dan Papua Nugini, tanah petani kecil dan masyarakat adat terlindungi dan ada supremasi hukum, kelapa sawit cenderung dikembangkan dengan laju sedang-sedang saja karena tanaman petani kecil memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat lokal dalam hal pendapatan, keadilan dan mata pencarian. Di Thailand, memang, pabrik pengolahan telah berkembang lebih cepat dari perkebunannya, memberikan petani kecil keuntungan untuk berada dalam pasar penjual.

Namun, jika tanah tidak terlindungi dan penegakan hukum lemah, seperti di Kamboja, Sarawak dan Indonesia, kelapa sawit cenderung dikembangkan dengan pesat seperti perkebunan besar atau sebagai skema petani plasma yang memberikan sedikit jaminan bagi para penanam. Jika jumlah pabrik pengolahan sedikit dan letaknya terpisah jauh, petani kecil berada dalam hubungan monopsonistik dengan pabrik pengolahan dan tidak memiliki daya tawar yang tinggi untuk mendapatkan harga yang lebih baik maupun perlakuan yang adil.

Pola yang biasa terjadi di semua daerah di mana perkebunan besar sedang dibangun adalah bahwa tanah diperoleh nyaris tanpa penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat atau pemanfaatan lahan sebelumnya oleh kelompok yang lebih miskin. Hal ini menimbulkan kebencian dan lalu konflik tanah, yang kemudian berujung pada penggunaan aparat keamanan dan pelanggaran HAM.

Pola suram lain yang teramat dari studi kasus-studi kasus negara ini adalah bahwa produksi minyak sawit tampaknya mendorong penyerapan tenaga kerja murah dengan perlindungan hak-hak pekerja yang minim. Upah rendah untuk pekerja di perkebunan umum terjadi di Indonesia dan Kamboja. Di Malaysia proporsi tenaga kerja yang sangat besar dalam kenyataannya adalah para migran dari Indonesia yang kondisinya telah menjadi subjek investigasi kedua negara. Ada perselisihan buruh yang serius di perkebunan di Filipina. Bahkan di Thailand, sebagian besar tenaga kerja di perkebunan dalam kenyataannya adalah bukan pemilik tanahnya tapi migran miskin, seperti masyarakat adat tanpa tanah dari belahan utara Thailand, serta orang-orang dari Burma dan Kamboja.

Implikasi dari temuan-temuan ini sudah jelas. Untuk menjamin agar kelapa sawit berkembang secara menguntungkan, standar-standar sukarela dari organisasi-organisasi seperti *the Roundtable on Sustainable Palm Oil* perlu didukung oleh reformasi tenurial dan tata kelola nasional yang mewajibkan persyaratan-persyaratan yang bisa menjamin hak-hak masyarakat lokal benar-benar dihormati dan dilindungi. Tanpa perlindungan tersebut, ekspansi kelapa sawit mungkin hanya menguntungkan para investor, pedagang dan elit nasional dengan mengorbankan masyarakat miskin pedesaan dan ekosistem yang rentan.

Catatan akhir

¹ Direktur, Forest Peoples Programme

² Asisten Direktur, Forest Peoples Programme

-
- ³ Proyek ini tidak mencakup Birma karena situasi politik di sana yang tidak memungkinkan penelitian yang independen dan kami juga tidak memasukkan Laos dan China bagian selatan karena informasi awal yang kami terima menunjukkan bahwa sistem iklim musiman di negara-negara tersebut tidak sesuai untuk penanaman kelapa sawit secara besar-besaran.
- ⁴ Butler 2010.
- ⁵ WWF 2009.
- ⁶ Ravanera & Gorra 2011
- ⁷ UN 2009
- ⁸ Thoenes 2006.
- ⁹ Jomo et al 2004.
- ¹⁰ Vermeulen & Goad 2006.
- ¹¹ Mishra & Parija 2011.
- ¹² Carrere 2011.
- ¹³ WRM 2006.
- ¹⁴ Down To Earth 2011a, Tiominar B 2011.
- ¹⁵ Faryadi 2009
- ¹⁶ Pongphon Sarsamak 2011.
- ¹⁷ Tiominar 2011.
- ¹⁸ Borras & Franco 2011, Butler 2007.
- ¹⁹ WRM 2006.
- ²⁰ Colchester et al 2007b.
- ²¹ World Bank 2010, Hall 2011.
- ²² Hirsch 2011:1-2, Borras & Franco 2011, Sikor & Lund 2009.
- ²³ Oberndorf 2006.
- ²⁴ Schneider 2011:11-12.
- ²⁵ CHRAC 2009:67.
- ²⁶ Filer 2011.
- ²⁷ Department of Lands and Physical Planning, Papua New Guinea 2005.
- ²⁸ Colchester 2004.
- ²⁹ Hance 2011.
- ³⁰ Nguyen et al 2008a.
- ³¹ USAID 2001.
- ³² Borras & Franco 2011.
- ³³ Seng 2000, JOANGOHutan 2006.

-
- ³⁴ Sirait 2009.
- ³⁵ Colchester & Fay 2007, Corlin 2004.
- ³⁶ Corlin 2004.
- ³⁷ Gorre et al 1997.
- ³⁸ Borras et al 2011.
- ³⁹ *ibid.*:3.
- ⁴⁰ Vejjajiva 2008, Childress 2004, USDOS 2006, USDOS 2008, Liddle 2008
- ⁴¹ Komnas HAM-SawitWatch 2010
- ⁴² FPP 2011b.
- ⁴³ O'Keefe 2009.
- ⁴⁴ UNHCHR 2004.
- ⁴⁵ Mongabay 2008, Naro 2011, Tiominar 2011, Guttal 2006.
- ⁴⁶ WRM 2009.
- ⁴⁷ White J & B 2011.
- ⁴⁸ Smolker et al 2009.
- ⁴⁹ WRM 2006.
- ⁵⁰ Colchester & Jiwan 2006a.
- ⁵¹ Colchester 2008:24.
- ⁵² Guttal 2006.
- ⁵³ IDEAL 1999, Attorney General 2007.
- ⁵⁴ Colchester et al 2007a.
- ⁵⁵ *ibid.*:81.
- ⁵⁶ FPP 2008.
- ⁵⁷ Reuters 2011, Adnan H 2011, Jakarta Post 2011, DTE 2011b.
- ⁵⁸ The Economist 2010, Greenpeace 2008, Greenpeace 2007, Mongabay 2011.
- ⁵⁹ Colchester 2011.

1. Pengembangan kelapa sawit di Thailand: pertimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan

Jonas Dallinger

Pengantar

Minyak sawit telah menjadi minyak nabati terkemuka di dunia dalam hal konsumsi dan produksi dengan 45,3 juta ton dihasilkan di seluruh dunia pada tahun 2009. Produsen terbesar, dengan pangsa produksi sebesar 47,6% tahun 2009, adalah Indonesia, diikuti oleh Malaysia (38,8%) dan Thailand (2,9%).¹ Produksi global minyak sawit dan, dengan demikian, perkebunan kelapa sawit telah meningkat pesat dalam dekade terakhir dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 9,7% antara tahun 1998 dan 2008.² Minyak sawit adalah komoditas yang serbaguna dalam industri makanan serta kimia dan penggunaannya semakin meningkat sebagai bahan baku untuk bahan bakar nabati (*biofuel*), yang merupakan alasan lain atas peningkatan popularitas kelapa sawit. Faktor-faktor lainnya mencakup peningkatan permintaan untuk minyak nabati pada umumnya dan harga minyak sawit yang cukup rendah.

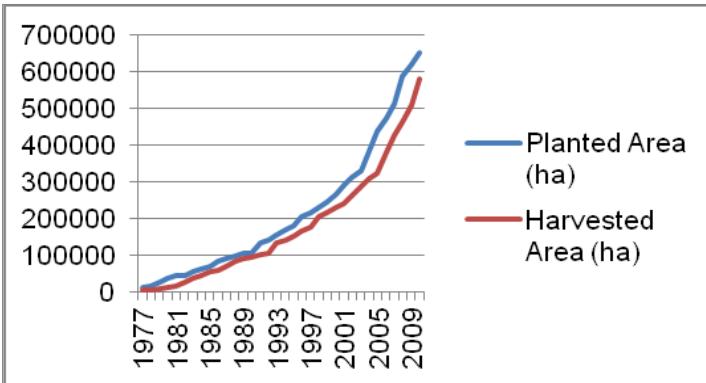
Dalam berbagai kampanye yang dipimpin oleh organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan dan sosial, ekspansi yang cepat dari perkebunan kelapa sawit disebut bertanggung jawab atas rusaknya hutan hujan, titik-titik penting keragaman hayati, dan kemunduran atau risiko kepunahan spesies langka. Khususnya, orangutan telah diberi status simbolis sebagai korban dari ekspansi kelapa sawit dan berbagai kampanye anti minyak sawit secara langsung menentang ancaman kepunahan spesies ini. Kritik utama lainnya terhadap minyak sawit adalah pelanggaran hak-hak asasi masyarakat adat yang terkena dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh perkebunan kelapa sawit, kondisi kerja yang tidak manusiawi di perkebunan kelapa sawit dan, meningkatnya kontribusi negatif kelapa sawit terhadap perubahan iklim karena kerusakan hutan primer dan lahan gambut untuk pengembangan perkebunan, kedua wilayah ini diketahui memiliki cadangan karbon sangat tinggi. Semua ini telah memberi citra buruk kepada minyak sawit, terutama

di Eropa dan Amerika Serikat. Akibatnya, perusahaan-perusahaan pengolahan minyak sawit dan pengecer terkemuka semakin berkomitmen untuk membeli hanya minyak sawit yang diproduksi dengan cara yang sesuai dengan standar keberlanjutan yang berlaku. Yang lainnya bahkan melakukan hal yang lebih jauh lagi dan melarang minyak sawit dari produk mereka sama sekali.³

Di Thailand juga, laju produksi minyak sawit semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun, struktur dari industri minyak sawit Thailand mengungkapkan gambaran yang berbeda dengan yang ada pada negara-negara penghasil minyak sawit utama, yang mengarah kepada kesimpulan bahwa dampak produksi minyak sawit, baik positif atau negatif, tidak dapat digeneralisasi dan sebaliknya harus diteliti dan dikaji sebagai hasil-hasil yang spesifik lokal.

Kencenderungan nasional perkembangan kelapa sawit di Thailand

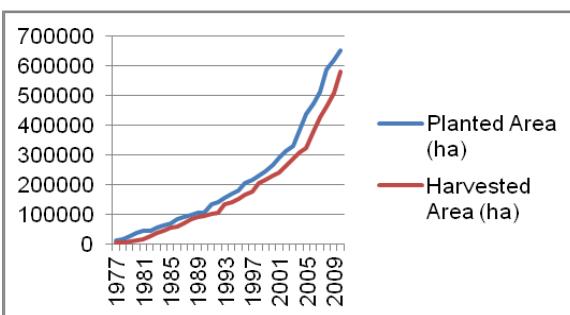
Saat ini, ada empat belas pabrik bio-diesel, dua belas kilang kelapa sawit dan lebih dari enam puluh pabrik minyak sawit yang beroperasi di Thailand. Pada tahun 2010 produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai 1.287.509 ton, di mana 65.942 ton di antaranya diekspor. Ekspor mencakup 5,1% dari total produksi tahun 2010. Ini adalah jumlah yang biasa untuk minyak sawit yang diekspor dari Thailand karena ekspor tahunan rata-rata minyak sawit tetap pada kisaran angka 6% selama dua puluh tahun terakhir dan hanya mencapai puncaknya sekitar 20% dari total produksi dalam tahun-tahun tertentu saja. Gambar 1 menunjukkan produksi tahunan CPO di Thailand selama dua puluh tahun terakhir serta jumlah yang digunakan untuk produksi biodiesel. Pada tahun 2010, 380.000 ton CPO, sekitar 29% dari keseluruhan produksi, digunakan sebagai bahan baku untuk biodiesel.



Gambar 1: Produksi CPO di Thailand dan Konsumsi untuk Biodiesel. (sumber: OAE 2010)

Trend Perkebunan

Lahan yang ditanami kelapa sawit di Thailand terus mengalami peningkatan, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 11% dari tahun 1981 hingga 2000 dan 9% dari tahun 2001 hingga 2010. Hal ini sangat sejalan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan 9,7% antara tahun 1998 dan 2008.



Gambar 2: Perkembangan luas lahan yang ditanami dan dipanen di Thailand (sumber: OAE 2010)

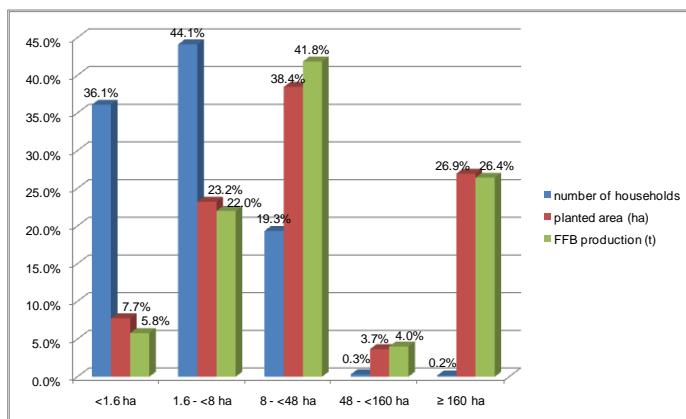
Sekitar 90% dari total lahan yang ditanami dengan kelapa sawit di Thailand terkonsentrasi di provinsi-provinsi bagian selatan Thailand. Provinsi-provinsi di bagian timur dan timur laut adalah daerah ekspansi yang menonjol, terutama saat ini di Chon Buri dan Trat di Pantai Timur. Tiga provinsi penghasil tandan buah segar (TBS) utama adalah Krabi, Surat Thani dan Chumphorn, yang menyumbang 72,1% dari total lahan perkebunan pada tahun 2008. Tabel 1 memberikan gambaran provinsi-provinsi terpenting untuk perkebunan kelapa sawit serta hasil tahunan rata-rata per hektar.⁴

	Lahan yang ditanami (hektar)	Lahan yang dipanen (hektar)	Hasil (per hektar)
Trad	10.735	6.540	20,3
Cholburi	13.096	11.844	19,5
Prachuabkirikhan	26.912	12.741	18,6
Chumpom	117.179	102.820	21,1
Ranong	11.724	7.687	18,3
Suratthani	146.441	120.440	20,2
Phangnga	16.345	13.078	17,8
Krabi	154.529	129.075	21,3
Trang	17.444	14.993	17,9
Nakhorns rithamarat	23.866	14.455	18,4
Satun	16.726	14.093	16,0
Lainnya	25.277	12.438	
Total	580.275	459.704	

Tabel 1: Luas lahan yang ditanami dan lahan yang dipanen dan hasil TBS per hektar di Thailand. (sumber: OAE 2008: 27)

Di Thailand, lebih dari 120.000 petani terlibat dalam budidaya kelapa sawit, sebagian besar mengelola lahan ukuran kecil hingga menengah. Petani kecil yang memiliki lahan kurang dari lima puluh hektar mengelola sekitar 70% dari total lahan yang ditanami dengan kelapa sawit dan mereka memiliki total produksi TBS yang kurang lebih sama. Skema kemitraan seperti Inti-Plasma (*Nucleus Estate Schemes / NES*) di Indonesia atau FELDA di Malaysia tidak ada di Thailand. Dalam banyak kasus, para petani bertindak secara

independen dari pabrik penggilingan kelapa sawit dan tidak terikat kontrak atau perjanjian formal apa pun dengan pabrik pengolahan. Dalam beberapa kasus, koperasi petani bahkan telah berhasil membangun pabrik pengolahannya sendiri dengan dukungan pemerintah. Gambar 3 memberikan perkiraan kasar tentang distribusi produksi, luas dan rumah tangga yang terlibat di antara berbagai skala perkebunan. Perlu dicatat bahwa "jumlah rumah tangga yang terlibat" mengacu kepada keluarga petani dan tidak termasuk pekerja pertanian yang bekerja di perusahaan perkebunan.



Gambar 3: Perkiraan porsi produksi TBS, jumlah rumah tangga dan lahan penanaman berdasarkan luas lahan di perkebunan kelapa sawit (data tidak terkonfirmasi)

Rata-rata luas lahan yang dimiliki perusahaan kelapa sawit dibandingkan dengan ukuran lahan petani mandiri adalah 796 hektar untuk perusahaan dan 3,89 hektar untuk petani (termasuk koperasi dan perkebunan pribadi) pada tahun 2007.⁵ Statistik ini menunjukkan bahwa perkebunan yang sangat besar agak langka di Thailand. Perkebunan kelapa sawit terbesar yang dimiliki sebuah perusahaan di Thailand terdiri dari gabungan seluas 7.120 hektar lahan.⁶ Dibandingkan dengan pemain utama global dalam industri kelapa sawit yang memiliki banyak perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia yang totalnya mencapai lebih dari 500.000

hektar, angka ini tampaknya amat kecil.⁷ Sulit bagi perusahaan untuk memperluas lahan perkebunan mereka di Thailand karena hanya sedikit bidang tanah untuk mendirikan perkebunan skala besar yang efisien yang tersedia untuk dibeli dan harga tanah telah meroket selama sepuluh tahun terakhir.⁸

Peraturan pertanahan dan penguasaan tanah

Kepemilikan tanah dan sertifikat tanah adalah isu-isu yang sangat rumit di Thailand. Dari tahun 1970 dan seterusnya, pemerintah Thailand telah melakukan banyak upaya legislatif dan programatik sebagai bagian dari Program Sertifikasi 20 Tahun (*20-Year Land Titling Program / LTP*) untuk menyelesaikan isu-isu tingginya tingkat ketidakpastian hunian (*tenant*), ketidakpunyaan tanah, dan kepemilikan tanah. Pemerintah menerapkan plafon yang tinggi untuk kepemilikan pribadi dan melaksanakan program alokasi lahan. LTP juga merampingkan sistem administrasi negara tentang pertanahan, yang terkenal akan efisiensi dan transparansinya.⁹

Namun, upaya untuk membatasi luas kepemilikan pribadi dan mendistribusikan kembali kelebihan lahan (*ceiling-surplus land*) untuk keluarga tanpa tanah kurang didukung kemauan politik atau pendanaan. Pada periode 1975-2003, hanya sekitar 74.000 hektar lahan swasta yang telah didistribusikan kembali.¹⁰ Selain itu, program ini tidak menjawab hak-hak penghuni hutan di negara ini, yaitu wilayah luas besar yang telah dihuni dan dibudidayakan oleh masyarakat lokal selama beberapa generasi.¹¹

Meskipun demikian, pemerintah berhasil mengidentifikasi lahan publik untuk distribusi dan mengatur bidang-bidang tanah publik yang telah dirambah. Dalam periode yang sama, pemerintah Thailand telah mengalokasikan 3,7 juta hektar lahan publik untuk 1,5 juta penerima, yang menerima bukti kepemilikan legal atau hak guna yang diakui oleh hukum formal.¹² Dengan demikian, LTP diakui telah memberikan kontribusi positif terhadap kepastian kepemilikan.¹³ Ini juga mendorong perkembangan pasar tanah.¹⁴

Hukum Thailand mendefinisikan tanah sebagai lahan privat atau lahan publik. Lahan privat dimiliki oleh individu, kelompok, atau

badan hukum. Sekitar 40% tanah berada di bawah kepemilikan privat pada tahun 1994.¹⁵ Lahan publik meliputi: tanah yang digunakan oleh negara; lahan yang terbuka untuk publik; lahan yang diidentifikasi untuk alokasi di bawah rencana reformasi tanah (juga dikenal sebagai lahan pemukiman publik), dan kawasan hutan. Seluruh tanah yang tidak berada di bawah kepemilikan privat dianggap tanah negara.¹⁶ Jenis lain dari penguasaan lahan termasuk okupansi dan pemanfaatan, dan sewa.

Lima legislasi utama yang membentuk dasar kerangka peraturan dan tata kelola pertanahan Thailand adalah:

- 1) *Konstitusi Thailand* menyatakan bahwa negara harus mengadopsi kebijakan pertanahan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan lahan, distribusi tanah, perencanaan kota dan pedesaan, dan perlindungan berkelanjutan atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Konstitusi secara khusus menyatakan bahwa distribusi tanah harus adil dan memberikan petani hak atas tanah untuk bertani.¹⁷
- 2) UU Pertanahan (*Land Code*) tahun 1954 (yang telah diamandemen) adalah legislasi pertanahan Thailand yang paling utama. UU Pertanahan mengidentifikasi berbagai jenis penguasaan, termasuk hak kepemilikan dan hak penggunaan. Sebuah Komite Alokasi Tanah bertugas mengidentifikasi lahan untuk alokasi dan realokasi dan melaksanakan rencana realokasi lahan untuk tanah negara dan privat.¹⁸
- 3) UU Reformasi Lahan Pertanian tahun 1975 (*Agricultural Land Reform Act of 1975*) bertujuan untuk mengatasi tingginya tingkat hunian (*tenant*) di daerah-daerah tertentu, banyaknya rumah tangga tanpa tanah, dan perambahan lahan publik untuk membuka ladang. UU ini menegaskan kembali dukungan negara untuk alokasi tanah negara dan tanah privat untuk rumah tangga tanpa tanah atau rumah tangga yang nyaris tidak memiliki tanah. UU ini juga memberikan kesempatan bagi pemukim untuk menyewa atau membeli tanah yang mereka garap dan memungkinkan penghuni liar dan siapa saja yang telah melanggar tanah negara untuk mendapatkan hak mereka secara hukum.¹⁹

- 4) UU Pengembangan Tanah tahun 1983 (*Land Development Act of 1983*) membentuk sebuah Komite Pembangunan Tanah nasional untuk meningkatkan pemanfaatan lahan dan produktivitas lahan pertanian negara. UU ini memberi kewenangan kepada komite ini untuk: melakukan perencanaan pemanfaatan lahan, mengembangkan program untuk mendukung petani, melakukan survei, dan membuat rencana untuk meningkatkan kualitas.²⁰
- 5) UU Penyesuaian Tanah tahun 2004 (*Land Readjustment Act of 2004*) mengatur proses untuk pengukuran kembali (*re-plotting*) dan pengembangan lahan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan. UU ini membentuk sebuah Komite Penyesuaian Tanah nasional yang bertugas jawab untuk mengembangkan kebijakan dan mengidentifikasi daerah untuk penyesuaian kembali. UU ini juga menetapkan serangkaian ketentuan untuk pembentukan Asosiasi Pertanahan yang beranggotakan pemilik tanah di daerah di mana penyesuaian kembali dilaksanakan dan Komite-Komite Provinsi untuk mengatur proses ini.²¹

Hak atas tanah	Penjualan/pembelian tanpa batasan	Lahan harus digunakan	Kepemilikan terdaftar	Dapat dimohonkan kepemilikan yang	Dapat diwariskan	Dapat dipinjamkan	Dapat digadai	Batas tanah terdaftar secara resmi	Dapat memohon kepemilikan penuh	Pengguna tanah dapat menginisiasi proses kepemilikan
sepenuhnya dimiliki	X	X	X	X	X	X	X	X		
NoSo 3 ko	X	X	X	X	X			X	X	
NoSo 3	X	X	X							
SePoKo	X	X			X			X		
NoSo 2	X	X			X			X	X	X
SeKo 1	X			X				X	X	X
NoSo 5		X	X	X	X			X		

Tabel 2: Akta-akta hak-hak atas tanah di Thailand (sumber GTZ 2008:9)

Tabel 2 menunjukkan berbagai jenis status tanah dengan berbagai jenis hak atas tanah yang ada. Tabel 3 menunjukkan distribusi status tanah (dalam jumlah bidang tanah dan persentase dari jumlah total bidang tanah yang dinilai) dalam sebuah survei sampel dari 1.012 bidang tanah ("Chanod" pada Tabel 3 sama dengan "sepenuhnya dimiliki" di tabel 2). Perbedaan dalam penulisan dan jenis status tanah yang dinilai dalam dua tabel merupakan indikasi dari kompleksnya sistem tenurial Thailand.

Hak tanah	(n=1,012 bidang tanah)	
- Chanod	143	14,1
- Nor Sor 3 Kor	29	2,9
- Nor Sor 3	313	30,9
- Sor Por Kor	245	24,2
- Por Bor Tor 5	151	14,9
- Kor Sor Nor 5/Kor Sor Nor 3	36	3,6
- Lainnya	14	1,4
- Tidak ada status	81	8,0

Tabel 3: Status hak bidang-bidang tanah dalam survei (sumber: Thongrak et al 2001:13)

Karena 8% bidang tanah dalam studi oleh Thongrak et al 2011 tidak memiliki hak tanah sama sekali, penyelidikan lebih lanjut akan diperlukan untuk mengungkapkan setiap konflik lahan dan penentangan masyarakat lokal.

Secara umum, kerangka hukum formal diakui sebagai yang mengatur hak-hak tanah di seluruh Thailand.²² Hukum adat masih digunakan di beberapa daerah dan untuk masalah-masalah tertentu – khususnya yang menyangkut lahan perkebunan keluarga dan perselisihan – di daerah pedesaan, khususnya di kalangan suku-suku asli yang banyak menghuni dataran tinggi dan pengunungan di daerah utara. Seringkali, suku-suku ini telah menduduki tanah yang sama selama turun-temurun, dan di kalangan mereka dan suku-suku tetangga, hukum adat menentukan hak akses dan penggunaan tanah. Bagaimanapun, tanah tunduk pada kerangka hukum formal yang mengatur hak atas tanah. Sebidang tanah luas yang diduduki oleh masyarakat adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara, dan sementara hukum saat ini tidak otomatis memberikan hak-hak kepada masyarakat adat di bawah hukum formal, beberapa politisi telah menyerukan regularisasi hak-hak kolektif, dan RUU Hutan Kemasyarakatan yang sedang mengalami penundaan menyediakan sebuah kerangka kontrak untuk pengelolaan hutan partisipatif dan hak-hak akses dan hak pemanfaatan kawasan hutan terkait.²³

Sistem administrasi tanah Thailand dianggap sebagai model untuk negara Asia Tenggara lain. Sistem ini memiliki standar kinerja wajib agar transaksi dapat diselesaikan dalam satu hari, dan beberapa dapat selesai dalam waktu dua jam. Rata-rata, prosedur registrasi tanah memerlukan waktu kurang dari satu hari dan biaya sekitar 1% dari nilai properti.²⁴ Hak tanah yang terdaftar umumnya dipandang pasti. Namun, hak rumah tangga menempati tanah yang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan dianggap tidak begitu pasti, tanpa memandang apakah mereka memiliki atau tidak memiliki sertifikat yang memberi mereka hak untuk menempati dan menggunakan tanah tersebut. Dengan atau tanpa sertifikat izin, hak atas tanah seringkali hanya bersifat sementara dan penghuninya bisa mengalami pengusuran.²⁵

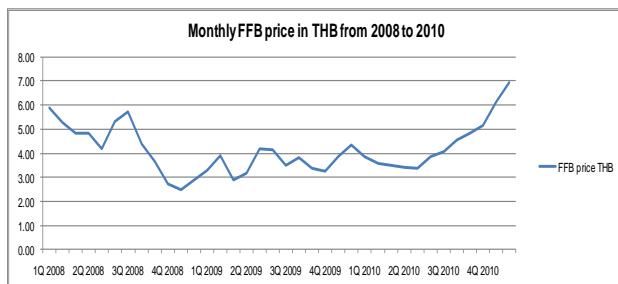
Pengelolaan pertanian dan pemasaran

Karena produksi CPO di Thailand jauh di bawah kapasitas tahunan sebesar 2,5 juta ton dan karena jarangnya kepemilikan perkebunan besar, pabrik pengolahan minyak Thailand sangat tergantung pada pembelian TBS dari petani kelapa sawit mandiri, yang sebagian besar adalah petani kecil. Ini membuat petani-petani tersebut dan terutama para perantara berada dalam posisi tawar-menawar yang baik untuk mencapai harga setinggi mungkin karena mereka bebas untuk memutuskan kemana dan kepada siapa mereka akan menjual produk mereka. Oleh karena itu, pembentukan harga terjadi di tempat dan harga bervariasi dari hari ke hari atau bahkan dapat berubah dalam hari yang sama. Hal ini juga disertai dengan fakta bahwa pasokan TBS hanya menyumbang sekitar setengah dari kapasitas penggilingan TBS, yang menyebabkan pabrik pengolahan kadang harus membayar lebih tinggi dari harga kliring pasar (*market clearing price*).²⁶ Harga yang dibayar sering kali tidak berhubungan dengan kualitas TBS karena pabrik-pabrik pengolahan tidak mampu menolak atau menindak pengiriman TBS yang kualitasnya buruk, karena mereka bergantung pada pasokan tetap.

Pada kebanyakan kasus, pengiriman TBS dari perkebunan ke pabrik pengolahan ini diatur oleh para perantara yang memiliki fasilitas kendaraan angkut atau *ramp* (sejenis bantalan untuk memudahkan memindahkan barang ke tempat tinggi). Para perantara ini

mengumpulkan dan menggabungkan panen dari berbagai petani untuk mendapatkan muatan truk yang lebih besar. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi biaya transportasi dan memungkinkan mereka untuk menikmati harga istimewa untuk pengiriman dengan volume yang lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi dibayarkan untuk buah yang lepas dari tandan karena kandungan minyak mereka ini jauh lebih tinggi daripada buah pada tandan penuh. Sayangnya, hal ini mendorong para perantara dan operator *ramp* untuk mencopoti buah dari tandan. Bentuk malpraktek lain yang umum dilakukan adalah membasahi TBS atau menambahkan pasir atau tanah untuk menambah berat TBS. Praktek ini semakin merendahkan kualitas TBS.

Harga TBS bervariasi sepanjang tahun dan sangat berhubungan dengan harga pasar CPO dunia yang berubah-ubah. Gambar 4 menunjukkan harga TBS bulanan dalam Thai Baht (THB) per kilogram dalam tiga tahun terakhir.



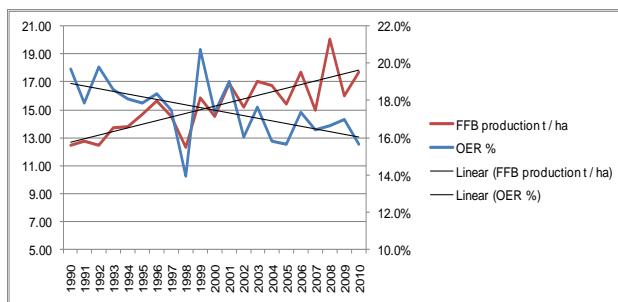
Gambar 4: Harga bulanan TBS sepanjang 2008 - 2010 (sumber: data yang tidak dipublikasikan, OAE 2010)

Di perkebunan kecil, biasanya TBS dipanen kurang lebih setiap dua puluh hari. Panen sering dilakukan oleh tim pemanen dari luar yang dibayar berdasarkan berat buah yang dipanen dan yang mengirim TBS ke *ramp* dengan mobil *pick-up*. Upah mereka tergantung pada panen tapi biasanya lebih tinggi dari upah minimum pekerja industri di Thailand. Musim panen yang tinggi berlangsung dari bulan Maret sampai bulan Juni. *Agrisource* 2005 menyatakan bahwa hanya 10% dari petani kelapa sawit Thailand yang mengelola pertanian mereka

sepenuhnya dengan tenaga sendiri.²⁷ Dalam sebuah survei lapangan oleh Thongrak et al. pada tahun 2011, 80,5% dari semua petani yang diwawancara mempekerjakan tenaga kerja tambahan. Tim pemanenan umumnya diatur oleh para perantara atau operator *ramp*, dan layanan mereka meliputi kegiatan pengelolaan perkebunan tambahan seperti pemangkasan atau penyiangan. Kontrak untuk buruh pada perkebunan petani kecil tampaknya tidak ada. Dalam banyak kasus, buruh adalah para pendatang dari kawasan miskin di Thailand (biasanya dari provinsi-provinsi di daerah timur laut) atau dari negara-negara tetangga termasuk Myanmar dan Kamboja. Sebuah survei lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani kecil kebanyakan menyadari potensi cedera kerja di perkebunan (96%, n = 503) dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan (96,5%, n = 483). Namun, informasi tentang hak-hak pekerja nyaris tidak ada di kalangan petani kecil. Upah minimum hanya diketahui oleh sekitar setengah dari petani yang diwawancara.²⁸

Hasil TBS dan OER di Thailand

Sementara hasil TBS per hektar dan per tahun telah meningkat secara signifikan meskipun mengalami fluktuasi dalam dua puluh tahun terakhir (lihat Gambar 5), tingkat ekstraksi minyak (OER) keseluruhan di Thailand menurun lebih 2% dari periode 1990-1994 sampai periode 2005-2009.



Gambar 5: Produksi TBS dan OER dari 1990 - 2010, (sumber: data yang tidak dipublikasikan, OAE 2010)

Rata-rata produksi TBS tahunan Thailand sebesar 16,8 ton / hektar selama 2005-2009 jauh di bawah yang dapat dicapai oleh perkebunan komersial di negara-negara penghasil minyak sawit utama. Selain itu, karena 16,8 ton/hektar adalah rata-rata industri Thailand, ini mengimplikasikan bahwa produksi rata-rata petani kecil bahkan lebih rendah.

Donough menyatakan bahwa pada satu blok tunggal di Malaysia dan Indonesia bisa dicapai hasil TBS tahunan di atas 40 ton / hektar, sedangkan hasil TBS tahunan rata-rata keseluruhan sebuah produsen internasional besar adalah 27 ton / hektar pada tahun 2006.²⁹ Petani kecil umumnya dilaporkan mendapatkan hasil yang jauh lebih rendah. Sebuah operasi besar di West New Britain, Papua Nugini (PNG) melaporkan hasil TBS tahunan rata-rata dari perkebunannya adalah 26-28 ton / hektar dibandingkan dengan 18 ton / hektar rata-rata hasil petani kecil pemasok. *Oil Palm Industry Cooperation* (OPIC) melaporkan bahwa hasil TBS rata-rata petani dalam proyek Hoskins (West New Britain, PNG) adalah 17,3 ton / hektar. Namun, beberapa dari mereka pernah menghasilkan hampir 30 ton / hektar.³⁰ Ada banyak variabel yang menjelaskan tingkat produksi yang berbeda ini, misalnya tanah, iklim, curah hujan, kelebatan rumpun, umur tanaman, input pupuk, serangan hama, intensitas pengelolaan dan kedekatan lokasi dengan pasar.

Di Thailand, petani yang mengelola perkebunan mereka dengan baik dapat mencapai hasil TBS tahunan antara 20 sampai 30 ton / hektar. Fairhurst memperkirakan bahwa hasil panen di propinsi Krabi dapat ditingkatkan sebesar 2,5 ton / hektar melalui praktik-praktek pengelolaan pertanian yang lebih baik. Ini termasuk: mengoptimalkan penggunaan pupuk mineral untuk memaksimalkan panen dengan biaya serendah mungkin; mengintegrasikan penggunaan pupuk mineral dan residu tanaman; pengelompokkan berdasarkan kontur (*front stacking around contour lines*); kanopi dan pengelolaan tutupan tanah yang tepat. Dihitung atas seluruh wilayah produksi di Thailand pada tahun 2009, peningkatan ini dapat menghasilkan tambahan produksi TBS sebanyak 1,276 ton dan produksi CPO sebesar 217.016 ton. Angka ini sesuai dengan hilangnya pendapatan 4.972 juta USD atau 151 juta USD di sektor kelapa sawit Thailand (OER dari 17%, harga CPO Malaysia tahun

2009 adalah 22.910 THB / ton; nilai tukar pada 33 THB / USD). Selain itu, dengan peningkatan kinerja (yaitu hasil meningkat sebesar 2,5 ton / hektar) ke-1.387.604 ton CPO yang diproduksi di Thailand pada 2009 bisa dicapai dengan menghemat 69.004 hektar lahan (13,5% dari total area panen tahun 2009).

OER di Thailand telah menurun selama dua puluh tahun terakhir. OER rata-rata pada periode 1990-1994 adalah 18,8%, sedangkan dari tahun 2005-2009 OER rata-rata hanya 16,6%, menunjukkan penurunan lebih dari 2%. Jika OER rata-rata 18,8% dapat dicapai pada tahun 2009, tambahan 146.923 ton CPO, setara 10,6% dari total hasil CPO pada 2009, dapat dihasilkan. Dikalikan dengan harga rata-rata CPO Malaysia untuk tahun 2009 (22.910 THB / ton), angkanya akan setara dengan 3.366 juta USD (sekitar 102 juta USD pada nilai tukar 33 THB / USD.³¹ Pendapatan tambahan ini sebenarnya dapat dihasilkan oleh sektor kelapa sawit Thailand seandainya bisa mencapai OER yang sama seperti lima belas tahun lalu. Dengan asumsi bahwa penghasilan tambahan ini sepenuhnya ditransfer ke harga TBS, harga akan meningkat 0,41 THB / kg, atau 11,3% dari harga TBS rata-rata di tahun 2009.

OER potensial yang bisa dicapai di bawah praktek pengelolaan yang baik bahkan lebih tinggi dari 18,8% yang dicapai selama 1990-1994 di Thailand. Perkebunan di Indonesia dan Malaysia mencapai OER hingga 25% di bawah kondisi optimum.³² Contoh dari salah satu pemain utama di PNG di West New Britain menunjukkan bahwa OER sebesar 23% dapat dicapai, bahkan dengan mengandalkan pengiriman TBS petani kecil untuk hanya sepertiga dari jumlah total TBS yang diproses (data dari kunjungan lapangan tahun 2010 yang dilakukan penulis).

OER sebesar itu di operasi pabrik pengolahan minyak bergantung pada berbagai faktor dan perbaikan jangka pendek tidak mudah dicapai. Faktor-faktor penghambat di Thailand adalah kemarau dan tegakan kelapa sawit yang cenderung tinggi (yaitu jumlah kelapa sawit yang tumbuh di daerah tertentu) dari bahan tanam yang kualitasnya relatif rendah. Sawit dari penanaman bahan tanam (benih) berkualitas rendah akan memiliki kandungan minyak lebih rendah dibandingkan kelapa sawit dari bibit unggul bersertifikat.

Semakin tinggi proporsi kelapa sawit dari benih yang buruk di Thailand, semakin rendah OER yang potensial dicapai.

Namun, beberapa perusahaan Thailand melaporkan rata-rata OER sebesar 26% di perkebunan mereka sendiri dan potensi bisa meningkat hingga 29% (data dari kunjungan lapangan tahun 2010 yang dilakukan penulis). Peningkatan praktek-praktek petani kecil untuk mengatasi OER sawit yang rendah di Thailand tidak hanya akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi industri dan pertanian; luas lahan yang signifikan di bawah budidaya kelapa sawit juga bisa dihemat. Ada potensi besar untuk efisiensi yang lebih tinggi di sektor ini dengan memperbaiki praktek pertanian di perkebunan petani kecil.

Situasi ekonomi petani kecil

Hasil dari survei sampel menunjukkan bahwa kebanyakan petani kelapa sawit kecil memiliki hutang dan mengambil pinjaman dari Bank Pertanian dan Koperasi (*Bank of Agriculture and Cooperatives /BAAC*) untuk membiayai pengelolaan pertanian mereka serta kegiatan atau aset lainnya.³³ Namun, karena pinjaman hutangnya adalah pada BAAC, bank tersebut tidak membatasi atau mensyaratkan para petani mengenai praktek pertanian atau keputusan pemasaran mereka. Keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lain dipandang sebagai alasan utama untuk mengembangkan pertanian kelapa sawit. Selain itu, kelapa sawit menawarkan pendapatan yang stabil dan tetap sepanjang tahun dan tenaga kerja pertanian yang dibutuhkan relatif rendah. Dalam kebanyakan kasus, petani Thailand bebas memilih tanaman apa yang ingin mereka tanam. Sebuah pengecualian adalah skema pemukiman dimana petani diberikan hak atas tanah yang terbatas di bawah prasyarat penanaman kelapa sawit untuk jangka waktu tertentu.

Ekspansi terus menerus perkebunan kelapa sawit dan peralihan penggunaan lahan oleh petani mandiri dari tanaman pertanian lain ke kelapa sawit menegaskan daya tarik ekonomi dari komoditas kelapa sawit ini. Dinas Ekonomi Pertanian (*Office of Agricultural Economics / OAE*) melaporkan bahwa pendapatan bersih dari setiap

ton TBS kelapa sawit yang dihasilkan adalah 1.067 THB pada tahun 2010 (917 THB dan 2.107 THB untuk masing-masing tahun 2009 dan 2008).³⁴ Variasi dalam laba bersih terutama terjadi dalam kaitannya dengan harga TBS dan harga pupuk. Dengan hasil rata-rata 3.225 ton/*rai/tahun*³⁵ dan luas lahan rata-rata 19,32 *rai* per rumah tangga petani kelapa sawit yang memiliki kurang dari 300 *rai* (48 hektar) (bandingkan Gambar 3), pendapatan bersih untuk median rata-rata petani kecil Thailand untuk tahun 2008 adalah 131.281 THB atau USD 4007 per tahun (kurs 32,76 THB/USD).³⁶ Perhitungan yang didasarkan pada data statistik ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati ketika menilai situasi ekonomi petani kecil. Dalam sebuah survei lapangan oleh Thongrak et al., hanya 22,5% dari petani yang diwawancara bergantung pada pertanian kelapa sawit sebagai satu-satunya sumber pendapatan, sehingga kebanyakan petani kelapa sawit diperkirakan memiliki sumber pendapatan tambahan.³⁷ Penelitian yang sama mengungkapkan bahwa hanya 24,4% dari petani dalam studi itu memiliki pendapatan rumah tangga kurang dari 200.000 USD dan mean aritmatika pendapatan rumah tangga adalah 470.650 THB atau USD 14.377 per tahun, di mana 60,2% di antaranya berasal dari pertanian kelapa sawit.³⁸

Kebijakan dan rencana

Rencana Pengembangan Industri Kelapa Sawit dan Minyak Sawit Thailand untuk tahun 2008-2011 dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan Koperasi yang bekerja sama dengan Kementerian Energi. Rencana ini mempunyai visi pembangunan industri minyak sawit yang berkelanjutan dan peningkatan produksi produk dengan nilai-tambah. Rencana ini menargetkan pengembangan penanaman baru seluas 80.000 hektar dan penanaman kembali tahunan seluas 16.000 hektar sampai tahun 2011. OER rata-rata ditargetkan meningkat sampai 18,5% dan hasil rata-rata hasil TBS mencapai 21 ton/hektar menjelang 2011. Kebijakan Energi Terbarukan Thailand adalah alat penting untuk mendukung harga pasar bahan baku industri ini dengan memanfaatkan surplus TBS yang mungkin dihasilkan untuk produksi biodiesel, melalui promosi biodiesel yang berasal dari kelapa sawit. Pasar Thailand dilindungi dari persaingan asing karena mengimpor minyak sawit memerlukan persetujuan

khusus dan hanya terbatas pada Organisasi Gudang Publik Thailand (*Thai Public Warehouse Organisation / PWO*), sebuah organisasi yang dikendalikan pemerintah. Pada saat harga rendah, pemerintah cenderung mendukung harga pasar dengan intervensi melalui PWO seperti yang terjadi pada akhir 2008 ketika PWO membeli sejumlah besar CPO untuk menaikkan harga TBS menjadi 3,5 THB/kg.³⁹

Kementerian Energi Thailand memperkenalkan Rencana Pengembangan Biodiesel dengan sebuah campuran wajib 2% (B2) biodiesel (B100) dari tahun 2008 dan seterusnya, ketika kebijakan tersebut diberlakukan. Produksi B100 didasarkan pada produk sawit seperti CPO, stearin sawit serta minyak sawit suling tanpa bau (*refined bleached deodorised palm oil / RBD*). Campuran 5% (B5) biodiesel telah diperkenalkan atas dasar sukarela sejak tahun 2008 dan potongan serta pembebasan pajak dari pembayaran kepada dana minyak untuk B100 secara tidak langsung digunakan untuk mensubsidi B5. Pada tahun 2010, B3 wajib (campuran 3%) dikenalkan. Namun, rencana pengenalan B5 wajib pada tahun 2011 telah dikesampingkan karena kekurangan kelapa sawit yang parah di Thailand selama kuartal keempat tahun 2010 dan awal 2011. Untuk menghindari kekurangan pada saat pasokan berkurang, pemerintah Thailand kini mengikuti sebuah pendekatan yang fleksibel terhadap campuran biodiesel, dan menetapkan kuota campuran berdasarkan situasi pasokan di pasar. Pendekatan ini tampaknya masuk akal karena impor bahan baku untuk biodiesel tidak dapat diprediksi, dan proyeksi pasokan domestik Thailand tidak dapat mengakomodasi permintaan tambahan yang dihasilkan dari Rencana Pengembangan Biodiesel.⁴⁰

Sesuai dengan perencanaan penggunaan lahan Thailand, ekspansi budidaya kelapa sawit dimaksudkan untuk dilaksanakan terutama di lahan tak terpakai, lahan rusak/terdegradasi, tanah asam serta lahan bekas budidaya karet dan padi. Pemerintah telah menyiapkan sebuah paket pinjaman lunak untuk mendukung kebijakan ini dan mempromosikan konversi dari karet ke kelapa sawit di provinsi-provinsi di wilayah selatan.⁴¹ Saat ini pemerintah merencanakan regulasi lebih lanjut mengenai industri minyak sawit melalui pengembangan sebuah kerangka regulasi. Dampak dari inisiatif pemerintah ini belum dapat diramalkan namun diharapkan kerangka

ini juga memasukkan keberlanjutan dalam isu-isu yang hendak ditangani.

Isu-isu keberlanjutan dalam sektor minyak sawit Thailand

Gambaran ikonik terkait perkebunan monokultur minyak sawit yang luas, penebangan kayu berskala besar, pembakaran lahan gambut dan ancaman kepunahan orangutan, tidak ditemukan di Thailand. Thailand telah melarang penebangan hutan sejak tahun 1989 dan hutan yang tersisa dinyatakan sebagai taman nasional atau cagar alam. *Wildlife Conservation Society* menjelaskan "jaringan kawasan lindung Thailand (...) [sebagai] salah satu sistem terkuat di Asia Tenggara.⁴²

Ekspansi perkebunan kelapa sawit secara eksplisit ditujukan pada tanah "tak terpakai" (*waste land*) seperti sawah yang terbengkalai, lahan terdegradasi, perkebunan buah-buahan yang terbengkalai, lahan dengan tanah bersifat asam dan lahan bekas budidaya karet.⁴³ Hal ini didukung oleh survei sampel yang meneliti penggunaan lahan sebelum pertanian kelapa sawit seperti yang diuraikan dalam Tabel 4. Penelitian telah menunjukkan bahwa ekspansi sebenarnya dari perkebunan kelapa sawit di provinsi-provinsi selatan terutama berlangsung di atas lahan sawah dan kebun karet, dan di provinsi Chonburi, di atas tanah yang dulunya digunakan untuk budidaya singkong dan nenas.⁴⁴ Ekspansi besar baru-baru ini dilaksanakan di atas lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertambangan di provinsi Trat.

Hampir 30% lahan di Thailand diklasifikasikan sebagai hutan dan telah menjadi subyek perebutan hak selama beberapa dekade⁴⁵ karena kelompok-kelompok konservasi, penghuni hutan dan perusahaan pertambangan bersaing untuk menguasai lahan hutan dan sumber daya. Dalam mengantisipasi bagian dari UU Kehutanan Masyarakat dan program-program pemberian beberapa hak jangka panjang resmi untuk penghuni hutan. Departemen Kehutanan telah meningkatkan upayanya untuk membawa tanah ke dalam status dilindungi. Pemerintah mengakui peran positif hak kehutanan partisipatif dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya hutan yang berkelanjutan.⁴⁶

Namun, pengembangan legislasi lebih lanjut terhenti dan dampak dari program hutan masyarakat terhambat oleh kurangnya kerangka hukum.⁴⁷ Selain itu, intrusi ke dalam hutan dan kawasan lindung untuk produksi pertanian juga telah dilaporkan, khususnya di provinsi-provinsi selatan juga. Pada tahun 2008, total intrusi di provinsi-provinsi selatan dan timur Thailand seperti yang dilaporkan oleh Departemen Kehutanan Kerajaan (RFD) mencapai 2.786 hektar.⁴⁸ Meskipun begitu, intrusi-intrusi ini tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan ekspansi kelapa sawit yang tidak terkendali, karena dokumentasi menyeluruh dan terpisah dalam hal ini belum ada. Membangun dan melindungi zona penyangga antara lahan yang digunakan untuk pertanian dan kawasan lindung dapat membantu untuk memastikan perlindungan efektif daerah-daerah ini.

Dampak lingkungan negatif yang diklaim diakibatkan oleh pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dilaporkan di provinsi Sri Thammarat Nakhon pada tahun 2010, di mana pembakaran rawa gambut dilakukan di Kuan Phru Kreng Wetland. Informasi tentang luas sebenarnya yang terkena dampak bervariasi di antara media lokal.⁴⁹ Sebuah laporan pers akhir-akhir ini menyalahkan perambahan perkebunan kelapa sawit dan karet ke dalam kawasan lindung sebagai salah satu penyebab badai *off-season* hebat di Thailand bagian selatan pada bulan Maret 2011, yang menewaskan sedikitnya empat puluh orang.⁵⁰

Ini hanya gambaran-gambaran sisi negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit tetapi kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa pemantauan yang ketat terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit sangat diperlukan untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan dan pelanggaran regulasi Thailand.

Penggunaan lahan sebelum kelapa sawit	No. (n=1,012 plots)	%
Perkebunan karet	269	26,6
Tanah tidak terpakai	401	39,6
Tanah pertanian lain	172	17,0

Perkebunan kelapa sawit	15	1,5
Sawah	134	13,2
Tidak tersedia	21	2,1

Tabel 4: Penggunaan tanah sebelum kelapa sawit (sumber: Thongrak et al 2011: 13)

Dampak lingkungan dari praktik pengelolaan pertanian telah diteliti selama kunjungan lapangan ke Kabupaten Aoluek, Provinsi Krabi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik pertanian sangat bervariasi di antara para petani, ada potensi untuk mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Isu-isu utama yang diidentifikasi adalah pemeliharaan terhadap zona penyangga di pingiran sungai, langkah-langkah pencegahan erosi, pengukuran kemiringan tanah dan efisiensi penggunaan pupuk.⁵¹ Survei lebih lanjut dan pengamatan umum menunjukkan bahwa langkah-langkah tentang perlindungan dasar terhadap erosi serta tentang kesuburan tanah diikuti oleh sebagian besar petani kecil. Penggunaan bahan kimia dibatasi, dan sebagian besar petani tidak menggunakan bahan kimia selain pupuk. Dalam hal aplikasi kimia, peralatan pelindung dasar seperti masker, sarung tangan dan sepatu bot digunakan di sebagian besar perkebunan.⁵² Sehubungan dengan dampak sosial, sebuah studi sektor yang dilaksanakan *Thailand Environment Institute* (TEI) mengidentifikasi bahwa tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan perkebunan kelapa sawit Thailand.⁵³ Meskipun tampaknya tidak ada perbedaan signifikan yang diperkirakan antara situasi pertanian kelapa sawit dan situasi pertanian tanaman lainnya di Thailand, dianjurkan adanya pemeriksaan lebih lanjut atas isu ini.

Dampak lingkungan dari pabrik pengolahan kelapa sawit terutama adalah dari limbah padat dan air limbah. Namun, dalam industri Thailand, limbah padat sering dijual kepada industri lain atau digunakan sebagai bahan bakar dalam proses penggilingan atau untuk menghasilkan energi untuk jaringan listrik. Praktek yang umum ini membuat sebagian besar pabrik mampu memasok energinya sendiri. Dalam banyak kasus, air limbah dari proses penggilingan juga digunakan, yaitu, dengan membangun fasilitas biogas yang menangkap gas metana dari air limbah dan menghasilkan listrik. Praktek ini merupakan kontribusi besar

terhadap pengurangan gas rumah kaca (GRK) dalam proses produksi minyak sawit (hampir semua emisi dalam proses pabrik penggilingan kelapa sawit berasal dari air limbah) dan memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai sebuah proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM). Jumlah proyek CDM yang disetujui di Thailand masih terbatas karena banyaknya prosedur birokratis yang memberatkan. Namun demikian, teknologi biogas digunakan atau sedang mulai digunakan di banyak operasi pabrik penggilingan kelapa sawit, karena manfaat ekonominya tidak hanya berasal dari pendaftaran proyek CDM dan penjualan kredit karbon, tetapi juga dari langkah-langkah kebijakan Thailand yang mengijinkan penjualan listrik yang dihasilkan dengan harga istimewa. Sampai tahun 2008, dua puluh satu proyek CDM di sektor kelapa sawit telah terdaftar di Organisasi Pengelolaan Gas Rumah Kaca Thailand (TGO).⁵⁴

Standar dalam budidaya kelapa sawit

Sebuah standar Praktek Perkebunan yang Baik (Thai GAP) untuk perkebunan kelapa sawit Thailand disusun pada tahun 2010 dan pelaksanaannya berdasarkan pada azas sukarela. Standar GAP ini jangan dirancukan dengan standar GAP global meskipun sama-sama menangani isu-isu yang sama. GAP Thailand untuk minyak sawit adalah inisiatif nasional dari Kementerian Pertanian dan Koperasi. Kepatuhan petani dikontrol oleh Departemen Pertanian. Isu-isu yang ditangani meliputi penggunaan yang aman dari pestisida, air dan pupuk. Selama proses penyusunan standar, Prinsip dan Kriteria RSPO digunakan sebagai digunakan sebagai referensi (lihat di bawah).

Inisiatif pemerintah lainnya terdiri dari standar untuk kualitas TBS, juga dikenalkan oleh Kementerian Pertanian dan Koperasi. Standar ini untuk menangani isu hilangnya minyak dalam industri Thailand yang terjadi akibat panen buah yang belum masak dan praktik penanganan yang buruk. Isu-isu yang dibahas dalam standar TBS termasuk malpraktek penambahan air dan pasir untuk menambah berat TBS, dan isu-isu yang berkaitan dengan kematangan dan kesegaran TBS.

RSPO di Thailand

RSPO merupakan inisiatif multi-stakeholder yang didedikasikan untuk mempromosikan produksi minyak sawit berkelanjutan di seluruh dunia. RSPO memiliki lebih dari 500 anggota biasa dan anggota afiliasi dari berbagai stakeholder misalnya mereka yang terlibat dalam produksi, pengolahan dan pembiayaan minyak sawit, dan berbagai NGO. Selama proses negosiasi pemegang multi-stakeholder, anggota RSPO mengembangkan delapan prinsip dan tiga puluh sembilan kriteria yang mendefinisikan produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Hampir sepuluh tahun telah berlalu pendiriannya dan RSPO telah menjadi referensi global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Namun, RSPO juga mendapat kritik dari berbagai sisi dan dituding telah menutupi aspek buruk lingkungan dari industri kelapa sawit (*greenwash*).

Saat ini, ada sembilan belas perusahaan penghasil atau pengolah kelapa sawit Thailand yang menjadi anggota RSPO.⁵⁵ Di Thailand, sebuah kelompok kerja beranggotakan stakeholder dari berbagai kelompok kepentingan berkumpul tahun 2009 untuk mengembangkan interpretasi nasional dari Prinsip dan Kriteria RSPO yang telah disetujui oleh Dewan Eksekutif RSPO (EB) tanggal 9 Juli 2010. Meskipun sebelumnya telah disetujui oleh EB, persetujuan akhir masih belum diberikan karena ada beberapa isu yang dianggap memerlukan penyelidikan lebih lanjut menurut sekretariat RSPO dan para konsultannya. Sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, petani kelapa sawit kecil mandiri merupakan mayoritas petani di Thailand. Untuk mengakomodasi mereka dalam RSPO, sebuah proses dimulai di Thailand bulan September 2010 untuk mengembangkan pedoman dan indikator bagi petani kecil mandiri.

Tantangan bagi sertifikasi petani kecil

Ketika melihat sektor pertanian secara keseluruhan, terlihat jelas adanya proliferasi standar-standar swasta. Dalam kata-kata Giovannucci dan Purcell, "*standar-standar swasta menjadi persyaratan entri dasar de facto untuk melakukan perdagangan dengan banyak operator skala besar dan rantai-rantai nilai*

terkemuka".⁵⁶ Efek negatif pada petani kecil dan petani yang dirugikan telah dipelajari untuk berbagai komoditas tanaman.⁵⁷ Prospek untuk sektor minyak sawit menunjukkan komitmen yang jelas dari pelaku rantai nilai utama terhadap sertifikat minyak sawit yang berkelanjutan. Salah satu contoh dapat dilihat di *newsletter* RSPO baru-baru ini yang menyatakan bahwa "Belanda berkomitmen terhadap 100% minyak sawit berkelanjutan di tahun 2015".⁵⁸ Persyaratan-persyaratan pasar baru seperti itu untuk sertifikasi minyak sawit berkelanjutan dapat secara efektif "menghilangkan petani kecil dan miskin dari rantai nilai"⁵⁹ seperti diuraikan dalam arti yang lebih luas untuk kelas (*grade*) dan standar standar swasta oleh Giovannucci dan Purcell.

Salah satu tantangan utama bagi sektor kelapa sawit Thailand dalam mencapai sertifikasi RSPO adalah penyertaan banyak petani kecilnya. Berbeda dengan perkebunan perusahaan besar, petani kecil tidak mampu secara mandiri memenuhi persyaratan pengelolaan yang digariskan Prinsip dan Kriteria RSPO. Selain itu, petani kecil tidak mampu menanggung berbagai biaya yang berasal dari keanggotaan, kepatuhan dan verifikasi. Selain itu, insentif yang jelas bagi para petani kecil ini untuk mencapai sertifikasi masih kurang. Di dalam kerangka RSPO baru-baru ini, petani kecil harus membentuk kelompok untuk tetap independen dari perusahaan pengolahan sementara pada saat yang sama harus mampu memperoleh sertifikasi RSPO. Kelompok-kelompok petani kelapa sawit kecil mandiri harus tunduk pada Standar RSPO untuk Sertifikasi Kelompok serta Prinsip dan Kriteria RSPO agar TBS mereka dapat disertifikasi. Namun, sampai Maret 2011, belum ada sistem pemasaran yang memungkinkan penjualan TBS bersertifikat ke pasar untuk minyak sawit bersertifikat.⁶⁰

Untuk menerima insentif harga untuk TBS bersertifikat di masa depan, ada dua pilihan yang mungkin, yaitu: menjual TBS bersertifikat ke pabrik pengolahan bersertifikat yang bergantung pada produksi TBS dari petani kecil atau menjual sertifikat untuk TBS berkelanjutan lewat sistem perdagangan sertifikat Sawit Hijau.⁶¹ Namun, harga premium yang mungkin untuk minyak sawit bersertifikat sering kali didiskusikan namun sulit diramalkan. Jika melihat harga saat ini untuk sertifikat minyak sawit RSPO,

diragukan bahwa akan ada insentif harga sertifikasi yang menjanjikan bagi petani kecil. Sebagai contoh, harga sertifikat minyak sawit berkelanjutan sebesar USD 3,79/ton CPO dan USD 5,00/ton minyak biji sawit (PKO)⁶² dapat dialihkan menjadi harga sertifikat TBS hanya dengan menggunakan OER rata-rata 20% dan tingkat ekstraksi minyak biji 2,5% (bagian PKO yang diekstraksi per unit TBS). Berdasarkan anggapan ini, harga sertifikat akan ditransfer ke harga premium untuk TBS yang dihasilkan secara berkelanjutan sebesar 0,022 THB/kg TBS (dari sertifikat CPO) dan sebesar 0,003 THB/kg TBS (dari sertifikat PKO)⁶³ hingga totalnya adalah 0,025 USD/kg TBS. Sangat diragukan apakah ini bisa menutupi biaya sertifikasi yang diantisipasi bahkan ketika mengandaikan bahwa sistem RSPO akan menutupi biaya verifikasi oleh badan sertifikasi dan memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas. Di sisi lain, dapat dibayangkan bahwa sertifikat CPO dan PKO dari kelompok petani kecil bisa mencapai harga lebih tinggi dari harga sertifikat produsen besar yang saat ini diperdagangkan di GreenPalm.

Beberapa kemungkinan biaya yang diantisipasi untuk pencapaian sertifikasi kelompok terhadap persyaratan RSPO mencakup hal-hal sebagai berikut:

- pengadaan informasi
- pembentukan kelompok
- pengelolaan kelompok
- perubahan yang diperlukan dalam praktik pengelolaan perkebunan (mungkin manfaat bersih)
- alat / fasilitas yang diperlukan (misalnya peralatan keselamatan, penyimpanan pestisida)
- dokumen yang diperlukan tentang persyaratan RSPO dan sertifikasi kelompok
- pelatihan yang diperlukan (tentang berbagai topik)
- analisa HCV
- pengelolaan HCV
- produksi dan daerah yang hilang (terkait dengan persyaratan HCV atau GAP)

- pemeliharaan sistem pengelolaan kelompok (pertemuan yang diperlukan, sistem pendokumentasian, dll.)
- kajian internal
- audit eksternal (biaya internal dan eksternal)
- biaya kesempatan

Karena kurangnya pengalaman dalam sertifikasi petani kecil milik RSPO, sulit untuk memperkirakan biaya sertifikasi dan laporan ini tidak akan mencoba untuk memperkirakannya. Namun, dengan mempertimbangkan harga premium minimal saat ini dan lambatnya tindakan dari RSPO, tampak jelas bahwa insentif inovatif untuk sertifikasi harus diupayakan jika petani tidak ingin dikecualikan.

Ini berarti bahwa sertifikasi RSPO kemungkinan tidak akan menawarkan insentif dalam bentuk akses ke pasar-pasar nilai yang lebih tinggi tetapi menjadi sebuah persyaratan untuk masuk ke dalam rantai-rantai nilai utama. Agar petani tidak dikecualikan, struktur kelembagaan untuk mendukung petani kelapa sawit kecil untuk memenuhi persyaratan keberlanjutan dan sertifikasi sangat penting. Saat ini, ada pembahasan dan rencana dalam RSPO untuk pembentukan mekanisme dukungan bagi petani kecil. Namun, tidak ada garis waktu yang jelas. Sejauh ini, masih belum jelas kapan dukungan mekanisme bagi petani akan tersedia dan apakah mereka dapat secara efektif menciptakan peluang-peluang dari keterlibatan dalam produksi dan sertifikasi berkelanjutan.

Standar-standar swasta seperti RSPO secara efektif menyerahkan tanggung jawab untuk berkelanjutan (termasuk isu-isu perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia) kepada sektor swasta di mana tanggung jawab ini dialirkan ke hulu di sepanjang rantai nilai. Ini membebaskan pemerintah, lembaga-lembaga terkemuka dan komunitas internasional dari tanggung jawab mereka mengenai pembangunan berkesinambungan dan menempatkan beban pada produsen sendiri karena mereka adalah pihak yang harus mematuhi standar. Dalam banyak kasus, ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk menghilangkan malpraktek oleh perusahaan-perusahaan yang eksplotatif dalam tahapan-tahapan utama produksi. Namun ketika petani kecil harus mengambil alih tanggung jawab dan tugas-tugas

terkait, seperti dalam sektor minyak sawit Thailand, patut dipertanyakan apakah perkembangan ini adalah semangat dari inisiatif keberlanjutan.

Peluang-peluang sertifikasi petani kecil

Seperti diuraikan di atas, selain mengurangi kerentanan produsen minyak sawit dengan menghindari pengecualian mereka dari pasar internasional dan rantai nilai perusahaan pengolahan utama, tampaknya sertifikasi menawarkan sedikit manfaat pasar. Namun, telah ditunjukkan bahwa upaya meningkatkan praktek pertanian dan pengelolaan memiliki potensi besar untuk mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini selanjutnya akan berarti keuntungan yang lebih tinggi bagi petani kecil. Selain aspek-aspek ekonomi ini, manfaat lingkungan dan sosial juga dapat diharapkan akan terjadi. Contoh-contoh dari standar-standar lain menunjukkan bahwa keuntungan jangka panjang petani dapat ditingkatkan sebagai hasil dari praktek pengelolaan pertanian yang lebih baik yang mengiringi penerapan standar.⁶⁴ Praktek-praktek yang baik dan perbaikan terus menerus adalah elemen integral dari Prinsip dan Kriteria RSPO. Namun referensi yang jelas untuk menghasilkan intensifikasi dan hasil yang lebih tinggi sulit ditemui. Juga sulit untuk meyakinkan petani untuk terlibat dalam sertifikasi ketika potensi manfaatnya sangat bisa dicapai lewat praktek yang berkelanjutan semata dan tanpa perlu mendapatkan sertifikasi untuk produksi.

Manfaat langsung lainnya bagi petani kecil yang dapat dicapai adalah peningkatan kondisi keamanan dan kesehatan di tempat kerja, peningkatan jangka panjang dalam kualitas tanah, pengelolaan air serta lingkungan fisik keseluruhan melalui perlindungan lingkungan. Menerapkan Prinsip dan Kriteria RSPO juga dapat membantu mengurangi terjadinya ketegangan dan konflik yang mengikutinya di daerah perkebunan kelapa sawit antara petani kelapa sawit dan anggota masyarakat lainnya.

Rekomendasi

Produksi minyak sawit dan daerah perkebunan kelapa sawit di Thailand terus meningkat dengan tetap selama dua puluh tahun terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat di masa depan karena meningkatnya permintaan dan promosi penggunaan minyak sawit untuk biodiesel. Kasus Thailand menunjukkan bahwa minyak sawit memiliki potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang menguntungkan banyak orang yang terlibat di sektor ini. Karakter skala kecil dari industri minyak sawit dan kelapa sawit Thailand memungkinkan distribusi sewa yang lebih luas dibandingkan yang mungkin terjadi di negara-negara di mana beberapa perusahaan besar mendominasi industri ini dan kepemilikan tanah individu dibatasi. Aspek-aspek penting lainnya termasuk kelebihan kapasitas di pabrik pengolahan kelapa sawit dan tidak adanya mekanisme harga yang dikendalikan pemerintah. Ini berujung pada situasi di mana pasar untuk TBS adalah pasar penjual dan bukannya pasar pembeli. Di sisi lain, struktur sektor minyak sawit di Thailand membawa berbagai tantangan terkait efisiensi dan akses ke sertifikasi untuk petani kecil.

Meskipun tidak ada keraguan bahwa industri kelapa sawit di Thailand memiliki dampak lingkungan negatif tertentu, seperti perambahan perkebunan ke dalam taman nasional sampai batas tertentu dan ke beberapa tempat lainnya, ini tidak dapat dibandingkan dengan penebangan skala besar yang terkait dengan industri minyak sawit di negara-negara lain. Selain itu, masalah-masalah ini tercakup oleh hukum nasional dan tidak spesifik untuk budidaya kelapa sawit saja. Salah satu pendekatan untuk mengatasi isu ini adalah meningkatkan kesadaran petani dan masyarakat Thailand tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan risiko yang terkait dengan degradasi lingkungan. Langkah lain yang dapat membantu adalah memperbaiki sistem registri tanah Thailand dan kualitas dan akurasi peta tanah di Thailand yang dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk perlindungan lingkungan. Hal ini akan memungkinkan pemantauan lebih baik terhadap keberlanjutan pembangunan pertanian di Thailand. Jumlah konkrit emisi gas rumah kaca dari industri minyak sawit di Thailand sedang dalam proses perhitungan,

namun hasil positif dalam hal ini dapat diperkirakan karena konversi ke kelapa sawit sebagian besar terjadi pada lahan pertanian. Selain itu, penangkapan gas metana sedang menjadi praktik umum di pabrik pengolahan kelapa sawit Thailand.

Sedikit sekali informasi yang telah dikaji untuk laporan ini mengenai isu penguasaan lahan dan hak-hak rakyat atas tanah. Penyelidikan lebih lanjut tentang topik ini amat dianjurkan, namun tidak perlu dibatasi pada sektor minyak sawit karena tidak ada tanda-tanda akan masalah yang spesifik tanaman dalam hal ini dan sebagian besar kelompok masyarakat adat berdiam di luar daerah-daerah pengembangan kelapa sawit utama.

Untuk memastikan mata pencaharian yang berkelanjutan petani kecil dari penanaman kelapa sawit dan pada saat yang sama mengurangi tekanan untuk memperluas perkebunan kelapa sawit, masalah efisiensi yang rendah dari sektor kelapa sawit Thailand perlu ditangani. Hal ini membutuhkan langkah-langkah yang harus diambil pada tingkat kebijakan serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas petani kecil. Menyusun standar-standar untuk praktik pertanian dan pemanenan juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi di tingkat pertanian. Namun, untuk mengefektifkan alat ini, manfaat ekonomi yang jelas bagi petani yang mematuhi standar-standar tersebut harus diciptakan. Selain itu, petani membutuhkan dukungan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan pasar mendatang untuk keberlanjutan seperti RSPO dan, kemungkinan besar, standar-standar keberlanjutan lainnya yang berkaitan dengan produksi bioenergi. Jika tidak, begitu standar-standar ini sudah terlaksana menjadi persyaratan masuk yang efektif untuk pasar TBS utama di Thailand, petani kecil akan dirugikan.

RSPO mempromosikan potensi dari standar-standarnya untuk meningkatkan praktik-praktek pengelolaan petani kecil dan di saat yang sama meningkatkan produktivitas dan mengurangi kebutuhan untuk ekspansi wilayah lebih lanjut. Pendekatan ini dapat meningkatkan mata pencaharian jutaan petani di seluruh dunia, menurut RSPO.⁶⁵ Namun, sampai sekarang masih belum jelas siapa yang akan mengambil tugas mendukung petani untuk mendapatkan sertifikat. Mekanisme pembiayaan yang ditetapkan untuk sertifikasi

petani juga sulit untuk diidentifikasi. Oleh karena itu, dianjurkan agar hak-hak petani kecil di Thailand diperlakukan sebagai prioritas dan mekanisme penetapan standar mendatang segera disusun untuk menciptakan mekanisme dukungan bagi para petani kecil ini.

Catatan akhir

¹ ISTA Mielke GmbH 2010

² ISTA Mielke GmbH 2009: 2

³ Reuters 2010

⁴ OAE 2009: 27

⁵ OAE cited in TEI 2009: 3-11

⁶ UPOIC 2011

⁷ Dy 2009: 151

⁸ Preechajarn 2010a: 3

⁹ Childress 2004; Glenn dan Johnson 2005; UNESCAP n.d.

¹⁰ USAID 2011:4

¹¹ *ibid.*:3

¹² Suehiro 2007; Giné 2004; Childress 2004

¹³ USAID 2011:1

¹⁴ USAID 2011:1

¹⁵ USAID 2011:6

¹⁶ KOT 1954; KOT 2006

¹⁷ KOT 2007

¹⁸ KOT 1954

¹⁹ KOT 1975.

²⁰ KOT 1983

²¹ KOT 2004

²² USAID 2011:6

²³ Vejjajiva 2008; Childress 2004; USDOS 2006; USDOS 2008; Liddle 2008

²⁴ World Bank 2008; Childress 2004; Giné 2004; Burns 2004

²⁵ USAID 2011:7

²⁶ *ibid.*2f

²⁷ Agrisource 2005: 9

²⁸ Thongrak et al 2011: 19ff.

²⁹ Donough et al 2010: 2

³⁰ (interview with a farmer 16.6.2010)

³¹ x-rates.com; accessed in August 2010

³² Donough et al 2010: 2

³³ Thongrak et al.2011: 10

³⁴ OAE 2010a: 31

³⁵ OAE 2008: 27

³⁶ www.oanda.com

³⁷ *ibid.* 8

³⁸ *ibid.* 9

³⁹ TEI 2009: 4-16

⁴⁰ Preechajarn 2010: 1

⁴¹ Jongskul 2010

⁴² wcs.org/where-we-work/asia/thailand.aspx

⁴³ Jongskul 2010

⁴⁴ TEI 2009: 3-20

⁴⁵ USAID 2011:1

⁴⁶ USAID 2011:2

⁴⁷ *ibid.*:2

⁴⁸ TEI 2009: 3-31 f.

⁴⁹ manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000081519;

terakhir diakses tanggal 18 Maret 2011

⁵⁰ Sarnsamak P & J Pongrai 2011

⁵¹ Proforest 2008: 4

⁵² Thongrak et al 2011: 22ff.

⁵³ TEI 2009: 2

⁵⁴ *ibid.* 2 ff.

⁵⁵ rspo.org/?q=countrystat/Thailand; terakhir diakses tanggal 18 Maret

2011

⁵⁶ Giovannucci dan Purcell 2008: 9

⁵⁷ *ibid.* 6

⁵⁸ RSPO 2010b

⁵⁹ Giovannucci dan Purcell 2008: 21

⁶⁰ BioCert Indonesia and Proforest 2010: 7 ff.

⁶¹ More information available at greennpalm.org

⁶² greennpalm.org, terakhir diakses tanggal 11 Nopember 2010

⁶³ exchange rate: 29.59 THB/USD; x-rates.com/calculator.html, terakhir diakses tanggal 11 Nopember 2010

⁶⁴ Giovanucci dan Purcell 2008: 19

⁶⁵ RSPO 2010a

2. Pengembangan Kelapa Sawit di Kamboja

H.E.P. Sokhannaro

Pengantar

Minyak sawit mentah (CPO) menjadi produk yang sangat dihargai di pasar internasional, menghasilkan biaya yang terus meningkat dalam dua puluh tahun terakhir. Malaysia dan Indonesia saja menghasilkan lebih dari 80% CPO yang diperdagangkan secara internasional. Saat ini, diperkirakan 4,5 juta hektar lahan telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit di Malaysia dengan rencana perluasan di Sarawak, negara bagian di Borneo Malaysia di daerah timur. Lebih dari 7,5 juta hektar lahan telah dijadikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan provinsi-provinsi merencanakan tambahan 20 juta hektar untuk pengembangan kelapa sawit.¹

Ekspansi kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi di kawasan Asia Tenggara. Thailand dan Papua Nugini sekarang juga sedang mengalami upaya-upaya untuk memperluas tanaman ini dan ada inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan tanaman ini lebih jauh lagi di Kamboja, Vietnam dan Filipina. Sebagian besar ekspansi ini terjadi di kawasan "hutan" di mana masyarakat memiliki hak atas tanah yang lemah atau tidak diakui. Ekspansi ini dilaporkan telah menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serius dalam hal degradasi hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati, perampasan lahan masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia dan hak atas tanah serta eksloitasi tenaga kerja, khususnya perempuan dan pekerja migran. Di Kamboja, dampak yang terdokumentasikan telah menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan serta media, masyarakat internasional dan beberapa kelompok hak asasi manusia.

Isu-isu inilah yang telah mendorong RECOFTC untuk berkolaborasi dengan Forest Peoples Programme (FPP) dalam rangka melaksanakan sebuah proyek sebagai mitra dari *the Rights and Resources Initiative* (RRI). Tujuan umum dari proyek ini adalah:

- Untuk meningkatkan kesadaran tentang hak, penguasaan (tenurial), proses perampasan tanah, ancaman yang ditimbulkan minyak sawit dan berbagai kemungkinan dan keterbatasan dari RSPO.
- Untuk membuka masalah-masalah yang dihadapi dan disebabkan oleh berbagai sektor dan mendiskusikan solusi yang memungkinkan termasuk melalui RSPO, namun juga, yang lebih penting, berdasarkan kerangka kerja perubahan yang diperlukan untuk mengatur sektor sawit.
- Untuk memperkuat mobilisasi sosial dalam rangka mempertahankan tanah dan hutan dari perusahaan predator dan eksploratif.

Studi kasus negara Kamboja berupaya memberikan sebuah ikhtisar tentang pengembangan kelapa sawit yang akan berkontribusi terhadap tujuan umum proyek. Studi kasus ini didasarkan pada data sekunder, perjalanan dan observasi di pedesaan Kamboja, dan wawancara informan kunci pribadi dengan perwakilan dari masyarakat pedesaan, pejabat pemerintah, organisasi penelitian dan organisasi non-pemerintah (NGO).

Kecenderungan Nasional dalam pengembangan kelapa sawit

Sejak kembali berintegrasi ke dalam pasar global pada tahun 1993, Kamboja telah menerima sejumlah besar penanaman modal asing (PMA) selain penanaman modal dalam negeri. Namun, sebagian besar investasi tersebut disalurkan untuk pengembangan sektor pariwisata, infrastruktur, sektor tersier dan industri. Pada pertengahan tahun 2009, PMA memberikan komitmen aset tetap untuk sektor pertanian yang hanya menyumbang 4% atau 1 miliar US dolar.²

Namun, sejak 2007, PMA tampaknya semakin diarahkan ke sektor pertanian. Hal ini terutama terjadi di tahun 2009 ketika jumlah total aset tetap yang disetujui mencapai 446 juta US dolar, lebih dari tiga kali lipat jumlah yang diberikan pada tahun 2008 ketika persetujuan PMA mencapai puncaknya.³ Memang, Kamboja memiliki potensi

untuk mengembangkan sektor pertaniannya, terutama karena kelimpahan lahan subur yang dipandang pemerintah cocok untuk dihibahkan sebagai Konsesi Lahan Ekonomis (*Economic Land Concession / ELC*) dengan biaya yang relatif rendah. Di sisi lain, Kamboja juga menderita kesenjangan yang besar dalam kapasitas pasca panennya untuk menyimpan dan mengolah tanaman untuk keperluan ekspor. Peluang-peluang inilah yang antara lain telah menarik peningkatan arus PMA ke Kamboja meskipun terjadi kelangkaan modal akibat krisis keuangan global.

Investasi perkebunan besar pertaniannya mencakup lahan yang luas, biasanya yang disebut sebagai tanah "kosong" di daerah berhutan. Pemberian tanah untuk investasi pertanian disebut "Konsesi Lahan Ekonomis" (ELC). Sekitar 60% lahan kosong yang berlimpah di Kamboja ditutupi oleh hutan. Upaya untuk mengubah daerah tersebut menjadi lahan pertanian terutama dicapai dalam bentuk Konsesi Lahan Ekonomis, dimana lahan publik banyak dialokasikan untuk perusahaan swasta untuk menarik investasi pertanian skala besar. Seperti yang diumumkan oleh Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada bulan April 2010, delapan puluh lima perusahaan telah diberikan konsesi jangka panjang atas lahan seluas total 956.690 hektar di enam belas provinsi yang berbeda.⁴ Luasan ini belum termasuk konsesi yang lebih kecil yang kurang dari 1.000 hektar yang diberikan oleh otoritas provinsi sebelum September 2008.⁵

Konsesi Lahan ekonomis (ELC) hanya dapat diberikan untuk tanah milik negara untuk jangka waktu tidak lebih dari sembilan puluh tahun dan tidak melebihi 10.000 hektar.⁶ Operasi pada ELC harus dimulai dalam tahun alokasi diberikan. Lima ketentuan harus diikuti untuk memastikan legalitas ELC, yaitu: kawasan tanah milik negara harus terdaftar dan diklasifikasikan; rencana penggunaan lahan harus diadopsi untuk daerah tersebut; Analisa Dampak Lingkungan dan Sosial harus dilakukan dan disetujui; pemilik tanah yang sah tidak boleh digusur oleh ELC dan; harus ada konsultasi tentang ELC dengan publik.⁷

Pengembangan perkebunan agro-industri melalui pemberian ELC memiliki potensi untuk memasok tanaman pertanian dalam jumlah besar dan konsisten. Dengan demikian, pertanian perkebunan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan bertindak sebagai sumber lapangan kerja pada skala besar. Konsesi lahan telah ditawarkan untuk budidaya tanaman perkebunan seperti karet, kelapa sawit, kacang mete dan kopi. Proyek-proyek kecil membudidayakan tanaman pangan seperti tebu dan pohon buah-buahan. Sebagian besar ELC terletak di daerah bebas banjir dan hutan terdegradasi. Pohon-pohon yang tumbuh di sana memerlukan setidaknya tiga tahun untuk menghasilkan dan membutuhkan investasi keuangan yang cukup besar. Karet dan kacang mete merupakan dua dari tanaman-tanaman yang paling berhasil ditanam di kawasan ELC.

Kebijakan pengembangan kelapa sawit

Kenaikan tiba-tiba harga minyak mentah internasional baru-baru ini telah menimbulkan situasi di mana negara-negara pengimpor minyak berupaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan sebaliknya melakukan konversi sebagian dari sumber energi ke sumber-sumber energi berkelanjutan. Dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi negara ini, bio-energi telah dipromosi oleh pemerintah Kamboja. Akibatnya, rencana promosi bio-energi telah dimulai, di mana *focal point*-nya adalah Kantor Dewan Menteri.

Produksi bio-fuel di Kamboja masih dalam tahap awal, tetapi banyak penelitian telah mengkonfirmasi potensi signifikan untuk pengembangan tanaman bio-energi di negeri ini. Namun, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk pengembangan, produksi atau penggunaan bahan bakar nabati (*bio-fuel*). Sebuah rencana untuk produksi bio-fuel untuk sektor transportasi saat ini sedang disusun. Sementara itu, pemerintah mempromosikan "Elektrifikasi Pedesaan melalui Kebijakan Energi Terbaru" sebagai bagian dari agenda kebijakan jangka panjangnya.

Kotak 1: Profil *Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co., Ltd.* (MRICOP)

MRICOP adalah perusahaan kelapa sawit komersial pertama di Kamboja. MRICOP mendapatkan 11.000 hektar lahan di bawah konsesi ekonomi untuk jangka waktu sewa tujuh puluh tahun pada tahun 1995 dan sudah memiliki rencana investasi sebesar 36 juta US dolar, termasuk untuk pembangunan kilang. Perkebunan ini terletak 180 km dari Phnom Penh dan 60 km dari provinsi Prah Sihanouk. Perusahaan ini mengimpor biji benih-benih kelapa sawit dari Kosta Rika, Thailand dan Malaysia.

Minyak sawit mentah (CPO) pertama kali dipanen pada tahun 2003 dan diproses pada tahun 2004. Produk-produk CPO terutama dieksport ke Cina, Malaysia, Sri Lanka dan Singapura.

Namun, banyak pejabat tinggi menyoroti ketertarikan pemerintah akan penggunaan bio-fuel dalam negeri adalah karena diakibatkan oleh berbagai alasan, termasuk untuk memotong biaya impor bahan bakar bensin, meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pencemaran. Pemerintah juga telah mengumumkan insentif seperti pembebasan pajak impor dan ekspor dan menawarkan keringanan pajak yang berarti bagi para permodal di bidang produksi bio-fuel.⁸

Masih belum jelas lembaga pemerintah mana yang akan bertanggung jawab khusus untuk pengembangan bio-fuel. Saat ini, baru Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Kementerian Perindustrian, Pertambangan dan Energi yang terlibat.

Sampai tahun 2010, Pemerintah Kerajaan Kamboja (RGC) tidak terlibat dalam inisiatif penting apa pun untuk mengembangkan biodiesel. Namun, RGC baru saja meluncurkan serangkaian diskusi untuk mengatasi pengembangan sumber energi terbarukan dan diramalkan bahwa RGC akan mempertimbangkan dan mendirikan sebuah proyek percontohan untuk mengembangkan biodiesel

sebagai sumber energi yang penting dan potensial memberikan keuntungan untuk Kamboja.

RGC telah mempelajari beberapa proyek pengembangan energi terbarukan baik secara mandiri, bekerjasama dengan sektor swasta, maupun dengan bantuan internasional. Sebagai salah satu sumber pasokan listrik untuk masyarakat pedesaan, penggunaan energi terbarukan yang tersedia di tingkat lokal dianggap ideal untuk mendukung kegiatan pertanian setempat. 85% dari populasi negara ini berada di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses listrik dan mayoritas adalah petani miskin. Sumber energi yang tersedia untuk mereka dipasok oleh baterai otomotif atau generator solar berukuran kecil dan medium yang mahal yang didirikan di kota-kota provinsi.

Sehubungan dengan ini, motivasi pemerintah untuk mengembangkan energi berbasis pertanian yang dapat diisi kembali (*agro-based recoverable energy*) didukung oleh fakta bahwa petani setempat dapat memperoleh pendapatan dan kemampuan keuangan yang berkelanjutan dengan memproduksi tanaman pertanian yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar. Oleh karena itu, merupakan kepentingan nasional untuk mengembangkan bahan bakar yang dapat diisi kembali untuk menjalankan generator diesel berukuran kecil dan medium, untuk mengurangi penggunaan minyak, kayu bakar dan arang sebagai sumber energi, terutama di daerah pedesaan yang disebutkan sebelumnya di mana akses ke pasokan listrik tersebut tidak memadai.⁹

Produksi CPO nasional

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor bisnis semakin tertarik dengan produksi etanol, terutama yang berasal dari singkong/ubi. Singkong merupakan salah satu komoditas ekspor paling penting di tahun 2007. Sejauh ini, hampir tidak ada fasilitas produksi bahan bakar beroperasi di Kamboja. Perkebunan tanaman energi skala besar yang direncakan baru saja dibangun, dengan jarak pagar dan singkong sebagai tanaman utama. Kelapa sawit juga telah dipandang sebagai salah satu opsi alternatif, meskipun promosi pemerintah difokuskan pada PMA skala besar di perkebunan jarak pagar.

Dengan inisiatif untuk mengembangkan perkebunan besar tanaman pertanian yang dapat dikonversi menjadi biodiesel, Kelompok Reththy Mong patungan dengan Borim Universal dari Korea Selatan meluncurkan sebuah proyek di 1994 untuk membuka kebun kelapa sawit di atas lahan seluas 11.000 hektar yang diajukan di Provinsi Prah Sihanoukville. Tujuan dari perkebunan itu adalah bukan untuk menghasilkan biodiesel dari kelapa sawit, melainkan merupakan upaya pertama untuk mengembangkan perkebunan minyak nabati di Kamboja. Seperti disebutkan oleh HE Chhan Saphan, Sekretaris Menteri Negara di Kementerian Pengelolaan Lahan, Perencanaan dan Pembangunan Perkotaan (*Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction / MLMUPC*), saat pertemuan Kelompok Kerja Teknis di bidang Lahan bulan Maret 2007, Mong Reththy Investment Kambodia Oil Palm Co (MRICOP) adalah salah satu dari ELC yang sukses dimanfaatkan untuk perkebunan pertanian, termasuk kelapa sawit.

Pada bulan Juli 2010, masih belum ada data yang tersedia tentang produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional, termasuk dari situs Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF).¹⁰ Ada banyak kekurangan data produksi CPO yang tersedia untuk akses publik saat ini.¹¹ Sejauh ini, hanya satu perusahaan, yaitu Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co, Ltd (MRICOP) yang sudah disebutkan di atas, yang tampaknya aktif dalam proyek-proyek perkebunan kelapa sawit (lihat kotak di atas untuk profil perusahaan). Pabrik kelapa sawit milik mereka mulai memproduksi CPO pada tahun 2003.

Pabrik pengolahan minyak sawit mentah MRICOP adalah pabrik pertama di Kamboja yang memproduksi minyak sawit mentah untuk konsumsi domestik dan ekspor. Pada tahun 2005, perusahaan ini memproduksi 4.000 metrik ton CPO untuk diekspor ke Cina, Malaysia, Belanda, Swiss, India, Singapura dan Perancis. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Forum Sektor Swasta Pemerintah Ke-14 bulan Nopember 2008, harga minyak sawit turun dari \$1.200 secara drastis menjadi \$400 per ton pada tahun 2008. Sejak itu, perusahaan telah mampu menghasilkan dua puluh ton CPO per jam, sementara rata-rata proyek ini menghasilkan dua puluh dua ton CPO per hektar per tahunnya. Hampir 20.000 ton kelapa sawit diekspor

ke Malaysia, India, Korea dan Jerman pada tahun 2008¹² dan sejak tahun 2009 perusahaan telah mengalihkan fokusnya lebih ke arah pasar domestik.

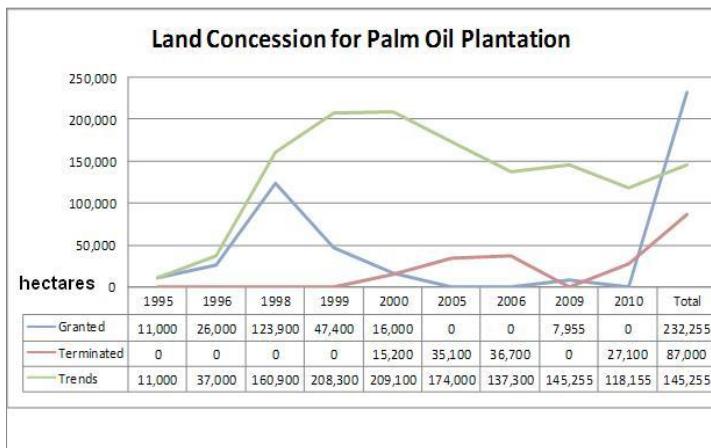
Saat ini, MRICOP mampu memanen lebih dari 350 metrik ton TBS (Tandan Buah Segar) per hari dan pabrik CPO-nya dapat memproses lebih dari 250 metrik ton per hari.¹³ Pabrik pengolahan perusahaan, saat ini bekerja dari kapasitas 50%, mampu memproses sampai tiga puluh ton per jam dan diperkirakan akan mencapai enam puluh ton per jam menjelang tahun 2011.

Dalam pertemuan pada bulan Juni 2010 antara Duta Besar Malaysia yang baru untuk Kamboja Mohd Hussein Mohd Tahir Nasruddin dan Wakil Perdana Menteri Sok An, Duta Besar menekankan bahwa investor Malaysia tertarik untuk berinvestasi di padi, perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit di Kamboja.¹⁴

Hingga Juli 2010, diperkirakan 232.255 hektar konsesi lahan ekonomi telah diberikan kepada empat belas (14) perusahaan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kamboja. Sebagian besar dari investasi di bidang perkebunan kelapa sawit ini berasal dari Malaysia, Thailand dan China. Mayoritas pemegang sahamnya perkebunan kelapa sawit berasal dari China. Karena berbagai alasan termasuk tidak sepenuhnya mematuhi rencana pengembangan proyek yang telah disepakati dengan pemerintah, sejumlah konsesi lahan ekonomi dihentikan. Menjelang bulan Juli 2010, lahan seluas 145.255 hektar¹⁵ telah ditutupi oleh perkebunan kelapa sawit di Kamboja. Di Kamboja, perkebunan kelapa sawit jarang ditanam sebagai perkebunan mono kultur melainkan dilengkapi dengan tanaman usaha pertanian lainnya termasuk tanaman singkong dan pohon karet.

Hanya warga negara Kamboja dapat memiliki tanah (*freehold*) di Kamboja, sementara ELC dapat diberikan kepada perusahaan lokal atau asing sebagai sewa (*leasehold*). Hukum Pertanahan tahun 2001 mengijinkan ELC untuk diberikan sampai sembilan puluh sembilan tahun tetapi dalam praktiknya MAFF umumnya hanya mengijinkan sewa sampai tujuh puluh tahun, yang dapat diperpanjang atas permintaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua perusahaan

konsesi terbagi menjadi perusahaan Kamboja dan perusahaan asing. Cina, Malaysia dan Thailand adalah mayoritas investor yang menaruh minat di bidang perkebunan kelapa sawit di Kamboja.



Gambar 1: Kecenderungan konsesi lahan bruto untuk perkebunan kelapa sawit (1995-2010)

Seperti diindikasikan oleh analisa informasi yang diberikan oleh MAFF terkait perkebunan kelapa sawit, sembilan dari empat belas ELC dimiliki oleh investor asing. Tujuh konsesi dimiliki oleh warga negara Cina, dua oleh warga negara Malaysia dan satu tidak diketahui. Analisa tersebut juga menunjukkan bahwa setidaknya ada dua ELC untuk kelapa sawit telah diberikan melalui koneksi politik Kamboja. Senator Reththy Mong adalah direktur MRICOP yang telah mendapat konsesi lahan seluas 11.000 hektar di provinsi Prah Sihanouk. Anggota senat Sarun, direktur GLOBALTECH Sdn. Bhd, Mittapheap-Men Sarun dan Rama Khmer International, telah diberikan 20.000 hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit di provinsi Ratanakiri.

MRICOP merupakan proyek perkebunan kelapa sawit komersial pertama yang dikenalkan di Kamboja sejak tahun 1995, meliputi lahan seluas 11.000 hektar di provinsi Prah Sihanouk, dan merupakan usaha patungan dengan tiga mitra asing lainnya. Reththy

Mong memegang 60% saham perusahaan, sedangkan sisanya dibagi antara Borim Universal Co Ltd (Korea Selatan, 20%), Kim Tat Kirim Group Pte. Ltd (Singapura, 10%) dan Lavanaland Sdn. Bhd (Malaysia, 10%).¹⁶

Green Rich Co Ltd telah diberikan konsesi lahan ekonomi seluas 60.200 hektar, yang terletak di provinsi Koh Kong. Menurut profil perusahaan di website MAFF, direktur perusahaan ini adalah orang Cina. Seperti dicatat oleh Chris Lang¹⁷, perusahaan ini dimiliki oleh Freeland Universal Limited, yang terdaftar di British Virgin Islands, dan kantornya terletak di Hong Kong. Bulan September 2004, surat kabar *the Cambodia Daily* melaporkan bahwa Asia Pulp and Paper (APP) Indonesia berada di balik operasi Green Rich di Kamboja.¹⁸

Menurut *homepage* MAFF, dari keempat belas ELC untuk perkebunan kelapa sawit (lihat tabel 1), Cina memiliki investasi langsung di sepuluh perusahaan kelapa sawit. Hanya dua perusahaan besar milik Malaysia yang berinvestasi secara langsung, yaitu TALAM Plantation Holding dan Fortuna Plantation. Dari keempat belas perusahaan ini, hanya lima yang dilaporkan masih aktif, sedangkan sisanya tidak aktif atau kontrak mereka telah diakhiri oleh MAFF.

Pembebasan lahan

Kerangka kerja hukum pembebasan lahan

Pemerintah Kamboja telah memberikan komitmen untuk berbagai perjanjian hak-hak asasi manusia, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Selain perjanjian-perjanjian internasional ini, konstitusi Kamboja juga melindungi hak-hak warga negara Kamboja atas lahan, dan kebebasan menyatakan pendapat kolektif dan individual.

Pasal 15 UU Pertanahan menyatakan bahwa lahan publik adalah tanah yang digunakan untuk kepentingan publik, termasuk sumber daya alam, seperti hutan. Tanah milik negara bukanlah lahan publik

maupun lahan yang dimiliki pribadi atau kolektif berdasarkan UU Pertanahan ini. Menurut UU ini, setiap orang yang telah memiliki tanah (kecuali bukan tanah publik) tanpa ada sengketa setidaknya selama lima tahun sebelum keluarnya UU ini¹⁹ memiliki hak untuk memohon sertifikat kepemilikan definitif dari tanah tersebut. Mereka yang telah memiliki tanah seperti itu setidaknya selama lima tahun dapat memperoleh sertifikat kepemilikan definitif. UU Pertanahan berwewenang untuk memberikan konsesi lahan sebagai respon terhadap situasi sosial atau ekonomi. Konsesi lahan harus didasarkan pada dokumen hukum tertentu, yang dikeluarkan oleh pejabat yang kompeten sebelum pendudukan tanah dimaksud, dan juga harus terdaftar pada Kementerian Pengelolaan Tanah, Perencanaan dan Pembangunan Perkotaan (MLMUPC).

Konsesi Lahan Ekonomi hanya akan diberikan untuk tanah milik negara dan untuk jangka waktu maksimal sembilan puluh sembilan tahun. Konsesi ini tidak memberikan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Namun, selain dari hak untuk mengalihkan tanah, pemegang hak konsesi diberikan hak-hak lain yang terkait dengan kepemilikan selama masa kontrak. Konsesi lahan ekonomis tidak boleh melebihi 10.000 hektar dan konsesi yang diberikan sebelum pelaksanaan UU Pertanahan harus dikurangi untuk mematuhi batas area ini, meskipun pengecualian dapat diberikan jika pengurangan tersebut akan merugikan eksloitasi yang sedang berjalan.²⁰

Pasal 18 UU Pertanahan menyatakan bahwa konsesi tanah yang gagal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di atas dinyatakan batal dan tidak berlaku, dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam bentuk apa pun. Pasal 55 menyatakan bahwa konsesi dapat dicabut oleh Pemerintah atas ketidakpatuhan pada persyaratan hukum, dan pemegang konsesi tersebut dapat mengajukan banding atas keputusan ini. Selain itu, pengadilan dapat membantalkan konsesi jika pemegang hak konsesi tidak memenuhi klausul tertentu yang ada dalam kontrak. Pasal 62 menyatakan bahwa ELC harus dieksplorasi dalam waktu dua belas bulan setelah hak diberikan, jika tidak, akan dianggap batal.

Surat Keputusan (*Sub-Decree*) tentang Konsesi Lahan Ekonomis²¹ menentukan kriteria, prosedur, mekanisme dan pengaturan

kelembagaan untuk pemberian ELC. Ini termasuk proses pemantauan perkembangan kontrak ELC, meninjau kepatuhan konsesi pada UU Pertanahan yang diberikan sebelum pemberlakuan Surat Keputusan ini.

Proposal untuk ELC harus dievaluasi berdasarkan berbagai kriteria termasuk promosi standar hidup masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, minimalisasi dampak negatif sosial dan penciptaan lapangan kerja.

Surat Keputusan ini menetapkan bahwa MAFF berwenang untuk memberikan dan menyetujui proyek-proyek investasi yang melibatkan ELC. Gubernur provinsi juga berwenang untuk menyetujui konsesi lahan hingga seluas 1.000 hektar per perusahaan. Namun, wewenang ini ditarik pada bulan September 2008 dan sebaliknya diberikan kepada otoritas pusat MAFF, seperti pada kasus konsesi lahan dengan luasan yang lebih besar.

MAFF juga menjabat sebuah komite antar-menteri untuk membuat keputusan tentang persetujuan pengajuan ELC setelah studi prakelayakan dilakukan. Proposal ELC harus memenuhi analisa dampak lingkungan dan sosial yang syaratkan, dan tidak boleh melibatkan pemindahan dan penggusuran masyarakat lokal.²²

Kecenderungan dalam pembebasan lahan

Konsesi Lahan Ekonomis (ELC) didefinisikan sebagai mekanisme bagi pemerintah untuk memberikan tanah milik negara kepada penerima konsesi untuk eksplorasi pertanian. Hal ini mengacu pada budidaya tanaman pangan atau tanaman industri, peternakan dan perikanan, pembangunan pembangkit listrik, pabrik atau fasilitas lainnya untuk mengolah bahan mentah pertanian dalam negeri atau kombinasi dari beberapa atau semua kegiatan di atas. Tujuan pemberian ELC juga termasuk untuk mendatangkan penerimaan negara, peningkatan lapangan kerja di pedesaan dan diversifikasi peluang mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Surat Keputusan menyatakan bahwa setiap investasi ELC harus menerima persetujuan dari MAFF tersebut.

Sayangnya, analisa kecenderungan ELC terhambat oleh ketidaklengkapan data yang tersedia saat ini. Sampai bulan Juli 2010, hanya ELC-ELC yang disetujui pada akhir 2006 yang dilaporkan dan diungkapkan oleh MAFF. Awal tahun 2010, di situs MAFF, daftar tersebut diperbarui dan memasukkan ELC-ELC yang disetujui sesudahnya dan yang dibatalkan. Namun, sembilan perusahaan hanya tercantum namanya saja, tanpa rincian lain, sehingga membatasi jumlah informasi yang tersedia tentang ELC masing-masing.

Kamboja tampaknya muncul sebagai eksportir utama dari sumber daya alam untuk negara-negara tetangganya. Investor yang tertarik berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura dan China. Bahkan dengan sedikit informasi yang tersedia, ELC sudah kelihatan banyak jumlahnya; delapan puluh tujuh perusahaan dinyatakan sah per April 2010. Situs MAFF melaporkan pembatalan empat puluh lima ELC. Namun, hanya dua belas di antaranya yang diposkan di website. Tampaknya ketiga puluh tiga ELC lainnya yang dibatalkan tidak akan pernah muncul di situs MAFF. Total lahan untuk kedelapan puluh tujuh ELC yang tersisa adalah 1.081.245 hektar (dari 18 juta hektar di Kamboja secara keseluruhan).

Sampai saat ini, empat belas perusahaan telah diberikan total 232.255 hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit (lihat tabel 1). Menjelang Juli 2010, hanya lima perusahaan menduduki 98.155 hektar yang masih beroperasi di mana dua perusahaan yang menempati 56.700 hektar belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam kegiatan mereka. Singkatnya, total lahan seluas 150.210 hektar ELC mencakup perkebunan kelapa sawit di 2010.

Tabel 1: Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kamboja

Provinsi	Nama perusahaan	Tahun Pemberian Izin	Luas	Status saat ini
Kampot	Camland Co Ltd	2000	16.000	Beroperasi
Kampot	Shing yu	1996	10.000	Dihentikan

	komersil			tahun 2005
Kampot	Cambodia Tapioca	1999	5.100	Dihentikan tahun 2005
Kampot	China Evergreen Cambodia Aglicultural Development	1998	4.000	Dihentikan tahun 2005
Koh Kong	TALAM Plantation Holding SDN BHD	1998	36.700	Dihentikan tahun 2006
Koh Kong	Cambodia Palm Oil	1999	15.200	Dihentikan tahun 2000
Koh Kong	Chung Shing Cambodia	1996	16.000	Dihentikan tahun 2005
Koh Kong	Green Rich Co. Ltd	1998	60.200	Beroperasi
Kampong Speu	Henan (Cambodia) Economic Trade development Zone	1999	4.100	Dihentikan tahun 2010
Kampong Speu	The cambodia Haining Co. Ltd	1998	23.000	Dihentikan tahun 2010
Kampong Speu	Fortuna Plantation (Cambodia) Ltd	2009	7.955	Beroperasi
Pursat	Ratanak Visal Development Co, Ltd	1999	3.000	Beroperasi
Ratanakiri	Global Tech Sdn, Bhd	1999	20.000	Tidak ada aktifitas

	Rhama Khmer Internasional dan Men Sarun Friendship			
Prah Sihanouk ²³	Mong Reththy Investment Oil Palm Cambodia Co.,Ltd	1995	11.000	Beroperasi
Total	14		232.255	

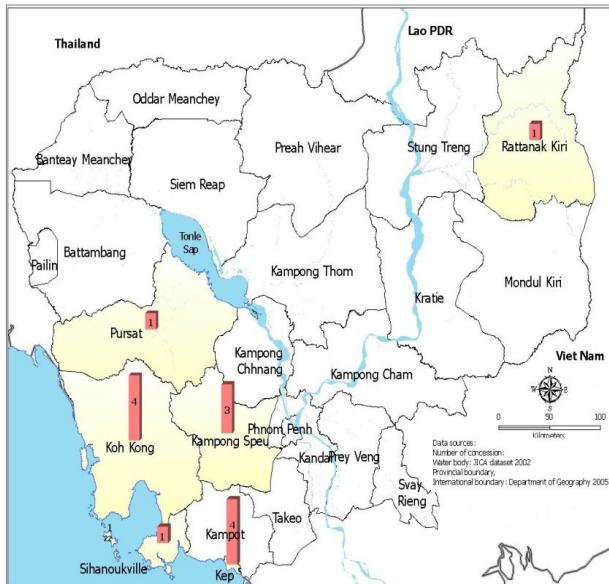
Wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit utama

Kamboja memiliki jumlah lahan terbatas yang cocok untuk pertumbuhan kelapa sawit yang membutuhkan iklim hutan tropis dengan curah hujan lebih dari 3.000 mm per tahun. Iklim Kamboja membuat negara ini lebih cocok untuk perkebunan jarak pagar sebagai bahan baku untuk bio-diesel fuel (BDF).²⁴

Pada tahun 1995, 20.000 hektar lahan konsesi untuk menanam perkebunan kelapa sawit di kabupaten O'Yadao, provinsi Ratanakiri, diberikan kepada sebuah usaha patungan GLOBALTECH Sdn. Bhd (Malaysia) dan perusahaan Kamboja Mittapheap-Men Sarun dan Rama Khmer International. Namun, uji coba kebun pada tahun 1996 ternyata gagal total dan lahan yang telah dibuka oleh perusahaan dibiarkan terlantar. Perusahaan kemudian memulai perkebunan kopi, dan membangun bendungan untuk menyediakan air untuk mengairi perkebunan.²⁵ Perusahaan Kamboja Haining, yang diberi konsesi lahan seluas 23.000 hektar di provinsi Kampong Speu, juga tidak membuat kemajuan yang signifikan setelah uji coba perkebunan kelapa sawit mereka di daerah tersebut gagal tahun 1998.

Saat ini, kelapa sawit ditanam terutama di wilayah selatan Kamboja, terutama di tiga provinsi pegunungan sepanjang zona pantai; Kampong Speu, Koh Kong, dan Preah Sihanouk (lihat peta di

bawah). Perkebunan kelapa sawit yang menempati ribuan hektar di zona pesisir baru menikmati keberhasilan yang terbatas. Rencana awal menyiapkan kilang untuk memproduksi minyak goreng tidak tercapai; sebaliknya benih-benih dikumpulkan dan dieksport ke Malaysia dan Kamboja mengimpor minyak goreng bebas pajak. Jumlah pekerja tidak banyak karena upah rendah dan kurangnya infrastruktur pemukiman. Contoh ini menggarisbawahi pentingnya komitmen yang berkesinambungan dari perusahaan investasi dan perlunya harga global yang tinggi untuk memastikan keberhasilan usaha komersial seperti perkebunan kelapa sawit.



Gambar 2. Lokasi perkebunan ELC di Cambodia

Dampak-dampak sosial dan lingkungan

Sering dilaporkan bahwa ELC memiliki dampak negatif terhadap hak asasi manusia dan mata pencarian masyarakat pedesaan yang bergantung pada hutan dan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka. Umumnya keprihatinan yang dikutip termasuk

perambahan pada lahan pertanian dan penggembalaan, hilangnya mata pencaharian adat, hilangnya akses ke hasil hutan bukan kayu dan kerusakan lingkungan.

UU Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam mensyaratkan adanya analisa dampak lingkungan pada semua proyek dan kegiatan swasta dan publik pemerintah. Menurut ketentuan Surat Keputusan tentang Proses Analisa Dampak Lingkungan, pihak yang bertanggung jawab harus melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk jangka waktu enam bulan kalender, terhitung dari tanggal konfirmasi MoE tentang laporan AMDAL mereka. Setidaknya dalam dua tahun setelah pengumuman Surat Keputusan ini, pihak yang bertanggung jawab harus mengumpulkan laporan AMDAL mereka dan mengirimkannya ke Dinas Lingkungan Kota/Provinsi (PEO) untuk diperiksa dan disetujui.²⁶ Namun, Surat Keputusan ini tidak menjelaskan bagaimana tepatnya AMDAL harus dilakukan, berapa lama periode waktunya, dan menurut indikator dan standar evaluasi apa.

Laporan *the United Nations Office of the High Commisioner for Human Rights* (UNOHCHR) bulan Juni 2007 mengangkat isu penebangan kayu berharga dalam lahan konsesi kelapa sawit Green Rich di Koh Kong. Pada awal tahun 2005, Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan terhadap perusahaan atas pelanggaran ketentuan kontrak dengan melakukan penebangan di luar daerah konsesi dan menghancurkan ratusan hektar hutan di taman nasional Botum Sarkor di provinsi Koh Kong²⁷. Tindakan hukum terhadap Green Rich juga diambil karena perusahaan gagal untuk menyerahkan laporan AMDAL-nya kepada Kementerian Lingkungan Hidup.²⁸ Tindakan perusahaan dipandang sebagai contoh utama dari sebuah konsesi yang memanfaatkan status perkebunan untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan milik taman nasional.

Konflik-konflik tanah: pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat adat dan perampasan tanah

Pemerintah Kerajaan Kamboja telah memberikan ratusan ribu hektar lahan sebagai ELC untuk hutan tanaman industri khususnya.

Hasilnya memiliki dampak yang parah pada hutan, masyarakat lokal dan pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan.

Cuma sedikit kasus yang semata-mata berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit, karena konsesi lahan skala besar untuk perkebunan lainnya seperti karet, jati, kopi dan jambu mete juga menimbulkan masalah serupa terhadap masyarakat lokal di Kamboja. Perusahaan menyewa lahan dari pemerintah di pedesaan dan mempekerjakan pekerja dari desa dan yang sering adalah pekerja migran. Masyarakat lokal hampir tidak pernah diajak konsultasi dan dalam banyak kasus warga diusir dengan kasar dari tanah mereka untuk pembukaan perkebunan-perkebunan ini.

Salah satu kekhawatiran terbesar dari NGO internasional adalah meningkatnya permintaan akan konsesi yang akan mengarah pada legalisasi perampasan tanah dari penduduk kawasan termiskin pedesaan. Data yang tersedia mengenai perampasan tanah di Kamboja terbatas dan kasus-kasus yang terjadi amat luas, karena banyak daerah yang mengalami redistribusi tanah yang melumpuhkan hak masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan.²⁹ Karena data empiris non-spekulatif terbatas, kerja lapang untuk mengungkapkan data sebenarnya merupakan sebuah kebutuhan. Sebuah analisa rinci tentang situasi masyarakat miskin desa yang tanahnya dirampas amat penting untuk memahami apakah mereka benar-benar mendapat manfaat dari bentuk-bentuk redistribusi tanah ini.³⁰

Perampasan tanah menyebabkan dan memperburuk konflik dan perebutan akses dan hak atas sumber daya alam antara perusahaan dan masyarakat lokal.³¹ ELC telah membawa dampak yang menghancurkan terhadap masyarakat adat dan masyarakat setempat, namun masyarakat adat adalah yang paling rentan, meskipun hak-hak mereka atas kepemilikan tanah kolektif dilindungi dalam UU Kamboja.³²

Seperti dikutip dalam publikasi *Watershed* oleh Chris Lang, pada tahun 2007, Yash Ghai, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Hak Asasi Manusia di Kamboja, menulis,

"Jelas bahwa ELC tidak memiliki manfaat nyata di daerah pedesaan tetapi telah merampas sumber mata pencaharian penting masyarakat, sehingga memperberat dan memperburuk situasi mereka yang sudah sulit. Jelas bahwa pemberian konsesi lahan ekonomi telah meningkatkan akumulasi properti dan kekayaan di tangan mereka yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi."³³

Di atas kertas, kontrak untuk ELC di Kamboja tidak melanggar hak tanah dan penggunaan lahan petani karena kontrak ELC hanya diberikan di atas tanah negara. Namun, kategorisasi daerah sebagai tanah negara tidak mencerminkan realitas. Konsesi Lahan Ekonomis mencakup sawah, ladang, lahan penggembalaan, air dan sumber daya hutan masyarakat.³⁴ Definisi yang dibuat negara akan tanah sebagai marjinal, menganggur atau terdegradasi/rusak telah menimbulkan "representasi yang sangat kasar akan hak aktual yang ada atas tanah, kadang-kadang menyesatkan".³⁵

Dengan demikian, merupakan asumsi yang salah mengandaikan bahwa tanah seperti itu tersedia dan cocok untuk eksploitasi. Pada kenyataannya, tanah ini sering kali telah dihuni, ditutupi hutan lebat atau dimanfaatkan sebagai sumber daya manfaat komunal. Akibatnya, kategorisasi tanah yang digunakan pemerintah yang mengabaikan praktek-praktek penggunaan lahan yang sesungguhnya menghasilkan perampasan milik kaum miskin pedesaan. Dengan mendefinisikan tanah sebagai marjinal, menganggur atau rusak, negara bisa mendapatkan keuntungan dengan menyewakan atau mengontrakkan lahan kepada kepentingan-kepentingan pemodal untuk pengembangan pertanian dan eksploitasi sumber daya. Perampasan tanah milik warga Kamboja ini adalah hasil dari kebijakan pertanahan negara secara yang tidak adil menyatakan lahan sebagai marjinal dan kurang produktif.³⁶

Selain itu, meskipun properti milik negara dan swasta dibedakan dalam UU Pertanahan tahun 2001, sampai saat ini, identifikasi, pemetaan, dan pendaftaran tanah negara belum dilakukan. Pemerintah jarang membedakan antara tanah publik dan tanah milik negara ketika menyatakan bahwa warga desa tinggal secara ilegal di

atas tanah negara. Oleh karena itu, warga desa dapat secara legal digusur untuk kepentingan ELC atau kepentingan investasi swasta. Karena tidak ada informasi publik tentang apa yang dimaksud lahan publik itu, sulit bagi para penghuni untuk mempertanyakan klaim negara bahwa mereka tinggal di atas properti negara.³⁷

Surat Keputusan tahun 2005 tentang Pengelolaan Tanah Negara menyatakan bahwa tanah negara harus dipetakan dan informasi ini harus dimasukkan ke dalam database pusat yang dapat diakses oleh publik. Hal ini tidak dilaksanakan secara sistematis atau transparan di Kamboja karena lahan yang luas dipilih dan diklasifikasikan pemerintah sebagai tanah negara swasta sehingga mereka dapat dialihkan atau disewakan kepada pihak swasta.³⁸ Selain itu, kepastian penguasaan lahan bagi masyarakat pedesaan tidak cukup memadai karena para perampas tanah dapat melegitimasi penggusuran dengan menyatakan bahwa mereka menempati tanah negara secara ilegal. Informasi tidak dapat diverifikasi karena pendaftaran tanah negara belum dilaksanakan. Penetapan ini dibuat secara *ad hoc* dan saat ada minat investasi di suatu daerah.³⁹

Sifat ambigu dari status tanah dan kemudahan pengalihan tanah publik (seperti hutan, lahan bera atau tanah non-pribadi) menjadi tanah negara telah memudahkan perampasan tanah di daerah pedesaan Kamboja. Negaralah yang menentukan siapa yang dapat memiliki akses terhadap pendaftaran tanah, sertifikat apa yang diakui, dan bagaimana sumber daya hutan dapat dimanfaatkan. Kaum miskin pedesaan tidak termasuk di sini karena adanya kesenjangan kekuasaan dalam sistem tata kelola tanah.⁴⁰ Contoh-contoh berikut menggambarkan sifat pengembangan kelapa sawit seperti yang dialami oleh penduduk lokal dan petani kecil.

Pada tahun 1997, MRICOP mananami lahan seluas 3.800 hektar dengan kelapa sawit. Dengan bantuan dari Kotamadya Phnom Penh, sembilan puluh keluarga yang dinyatakan tinggal di Phnom Penh secara ilegal dipindahkan untuk dipekerjakan di daerah perkebunan yang terletak di sepanjang salah satu jalan negara (*National Route 4*). Perusahaan berjanji untuk memberi mereka dua hektar bidang lahan untuk perkebunan pribadi mereka. Menurut penduduk desa di daerah tersebut, tanah yang digunakan untuk perkebunan kelapa

sawit termasuk hutan dan lahan pertanian. Sekitar 300 keluarga yang tinggal di desa Tanei, yang bersebelahan dengan perkebunan, dilaporkan kehilangan lahan pada waktu itu karena diambil untuk perkebunan tersebut.⁴¹ Akibatnya, penduduk desa tersebut pindah ke daerah yang bersebelahan dengan jalan negara (*national route*) dan banyak dari mereka kini mencari nafkah dengan menjual minuman dan buah-buahan dari toko-toko kecil di sepanjang jalan.

Menurut hasil investigasi lapangan Chris Lang sejak tahun 2001, beberapa warga desa merasa tertipu oleh perusahaan untuk menyerahkan tanah mereka karena mereka tidak pernah menerima kompensasi apapun dari perusahaan. Namun, dalam laporan yang sama, juga disebutkan bahwa beberapa warga desa menerima uang untuk tanah mereka, tetapi tidak untuk pohon-pohon mereka. Masalah ini berlangsung selama dua tahun tanpa penyelesaian, terutama yang berkaitan dengan dua hektar tanah yang dijanjikan kepada pekerja perkebunan. Perusahaan masih mengklaim bahwa tanah yang diberikan adalah tanah kosong, tetapi masyarakat setempat telah mengajukan protes, yang berujung pada berbagai tindak kekerasan. Bulan Februari 2001, sekitar 6.500 pohon kelapa sawit yang ditanam perusahaan dibakar, menyebabkan biaya kerusakan sekitar 70.000 US dolar.⁴² Sementara itu, sebagian besar keluarga yang dipindahkan tidak memiliki pekerjaan. Mereka mencari nafkah dengan mengumpulkan kayu bakar di hutan terdekat untuk dijual di Phnom Penh dan sebagian telah pindah kembali ke Phnom Penh untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

Kasus serupa juga terjadi di provinsi Kampot awal bulan Juni 2009, ketika sekitar 300 penduduk desa bersenjatakan kapak dan pisau berkumpul untuk memprotes Camland Company, mengklaim perusahaan itu membuka lahan mereka tanpa persetujuan mereka. Perusahaan ini memiliki izin lisensi tujuh puluh tahun dari pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit namun masyarakat mengklaim daerah konsesi tersebut sebagai tanah leluhur mereka yang telah mereka tempati turun temurun. Masyarakat setempat mengancam untuk membakar bulldoser-bulldoser perusahaan jika pihak perusahaan tidak menghentikan kegiatannya. Sampai saat ini, lebih dari 3.000 hektar lahan telah dibuka dan perusahaan melakukan pembalasan dengan meminta

para pemrotes untuk memperlihatkan dokumen bukti klaim mereka.⁴³

Dalam beberapa kasus yang ekstrim, tuntutan pidana telah diajukan terhadap masyarakat lokal yang memprotes dampak kerusakan akibat konsesi perkebunan kelapa sawit. Namun, sistem peradilan belum digunakan untuk menegakkan hak masyarakat lokal sehingga perusahaan yang terang-terangan melanggar hukum tidak dapat dimintai tanggung jawabnya atas kegiatan mereka. Bulan Desember 2005, tiga aktivis masyarakat didakwa dengan tuduhan penghasutan dan perusakan properti milik Ratanak Visal Concession Company. Perusahaan mengajukan pengaduan setelah aktivis masyarakat menandatangani sebuah petisi kepada pemerintah daerah atas nama komunitas yang terkena dampak ketika perusahaan menutup sebuah sungai kecil yang amat penting bagi irigasi sawah mereka.

Konsesi-konsesi lain diberikan di atas tanah adat untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit distrik di O'Yadao, Ratanakiri. Tahun 1996, sebuah perusahaan patungan, GLOBALTECH Sdn. Bhd, Mittapheap-Men Sarun dan Rama Khmer International, diberi konsesi lahan seluas 20.000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit yang tepat terletak di tengah-tengah tanah yang dihuni oleh masyarakat dataran tinggi. Masyarakat lokal tidak diajak bicara, 4.500 orang dilaporkan digusur dari tanah mereka dan lapangan pekerjaan disediakan oleh perusahaan hanya untuk 400 pekerja,⁴⁴ yang sebagian direkrut untuk membuka lahan dan hutan. Karena kelapa sawit ternyata tidak cocok dengan kondisi iklim daerah itu, perusahaan mulai menanam kopi sebagai gantinya. Sebuah bendungan untuk menyediakan air untuk mengairi kebun kopi dibangun akibat kekeringan yang melanda daerah tersebut. Lahan masyarakat setempat yang terendam dibeli oleh perusahaan dengan harga yang amat rendah (US\$52 per hektar) karena mereka diberitahu bahwa, bagaimana pun juga, perusahaan akan mengambil tanah itu bahkan meskipun mereka menolak untuk menjualnya.⁴⁵

Upaya-upaya untuk mendapatkan kompensasi atas ketidakadilan yang diperparah oleh perampasan tanah di Kamboja gagal karena para petani nyaris tidak memiliki pilihan untuk berhasil melawan sistem.⁴⁶ Karena penentangan terang-terangan dihadapi dengan aksi

brutal oleh militer dan polisi yang dikontrak di Kamboja, bersuara lantang menentang para pejabat pemerintah atau orang yang memiliki koneksi yang kuat untuk negara dapat menempatkan masyarakat, keluarga mereka, dan seluruh desa dalam bahaya kerugian jasmani, penggusuran, dan penangkapan.⁴⁷ Namun, meskipun ada risiko-risiko ini, terjadi peningkatan jumlah kasus di mana masyarakat setempat terang-terangan menantang perampasan tanah dan sistem yang mempromosikan pengambilalihan tanah sebagai pengembangan ekonomi pedesaan. Di sisi lain, kebanyakan petani menolak pengambilalihan tanah mereka yang dilakukan lewat penipuan dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.⁴⁸ Saat ini di Kamboja, resistensi atas perampasan tanah pengembangan perkebunan kelapa sawit sering terjadi setiap hari, sering dalam bentuk oposisi terbuka, tidak terorganisir dan tidak terstruktur oleh kaum miskin pedesaan. Ketegangan yang semakin meningkat, terutama dalam perebutan tanah antara modal dan kaum miskin pedesaan, juga dapat mengakibatkan munculnya politik advokasi dalam waktu dekat.⁴⁹

Isu-isu lain terkait perkebunan

Penggunaan sebagian ELC untuk produksi pertanian tampaknya tetap berada pada tingkat spekulatif. Beberapa perusahaan kekurangan modal untuk mengkonversi ELC mereka menjadi usaha pertanian. Lainnya berkonflik dengan para pemangku kepentingan lain mengenai hak atas tanah, terutama dengan masyarakat lokal, dan tidak mampu melaksanakan rencana-rencana mereka.

Klaim atas lahan yang tumpang tindih dilakukan baik oleh masyarakat lokal maupun orang-orang berpengaruh yang membeli tanah dari masyarakat lokal ini atau yang diberikan tanah oleh pemerintah. Menurut laporan sengketa lahan dari database *NGO Forum on Cambodia* tahun 2009, 108 kasus yang diidentifikasi terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan perkebunan, pencarian dukungan pemimpin setempat melalui iming-iming imbalan finansial dan intimidasi terhadap aktivis menentang pembangunan perkebunan.⁵⁰ Penyelesaian konflik-konflik tersebut sangatlah sulit, seperti tercermin dalam kenyataan bahwa banyak konflik tanah telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Kerangka kerja hukum dan regulasi untuk memberikan ELC jelas jauh dari ketat. Analisa dampak lingkungan dan analisa dampak sosial tidak dilaksanakan dan ditegakkan dengan benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang Konsesi Lahan Ekonomis. Hanya lembaga konsultan yang diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang diizinkan untuk melakukan AMDAL. Namun, analisa-analisa ini tidak dapat diandalkan karena mereka cenderung hanya menjadi aksi contreng-mencontreng kotak isian.⁵¹

Sebuah tinjauan terhadap website MAFF menemukan bahwa banyak perusahaan konsesi kelapa sawit melakukan implementasi kontrak atau rencana usaha mereka secara lambat atau tidak serius. Sangat sedikit tampaknya proyek yang serius dan penuh komitmen dalam menerapkan proposal pengembangan industri pertanian mereka, seperti ditegaskan dalam pertemuan *Technical Working Group on Land* pada bulan Maret 2007.⁵² Hal ini antara lain telah mengakibatkan perampasan tanah secara ilegal, yang menyebabkan konflik yang akan sulit dan memakan waktu untuk diselesaikan.

Penduduk setempat tampaknya mengalami masalah keuangan yang lebih buruk dari sebelumnya, meskipun sebagian menerima manfaat sementara dari proyek-proyek ELC. Suku minoritas yang dirugikan yang tinggal di dataran tinggi terpencil khususnya telah kehilangan praktek-praktek tradisional mata pencaharian mereka, dan tidak ada alternatif yang tersedia untuk mereka saat ini. Sebuah contoh gambaran dari situasi ini adalah kasus Globaltech Sdn. Bhd., Mittapheap-Men Sarun dan Rama Khmer International yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mendapat konsesi lahan seluas 20.000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit di Ratanakiri.

Informasi resmi yang berkaitan dengan kondisi kerja di perkebunan kelapa sawit sangat kurang. Sejauh ini, satu-satunya informasi yang tersedia adalah yang dikumpulkan oleh NGO hak asasi manusia dan studi-studi independen lainnya. Memang, seperti yang dilaporkan oleh Chris Lang, kondisi kerja pekerja untuk Green Rich benar-benar mengerikan.⁵³ Perusahaan menyewa penebang dari wilayah timur laut lain. Laporan Chris mengklaim bahwa pihak sub-kontraktor menggelembungkan harga makanan bagi para pekerja

dan pekerja banyak menemukan diri mereka harus bergantung pada pinjaman uang hutang dan makanan untuk bertahan hidup. Ada cukup banyak pekerja melarikan diri, berenang melintasi sungai di malam hari dan berjalan puluhan kilometer melalui hutan bakau untuk menghindari kondisi yang eksploratif ini.

Dalam beberapa kasus, pekerja datang dari daerah lain untuk hidup dan bekerja dengan perusahaan konsesi. Salah satu contoh dari kasus ini adalah contoh dari MRICOP di provinsi Prah Sihanouk. Awal tahun 1999, Kotamadya Phnom Penh, bekerjasama dengan perusahaan tersebut, memindahkan sembilan puluh sembilan (99) keluarga yang secara ilegal tinggal di belakang kedutaan Rusia ke Monorom 1, sebuah desa baru yang bersebelahan dengan lahan MRICOP. Orang-orang ini dijanjikan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit bersama-sama dengan rumah baru. Kotamadya membangun sekolah dan pasar. Namun, seperti dilaporkan Chris Lang, hanya sekitar lima puluh orang yang benar-benar mendapat pekerjaan di perusahaan. Bulan Juni 2001, dilaporkan bahwa para pekerja migran dapat bebas melakukan apapun yang mereka inginkan untuk mencari nafkah, sementara perusahaan itu sendiri bahkan tidak mengetahui berapa banyak penduduk desa yang bekerja untuk mereka.⁵⁴

Menjelang tahun 2001, usaha patungan kelapa sawit itu masih belum mendapatkan keuntungan apa pun. Meskipun buah-buah yang pertama sudah dipanen, tidak ada pabrik untuk mengolahnya. Dalam laporannya, Chris Lang menekankan fakta bahwa perusahaan telah gagal total dalam memberikan manfaat bagi masyarakat lokal atau orang-orang dipindahkan dari Phnom Penh. Masyarakat di sekitar daerah perkebunan telah kehilangan akses mereka ke lahan dan hutan, dan semua ini tanpa ada kompensasi. Dari semua pekerja migran yang pindah dari Phnom Penh dan dijanjikan pekerjaan di perusahaan, hanya segelintir telah menerima pekerjaan dan tidak ada yang menerima tanah yang dijanjikan perusahaan.

Standar dan norma-norma nasional

Meskipun Pemerintah Kerajaan Kamboja memiliki kebijakan untuk mempromosikan bio-energi untuk mengurangi ketergantungan

Kamboja pada minyak impor, masih belum ada agenda khusus untuk pengembangan kelapa sawit. Seperti dilaporkan oleh sumber media lokal, MAFF tidak secara khusus mendorong proyek-proyek kelapa sawit karena proyek-proyek tersebut dipandang tidak banyak memiliki manfaat positif. Bahkan MRICOP juga telah memperluas proyek perkebunan mereka dengan fokus pada singkong.

Sejak bulan Juli 2010, belum ada informasi yang tersedia mengenai keanggotaan dari perusahaan mana pun di Kamboja di *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Namun, prinsip-prinsip RSPO dan kriteria yang berkaitan dengan masyarakat adat, masyarakat lokal, buruh dan petani, standar dan norma masyarakat secara teori sejalan dengan kerangka hukum yang ada di Kamboja, termasuk UU dan hukum-hukum internasional. Selain itu, kertas posisi dan pernyataan NGO yang dibuat saat pertemuan *Cambodia Development Cooperation Forum* (CDCF) memberikan sumber lain yang dapat digunakan CSO untuk mengangkat keprihatinan mereka tentang dampak dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat di tingkat lokal.

Konstitusi Kamboja menyatakan bahwa semua warga memiliki hak yang sama, tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa atau keyakinan. Masyarakat adat dianggap sebagai warga negara Kamboja. Kamboja telah menandatangani sejumlah instrumen internasional yang melindungi hak asasi manusia yang diratifikasi sejak 1992, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 31 dari Konstitusi Kamboja juga menyatakan bahwa Kamboja mengakui dan menghormati konvensi PBB yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Menanggapi hal ini, NGO internasional dan lokal telah menghasilkan sejumlah laporan yang terkait dengan dampak perkebunan kelapa sawit terhadap mata pencarian, hak, sumber daya dan pilihan masyarakat lokal. Mengacu pada ELC dengan lebih luas, Komite bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menulis dalam Observasi Penutupnya tahun 2009 bahwa Komite ini

"merasa prihatin dengan laporan bahwa peningkatan konsesi lahan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir,

bahkan dalam kawasan lindung, adalah faktor utama dari degradasi sumber daya alam, yang secara negatif telah mempengaruhi ekologi dan keanekaragaman hayati, mengakibatkan pengusuran masyarakat adat dari tanah mereka tanpa kompensasi yang adil dan pemukiman kembali, dan hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan yang tergantung pada sumber daya lahan dan hutan untuk kelangsungan hidup mereka.”⁵⁵

Menanggapi kegiatan ELC, masyarakat menyerukan aksi untuk melindungi mata pencaharian mereka. Mereka memobilisasi diri untuk memberitahukan kepada para pemegang konsesi dan pihak berwenang tentang dampak dari kegiatan-kegiatan ini melalui petisi dan protes publik. Dalam beberapa kasus, dijanjikan akan ada tindakan-tindakan untuk menyelesaikan konflik, namun tidak pernah direalisasikan.

Jendela kesempatan lain untuk komunitas NGO Kamboja agar terlibat dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja dalam rangka mengatasi isu-isu ini adalah melalui kertas posisi NGO⁵⁶ yang dipresentasikan saat acara tahunan Forum Kerjasama Pembangunan Kamboja.⁵⁷ Kertas posisi ini memberikan pengamatan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan kinerja pemerintah terhadap Indikator Pemantauan Bersama (JMIs) dan Rencana Pembangunan Strategis Nasional (NSDP) yang disusun pemerintah. Meskipun pernyataan-pernyataan NGO jarang sekali menyebut isu-isu kelapa sawit secara langsung, pernyataan tahun 2010 ini menegaskan bahwa “ELC adalah akar penyebab bencana kehutanan dan konflik tanah di negeri ini, umumnya dengan dampak negatif pada masyarakat yang terkena dampak.”⁵⁸ Pernyataan itu juga meminta pemerintah untuk memastikan pengungkapan publik dan update berkala teratur dari buku log ELC, terutama yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan perusahaan perkebunan.

Dalam pernyataan yang sama, NGO yang bergerak di isu-isu konservasi, perlindungan lingkungan, dan perubahan iklim menyatakan keprihatinan mereka bahwa tidak ada cukup perhatian yang diberikan terhadap kualitas AMDAL yang dilaksanakan untuk proyek-proyek pembangunan. Mereka merekomendasikan agar pemerintah meninjau kembali proyek-proyek ELC yang saat ini

sedang berlangsung atau yang beroperasi tanpa AMDAL dan menangguhkan proyek-proyek ini sampai laporan AMDAL mereka diserahkan.

Rekomendasi

- Untuk mengungkapkan dan menyediakan bagi publik semua informasi yang berhubungan dengan ELC, dan khususnya untuk produksi minyak sawit. Informasi ini harus mencakup lokasi perkebunan kelapa sawit dengan koordinat geografisnya, luas lahan yang digunakan, status perkembangan produksi minyak sawit, kapasitas produksi dan pasar ekspor yang ditargetkan.
- Untuk memastikan bahwa semua konsesi sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan Hukum Pertanahan dan Surat Keputusan (*Sub-decree*) tentang Konsesi Lahan Ekonomis.
- Untuk menjamin partisipasi efektif masyarakat lokal melalui konsultasi sebelumnya dan konsultasi publik.
- Untuk memastikan bahwa analisa dampak lingkungan dan sosial dibuat sebelum pemberian konsesi lahan.
- Untuk memastikan bahwa konsesi lahan kebun sawit tidak diberikan di atas tanah hutan dan bahwa hak penggunaan lahan adat masyarakat lokal dilindungi.

Catatan akhir

¹ Colchester 2010

² Ngo S & Chan S 2010

³ *ibid.*

⁴ MAFF 2010

⁵ Surat Keputusan baru untuk menghapus kewenangan otoritas provinsi untuk memberikan tanah kepada perusahaan swasta.

⁶ UU Pertanahan tahun 2001, Pasal 17, 58; Pasal 61; Pasal 59

⁷ Schneider A E 2011

⁸ Schott C 2009

⁹ Japan Development Institute (JDI) 2007

¹⁰ MAFF 2010

¹¹ Wawancara telepon dengan Tn.Neou Senior, Peneliti Senior dari Manajer Database Online Institut Ekonomi Kamboja tanggal 19 Juli 2010.

¹² Cambodia Business Intelligence

¹³ Mong Reiththy Group

¹⁴ DAP-News 2010

¹⁵ Total lahan tidak hanya diperuntukkan untuk kelapa sawit namun tanaman agro-industri lainnya. Data tentang alokasi lahan khusus untuk minyak sawit tidak tersedia.

¹⁶ Lang 2001a

¹⁷ Lang 2005

¹⁸ Quoted in Lang 2008

¹⁹ UU Pertanahan diumumkan tanggal 30 Agustus 2001.

²⁰ Surat Keputusan tentang Konsesi Lahan Ekonomis memberi kewenangan pada Dewan Menteri untuk memberikan pengecualian ini, namun SK ini menjelaskan bahwa pembukaan lahan tidak dianggap sebagai eksloitasi yang sedang berjalan.

²¹ Surat Keputusan ditandatangani Perdana Menteri tanggal 27 Desember 2005.

²² Surat Keputusan tahun 1999 tentang Proses Analisa Dampak Lingkungan, Kerajaan Kamboja.

²³ Sebelumnya dikenal sebagai Sihanouk Ville

²⁴ Japan Development Institute (JDI) 2007

²⁵ WRM 2002

²⁶ Surat Keputusan tentang Proses Analisa Dampak Lingkungan, Kerajaan Kamboja.

²⁷ Lang 2008

²⁸ WRM 2005

²⁹ Schneider 2011:11

³⁰ *ibid.*

³¹ Lang 2003

-
- ³² OHCHR 2007
- ³³ Lang 2008
- ³⁴ Schneider 2011:11-12
- ³⁵ Scott 1998: 47
- ³⁶ *ibid.*
- ³⁷ CHRAC 2009
- ³⁸ Grimsditch & Henderson 2009:6
- ³⁹ *Ibid.*
- ⁴⁰ Schneider 2011:14
- ⁴¹ Lang 2001b
- ⁴² *ibid.*
- ⁴³ [Cambodia News Online 2009](#)
- ⁴⁴ WRM 2002
- ⁴⁵ *ibid.*
- ⁴⁶ O'Keefe 2009:6
- ⁴⁷ CHRAC 2009
- ⁴⁸ Schneider 2011:15
- ⁴⁹ *ibid.*:8
- ⁵⁰ NGO Forum on Cambodia 2010
- ⁵¹ Ngo S & Chan S 2010
- ⁵² H.E. Chhan Saphan, Menteri Negara di Kementerian Pengelolaan Lahan, Perencanaan dan Pembangunan Perkotaan, dalam pertemuan *Technical Working Group on Land* bulan Maret 2007 bahwa Mong Reththy Investment Cambodia Palm Oil (MRICOP) adalah satu-satunya konsesi lahan ekonomi yang telah berhasil.
- ⁵³ WRM 2005
- ⁵⁴ Lang 2001
- ⁵⁵ Indigenous People NGO Networks, 2010
- ⁵⁶ Publikasi ini merupakan kompilasi informasi dari NGO lokal dan internasional yang bergerak di berbagai sektor di Kamboja. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi <ngoforum.org.kh>
- ⁵⁷ CDCF adalah forum tingkat tinggi antara Pemerintah Kerajaan Kamboja dan Mitra Pembangunannya untuk membicarakan perkembangan pembangunan di Kamboja dan mobilisasi bantuan.
- ⁵⁸ NGO Forum on Cambodia 2010

3. Pengembangan Kelapa Sawit di Vietnam

Vo Thai Dan¹

Pengantar

Vietnam terletak di dekat Khatulistiwa dan terbagi menjadi dataran tinggi di bagian utara dan dataran rendah pesisir di bagian selatan. Hutan tropis meliputi 42% dari total luas permukaan (325.360 km²). Kondisi cuaca berkisar dari tropis di sebelah selatan dan musiman di sebelah utara dengan musim hujan yang panas dan musim kemarau yang hangat. Terletak di zona ekonomi Indomalaya, Vietnam merupakan rumah bagi berbagai flora dan fauna khas. Jumlah penduduk di Vietnam adalah sekitar 85 juta jiwa, di mana 60% di antaranya bekerja di sektor pertanian. 25 juta ha lahan di Vietnam digunakan untuk keperluan pertanian, 3,4 juta ha untuk keperluan non-pertanian, dan 4,7 juta ha terdiri dari lahan yang tidak terpakai. Tingkat iklim, suhu, dan kelembaban di Vietnam menjadikannya sesuai untuk perkebunan tanaman tropis seperti kelapa sawit.

Saat ini, budidaya kelapa sawit di Vietnam masih berada pada tahap percobaan sehingga tidak banyak dampak sosial dan lingkungan negatif yang dihasilkan dari pengembangan produksi minyak sawit telah didokumentasikan. Berdasarkan literatur yang tersedia dengan jumlah yang sangat terbatas, laporan ini berupaya untuk memprediksi potensi masa depan dari pengembangan budidaya kelapa sawit untuk tujuan komersial di Vietnam dan dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat lokal dan lingkungan.

Minyak sawit dan RSPO

Menurut *the Center for People and Forests (RECOFTC)*, ekspansi kelapa sawit merupakan penggerak utama penebangan hutan di kawasan Asia Tenggara. Lebih dari lima juta hektar lahan di Malaysia telah ditanami kelapa sawit dengan ekspansi lebih lanjut yang direncanakan di Sarawak. Lebih dari tujuh juta hektar lahan di Indonesia telah ditanami kelapa sawit dan perencanaan provinsi telah mencatat tambahan lahan seluas dua puluh juta hektar untuk pengembangan kelapa sawit. Thailand dan Papua Nugini saat ini

juga tengah sibuk untuk mengembangkan tanaman ini, dan ada inisiatif untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kamboja, Vietnam, dan Filipina.

Sebagian besar dari ekspansi ini terjadi di kawasan “hutan”, di mana orang memiliki hak atas lahan dan sumber daya alam yang lemah atau tidak diakui. Ekspansi ini telah menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang serius dalam hal hilangnya hutan dan keanekaragaman hayati, perampasan lahan masyarakat dan pelanggaran hak dan eksploitasi tenaga kerja, khususnya perempuan dan pendatang/migran. Selama ini, keterlibatan masyarakat sipil yang berkelanjutan dengan dialog-dialog industri dan nasional tentang minyak sawit sebagian besar telah terjadi di Indonesia dan pada tingkat lebih rendah di Malaysia.

Menyadari kebutuhan akan penetapan standar dan akuntabilitas dalam produksi minyak sawit berkelanjutan, *the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* didirikan pada tahun 2004 oleh *the World Wildlife Fund (WWF)* dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi, pengolahan, dan ritel minyak sawit. RSPO adalah suatu badan multi-stakeholder yang di satu sisi berupaya untuk memperbaiki praktek-praktek perusahaan, tetapi di sisi lain berupaya untuk melegitimasi ekspansi berkelanjutan.² RSPO telah mengadopsi delapan prinsip, tiga puluh sembilan kriteria dan lebih dari seratus dua puluh indikator untuk minyak sawit yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan serta sistem sertifikasi dan indikator untuk petani kemitraan dan mandiri.

RSPO menegaskan hak-hak masyarakat adat atas tanah adat mereka, mensyaratkan pembebasan lahan dan ganti rugi atas konflik, dan menekankan bahwa tidak ada lahan yang dapat diambil dari masyarakat adat tanpa keputusan bebas, didahului dan diinformasikan (*free, prior and informed consent/FPIC*) mereka, yang diungkapkan melalui perwakilan mereka sendiri yang dipilih secara bebas. Meskipun keterlibatan masyarakat sipil dalam proses ini telah menjamin beberapa perolehan penting untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat, masih ada sejumlah keprihatinan bahwa proses-proses RSPO memerlukan pemeriksaan ulang dan perbaikan lebih lanjut agar tujuannya dapat dicapai.³

Studi kasus negara mengenai minyak sawit di Vietnam ini memberikan kontribusi terhadap beberapa tujuan RSPO berikut:

- Meningkatkan kesadaran tentang hak, kepemilikan, proses pembebasan tanah, dan konsekuensi sosio-ekonomi dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit yang mungkin terjadi di masa depan
- Mengungkapkan masalah dari berbagai sektor dan solusi yang mungkin termasuk melalui RSPO, tetapi juga, yang lebih penting, melalui reformasi kerangka kerja yang diperlukan untuk mengatur sektor tersebut
- Memperkuat mobilisasi sosial untuk mempertahankan lahan dan hutan dari perusahaan predator

Minyak sawit dalam kebijakan negara dan pasar

Sejarah minyak sawit di Vietnam: kebijakan dan target pemerintah

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) pertama kali diperkenalkan ke Vietnam oleh Perancis pada tahun 1878 dan digunakan terutama sebagai tanaman hias. Meskipun kini ada beberapa kebijakan terkait dengan pengenalan dan pengembangan kelapa sawit dalam sistem penanaman sebagai tanaman industri yang potensial dan bernilai komersial, budidaya kelapa sawit di Vietnam masih berada pada tahap percobaan.

Kelapa sawit telah muncul sesekali dalam kebijakan pemerintah selama lima dekade terakhir, dimulai pada tahun 1962, ketika Presiden Ho Chi Minh memerintahkan Kementerian Pertanian (yang sekarang dikenal sebagai Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan) untuk meneliti dan mengembangkan kelapa sawit. Pada tahun 1967, Vietnam mengimpor kelapa sawit Dura dari China untuk ditanam di tiga perkebunan percobaan di provinsi Thanh Hoa, Hung Yen dan Nghe An. Pada bulan Maret 1971, kelapa sawit telah ditanam untuk keperluan penelitian di distrik Huong Son, provinsi Ha Tinh.

Kotak 1: Tonggak Utama dalam Kerangka Kerja Kebijakan dan Hukum

Agustus 1991:	UU tentang perlindungan dan pengembangan hutan yang disahkan oleh Majelis Nasional ke-8, yang menandai suatu upaya untuk melibatkan masyarakat lokal dan berbagai sektor ekonomi dalam perlindungan dan pengembangan hutan.
Juli 1993:	UU tanah yang disahkan oleh Majelis Nasional ke-9, menetapkan hak-hak pemilik untuk menyewakan, menukar, mewariskan, menggadaikan, dan mengalihkan hak guna lahan.
Januari 1994:	Dekrit pemerintah 02/CP tentang alokasi lahan hutan bagi organisasi lokal, rumah tangga, dan individu.
Januari 1995:	Dekrit pemerintah 01/CP tentang alokasi lahan melalui kontrak untuk keperluan pertanian, kehutanan, dan budidaya perikanan.
Nopember 1999:	Dekrit pemerintah 163/1999/ND-CP tentang alokasi lahan dan sewa untuk keperluan kehutanan.
Nopember 2003:	UU tanah yang disahkan oleh Majelis Nasional ke-11, yang mengakui status hukum masyarakat dalam kepemilikan lahan.
Desember 2004:	UU tentang perlindungan dan pengembangan hutan yang disahkan oleh Majelis Nasional ke-11, yang mengakui properti umum sebagai suatu pengaturan pengelolaan hutan yang sah.

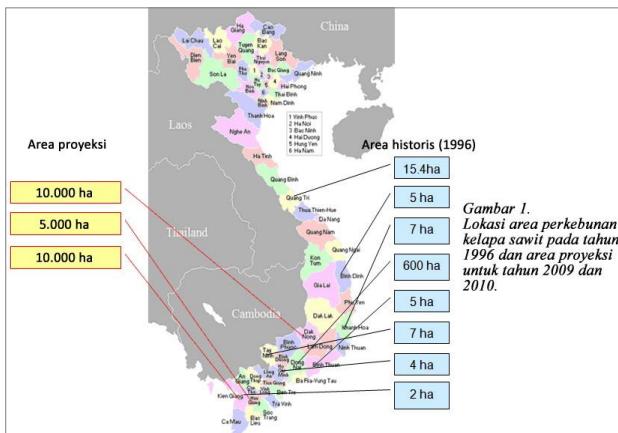
Sumber: Nguyen, Nguyen & Tran 2008

Dari tanggal 17 hingga 19 Nopember 1980, Kementerian Pertanian menyelenggarakan konferensi yang berfokus pada kelapa sawit di provinsi Ha Tinh dan menyimpulkan bahwa kelapa sawit dapat dibudidayakan dari Ha Tinh hingga ke daerah selatan Vietnam. Pada tahun 1981, hasil konferensi tersebut dilaporkan ke Perdana Menteri yang kemudian setuju untuk memulai budidaya kelapa sawit dalam skala besar. Selanjutnya, pada tahun 1986, pemerintah menugaskan sebuah proyek bernama “Kajian tentang adaptasi kelapa sawit yang tumbuh di selatan Vietnam” untuk Institut Penelitian Minyak Nabati Vietnam dalam rangka membangun dasar ilmiah bagi perencanaan dan pengembangan kelapa sawit di Vietnam.

Seperti disebutkan sebelumnya, saat ini tidak ada CPO komersial yang sedang diproduksi di Vietnam. Setiap tahunnya, Vietnam mengimpor lemak nabati dalam jumlah besar dengan nilai lebih dari 700 juta dolar AS, di mana kelapa sawit yang diimpor dari Indonesia dan Malaysia memberikan sumbangan sebesar 77,88%. Produksi kelapa sawit tetap berada dalam masa percobaan dan belum diperluas secara komersial karena beberapa alasan. Pertama, diperlukan penelitian dan percobaan yang terperinci dan praktis sebelum kelapa sawit dapat diolah sebagai tanaman komersial yang layak. Kedua, sudah ada beberapa tanaman industrial bernilai tinggi yang menempati lahan yang luas di Vietnam, seperti kopra, kedelai, kacang tanah dan wijen. Masih harus ditetapkan sampai sejauh mana lahan yang cocok untuk menumbuhkan kelapa sawit dapat bersaing dengan lahan untuk tanaman bernilai tinggi lainnya. Terakhir, dan terkait dengan poin sebelumnya, tidak banyak lahan tidak terpakai yang tersedia untuk budidaya kelapa sawit akibat produksi massal dari tanaman bernilai tinggi lainnya.

Terlepas dari keterbatasan-keterbatasan tersebut, budidaya kelapa sawit untuk mengembangkan *bio-oil* sedang dipertimbangkan sebagai sebuah pilihan oleh pemerintah Vietnam. Pada tanggal 20 Nopember 2007, Perdana Menteri menyetujui sebuah proyek yang bertajuk “Pengembangan bahan bakar nabati untuk tahun 2015, visi untuk 2025”. Proyek ini menunjukkan bahwa produksi etanol dan lemak nabati (dari beragam jenis bahan berminyak, bukan hanya kelapa sawit) harus mencapai 1,8 juta ton agar dapat memenuhi 5% dari kebutuhan bahan bakar negara.

Pemerintah juga memberikan hak-hak kepada Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan untuk bergabung dengan Kementerian Industri dan Perdagangan dan Kementerian Perencanaan dan Portal Investasi untuk merencanakan dan mengembangkan daerah bagi industri bahan bakar nabati Vietnam di masa depan. Pemerintah menginvestasikan dana senilai 259,2 miliar Dong Vietnam/VND (28,8 miliar dolar AS per tahun) untuk proyek berjangka sembilan tahun yang akan berlangsung mulai 2007 hingga 2015.



*Gambar 1.
Lokasi area perkebunan kelapa sawit pada tahun 1996 dan area proyeksi untuk tahun 2009 dan 2010.*

Perkebunan kelapa sawit saat ini dan yang akan datang

Meskipun saat ini belum ada produksi minyak sawit komersial yang dapat didokumentasikan di Vietnam, beberapa peristiwa penting dalam budidaya kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir dapat diidentifikasi. Pada tahun 1978, kelapa sawit ditanam dalam jumlah sedikit sebagai tanaman model di provinsi Nghe An, Quang Tri, Binh Dinh, Khanh Hòa, dan Dong Nai. Pada tahun 1980, kelapa sawit terus diimpor dan ditanam untuk percobaan di beberapa provinsi di selatan Vietnam. Pada tahun 1996, daerah kelapa sawit yang dibudidayakan adalah sebesar 650 hektar, termasuk 600 hektar di Xuan Loc (Đồng Nai), 5 hektar di Ham Tan (Thuan Hai), 7 hektar di Suoi Trau (Khanh Hoa), 5 hektar di Phu Cat (Binh Dinh), 4 hektar di Kota Ho Chi Minh, 7 hektar di Tay Ninh, dan 2 hektar di Kien Giang. Pada tahun 2001, kelapa sawit telah ditanam di atas lahan seluas 56,7 hektar di Dong Hektar (Quang Tri). Namun, daerah ini berkurang menjadi 15,4 hektar pada tahun 2007. Akibatnya, Vietnam saat ini memiliki perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari 650 hektar. Meskipun saat ini tampak tidak berarti, luasan ini dapat berperan sebagai landasan bagi ekspansi kelapa sawit lebih lanjut dalam waktu dekat ini.

Baru-baru ini, pada tahun 2009, komite rakyat Dak Nong berencana untuk mengembangkan kelapa sawit di atas lahan seluas 10.000 hektar di distrik Dak G'Long. Proyek ini ditangani oleh CT Group dari Malaysia. Pada periode pertama, CT Group akan menanam

kelapa sawit di atas lahan seluas 2.000 sampai 4.000 hektar, jika kondisinya memungkinkan untuk proyek tersebut. Mulai dari 2010 hingga 2015, Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan dari proyek-proyek Hau Giang merencanakan untuk membangun daerah pertanian berteknologi tinggi seluas 5.000 hektar, yang mana semuanya akan ditanami dengan kelapa sawit untuk menghasilkan lemak nabati dan *bio-oil*. Para investor berencana untuk mengembangkan produksi minyak sawit di Bac Lieu, Kien Giang dengan meningkatkan luas daerah perkebunan hingga mencapai 10.000 hektar.

Tanaman lemak nabati

Di Vietnam, lemak nabati terutama dihasilkan dari kopra, kedelai, kacang tanah, dan wijen. Produksi pertanian domestik tidak mampu menyediakan pasokan yang cukup untuk konsumsi lemak nabati lokal dan sebagai hasilnya, bahan berminyak (termasuk minyak sawit mentah) yang digunakan oleh hampir semua perusahaan lemak nabati harus diimpor.

Pada tahun 2008, Vietnam memiliki 35 perusahaan pengolahan lemak nabati di tiga belas provinsi dengan potensi kapasitas sebesar 1.129.000 ton minyak olahan per tahun (kapasitas sebenarnya hanya 51,3% dari kapasitas total) dan 2.969.000 ton bahan berminyak (kapasitas sebenarnya hanya 35,3%), yang setara dengan 85.000 ton lemak nabati mentah. Di antara mereka, perusahaan Vocarimex beserta anak perusahaan dan usaha patungannya menghasilkan 78,74% dari total minyak olahan dan 23,24% dari total lemak nabati mentah.

*Gambar 2. Produksi tanaman minyak di Vietnam tahun 2008
(sumber: FAO 2010)*

	Luas pemanenan (ha)	Hasil (kg/ha)	Produksi (ton)	Biji (ton)
Biji jarak	7.000	714	5.000	105
Kelapa	138.300	7.852	1.086.000	
Biji kapas			4.595	920
Kacang tanah dengan	256.000	2.085	533.800	15.360

kulit				
Kapas	5.200	1.327	6.900	
Biji wijen	45.000	489	22.000	450
Kedelai	191.500	1.403	268.600	6.702

Lemak nabati Vietnam memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan dengan daya saing minyak dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, karena Vietnam harus mengimpor lebih dari 90% bahan baku lemak nabatinya, di antaranya kelapa sawit yang utamanya diimpor dari Malaysia dan Indonesia. Hampir semua perusahaan minyak di Vietnam mengimpor minyak olahan untuk menghasilkan produk akhir.

Pasar impor dan ekspor

Sejak tahun 2000 hingga 2008, tingkat impor minyak di Vietnam meningkat rata-rata 12,6% per tahun, sedangkan tingkat ekspor minyak menurun secara bertahap. Oleh karena itu, kesenjangan perdagangan dalam industri minyak Vietnam sangatlah tinggi. Pada tahun 2008, omzet ekspor industri minyak mencapai 700 juta dolar AS. Berdasarkan proyeksi untuk lemak nabati, Vietnam harus mengimpor minyak mentah senilai lebih dari 1 miliar dolar pada tahun 2025 jika negara ini tidak mengembangkan perkebunan penghasil minyaknya sendiri. Pada tahun 2020, Vietnam diperkirakan akan menghasilkan 1.420.000-1.730.000 ton minyak olahan, 280.000-430.000 ton minyak mentah (terutama dihasilkan dari berbagai bahan berminyak impor, termasuk minyak sawit mentah) dan akan mengekspor 60.000 ton minyak. Pada tahun 2025, Vietnam akan mampu menghasilkan 1.680.000-2.130.000 ton minyak olahan dan 320.000-520.000 ton minyak mentah dan akan mengekspor 80.000 ton minyak. Namun, harus diingat bahwa data terpisah pada prediksi ini sulit diperoleh dan diverifikasi.

Perusahaan minyak utama di Vietnam adalah *National Company for Vegetable oils, Aromas and Cosmetic of Vietnam* (Vocarimex). Usaha patungannya meliputi Golden Hope Nha Be Edible Oils., Ltd, Cai Lan Oils & Fats Industries Co., Ltd, dan LG VINA Cosmetics. Kelompok usaha ini memegang 95% saham minyak goreng dan 20% saham parfum di pasar domestik. Mereka saat ini memiliki kapasitas pabrik untuk mengolah 828.000 ton minyak makan (*edible*

oil), terutama dari bahan berminyak impor, termasuk minyak sawit mentah dari Indonesia dan Malaysia. Diharapkan pada tahun 2015, kapasitas perusahaan-perusahaan ini dapat meningkat menjadi 1,5 juta ton minyak. Namun, data terpisah mengenai berapa banyak minyak sawit yang sedang diproses tidak tersedia.

Peran Negara

Konstitusi Vietnam 1980 memberikan semua hak atas tanah pada negara. Prinsip ini merupakan bagian dari UU Tanah 1988, tetapi dinyatakan kembali sebagai “kepemilikan rakyat” dan “pengelolaan negara” dalam Konstitusi 1992 dan UU Tanah 1993. Karena pemerintah pusat dan lokal menggunakan hak kepemilikan lahan atas nama rakyat, mereka juga memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, dan menjual tanah. Sambil tetap mempertahankan kendali tertinggi atas peraturan dan kebijakan, pemerintah pusat telah menyerahkan pengelolaan lahan pada Komite Rakyat. Otoritas lokal juga bertanggung jawab atas penyusunan peraturan zonasi dan penggunaan lahan, pendaftaran, dan penyelesaian jenis sengketa penggunaan lahan tertentu.

Secara keseluruhan, negara masih mendominasi pengelolaan sumber daya hutan. Masyarakat lokal harus mendaftar ke suatu badan negara untuk memperoleh sertifikat tanah, negara menentukan penggunaan sumber daya hutan yang sudah dialokasikan bagi masyarakat lokal, hutan-hutan kualitas terbaik dilaporkan dimiliki oleh aktor-aktor negara dan kepemimpinan desa yang dipilih oleh negara memainkan peran yang dominan dalam perundingan yang berhubungan dengan lahan. Akibatnya, kebijakan-kebijakan alokasi lahan (hutan) dulu dan sekarang belum mampu memberikan kuasa yang diperlukan atas pemanfaatan dan pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal.

Reformasi kebijakan pertanahan Vietnam

Pada bulan Desember 1986, pada Kongres Nasional keenam, pemerintah Vietnam mengenalkan sejumlah kebijakan dengan cakupan luas yang dikenal sebagai “*doi moi*” (“pembaruan” atau “inovasi”). Dirancang sebagai tanggapan terhadap beberapa kegagalan perencanaan pusat, reformasi *doi moi* dimaksudkan untuk secara bertahap meliberalisasi ekonomi Vietnam. Terkait dengan reformasi ini adalah UU Tanah 1993 (dan revisi tahun 1998), yang mengikuti “Resolusi 10” tahun 1988, yang meresmikan rumah tangga tani sebagai unit utama dari produksi pertanian dan menyediakan alokasi hak-hak guna lahan bagi rumah tangga tersebut. Hak-hak guna lahan ini memberikan rumah tangga terkait hak untuk mengambil keputusan terkait pembelian dan penggunaan sarana, penjualan hasil, dan, hingga tingkat tertentu, penggunaan lahan.

Beberapa amandemen UU Tanah tahun 1998 membagi lahan menjadi 6 kategori: lahan hutan, lahan pertanian, lahan pemukiman pedesaan, lahan perkotaan, lahan khusus dan lahan tidak terpakai. Lahan hutan lebih lanjut diklasifikasikan sebagai lahan berhutan dan lahan tidak berhutan yang direncanakan untuk reboisasi. UU Tanah 1998 membedakan “hutan tanaman” dan “hutan alam”. Ini mengizinkan organisasi, tetapi bukan perorangan, untuk memanfaatkan nilai kayu yang tumbuh di lahan hutan yang dialokasikan untuk keperluan agunan. Organisasi juga dapat menggunakan lahan sebagai kontribusi modal untuk proyek patungan usaha kehutanan. Pada bulan Nopember 2001, pemerintah merevisi UU Tanah ini lagi, yang mengizinkan bank-bank asing untuk mengambil hak guna lahan sebagai jaminan untuk pinjaman dan membantu pembentukan pasar tanah.

UU Pertanahan (1993)

UU Pertanahan (1993) didasarkan pada enam prinsip utama yang mengatur masalah-masalah tanah:

- (1) tanah adalah milik seluruh rakyat;
- (2) tanah diurus secara seragam oleh negara;
- (3) yang mendorong penggunaan yang efektif dan ekonomis. Lebih lanjut,
- (4) negara melindungi lahan pertanian;
- (5) mendorong investasi pada tanah; dan
- (6) menetapkan nilai tanah.

UU Pertanahan 1993 mengizinkan otoritas provinsi untuk menentukan penggunaan lahan dan mengalokasikan atau menyita tanah yang sesuai. Wewenang tersebut, bersama dengan kebutuhan pemerintah provinsi dan perusahaan kehutanan untuk menghasilkan pendanaan mereka sendiri, telah menyebabkan peningkatan penanaman tanaman komersial, termasuk tanaman industri, tetapi seringkali dengan mengorbankan ekonomi subsisten masyarakat pedesaan tempatan. Sebagai contoh, di provinsi Song Be, salah satu provinsi yang paling terkenal di mata investor asing, investasi dalam proyek-proyek perkebunan telah menempati lahan yang luas, melemahkan hak para petani atas tanah dan secara efektif mengubah petani menjadi penggarap permanen ketimbang pemilik tanah yang sebenarnya.

Kecenderungan dalam produksi pertanian komersial...

Seperti yang disebutkan di atas, reformasi penguasaan lahan (*land tenure*) telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam daerah tanaman industri dari 1.135.300 ha pada tahun 1993 menjadi 2.632.500 ha pada tahun 2007. Namun, produksi pertanian komersial berupa tanaman komersial (seperti padi, kopi, karet, jambu mete, dan lada) telah dilakukan dengan mengorbankan produksi pertanian subsisten. Hasilnya berupa diversifikasi dan intensifikasi penggunaan lahan, peralihan dari tanaman tradisional ke tanaman komersial bernilai tinggi dengan adopsi teknologi baru dan penggunaan intensif dari pupuk, pestisida, varietas dengan hasil tinggi dan pembajakan dengan traktor. Hal ini menjadi praktik yang semakin umum di kalangan petani serta masyarakat adat yang secara tradisional melakukan rotasi pertanian untuk keperluan subsisten. Kebanyakan perkembangan pertanian intensif dan pertumbuhan pertanian telah didorong oleh reformasi kebijakan pertanahan, reformasi harga, liberalisasi pasar, integrasi dalam perekonomian global dan kekuatan pasar eksternal. Sejak tahun 2001, investasi dalam sumber energi terbarukan, termasuk kelapa sawit, telah berkembang pesat.

...dan isu ‘tanpa tanah’

Kebijakan reformasi pertanahan secara berturut-turut sejak tahun 1988 telah cenderung mengurangi fragmentasi lahan, dan memungkinkan ukuran kepemilikan lahan yang lebih luas, hak guna lahan yang lebih lama, dan penggunaan lahan yang lebih fleksibel. Dampak kebijakan ini dapat dilihat dalam bentuk pertanian yang lebih luas, dan meningkatnya tekanan atas perubahan dalam penggunaan lahan dari subsisten ke tanaman makanan pokok dan tanaman komersial industri, seperti jagung, kedelai, singkong, ubi jalar, dan kacang tanah.

Namun, ketidak-seimbangan dalam kepemilikan lahan juga mengalami peningkatan, yang menciptakan kesenjangan yang kasar mata antara orang miskin yang tidak memiliki lahan dengan orang kaya pemilik lahan. Konsolidasi dan akumulasi lahan oleh keluarga dan individu kaya selanjutnya meningkatkan jumlah rumah tangga pedesaan yang tidak memiliki lahan. Terdapat bukti bahwa persentase petani yang tidak memiliki lahan, terutama di delta Mekong, mengalami peningkatan di Vietnam. Survei yang dilakukan oleh Kantor Statistik Pemerintah pada tahun 1994 dan 1998 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang tidak memiliki lahan telah meningkat dari 12.250 rumah tangga tani atau 0,7% dari total populasi Mekong, menjadi lebih dari 1.000.000 rumah tangga tani atau 6% dari populasi wilayah tersebut.

Suku minoritas di Vietnam

Banyak dilaporkan bahwa suku minoritas di Vietnam memperoleh kepastian yang kurang dalam hal lahan dan hutan dibandingkan dengan mayoritas nasional (*Kinh*). Para pejabat juga mengakui adanya kesenjangan kekayaan yang semakin besar antara *Kinh* dan suku minoritas. Kebijakan negara masih ditujukan untuk mengakhiri perladangan berpindah dan membawa suku minoritas ini keluar dari keadaan mereka yang ‘terbelakang’. Pengetahuan tradisional terkait dengan hutan dan sistem adat bagi pemanfaatan lahan tidak didukung. Meskipun pengakuan hak di dalam hutan dan alokasi lahan telah menjadi milik individu, suku minoritas cenderung untuk dikecualikan dari hak kepemilikan mereka, khususnya, perempuan dari suku minoritas, beberapa dari mereka telah melapor bahwa mereka merasa kehilangan haknya melalui proses alokasi lahan.

Individualisasi kepemilikan lahan dalam reforma agraria telah menyebabkan suku minoritas kehilangan akses terhadap lahan di pasar tanah yang terjadi kemudian, seperti dilaporkan terjadi di kalangan Hmong, suku minoritas Vietnam terbesar. Hal ini disebabkan orang-orang miskin telah menjual lahan untuk keluar dari kesulitan keuangan jangka pendek dan karena sistem yang baru mengharuskan agar petani individu atau pemilik properti memiliki pengetahuan yang kuat tentang pengelolaan dan, sebaiknya, ‘koneksi’ yang baik. Tak pelak lagi, banyak orang dari suku minoritas ditakdirkan untuk kalah dalam kompetisi atas sumber daya yang langka.

Kebijakan yang mendukung investasi modal dan mengizinkan usaha patungan dan perusahaan untuk menguasai lahan dan hutan, dan terlibat dalam perkebunan komersial di daerah-daerah yang telah dihuni oleh suku minoritas dari generasi ke generasi, saat ini sedang berkembang. Sangat penting untuk membuat para pemangku kepentingan kunci dan pembuat keputusan sadar akan praktek-praktek adat dari kelompok-kelompok suku dalam perencanaan, pengelolaan, dan komersialisasi sumber daya hutan. Perkembangan lebih lanjut dalam hal ini akan tergantung pada pengembangan dan penyebarluasan pendekatan yang lebih peka budaya kepada suku minoritas, promosi penghormatan atas hak-hak adat, penguatan lembaga masyarakat, peningkatan pemahaman pejabat setempat atas hak kepemilikan dan pengelolaan, jaminan mekanisme pembagian manfaat yang adil dan pengembangan paket bantuan yang lebih komprehensif dan akses yang lebih jelas ke pasar bagi suku minoritas ini.

Tanah dan ideologi

Di Vietnam, debat mengenai tingkat reformasi lahan yang diinginkan terkait erat dengan sikap ideologis negara maupun upaya pengentasan kemiskinan. Kepemilikan rakyat dan pengelolaan negara atas lahan merupakan prinsip-prinsip utama dari doktrin Komunis yang menjadi landasan definisi hukum kepemilikan dan penggunaan lahan. Isu-isu doktrinal adalah yang paling kasat mata dalam peraturan pedesaan dan lahan penghasil pemasukan lainnya. Akibatnya, kebijakan pertanahan di Vietnam menjadi isu yang sensitif secara politis dan sangat rumit. Selain itu, rejim hukum pertanahan di Vietnam sangatlah kompleks. Hal ini telah dilaporkan sebagai kendala serius bagi kemampuan masyarakat lokal untuk memahami dan bertindak berdasarkan hak-hak mereka serta meminta ganti rugi dalam kasus pelanggaran hak.

Pengelolaan tanah negara yang terus berlanjut berakar pada kepdulian atas produktivitas lahan, ketahanan pangan nasional dan ideologi Sosialis. Aksioma bahwa negara memiliki tugas untuk “mengelola” (*quan ly*) lahan mendasari semua hukum dan kebijakan pertanahan. Doktrin sosialis memperlakukan lahan, bersama dengan sumber daya penghasil pemasukan lainnya, sebagai “alat produksi khusus” (*tu lieu san xuat dac biet*) yang harus dikelola oleh negara untuk menjamin produktivitas maksimum. Penggunaan lahan harus menyeluruh (*day du*), dengan kata lain, semua lahan harus digunakan; dan penggunaan lahan harus masuk akal (*hop ly*), dengan kata lain, lahan harus ditanami secara efisien dengan tanaman dan rotasi yang sesuai serta dengan memberikan perhatian bagi keberlangsungan tingkat kesuburan lahan. Dalam praktiknya, hal ini ditentukan oleh sejumlah larangan penggunaan lahan yang dirinci dalam sertifikat hak guna lahan.

Lama setelah perencanaan pusat dibongkar dalam pasar komoditas, paham Marxis-Leninis dalam manfaat dari alokasi yang diarahkan negara tetap terkandung di dalam “pengelolaan lahan negara” (*quan ly nha nuoc ve dat dai*). Ada pandangan-pandangan yang saling bertentangan mengenai sampai sejauh mana penggunaan lahan menjadi domain individu, atau dikuasai oleh negara. Meskipun demikian, pentingnya pengelolaan lahan negara bagi kebijakan pemerintah tetap menjadi hal terpenting.

Hak guna masyarakat

Konstitusi Vietnam mengamanatkan bahwa tanah milik seluruh rakyat dengan negara yang berperan sebagai perwakilan mereka. Namun, isu-isu hukum yang terkait dengan hak guna masyarakat berikut perlu menjadi catatan:

KUHPerdata 2005 tidak mengakui masyarakat sebagai subyek hubungan hukum perdata meskipun peraturan hukum menetapkan kepemilikan bersama oleh masyarakat. Hal ini terutama bermasalah dalam sudut pandang konsep adat tentang tanah yang dimiliki dan dikelola secara kolektif, seperti yang dijelaskan di atas.

UU Pertanahan dan UU Perlindungan dan Pengembangan Hutan memberikan masyarakat hak dan tanggung jawab yang sama dengan pengguna lahan yang lain (yakni dapat mengeksplorasi dan menikmati manfaat sumber daya yang dimaksud), tetapi mereka tidak dapat menukar, mengalihkan, menyewakan atau mendonasikan hak guna hutan mereka. Di samping itu, mereka tidak dapat menggadaikan, memberikan jaminan atau menggunakan lahan di bawah pengelolaannya sebagai suatu kontribusi untuk investasi bersama. Masyarakat juga tidak dapat membagi hutan tersebut di antara para anggotanya.

Seperti yang disebutkan dalam laporan IUCN tahun 2008 tentang Hak atas Hutan menurut UU dan Adat di Vietnam, praktik alokasi lahan dan hutan pada masyarakat pedesaan menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk: (i) apakah masyarakat terkait meliputi semua rumah tangga dan individu yang tinggal di desa tersebut, atau hanya sekelompok rumah tangga dan individu; (ii) apakah suatu masyarakat desa dapat dialokasikan daerah hutan lain di samping yang memenuhi kondisi alokasi (iii) mekanisme resolusi konflik apa yang tersedia dalam kasus konflik penggunaan lahan dan hutan antara masyarakat dan aktor lain; dan iv) mekanisme apa yang ada untuk menjamin pembagian manfaat yang adil di antara masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini mencerminkan kerancuan dan masalah penafsiran berikutnya dari ketetapan hukum Vietnam yang selanjutnya meningkatkan kendala bagi pengelolaan hutan dan perkebunan yang adil dan berkelanjutan di Vietnam.

Masalah-masalah dengan penguasaan lahan dan kepastian lahan

Salah satu kesulitan yang muncul dengan sistem kepemilikan yang ada adalah bahwa meskipun ada kewenangan konstitusional dan hukum untuk mengalihkan hak guna lahan, prosedur administratif yang tidak jelas ditambah dengan doktrin “pengelolaan lahan negara” memberlakukan suatu “persetujuan administratif tentang pengalihan”. Proyek reformasi lahan sebelumnya telah menyimpulkan bahwa kecuali pendekatan konsesi terhadap pengelolaan lahan berubah, birokrat akan terus melanggar atau mengabaikan hak atas lahan menurut UU. Secara keseluruhan, hak atas lahan dalam prakteknya masih tetap tidak aman karena otoritas lokal telah mempertahankan kendali atas lahan melalui kuasa mereka atas sertifikasi, pembatasan penggunaan lahan dan perampasan lahan untuk proyek infrastruktur. Tambahan pula, hanya sedikit yang diketahui tentang sejauh mana reformasi tenurial semacam itu telah berjalan pada prakteknya dan bagaimana reformasi tenurial ini telah mempengaruhi penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. UU Pertanahan 1993 belum dilaksanakan secara merata dan sangat bervariasi antar daerah. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan UU Pertanahan meliputi peraturan tanah yang rancu dan tidak konsisten, keputusan dan petunjuk lokal yang tidak konsisten, prosedur pelaksanaan yang rumit, pendekatan *top-down*, dan kekurangan-kekurangan dalam tata kelola. Salah satu konsekuensi dari hal ini adalah bahwa masyarakat lokal tampaknya memiliki pemahaman dan kesadaran yang sangat terbatas tentang hak-hak atas lahan dan sumber daya mereka. Tambahan pula, ada kekurangan serius akan informasi yang tersedia terkait dengan resolusi konflik atau sengketa dan mekanisme ganti rugi bagi masyarakat lokal yang hak atas lahan dan tanahnya mungkin dilanggar. Kepemilikan lahan yang tidak merata juga telah muncul sebagai aspek yang bermasalah dari penguasaan lahan di Vietnam. Beberapa rumah tangga telah secara ilegal menggunakan hutan di dekat pemukiman mereka untuk keperluan penanaman, karena potensi persediaan lahan baru untuk ditanami di desa telah menjadi langka dan permintaan lokal akan lahan pertanian telah tumbuh secara signifikan karena pertumbuhan penduduk dan ekspansi pertanian komersial. Tidak memiliki tanah telah menjadi salah satu hasil negatif dari pembelian lahan secara resmi maupun tidak resmi oleh rumah tangga kaya.

Permasalahan terkait kehutanan

Meskipun ada pendeklasian relatif pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal dan integrasi langkah-langkah pengentasan kemiskinan ke dalam kegiatan kehutanan, sejumlah masyarakat lokal masih menghadapi rintangan dalam hal pemahaman dan kemampuan untuk melaksanakan hak-hak mereka atas lahan dan sumber daya. Bidang yang menjadi perhatian meliputi:

Ketidak-konsistensi antara dokumen-dokumen hukum yang berbeda: Beberapa ketetapan dalam dokumen hukum yang berbeda bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, masyarakat lokal diakui secara hukum sebagai pemilik hutan di dalam UU Perlindungan dan Pengembangan Hutan, tetapi tidak diakui di dalam KUHPerdata 2005.

Kerancuan dan perubahan dalam peraturan kehutanan negara: Sistem dokumen hukum normatif untuk pengelolaan hutan merupakan sistem yang rumit dan dapat berubah-ubah. Beberapa ketetapan masih bersifat umum dan kekurangan petunjuk pelaksanaan. Yang lain, termasuk ketetapan-ketetapan mengenai penilaian hutan, nilai hak guna hutan, dan nilai hutan tanaman produksi, terlalu rumit untuk memungkinkan pemahaman dan kepatuhan yang tersebar luas. Kebingungan menandakan bahwa otoritas lokal tidak mampu melaksanakan beberapa kebijakan negara, terutama kebijakan terkait perubahan kegunaan hutan, pembagian manfaat dengan rumah tangga dan individu, dan regenerasi serta penanaman hutan.

Suatu kerangka hukum yang tidak jelas: Banyak dokumen hukum yang dapat mengalami penafsiran yang beragam, terutama karena bahasanya yang rumit. Keputusan 178/2001/QD-TT, contohnya, dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban pemilik hutan, tetapi banyak orang yang melaporkan temuan berupa rumusan untuk menghitung keuntungan bagi pemilik tertentu yang terlalu rumit untuk dapat dimengerti.

Program Reforestasi Lima Juta Hektar

[The Five Million Hectare Reforestation Programme (5MHRP)]

Tujuan:

- Secara efisien melindungi hutan seluas 9,3 juta ha yang ada;
- Menciptakan hutan dengan pemanfaatan khusus dan hutan lindung seluas dua juta hektar, sebagai perlindungan DAS dan untuk melindungi dari angin, pasir, dan gelombang. Satu juta hektar dari total lahan tersebut dibangun melalui regenerasi alami dan satu juta hektar sisanya melalui perkebunan;
- Menciptakan tiga juta hektar hutan produksi, di mana dua juta hektar di antaranya akan dijadikan perkebunan untuk menyediakan bahan baku kertas, tiang penyangga terowongan untuk pertambangan, kayu, dan satu juta hektar lainnya ditanami tanaman industri jangka panjang dan pohon buah-buahan;
- 50 juta pohon per tahun untuk ditanam di sekitar rumah, kantor, sekolah, dan di sepanjang jalan dan tanggul untuk menyediakan kayu bakar dan bahan untuk perabotan rumah tangga;
- Mempercepat penanaman hutan, menghijaukan kembali lahan yang gundul, melindungi hutan yang ada serta hutan baru, dan meningkatkan tututpan hutan menjadi lebih dari 40% di negara ini;
- Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemasukan pedesaan, mengembangkan produksi dan menjamin pertahanan dan keamanan nasional;
- Menciptakan daerah bahan baku dan mengembangkan industri untuk mengolah hasil hutan dan;
- Menciptakan hutan baru melalui sejumlah proyek lokal yang dirancang dengan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal karena masyarakat lokal merupakan tenaga penggerak untuk pembangunan, perlindungan, dan regenerasi hutan dan mereka berhak untuk menikmati manfaat dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hutan.

Permasalahan dengan 5MHRP

5MHRP mencakup proposal yang sangat ambisius untuk meningkatkan luas perkebunan komersial. Namun, selama lebih dari dua tahun di dalam program tersebut, tampaknya tidak ada studi apapun mengenai apa kegunaan perkebunan ini. Penyebab tambahan yang menjadi perhatian adalah bahwa pembuat kebijakan Vietnam, serta penasihat dan penyumbang dana internasional mereka, tampaknya tidak begitu berminat untuk mempelajari dampak perkebunan komersial pada masyarakat lokal, penghidupan, serta lingkungan mereka.

5MHRP tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan daerah hutan tanaman industri. Program ini juga menyatakan bahwa “alokasi lahan harus dilakukan secara terbuka dan demokratis”. Meskipun demikian, proyek-proyek di bawah program ini harus disetujui oleh Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (*MARD*). Ini juga berarti bahwa proyek-proyek tersebut harus sesuai dengan persyaratan birokratik pejabat-pejabat yang berbasis di Hanoi. Dengan demikian, ada bahaya bahwa pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal akan dikesampingkan dari rancangan proyek-proyek tersebut.

Secara khusus, ketika pejabat pemerintah melaksanakan alokasi lahan dan perencanaan penggunaan lahan di daerah masyarakat adat, anggapan bahwa kelompok suku minoritas yang mempraktekkan pertanian “tebang-bakar” merusak kawasan hutan begitu kental. Bagi kebanyakan pejabat pemerintah, lahan bekas ladang hanyalah “lahan yang tidak terpakai”. Masyarakat lokal dengan demikian kehilangan sebagian dari lahan pertanian mereka jika lahan tersebut dimaksudkan untuk reboisasi. Jika lahan bekas ladang ditanami dengan pohon, para petani tidak mempunyai pilihan ketika tiba saatnya untuk menggunakan kembali lahan tersebut selain untuk membuka lahan lain untuk tanaman mereka atau menebang pohon-pohon yang ditanam. Lebih lanjut, peraturan kepemilikan saat ini tidak mengizinkan kepemilikan bersama oleh masyarakat. Oleh karena itu, lahan umum beresiko diperlakukan melalui program alokasi lahan.

Penggunaan tanah secara adat

Otoritas lokal di Vietnam secara rutin menemukan diri mereka bergulat dengan isu-isu rumit yang terlibat dalam rekonsiliasi UU Pertanahan 1993 dengan pola dan hak penggunaan tanah secara adat. Ruang lingkup untuk sengketa tergolong besar karena pemilik adat dapat dengan gigih melawan alokasi hak-hak individual karena perbedaannya dari penggunaan dan kepemilikan tanah ulayat. Di daerah-daerah yang dihuni oleh suku minoritas, kecenderungan tersebut telah menjadi salah satu dari peningkatan kendali oleh negara atas lahan melalui pengaturan administrasi. Akibatnya, peran pengelolaan masyarakat telah dilemahkan secara serius. Sementara kecenderungan ini dapat meningkatkan peran negara, yang memberikan kontribusi bagi tatanan masyarakat dan keamanan, hal ini juga dapat menciptakan celah baru, yang merupakan ancaman sebagai suatu sumber ketidakadilan baru, terutama bagi suku minoritas di pedesaan. Karena undang-undang tertulis tidak mengakui peraturan adat, masyarakat lokal yang mengikuti hukum adat sebenarnya melanggar hukum dan praktik ini dianggap ilegal.

Di antara kelompok-kelompok tersebut, kepemilikan publik adalah pendekatan adat yang paling sering dilakukan terhadap lahan dan sumber daya. Lahan publik dipahami sebagai lahan bersama dari satu atau beberapa desa, atau lahan dari keluarga tertentu. Di dalam kepemilikan lahan publik, masyarakat memiliki hak sepenuhnya atas pengelolaan lahan seperti menentukan daerah pemukiman, daerah penanaman, daerah untuk pemakaman, dan lain-lain serta berhak untuk menghukum orang yang melanggar peraturan di atas. Individu hanya memiliki hak untuk menggunakan lahan, hak waris, dan hak untuk mengeksplorasi hasil alam, tetapi tidak memiliki hak untuk memindah-tangankan atau menjual lahan kepada orang di luar masyarakat.

Konflik antara kebijakan pemerintah saat ini dengan konsep adat mengenai kepemilikan lahan dan hak guna dianggap sebagai salah satu penyebab utama dari sengketa di daerah dataran tinggi Vietnam selama satu dekade terakhir. Konflik biasanya terjadi di mana lahan hutan adat dialokasikan menurut perundang-undangan bagi orang luar atau bahkan bagi rumah tangga masyarakat. Rejim kepemilikan lahan formal Negara yang baru, yang dikenal sebagai “kepemilikan publik atas lahan”, telah menyebabkan kepemilikan dan hak guna lahan masyarakat adat dialihkan ke rumah tangga dan organisasi ekonomi. Hak guna lahan adat telah dibatasi. Selain itu, pengaturan pembagian manfaat secara adat tidak diakui secara resmi di bawah undang-undang tertulis. Hukum adat mengatur pembagian manfaat di dalam masyarakat, sedangkan undang-undang tertulis menetapkan metode pembagian manfaat yang rumit dan sebagian besar dibiarkan tanpa penjelasan kepada penduduk lokal.

Tambahan pula, para administrator lahan dan hutan pada tingkat yang berbeda terkadang tidak menyadari peranan dan pentingnya sistem adat untuk mengatur lahan dan sumber daya, dan kurangnya pengetahuan mereka ini membatasi sampai sejauh mana ciri positif dari norma dan peraturan adat dapat dimasukkan ke dalam praktik pengelolaan lahan resmi. Meskipun beberapa pembuat kebijakan dan administrator kehutanan benar-benar mengakui keberadaan hukum adat, banyak yang menganggapnya sebagai suatu halangan ketimbang bantuan bagi pelaksanaan undang-undang tertulis mengenai pengelolaan dan pengembangan hutan.

Di samping itu, meskipun peraturan-peraturan perlindungan hutan cenderung dikembangkan melalui konsultasi dengan desa-desa, penduduk desa seringkali menganggap mereka sebagai bentuk lain dari undang-undang tertulis yang berlaku secara eksternal, yang mungkin tidak konsisten dengan aturan adat. Kebanyakan masyarakat desa tidak menerima pengakuan hukum atas hak-hak hutan adat mereka, dan sering melihat perlindungan hutan di bawah peraturan desa sebagai sarana bagi “pihak lain” untuk memperoleh keuntungan finansial. Selain itu, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa yang ditunjuk oleh negara, bukan oleh pemimpin desa adat, yang menyebabkan gesekan dalam hal siapa yang memberikan keputusan, atas nama siapa, dan untuk kepentingan siapa.

Pengentasan kemiskinan?

Perubahan ekonomi yang diluncurkan oleh reformasi *Doi Moi* berhasil menarik banyak rakyat Vietnam keluar dari kemiskinan. Reformasi lahan yang memberikan hak guna lahan bagi rumah tangga individu dan mendorong distribusi yang merata dan penggunaan lahan yang efisien dianggap “sangat penting untuk pembangunan desa, untuk mobilisasi sumber daya manusia, dan untuk peningkatan produksi untuk pengentasan kemiskinan”. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan masih sangat tinggi di daerah pegunungan, terutama di antara suku minoritas. Jumlah orang yang tinggal dalam kemiskinan absolut masih tinggi dan kemiskinan ini terkait erat dengan fakta bahwa beberapa rumah tangga masih memiliki akses yang buruk terhadap lahan atau hanya memiliki akses ke lahan berkualitas buruk.

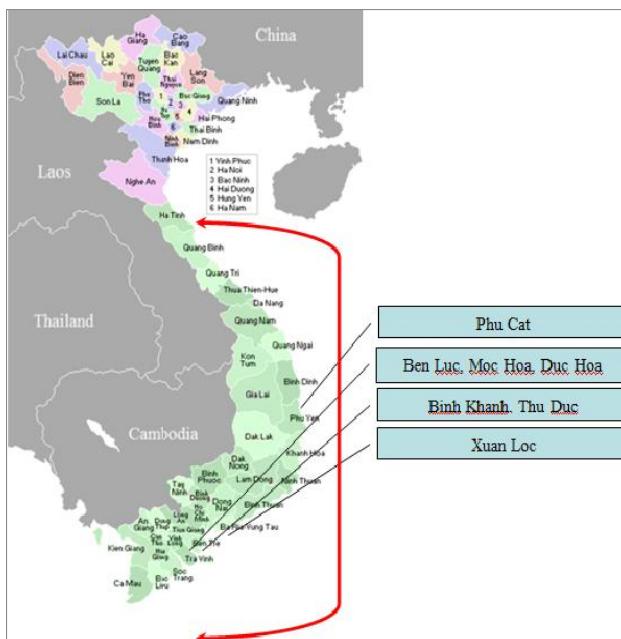
Reformasi kepemilikan hutan harus menangani masalah pengentasan kemiskinan melalui alokasi hutan yang berkualitas, pembentukan mekanisme distribusi keuntungan dari hutan yang berpihak pada rakyat miskin, peningkatan transparansi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, dan penghormatan terhadap dan masuknya praktik-praktek adat. Keterlibatan penduduk desa yang miskin dalam kegiatan komersial berbasis hutan sebagai mitra dalam penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan, atau sebagai kontributor lahan hutan, juga harus didorong.

Langkah ke depan

Pendelegasian pengelolaan hutan yang berarti ke masyarakat lokal serta keputusan bebas tanpa tekanan, didahului dan diinformasikan dari penduduk lokal saat keputusan mengenai lahan dan sumber daya diambil, yang mempengaruhi mereka secara langsung maupun tidak langsung, juga sangat penting. Saat ini, peraturan yang mengatur pemanfaatan hutan masih bersifat membatasi dan kepemilikan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal tetap hanya berupa nama. Untuk membuat pendelegasian pengelolaan hutan menjadi lebih berarti, bukan hanya hak-hak atas hutan yang harus didelegasikan, tetapi juga wewenang untuk memutuskan pengelolaan sumber daya hutan, dengan memperhitungkan struktur tata kelola tradisional yang ada. Dukungan yang tepat waktu harus disediakan untuk membangun kapasitas masyarakat lokal untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka. Selain itu, mekanisme, kebijakan, sistem kepemilikan, dan sarana ganti rugi yang ada harus diperjelas dan dipahami oleh pihak-pihak yang terkena dampak. Sebuah reformasi kepemilikan lahan yang komprehensif tidak hanya akan melibatkan perubahan normatif dan prosedural, tetapi juga konfigurasi ulang kelembagaan. Pergeseran dari sistem kepemilikan konsesi ke sistem kepemilikan berbasis hak akan memusatkan kekuatan administratif negara dan sekaligus mendelegasikan kuasa yang lebih untuk mengambil keputusan kepada pemain non-negara.

Pembebasan dan penggunaan lahan

Meskipun penelitian mengenai kesesuaian kelapa sawit dengan kondisi tanah dan cuaca di Vietnam saat ini berada pada tahap awal, pada umumnya diperkirakan bahwa kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di bagian tengah dan selatan Vietnam, mulai dari provinsi Ha Tinh ke arah selatan (Gambar 3).



Gambar 3. Lahan potensial yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit

Menurut Tang Thi Tram et al. (1996), yang telah menganalisa beberapa karakteristik kondisi cuaca dan tanah untuk budidaya kelapa sawit, kelapa sawit akan tumbuh dengan baik di tanah sulfat masam (*thionic fluvisols*) Vietnam dan hasil minyak di sini akan menjadi salah satu yang terbanyak di antara daerah percobaan yang ada saat ini. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai teknik

penanaman baru dan varietas baru untuk mencapai hasil minyak sawit yang lebih banyak. Jika kelapa sawit akan dibudidayakan secara komersial di Vietnam, kemungkinan besar budidaya ini akan dilakukan di bekas daerah yang ditumbuh hutan atau di tempat di mana tanaman industri dulunya tumbuh. Hal inilah yang telah terjadi pada karet, di mana pemerintah mendorong penggantian daerah berhutan yang rusak dan bekas perkebunan jambu mete dengan pohon-pohon karet.

Proses pembebasan lahan

Menurut hukum Vietnam, lahan adalah milik negara. Penduduk Vietnam hanya memiliki hak guna lahan. Pemerintah memiliki hak untuk menarik kembali lahan dari perorangan dan/atau organisasi dan memberikannya kepada pengguna baru jika proyek telah disetujui. Setelah proyek baru disetujui (oleh pemerintah pusat atau lokal, tergantung dari skala proyek), investor harus berunding dengan dan memberikan kompensasi bagi penduduk lokal yang tinggal di daerah yang dialokasikan untuk proyek jika mereka diminta untuk pindah. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, investor harus menyesuaikan proyek mereka (jika proyek ini hanya suatu proyek komersial) atau penduduk lokal harus dipindahkan secara paksa (jika proyek ini adalah sebuah proyek kesejahteraan). Ini berarti bahwa jika investor ingin mendapatkan lahan untuk budidaya kelapa sawit komersial, mereka harus memiliki suatu proyek yang telah disetujui dan kemudian berhasil bernegosiasi dengan penduduk lokal di daerah yang dialokasikan untuk proyek.

Kerangka hukum untuk pembebasan lahan

Semua kegiatan di Vietnam terkait kepemilikan dan pemanfaatan lahan tunduk pada UU Pertanahan tahun 2003. Peraturan untuk organisasi dalam dan luar negeri atau individu yang menyewa lahan di Vietnam disajikan di dalam UU Pertanahan Vietnam pada Pasal 24-L/CTN.

Pemerintah mengizinkan organisasi-organisasi dalam dan luar negeri, dan penduduk Vietnam yang tinggal di Vietnam atau di negara lain untuk menyewa tanah. Hak dan kewajiban penyewa tanah adalah:

- Penyewaan lahan kepada suatu organisasi atau individu harus didasarkan pada landasan ekonomi-teknologi yang disetujui oleh pemerintah di dalam hukum investasi asing di Vietnam.
- Organisasi dalam dan luar negeri dan penduduk Vietnam yang berinvestasi dan menyewa tanah di Vietnam harus mengikuti hukum ini dan peraturan lainnya yang ada di dalam hukum Vietnam.
- Jangka waktu penggunaan lahan oleh organisasi atau individu diatur dalam hukum investasi asing di Vietnam.
- Orang asing yang melanggar UU Pertanahan Vietnam akan dihukum berdasarkan hukum Vietnam, sambil mempertimbangkan perjanjian internasional yang harus diikuti oleh pemerintah Vietnam.

Perlindungan terhadap hak-hak petani dan masyarakat adat

Pemerintah menyediakan hibah bagi petani untuk mengurangi kemiskinan dan memiliki program-program untuk mendorong produksi pertanian. Menurut “Proyek pengembangan untuk industri lemak nabati hingga 2020, visi untuk 2025”, perusahaan minyak akan membuat pola produksi kelapa sawit bagi petani untuk pertukaran pengalaman di daerah-daerah, terutama untuk kelompok minoritas. Berbicara secara hukum, hak guna lahan bagi petani dan masyarakat adat telah dijamin. Sebelum proyek dilaksanakan, investor harus berunding dengan dan memberikan kompensasi yang sesuai bagi petani lokal dan masyarakat adat yang terkena dampak dari proyek tersebut.

Perampasan lahan dan konflik lahan

Hukum pertanahan secara tegas melarang perampasan lahan, pengubahan hak guna lahan secara ilegal dan penggunaan lahan untuk keperluan lain selain yang telah dinyatakan. Orang yang merampas lahan, merusak tanah, mengalihkan hak guna lahan secara ilegal atau melanggar hukum pertanahan akan ditangani sesuai dengan hukum Vietnam. Orang yang menggunakan posisinya dalam sistem politik untuk keuntungannya sendiri dan melanggar hukum pertanahan juga akan ditangani sesuai dengan hukum tersebut dan juga harus membayar ganti rugi atas tindakannya.

Hak atas tanah petani kecil

Pemerintah melindungi hak-hak hukum dan kepentingan pengguna lahan. Keluarga atau orang yang memperoleh lahan dari pemerintah

memiliki hak untuk menggunakan lahan dan dapat mengalihkan, menyewakan, mewariskan, dan menggadaikan hak guna lahan. Hak-hak yang disebutkan di atas hanya berlaku jika lahan digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dan sejalan dengan hukum pertanahan dan hukum-hukum lainnya. Serikat Petani Vietnam harus melindungi hak-hak petani Vietnam sebagai tujuannya, termasuk melindungi mereka dari penyalah-gunaan atas hak guna lahan mereka. Pengadilan sipil mengadili konflik-konflik penggunaan lahan sipil.

Pengguna lahan memiliki kewajiban untuk melindungi, memperbaiki, dan menggunakan lahan secara efektif. Mereka harus memiliki dokumen hukum atas tanah mereka, dan membayar pajak pengalihan tanah dan pembayaran lain yang ditetapkan oleh hukum. Pemerintah mendorong pengguna lahan untuk menginvestasikan tenaga kerja dan material guna meningkatkan nilai tanah mereka, menerapkan budidaya intensif untuk meningkatkan hasil panen, mengklaim kembali tanah, merambah dataran pesisir, menanami lahan gundul dan bukit pasir di dekat laut untuk mengusahakan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan, melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kesuburan tanah, dan menggunakan lahan secara efektif.

Proyeksi dampak kelapa sawit

Lingkungan

Sampai saat ini, kami tidak dapat memeriksa dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit di Vietnam. Meskipun demikian, ahli pertanian beranggapan bahwa kelapa sawit memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Vietnam. Selain memberikan kontribusi bagi industri lemak nabati, perkebunan kelapa sawit juga dilaporkan memiliki efek positif dalam pencegahan bahan yang disebabkan oleh angin kencang. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Vietnam, provinsi Quang Tri telah merencanakan untuk membudidayakan kelapa sawit di sepanjang pantainya untuk mengurangi kerusakan akibat badai tropis. Namun, saat ini, kekhawatiran mengenai kelestarian lingkungan akibat produksi minyak sawit telah disuarakan, terutama ancaman bahwa ekspansi kelapa sawit dihadapkan pada hutan tropis sebagai sumber keanekaragaman hayati yang unik.

Pekerja dan petani di pedesaan

Jumlah penduduk Vietnam pada tahun 2009 adalah sekitar 86 juta jiwa, di mana 44 juta di antaranya berada pada usia produktif. Pekerja di sektor pertanian mewakili 60% dari total populasi (26,3 juta jiwa) di atas lahan pertanian seluas 21.454,7 ha. Namun, beberapa sektor pertanian, seperti penyadapan karet dan pemanenan teh, kopi, dan jambu mete musiman, akhir-akhir ini mengalami kekurangan tenaga kerja. Menurut Dr. Dang Kim Son, Kepala Institut Kebijakan dan Strategi untuk Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Vietnam kini memiliki jutaan pekerja yang menganggur di sektor pertanian.

Budidaya kelapa sawit komersial dalam skala besar dapat memungkinkan penciptaan kesempatan kerja yang lebih jauh, asalkan memperhitungkan sifat dan kondisi tenaga kerja Vietnam yang tidak memiliki keterampilan. Perluasan produksi pertanian seperti kelapa sawit juga dapat menarik para pekerja migran kembali ke kampung halaman mereka untuk mencari pekerjaan, sehingga mengurangi tekanan pada banyak kota di Vietnam yang diakibatkan oleh migrasi massal dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

Menurut kebijakan keuangan pemerintah untuk mendukung pembangunan pertanian dan pedesaan, petani dapat menerima pinjaman bank dengan jumlah maksimum lima puluh juta Dong Vietnam (VND) tanpa jaminan untuk mendukung produksi pertanian mereka (termasuk produksi kelapa sawit, jika ada) sejak 1 Juni 2010. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah Vietnam berusaha untuk menyediakan kondisi dan insentif keuangan uang sebaik mungkin bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian. Namun, karena kelapa sawit belum ditanam di lahan yang luas, tidak ada penelitian yang tersedia untuk mengevaluasi dampak yang lebih luas dari produksi kelapa sawit pada perekonomian pedesaan. Diharapkan agar beberapa efek positif akan meliputi penyediaan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan peningkatan infrastruktur dasar di daerah pedesaan.

Terakhir, dalam hal ketahanan pangan, karena daerah kelapa sawit yang ada saat ini hanya sekitar 600 ha dan sebagian besar ditanam di daerah pertanian atau pusat penelitian, kelapa sawit belum memiliki dampak apapun pada perkebunan tanaman komersial dan tanaman

subsisten lain seperti padi. Oleh karena itu, ketahanan pangan tampak stabil dan diharapkan agar tetap demikian karena adanya fakta bahwa kelapa sawit tidak diproyeksikan untuk ditanam dengan tujuan kompetisi dengan atau menggantikan tanaman pangan yang ada.

Melihat ke depan

Meskipun Vietnam belum mengembangkan standar nasional apapun untuk meningkatkan atau mengatur produksi minyak sawitnya, dalam laporan “Vegetable Oil Sector of Vietnam – a Vision to the First 25 Years of the 21st Century”, Phan Lieu menyatakan Vietnam harus memperluas daerah budidaya kelapa sawit dari 70.000 menjadi 100.000 ha untuk mengamankan dan mencapai target produksi lemak nabati dalam negerinya hingga 2015. Ia juga menyimpulkan bahwa kelapa sawit memiliki potensi beberapa kali lebih besar daripada potensi tanaman lemak nabati lainnya (empat sampai lima kali lebih besar dibandingkan dengan kacang tanah, misalnya). Oleh karena itu, dia menyarankan agar kelapa sawit menjadi sumber minyak utama bagi Vietnam di masa depan. Kemungkinan kelapa sawit ditanam secara komersial di Vietnam juga meningkat karena kebutuhan Vietnam yang besar akan minyak goreng dan impor dalam skala besar saat ini dari Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Vietnam telah menunjukkan minat dalam pengembangan industri bio-energinya melalui perkebunan kelapa sawit, seperti yang tercermin dalam beberapa kebijakan.

Kelapa sawit memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di lahan yang luas di Vietnam yang masih memiliki cukup lahan bekas ladang dan lahan tidak terpakai yang terbentang di sepanjang negara tersebut untuk didirikan perkebunan. Kondisi cuacanya juga menguntungkan untuk pertumbuhan kelapa sawit, dan melimpahnya tenaga kerja murah di daerah pedesaan dapat mendukung perkembangan produksi minyak sawit. Namun, guna mengembangkan kelapa sawit secara komersial di Vietnam, masih ada sejumlah masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi yang harus dipertimbangkan secara hati-hati dan sistemik.

Sebagai tanaman yang baru saja diperkenalkan, kelapa sawit akan memerlukan penelitian dan percobaan lebih lanjut sebelum menerima status sebagai tanaman komersial di Vietnam. Lebih jauh

lagi, Vietnam harus terlibat di dalam dialog dengan negara-negara Asia Tenggara penghasil CPO lainnya guna belajar dari pengalaman mereka dan menghindari pengulangan kesalahan yang dibuat dengan mengorbankan lingkungan dan kondisi sosio-ekonomi lokal.

Catatan akhir

¹ Fakultas Agronomi, Universitas Nong Lam (NLU) Kota Ho Chi Minh, Vietnam – vthaidan@yahoo.com

² Colchester & Lumuru 2005

³ RECOFTC 2010; Nguyen et al 2008; Salmi et al 1999; Mekong Sources (26 November - 1 December 2001) dalam Lang 2002; Ratcliffe 1994; Ha Thuc Vien 2011; World Bank Vietnam 2000; Vietnam News 1999; IUCN 2008; Nguyen et al 2008; Colchester & Fay 2007; Corlin 2004; USAID 2001; AusAid 2007; MARD 2000; Lang 2002; Xanthaki 2003; FAO 1979 cited in de Janvry 1984; Kirk & Tuan 2009.

4. Ekspansi kelapa sawit di Filipina

Analisis isu-isu keamanan hak atas tanah, lingkungan dan pangan

Jo Villanueva

Pengantar

Dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang belum pernah terjadi sebelumnya dan cepat di Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan Indonesia, telah mendorong kekhawatiran yang cukup besar dalam hal dampak negatifnya terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, pemanasan global, penggusuran masyarakat lokal (dan adat), pengikisan mata pencarian tradisional, dan pelemahan hak-hak masyarakat dan pekerja adat. Di Indonesia, ekspansi kelapa sawit telah berkontribusi terhadap deforestasi, degradasi gambut, hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran hutan dan berbagai macam konflik sosial yang belum terselesaikan. Di Sarawak, Malaysia, dampak dari kelapa sawit mencakup hilang dan rusaknya sumber daya hutan, pembagian keuntungan yang tidak merata, polusi air dan penipisan unsur hara tanah. Di tengah peningkatan keuntungan minyak sawit di pasar dunia, fleksibilitas produk turunannya dan potensinya sebagai sumber biomassa dalam industri makanan dan manufaktur, perdebatan sengit terjadi di antara masyarakat sipil dan pihak industri tentang apakah minyak sawit merupakan kejahatan yang diperlukan atau apakah dampak negatif industri ini terhadap kehidupan, tanah dan lingkungan jauh lebih besar daripada nilainya.

Meskipun dianggap sebagai industri baru di sektor agribisnis Filipina dan meski ukurannya jelas kecil jika dibandingkan dengan jutaan hektar perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia, Filipina telah mengembangkan dan mengolah minyak sawit selama tiga dekade terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan Minyak Sawit Mentah (CPO) yang meningkat dan tingginya nilai komersial produk itu telah mendorong pertumbuhan industri minyak sawit lokal. Saat ini, kapasitas produksi CPO sebagian besar diarahkan untuk kebutuhan pasar domestik, tetapi permintaan yang mendesak baik dari pasar domestik maupun internasional

mendorong industri itu untuk secara agresif melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit yang ada di Filipina berpusat di beberapa daerah di Mindanao, provinsi Bohol di Visayas dan Palawan di Luzon.

Dalam konteks persaingan (dan sering pertentangan) lahan dan pemanfaatan sumberdaya dan mekanisme tenurial, kehancuran ekosistem yang meningkat, pelanggaran hak-hak masyarakat dan masyarakat adat oleh industri ekstraktif, dan perecepatan perkebunan untuk pertanian dan produksi bahan bakar nabati, studi ini berupaya untuk menguji kondisi industri minyak sawit di Filipina saat ini dan untuk mengedepankan beberapa pengalaman masyarakat lokal, pemilik tanah, petani dan pekerja di kawasan lahan kelapa sawit yang berbeda.

Di Filipina, keterbatasan informasi dan kurangnya gambaran akan keadaan industri minyak sawit saat ini dan kekhawatiran masyarakat lokal, petani kecil dan pekerja selama beberapa tahun terakhir, telah membatasi dan mencegah keterlibatan masyarakat sipil dalam mengatasi isu-isu penting yang terkait dengan kelapa sawit. Karena menyadari keterlibatan masyarakat sipil dan resistensi masyarakat terhadap tantangan dan ancaman ekspansi minyak sawit di Malaysia dan Indonesia, studi ini bertujuan untuk memberi kontribusi dalam membangun gambaran yang komprehensif tentang ekspansi perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara. Diharapkan bahwa studi ini akan membawa kesadaran lebih besar akan peluang dan ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, membantu menginformasikan tindakan pemangku kepentingan yang berbeda, dan memacu tanggapan atau inisiatif bersama di antara berbagai sektor baik di dalam maupun di luar industri itu.

Ruang lingkup dan metodologi

Studi ini dicapai melalui penggabungan data primer dan sekunder. Metodologi pengumpulan data meliputi wawancara informan kunci dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pejabat dari industri minyak sawit dan perusahaan, pejabat pemerintah, koperasi lokal, petani/petani plasma, masyarakat lokal di lokasi kelapa sawit dan

NGO. Studi kasus dilakukan di Palawan, Agusan del Sur, Bukidnon dan Sultan Kudarat. Kunjungan lapangan juga dilakukan di beberapa perkebunan kelapa sawit di Mindanao dan Palawan.

Mengingat skala ekspansi kelapa sawit yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir dan ruang lingkup geografis operasinya saat ini, masih belum memungkinkan untuk melakukan pengujian mendalam terhadap semua isu yang ditimbulkan oleh ekspansi ini. Studi ini utamanya memberikan gambaran umum dari industri minyak sawit di Filipina dan khususnya melihat situasi masyarakat lokal, koperasi lokal dan pekerja di wilayah-wilayah utama lahan sawit.

Susunan laporan

Bagian 1 terdiri atas pengantar singkat studi ini, sedangkan bagian 2 memberikan gambaran dari industri minyak sawit di Filipina dan kecenderungan dalam produksi dan pertumbuhan CPO. Bagian 3 membahas kecenderungan itu dan kerangka kerja hukum dalam pembebasan tanah dan bagian 4 menyajikan lima studi kasus mengenai situasi tertentu dan pengalaman masyarakat lokal, pekerja dan koperasi di lahan perkebunan kelapa sawit yang berbeda. Bagian 5 adalah rangkuman dari isu, tantangan dan pembelajaran yang didapat dari pengalaman yang dibahas dalam studi kasus. Bagian 6 menyajikan kesimpulan dan memberikan sekumpulan rekomendasi untuk pengembangan kelapa sawit di Filipina.

Tim riset

Studi Negara Filipina adalah bagian dari inisiatif riset regional tentang minyak sawit yang dipelopori oleh *the Forest Peoples Programme* (FPP) dan didukung oleh *the Rights and Resources Initiative* (RRI). FPP, sebuah NGO yang berbasis di Inggris, menjembatani kesenjangan antara pembuat kebijakan dan masyarakat hutan. FPP mendukung visi alternatif tentang bagaimana hutan harus sebaiknya dikelola dan dikontrol berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang paling mengenalnya. FPP bekerja dengan masyarakat hutan di

Amerika Selatan, Afrika Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk membantu mereka mengamankan hak-hak mereka, membentuk organisasi mereka sendiri dan bernegosiasi dengan pemerintah dan perusahaan tentang bagaimana sebaiknya mencapai pembangunan ekonomi dan konservasi di tanah mereka.

Riset tentang negara Filipina dikoordinir oleh *the Samdhana Institute* yang bekerja untuk meningkatkan dan memperkaya pemahaman akan pendekatan inovatif terhadap pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan dan lewat ini, memperluas opsi-opsi mata pencaharian masyarakat setempat. *The Samdhana Institute* bekerja sama dengan *the Alternate Forum for Research in Mindanao* (AFRIM) dan *the Environmental Legal Assistance Centre* (ELAC) untuk studi kasus di Bukidnon, Sultan Kudarat dan Palawan. Kolaborator lain dalam studi ini adalah: *the Columbio Multi-Sectoral Environmental Movement* (CMEM) yang telah menulis buku panduan mengenai kelapa sawit, Rene Espinosa dari Bohol dan *Kasanyangan Foundation, Inc.* (KFI).

Kecenderungan nasional dalam pengembangan kelapa sawit

Sejarah singkat

Industri minyak sawit di Filipina bermula pada tahun 1950-an dengan perkebunan seluas 200 hektar yang dibuka oleh *Menzi Agricultural Corporation* di Basilan, Zamboanga. Perusahaan itu menghentikan operasi perkebunan kelapa sawitnya saat tanahnya diserahkan kepada pekerja pertanian di bawah *the United Workers Agrarian Reform Beneficiaries Multi-Purpose Cooperative*, sebagai bagian dari Program Reforma Agraria Komprehensif (*the Comprehensive Agrarian Reform Program*).¹ Pada tahun 1967, *Kenram Industries, Inc.* mengubah perkebunan rami (*Boehmeria nivea*) mereka menjadi perkebunan kelapa sawit dan membangun perkebunan inti seluas 1.100 hektar serta pabrik CPO berkapasitas 20 ton. Tanah-tanah tersebut didistribusikan kepada penerima manfaat reforma agraria yang membentuk koperasi pada tahun 2002.²

Pada tahun 1980, *the National Development Corporation* (NDC), sebuah perusahaan milik pemerintah, yang bekerja sama dengan *Guthrie Corporation*, sebuah perusahaan milik Inggris yang kemudian dijual kepada pemerintah Malaysia, membuka 4.000 hektar perkebunan kelapa sawit di Agusan del Sur. Kemitraan ini mengawali pembentukan *NDC-Guthrie Plantations, Inc.* (NGPI). Pada tahun 1983, NDC menandatangani kerja sama lain dengan perusahaan Malaysia, Kumpulan Guthries Sendirian Berhad, yang melahirkan *NDC-Guthrie Estate, Inc.* (NGEI). NGEI kemudian membuka satu lagi perkebunan kelapa sawit seluas 4.000 hektar di wilayah-wilayah berdekatan yang mencakup kotamadya Rosario dan Bunawan, Agusan del Sur. Perusahaan ini juga mendirikan pabrik CPO berkapasitas 40 ton untuk memproses TBS dari dua perkebunan itu.³

Menyusul pembuatan UU Reforma Agraria Komprehensif (*Comprehensive Agrarian Reform Law/CARL*) oleh Presiden Corazon Aquino pada 1988, lahan yang dikuasai perkebunan kelapa sawit NGEI dan NGPI didistribusikan ke 1.368 pekerja melalui pemberian sertifikat kepemilikan tanah (*Certificates of Land Ownership Award / CLOA*). Pada tahun 1991, 40% saham Guthrie dibeli oleh *Filipinas Palm Oil Plantations, Inc.* (FPPI), sebuah konsorsium Filipina-India-Malaysia. Lalu pada tahun 1994, mereka membeli 60% saham NDC, sehingga memperoleh kepemilikan dan kendali penuh atas pabrik minyak sawit itu dan perkebunan yang terkait.

Pada tahun 1993, kerjasama patungan dari investor Singapura, Filipina dan Malaysia membuka jalan bagi pendirian *Agusan Plantations, Inc.* (API). API membuka perkebunan kelapa sawit seluas 1.800 hektar di Trento, Agusan del Sur. Sebuah pabrik CPO berkapasitas 30 ton dibangun pada tahun 1998. Meski API menguasai wilayah yang lebih kecil daripada FPPI, perusahaan ini merintis skema petani plasma dan telah secara agresif mencoba memperluas investasi minyak sawitnya di Maguindanao, Bohol dan di Palawan. Hingga saat ini, perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan 3 pabrik kelapa sawit di Mindanao dan di Visayas. Petani plasmanyanya tersebar luas di berbagai wilayah di Mindanao

seperti di provinsi Surigao, Compostela Valley, Davao del Norte, Cotabato Utara, Sultan Kudarat dan Misamis Oriental.

Pada tahun 2003, *A. Brown Company, Inc.* mulai menanamkan investasi di kelapa sawit. Perusahaan ini 100% dimiliki Filipina, berbasis di Cagayan de Oro City dan bergerak antara lain di bidang real estat, penghasil sumber energi/listrik, perdagangan, pertambangan dan penggalian. *A. Brown* membangun dua anak perusahaan untuk investasi minyak kelapa sawit; *the Nakeen Development Corporation* (*Nakeen*) dan *A. Brown Energy Resources Development, Inc.* (*ABERDI*). *Nakeen* mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 1.200 hektar di Impasugong, Bukidnon, sementara *ABERDI* mengelola pabrik CPO berkapasitas 10 ton di daerah yang sama. Saat ini, keempat perusahaan ini, FPPI, API, Kenram dan *ABERDI*, adalah pemain utama dalam ekspansi kelapa sawit di Filipina.

Kebijakan dan target pemerintah

Selama bertahun-tahun, presiden-presiden dari Negara ini (mulai dari era Ferdinand Marcos hingga Gloria Macapagal-Arroyo) telah membantu memajukan "pertumbuhan" industri minyak sawit. Slogan promosi untuk industri ini antara lain minyak kelapa sawit adalah "industri matahari terbit" dan pohon kelapa sawit adalah "pohon perdamaian". Potensi kelapa sawit di pasar dunia telah diakui oleh Departemen Pertanian, yang mengklaim bahwa "permintaan global akan minyak kelapa sawit diperkirakan mencapai 20 juta ton per tahun dan diperkirakan bertambah dua kali lipat pada 2020." Namun, "pertumbuhan" ini, setidaknya di Filipina, belum tercapai. Investor dan pendukung bisnis industri ini masih menunggu bentuk nyata dukungan pemerintah misalnya antara lain dalam bentuk kebijakan yang ramah minyak sawit, dukungan infrastruktur, anggaran untuk penelitian dan pembiayaan. Mantan Sekretaris DAR Lorenzo juga melihat bahwa "Filipina telah gagal untuk menghargai potensi minyak sawit dan dukungan pemerintah bersifat setengah hati dan kadang ada kadang tidak."⁴

Otoritas Kelapa Filipina

The Philippine Coconut Authority (PCA) adalah badan pemerintah yang diberi mandat untuk "mengawasi pengembangan industri kelapa dan minyak sawit lainnya dalam semua aspeknya dan memastikan bahwa petani kelapa menjadi peserta langsung dalam dan penerima manfaat dari pembangunan dan pertumbuhan tersebut."⁵ Misi Keputusan Presiden 1468 adalah untuk "memajukan pengembangan industri kelapa dan minyak sawit lainnya yang kompetitif secara global yang akan memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan, pendapatan yang lebih baik dan partisipasi para pemangku kepentingan meningkat." Termasuk dalam fungsi-fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

- Merumuskan dan mendorong sebuah program pengembangan strategis dan komprehensif untuk industri kelapa dan minyak sawit dalam segala aspeknya;
- Menerapkan dan meneruskan penanaman dan peremajaan kelapa di seluruh negeri, pemupukan dan rehabilitasi, dan program produktivitas pertanian lainnya;
- Melakukan kerja-kerja penelitian dan penyuluhan mengenai produktivitas pertanian dan pengembangan proses untuk kualitas dan diversifikasi produk;
- Menetapkan standar kualitas bagi produk kelapa dan kelapa sawit dan produk turunannya; dan
- Mengembangkan dan memperluas pasar-pasar domestik dan luar negeri;
- Meningkatkan kapasitas dan memastikan kesejahteraan sosial-ekonomi petani kelapa dan petani kelapa sawit dan buruh tani.

Sebuah draft dokumen berjudul "*Policy Framework for the Development of Palm Oil Industry*" (Kerangka Kebijakan untuk Pengembangan Industri Kelapa Sawit)⁶ menguraikan tentang mandat dari Dewan Pengurus PCA, dan mencakup poin-poin berikut:

- 1) Industri minyak sawit harus melengkapi industri kelapa. Pada akhirnya, industri minyak sawit akan melampaui swasembada

- dan membidik pasar regional yang berkembang di Asia-Pasifik;
- 2) Pengembangan industri minyak sawit harus dilakukan melalui inisiatif sektor swasta. Pemerintah harus menyediakan insentif dan tindakan peraturan yang akan mendorong, mempercepat dan melindungi industri itu;
 - 3) Prioritas dalam budidaya kelapa sawit harus diberikan ke daerah kosong, tidak produktif dan tertinggal;
 - 4) Penanaman kelapa sawit akan dianjurkan hanya di wilayah di mana fasilitas pabrik minyak tersedia atau terjamin. Investasi di pabrik minyak harus difasilitasi jika ada penanaman skala besar;
 - 5) Budidaya kelapa sawit akan didorong melalui pekebun-pekebun terorganisir yang memiliki hubungan pemasaran dengan pabrik-pabrik minyak;
 - 6) Semua operator pembibitan kelapa sawit wajib mendaftar pada dan diakreditasi oleh PCA untuk menjamin pekebun-pekebun mendapat bahan tanam berkualitas;
 - 7) Upaya-upaya penelitian dan dokumentasi lokal (R&D) akan didukung dan dikordinir oleh pemerintah.

Hingga saat ini, kerangka kebijakan ini masih berupa sekumpulan rekomendasi karena Dewan Pengurus PCA belum mengeluarkan resolusi untuk menyetujuinya. Menurut Direktur PCA Wilayah 10, kerangka kebijakan ini juga belum didukung dengan pedoman penerapan dan karenanya bukan merupakan dokumen kebijakan resmi dari PCA. Selain itu, mandat PCA tampaknya bersifat agak umum dan mengenai pengembangan minyak sawit (dibandingkan industri kelapa, yang merupakan mandat utama mereka) dan menghadapi beberapa tantangan internal yang serius sebagai badan pemerintah yang terus-menerus kekurangan uang. Namun, PCA

telah memberikan dukungan bagi industri minyak sawit melalui tindakan-tindakan berikut:⁷

- Memfasilitasi persetujuan dari Dewan Pengurus PCA untuk pembentukan Dewan Pengembangan Kelapa Sawit Filipina (*Philippine Oil Palm Development Council / POPDC*) pada bulan Juli 2003. POPDC adalah wadah bagi berbagai sektor dan pemangku kepentingan untuk secara adil diwakili dalam hal-hal yang berkaitan dengan industri minyak sawit. Tugas khusus dari Dewan itu mencakup: 1) mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program untuk memastikan kelangsungan industri kelapa sawit, termasuk penelitian dan pengembangan, 2) memperluas bantuan teknis dalam produksi dan pengolahan pertanian, dan 3) mendorong pengembangan perdagangan dan pasar;
- Mendirikan Palm Oil Development Office/PODO (Kantor Pengembangan Kelapa Sawit) yang berlokasi di Pusat Pelatihan Penyuluhan Kelapa di Davao City pada Oktober 2002 lalu. Tugas PODO adalah untuk membangun pusat data bagi industri itu dan memimpin dalam perumusan buku panduan, manual dan informasi lainnya untuk industri itu;
- Berkolaborasi dengan Dewan Industri Minyak Sawit Filipina (*Philippine Palm Oil Industry Council/PPOIC*) yang terdiri dari perwakilan koperasi para pekebun kecil dan pengolah minyak sawit, dengan menyusun Rencana Pengembangan Industri Minyak Sawit Filipina (2004-2010) yang merencanakan arahan dan dorongan industri itu selama 6 tahun.

Terlepas dari semua pencapaian ini, PCA percaya bahwa hanya melalui kepemimpinan sektor swasta-lah industri minyak sawit bisa melenting mempertahankan pertumbuhan. Jadi selama beberapa tahun terakhir, dorongan dan ekspansi yang agresif telah dilakukan oleh investor (pemilik dan pemimpin pabrik minyak sawit/pengolah dan para pekebun kelapa sawit/penanam) dan dengan dukungan dari badan-badan pemerintah lainnya seperti Departemen Perdagangan dan Industri (DTI), Departemen Reforma Agraria (DAR),

Departemen Pertanian (DA) dan juga Unit Pemerintah Daerah (LGU) di provinsi Sultan Kudarat, Cotabato Utara, Maguindanao, Agusan, Bukidnon, Bohol dan Palawan, diantaranya.

Undang-Undang Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Pada tahun 2006, pemerintah Filipina mengesahkan *Republic Act 9367*, yang juga dikenal sebagai UU Bahan Bakar Nabati tahun 2006.⁸ Departemen Energi (DOE) instansi pemerintah terkemuka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini. Sebuah Dewan Bahan Bakar Nabati Nasional (*National Bio-fuels Board/NBB*) yang terdiri dari berbagai instansi/badan pemerintah nasional telah dibentuk sebagai lengan utamanya untuk mengawasi program bahan bakar alternatif milik pemerintah dan untuk menjamin pasokan dan kualitas bahan bakar nabati. Berdasarkan riset AFRIM pada bahan bakar agro, Rencana Pembangunan Filipina Jangka Menengah (*Medium Term Philippine Development Plan/MTPDP*) untuk 2004-2010 mengidentifikasi 2 juta hektar lahan untuk tujuan agribisnis. Setidaknya 429.000 hektar dari lahan ini diperuntukkan untuk budidaya bahan bakar nabati. Beberapa tanaman yang diidentifikasi sebagai sumber bahan baku untuk biodiesel adalah minyak sawit, kelapa dan jarak pagar, sementara tebu dan singkong adalah sumber utama bio-etanol.

Rencana pengembangan tanaman bio-diesel tidak sepenuhnya berjalan mulus di tingkat lokal. AFRIM telah mendokumentasikan beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat dari perkebunan jarak pagar di Brgy. Lumbia, Cagayan de Oro. Di sebuah desa terdekat, warga lokal Brgy. Bayanga di Cagayan de Oro berhasil dalam kampanye mereka untuk menghentikan pembangunan pabrik etanol di *barangay* (desa atau distrik) mereka dan pembukaan sebuah perkebunan singkong. Namun, dari temuan penelitian ini, kelapa sawit yang saat ini diproduksi di Filipina untuk pasar domestik belum digunakan untuk biodiesel, tetapi terutama untuk industri makanan lokal dan manufaktur. Dengan demikian, permintaan tambahan untuk kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati tetap merupakan peluang pasar yang belum dimanfaatkan bagi industri minyak sawit.

Rencana Pengembangan Kelapa Sawit Filipina

Dengan kepemimpinan Dewan Pengembangan Minyak Sawit Filipina, sebuah Rencana Pengembangan Kelapa Sawit Filipina untuk 2004-2010 dibuat pada tahun 2003.⁹ Rencana ini bertujuan untuk memberikan bimbingan tentang arah industri itu. Berikut adalah beberapa poin utama dari dokumen ini:

Visi: Kelapa sawit sebagai tanaman strategis untuk ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, yang melengkapi tanaman kelapa.

Misi: Untuk mengembangkan industri pengolahan kelapa sawit melalui produksi, pengolahan dan pemasaran produksi minyak sawit dan produk sampingannya yang menguntungkan untuk memastikan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan pedesaan dan pembangunan berkelanjutan saat bersamaan memperhitungkan pertimbangan pelestarian total ekosistem.

Sasaran dan tujuan

Umum: Untuk mencapai kecukupan dalam kebutuhan minyak sawit dalam negeri, sehingga mempertahankan cadangan devisa (dolar).

Khusus:

- ▲ Menciptakan lapangan kerja dan mendorong berbagai kegiatan mata pencaharian di pedesaan sehingga pada tahun 2010 sebanyak sekitar 39.000 petani pelaku bersama akan mendapat manfaat dari pengembangan industri
- ▲ Memanfaatkan daerah kosong tak produktif untuk program lingkungan berkelanjutan sehingga menjelang tahun 2010 sebanyak sekitar 104.000 hektar telah ditanami kelapa sawit
- ▲ Menjadikan industri ini kendaraan persatuan rakyat

Dari analisa SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) yang dilakukan, Rencana Pembangunan itu juga melihat pada kesempatan yang ditawarkan oleh minyak sawit, yang mencakup meningkatnya permintaan minyak sawit oleh industri makanan cepat saji dan pengalengan, ketertarikan sektor swasta yang makin besar dalam mengembangkan industri minyak kelapa sawit dan kelapa, dan penggunaan minyak kelapa untuk produksi produk bernilai lebih tinggi seperti oleo kimia. Beberapa keuntungan saat ini yang diidentifikasi oleh industri meliputi 304.000 hektar lahan kosong dan belum dikembangkan, kondisi iklim dan agronomi yang menguntungkan, adanya pabrik kelapa sawit di Mindanao (lima pabrik yang terletak di provinsi Agusan del Sur, Sultan Kudarat, Bukidnon dan Maguindanao) dan di Visayas (satu pabrik di provinsi Bohol), keahlian teknis meningkat dari sektor swasta, ketersediaan tenaga kerja murah, ketersediaan tenaga penyuluhan pertanian pemerintah yang dapat dengan mudah dilatih dalam teknologi kelapa sawit dan adanya pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga akademik yang mampu melakukan penelitian mengenai kelapa sawit.¹⁰

Di sisi lain, beberapa kelemahan yang diidentifikasi termasuk kurangnya bahan tanam lokal dan impor bibit, kepemilikan lahan yang terfragmentasi yang sulit dikonsolidasikan menjadi perkebunan, kurangnya modal pekebun, kesempatan pembiayaan yang terbatas untuk pekebun, jaringan jalan yang tidak memadai di daerah pedesaan dan meningkatnya biaya sarana produksi pertanian. Ancaman lebih lanjut yang diidentifikasi meliputi penyelundupan minyak kelapa sawit dari negara-negara lain oleh pihak pengolah karena produksi lokal yang rendah dan menurun dan ketidakstabilan kondisi perdamaian dan ketertiban yang dapat membatasi pembangunan di daerah yang sesuai dan menurunkan minat investasi lokal dan asing.¹¹

Kebijakan dan tindakan yang diusulkan

Untuk mengatasi beberapa kendala yang dirasakan terhadap pertumbuhan industri sawit, PPODC telah mengusulkan beberapa kebijakan dan tindakan berikut:¹²

- 1) Industri minyak sawit harus menjadi pelengkap industri kelapa. Pada akhirnya, industri minyak sawit akan melampaui swasembada dan membidik pasar regional yang berkembang di Asia-Pasifik;
- 2) Pengembangan industri sawit harus dilakukan melalui inisiatif sektor swasta. Pemerintah harus menyediakan beberapa insentif dan upaya pengaturan yang akan mendorong, mempercepat dan melindungi industri itu;
- 3) Prioritas dalam budidaya kelapa sawit harus diberikan ke daerah kosong, tidak produktif dan tertinggal;
- 4) Penanaman kelapa sawit akan dianjurkan hanya di daerah di mana fasilitas pabrik minyak tersedia atau terjamin. Investasi di pabrik minyak harus difasilitasi jika ada penanaman skala besar;
- 5) Pengembangan kelapa sawit akan didorong melalui petani terorganisir yang memiliki hubungan pemasaran dengan pabrik minyak;
- 6) Para pengembang pembibitan kelapa sawit wajib mendaftar pada dan diakreditasi oleh PCA untuk menjamin petani mendapat bahan tanam berkualitas;
- 7) Fokus awal pengembangan akan berada di daerah bebas masalah dengan pemangku kepentingan yang bersedia untuk mengurus lahan mereka dan mencurahkan hati mereka terhadap pengembangan industri sawit. Kerja untuk perdamaian di Mindanao akan terus berlanjut.

Beberapa program untuk mencapai hal ini mencakup penanaman, penanaman kembali, mata pencarian di pertanian, pembangunan pabrik minyak, pengembangan penelitian dan pengembangan kelembagaan serta pelatihan petani kelapa sawit dan tenaga teknis. Persyaratan keuangan untuk melaksanakan rencana pembangunan

(2004-2010) diperkirakan PhP 12,512 miliar (291,859,116.21 USD).

Struktur dan hubungan industri minyak sawit

Industri Kelapa Sawit Filipina membedakan tiga rantai industri yang saling tergantung operasinya: industri hulu, fokal dan hilir. "Industri hulu" terdiri dari perkebunan kelapa sawit atau mereka yang terlibat dalam produksi Tandan Buah Segar (TBS). Industri Fokal melaksanakan pengolahan dan penyulingan CPO dari TBS setelah pemanenan, pengumpulan dan pengangkutan TBS ke pabrik kelapa sawit. "Industri hilir" adalah pengolahan sekunder dan tersier produk minyak sawit untuk pembuatan dan produksi makanan, farmasi, oleo-kimia dan produk industri dan rumah tangga lainnya. Kilang CPO menghasilkan minyak goreng, margarin dan bahan mentah industri lainnya untuk pengolahan tersier. Pengolahan tersier menghasilkan minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, bio-diesel, bahan bakar nabati dan pelumas di antara turunan CPO lainnya.

Produksi CPO nasional

Selama beberapa tahun terakhir, dan dengan kekurangan pasokan yang signifikan untuk permintaan minyak sawit domestik di Filipina, telah ada kebangkitan investasi dalam pembukaan perkebunan kelapa sawit dan minat dalam membangun lebih banyak pabrik kelapa sawit. Produksi lokal hanya dapat memasok 25% dari yang dibutuhkan oleh industri lokal; 75% sisanya diimpor. Pemain industri kunci, terutama pejabat di dewan Pengembangan Industri Kelapa Sawit Filipina, sangat antusias mengenai prospek cerah produksi kelapa sawit yang meningkat di tengah melonjaknya harga komoditas ini di pasar dunia, belum lagi permintaan yang besar dari pasar domestik dan prospek mengekspor minyak sawit secara global.

Tabel 1. Produksi CPO

Produk	Produksi Tahunan Rata-rata (MT)	Penggunaan Tahunan Rata-rata (MT)	Kekurangan (%)
Minyak Sawit	54.333	94.400	42,5
Biji Sawit	6.544	7.277	10.0

Berdasarkan data industri produksi dan konsumsi CPO tahun 2009, kekurangan dalam konsumsi domestik memiliki perkiraan nilai impor minyak sawit sebesar kurang lebih PhP 840,03M (USD 14,83 M). Dengan peningkatan konsumsi tahunan pada tingkat konservatif 5% dan dengan masa pertumbuhan perkebunan empat tahun sebelum panen, tren ekspansi perkebunan kelapa sawit saat ini sepertinya tidak mungkin untuk mengejar permintaan domestik yang terus meningkat.

*Tabel 2. Proyeksi konsumsi minyak sawit dan minyak biji sawit
Filipina tahun 2006-2010*

Tahun	Volume Minyak Sawit*	Volume Minyak Biji Sawit**
2006	118.091	8.106
2007	123.499	8.282
2008	129.155	8.463
2009	135.071	8.647
2010	141.257	8.836

* Berdasarkan tingkat pertumbuhan konsumsi tahunan rata-rata 4,52% dengan volume rata-rata dasar sebesar 94,400 MT

** Berdasarkan tingkat pertumbuhan konsumsi tahunan rata-rata 2,15% dengan volume rata-rata dasar sebesar 7,277 MT

Luas kasar perkebunan kelapa sawit

Dari data tahun 2009 yang disediakan oleh Dewan Pengembangan Minyak Sawit Filipina (PPODC), sejumlah 46.608 hektar telah ditanami dengan kelapa sawit. Ini dianggap sebagai prospek yang menjanjikan karena mencerminkan kenaikan 160% yang dicapai dalam rentang waktu hanya empat tahun. Pada bulan Maret 2005, hanya ada sekitar 29.003 hektar perkebunan kelapa sawit. Tabel di bawah menunjukkan kecenderungan ekspansi dan berbagai lokasi perkebunan ini:

Tabel 3. Perkiraan pertumbuhan lahan kelapa sawit pada 2003, 2005, dan 2009 (hektar)¹³

Wilayah	2003	2005	2009
IVB –Palawan			3.592
VII-Visayas Tengah	3.994,15	5.300	6.506
IX-Mindanao Barat			62
X-Mindanao Utara	190	413,30	1.128
XI-Mindanao Selatan	217,38	244,38	1.217
XII-Mindanao Tengah	6.766,81	6.905,81	13.961
XIII-CARAGA	13.461,72	15.404,29	17.252
ARMM		735,89	2.890
Total	25.226,95	29.003,67	46.608

Di Mindanao saja, Otoritas Pengembangan Filipina Selatan (*Southern Philippines Development Authority/SPDA*) telah mengidentifikasi 304.350 hektar untuk perkebunan kelapa sawit.¹⁴ Namun, perkebunan kelapa sawit seluas 46.608 hektar yang ada hanya mewakili sekitar 15% dari keseluruhan daerah potensial untuk pengembangan kelapa sawit yang seluas 304.350 hektar.

Tabel 4. Daerah potensial untuk penanaman kelapa sawit di Mindanao.

Wilayah/Provinsi	Hektar
Wilayah IX (Mindanao Barat)	
Zamboanga del Norte	7.530
Zamboanga del Sur	31.430
Wilayah X (Mindanao Utara)	
Bukidnon	65.090
Misamis Oriental	10.370
Misamis Occidental	1.440
Wilayah XI (Mindanao Selatan)	
Davao del Norte	2.070
Davao Oriental	6.220
Cotabato Selatan	17.000
Wilayah XII (Mindanao Tengah)	
Cotabato	1.180
Lanao del Norte	830
Sultan Kudarat	5.630
Wilayah XIII (CARAGA)	
Agusan del Norte	10.370
Agusan del Sur	7.490
Surigao del Norte	31.360
Surigao del Sur	93.790
ARMM/Lanao del Sur	3.280
Maguindanao	9.270
TOTAL	304.350

Pabrik minyak sawit

Saat ini, ada enam pabrik minyak sawit yang beroperasi di Filipina. Keenam pabrik itu adalah:

- 1) *Filipinas Palm Oil Plantation Inc.* (FPPI), berlokasi di San Francisco Agusan del Sur dan mulai beroperasi pada tahun 1981. Pabrik ini dimiliki oleh investor Filipina (60%) dan Indonesia (40%) dan memiliki kapasitas 40 ton TBS/jam;
- 2) *Agusan Plantations Inc.* (AGUMIL Phil.), berlokasi di Manat, Puerto, Agusan de Sur dan mulai beroperasi pada

tahun 1983. Pabrik ini dimiliki oleh investor Singapura (60%) dan Filipina (40%) dan memiliki kapasitas 20 ton TBS/jam.

- 3) *Kenram Industrial & Development, Inc.* (KIDI), berlokasi di Isulan, Sultan Kudarat dan dianggap yang tertua di antara pabrik kelapa sawit, mulai beroperasi pada tahun 1967. Perusahaan ini 100% dimiliki oleh investor Filipina dan memiliki kapasitas pengolahan 20 ton TBS/jam.

Kapasitas pengolahan telah meningkat secara signifikan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dihasilkan dari peningkatan jumlah "pekebun-pekebun mandiri". Pada tahun 2004, kapasitas pengolahan total industri itu hanya sekitar 80 ton/jam dan disediakan oleh ketiga pabrik kelapa sawit di atas. Namun, pabrik tambahan telah didirikan dengan peningkatan 87% dalam kapasitas pengolahan. Dengan tambahan 7 ton/jam, kapasitas total pabrik pengolahan yang ada saat ini adalah 150 ton/jam. Pertumbuhan dalam kapasitas pengolahan ini dicapai oleh perusahaan-perusahaan berikut:

- 4) *Buluan Palm Oil Mill*, sebuah anak perusahaan AGUMIL Phil, yang terletak di Buluan., Sultan Kudarat dan mulai beroperasi pada 2008 dengan kapasitas 40 ton/jam.
- 5) *Philippine Agricultural Land Development Mill*, (PALM), Inc, anak perusahaan lain dari AGUMIL Phil. Berlokasi di Bohol, Visayas, dan mulai beroperasi pada tahun 2005 dengan kapasitas 20 ton/jam.
- 6) *A. Brown Energy Resource Development Inc.* (ABERDI) sebuah perusahaan Filipina yang berlokasi di Impasugong, Bukidnon, yang mulai beroperasi pada tahun 2007 dengan kapasitas pengolahan saat ini 10 ton/jam. Perusahaan ini berencana meningkatkan kapasitas pengolahannya dengan mendirikan satu pabrik lagi dengan kapasitas pengolahan 20 ton/jam di tahun-tahun mendatang.

Perkiraan terakhir luas lahan perkebunan kelapa sawit keseluruhan yang ada di Filipina adalah sekitar 50.000 hektar. Namun,

dilaporkan bahwa ada kelebihan dalam kapasitas pengolahan karena 20% dari perkebunan ini sudah tua. Beberapa sudah berusia 30 tahun atau lebih, dengan hasil yang menurun seperti dalam kasus Agusan del Sur dan Sultan Kudarat. Sekitar 30% dari perkebunan sawit masih berusia muda, berkisar 2-6 tahun. Dengan demikian, hasil TBS-nya sangat minim.

Dalam Rencana Pengembangan Minyak Sawit, terungkap target yang lebih ambisius yaitu berdirinya 17 pabrik minyak kelapa sawit pada akhir tahun 2010. Namun, mengingat bahwa industri ini belum mencapai targetnya dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit, tampaknya tidak masuk akal dari sisi finansial untuk menambah jumlah pabrik yang saat ini beroperasi.

Tabel 5. Perkiraan target jumlah pabrik minyak sawit yang akan didirikan pada 2004-2010¹⁵

Wilayah	Jumlah Pabrik Minyak Sawit								% dari Total
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	
IV				1			1	2	12
VI			1		1		1	3	18
VII			1		1		1	3	18
IX			1		1		1	3	18
X				1		1		2	12
XI							1	1	8
XII							1	1	8
XIII									
ARMM				1		1		2	12
Jumlah Keseluruhan			3	3	3	2	6	17	100

Kebun pembibitan kelapa Sawit

Salah satu masalah yang dihadapi oleh industri minyak sawit di Filipina adalah kegagalan untuk menginvestasikan dana untuk penelitian dan perkecambahan bibit sejak pembukaan perkebunan kelapa sawitnya. Semua bibit diimpor dari Malaysia, Papua New Guinea, Costa Rica dan baru-baru ini, Thailand. Pembukaan kebun pembibitan telah menjadi bisnis yang menguntungkan karena permintaan untuk bahan tanam kelapa sawit telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Harga jual yang ditawarkan oleh kebun

pembibitan kelapa sawit berkisar dari PhP 200-280 per bibit. Jadi, untuk satu hektar dengan 136 tanaman, biaya bahan tanam berkisar dari PhP 27.200 hingga PhP 38.080. Akibatnya, dari biaya bahan tanam itu saja berarti petani yang tidak memiliki modal uang akan tergantung pada perusahaan minyak sawit untuk dukungan keuangan.

Saat ini ada 5 kebun pembibitan kelapa sawit yang diakreditasi oleh pemerintah di Mindanao. Mereka dimiliki oleh pengusaha pabrik minyak sawit seperti AGUMILL, FPPI, ABERDI/Nakeen, dan KIDI. Koperasi Multi Guna Penerima Manfaat Reforma Agraria Kenram (*Kenram Agrarian Reform Beneficiaries Multi-purpose Cooperative/KARBEMPCO*) juga memiliki kebun pembibitan, yang terletak di dalam perkebunan mereka di Sultan Kudarat. Kebun pembibitan lain dikelola oleh sebuah perusahaan swasta yang dikenal sebagai BH & Associates di M'lang, Cotabato.

Beberapa perusahaan dan konglomerat kunci

Produksi minyak sawit di Filipina terutama diarahkan pada pasar domestik. Menurut sebuah laporan industri, produksi CPO saat ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan domestik. Baru-baru ini, telah dilaporkan bahwa FPPI dan KIDI sudah mulai mengekspor CPO mereka ke Jepang dan negara-negara lain karena harga yang lebih tinggi di pasar internasional. Pada waktu penulisan, tidak ada data mengenai volume ekspor minyak kelapa sawit yang tersedia.

Daftar Kilang CPO dan Minyak Biji Sawit lokal diterbitkan dalam buku panduan industri oleh Kantor Pengembangan Minyak Sawit Filipina. Sebagian besar adalah campuran dari perusahaan transnasional yang berbasis di Filipina dan perusahaan domestik yang kebanyakan bergerak di industri makanan. Daftar ini menampilkan perusahaan-perusahaan berikut:

1. Asian Plantations Philippines, Inc.
2. Ricor Mills Corporation
3. Universal Robina Corporations
4. RFM Corporation
5. Mina Oil Mill Corporation

6. Oleo Fats Inc.
7. Royal Oil Products
8. Barons Marketing
9. Pacific Oil Products

Sebuah daftar perusahaan makanan dan manufaktur industri di Filipina yang menggunakan produk minyak sawit berisi perusahaan-perusahaan berikut:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Ansi Corporation | 12. Malabon Soap |
| 2. Universal Robina Corporation | 13. Nestle Philippines |
| 3. Windsor Corporation
Corporation | 14. Tricon Link Industrial |
| 4. Serges Products | 15. United Chemical |
| 5. Meadow Brand | 16. Mina Oil |
| 6. Dayton Corporation | 17. Oleo Fats, Inc. |
| 7. G.A. Import Sales | 18. Sandoz Nutrion |
| 8. Royal Oil | 19. Nutrifats & Oils |
| 9. Tantuco Enterprises | 20 GLY Marketing |
| 10. JNJ Oils Industries | 21. Trade Manila |
| 11. United Coconut | 22. Handyware Philippines |

Kecenderungan investasi dan pola pembiayaan

Dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Indonesia, Filipina bukanlah saingan karena terbatasnya jumlah lahan yang dibuka untuk ekspansi kelapa sawit dan kendala serius yang dihadapi dalam hal pembiayaan. Selama dua dekade terakhir, pengembangan industri sawit sebagian besar digerakkan oleh gabungan antara investasi domestik dan asing. Dukungan pembiayaan diberikan oleh perusahaan minyak sawit untuk memajukan pengembangan kelapa sawit oleh pemilik lahan kecil.

Di Filipina, skema pembiayaan untuk pertanian komersial besar (yang termasuk pertanian perkebunan agribisnis, yang memproduksi tanaman eksport, seperti pisang dan nanas) disediakan oleh bank

komersial swasta. Untuk perkebunan nanas dan pisang, perusahaan-perusahaan komersial besar biasanya melakukan skema kontrak-tumbuh dengan para petani untuk menanam tanaman ini. Namun, bank-bank swasta belum memberikan pembiayaan untuk tanaman bernilai tinggi dan lama berbuah lainnya seperti kelapa sawit dan karet karena mereka lebih nyaman membiayai tanaman bernilai tinggi yang cepat berbuah. Akibatnya, sementara ini lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan untuk tanaman tahunan tradisional seperti padi dan jagung, tetapi sulit untuk mendapatkan bantuan pinjaman untuk tanaman lama berbuah seperti kelapa sawit, karet dan tanaman lain semacam itu.

Llanto telah menguraikan secara ekstensif kelangkaan pembiayaan jangka panjang yang tersedia untuk tanaman yang lama berbuah. Salah satu hambatan yang dikutip oleh Bank Tanah Filipina adalah fragmentasi lahan pertanian yang disebabkan oleh reforma agraria. Program reforma agraria telah mengurangi nilai agunan tanah yang secara tradisional digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman bank. Ketentuan dalam Program Reforma Agraria Komprehensif (*Comprehensive Agrarian Reform Program/CARP*) yang menjadi penghalang investasi swasta di bidang pertanian dan pedesaan meliputi (a) batas kepemilikan, (b) pengalihan lahan dan periode sewa (*holding period*) dan (c) ketidakpastian yang diciptakan oleh penerapan reforma agraria yang lambat.¹⁶

Namun, seperti dijelaskan lebih lanjut oleh Llanto, penghalang untuk pembiayaan swasta ini telah diatasi oleh agribisnis besar di Mindanao. Dengan mengkonsolidasikan lahan yang didistribusikan dalam program reforma agraria melalui berbagai skema pembebasan seperti perjanjian kontrak-tumbuh dan *sewa kembali (leaseback)* dengan Penerima Manfaat Reforma Agraria (*Agrarian Reform Beneficiaries/ARB*), perusahaan agribisnis telah berhasil memproduksi tanaman target ekspor tersebut. Dalam beberapa pengaturan skema kontrak-pertumbuhan, bahan baku dan sarana produksi lainnya juga disediakan oleh perusahaan untuk petani kecil.

Sebagai tanaman lama berbuah yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang, kelapa sawit mulai berbuah hanya dalam tahun

ketiga dan pembayaran proyek hanya bisa dimulai setelah periode ini. Dari sudut pandang industri, yang dibutuhkan adalah ketersediaan pendanaan jangka panjang dengan suku bunga yang wajar. Saat ini, hanya ada dua jendela pembiayaan utama untuk produksi minyak sawit, yaitu Bank Tanah Filipina (*Land Bank of the Philippines/LBP*) dan *the Quedan and Rural Credit Guarantee Corporation (QUEDANCOR)*.

Bank Tanah Filipina

Jendela pembiayaan utama untuk proyek-proyek kelapa sawit saat ini adalah LBP. Menyadari potensi industri ini, LBP telah memulai program yang mendukung berbagai usaha yang terkait dengan kelapa sawit. Program-program ini adalah Pilhan Pembangunan Total-Pendekatan Bank Tanah Bersatu untuk Pembangunan (*Total Development Options-Unified Land Bank Approach to Development/TODO UNLAD*) dan Dana Pinjaman Pertanian dan Dana Pinjaman Desa (*Agricultural Loan Fund and Countryside Loan Fund/ALF/CLF*).

Program TODO UNLAD berupaya untuk secara efektif menghubungkan semua pemain dalam sistem sosio-ekonomi pedesaan, termasuk petani miskin-produSEN dari perusahaan komersial dan industri, Unit Pemerintah Daerah (LGU), bank-bank pedesaan dan koperasi non-pertanian. Begitu produsen terhubung dengan pengolah dan pasar, program ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki infrastruktur dan membuka jalan bagi industrialisasi pedesaan.

Dana Pinjaman Desa (CLF) adalah fasilitas kredit grosir dari Bank Dunia, yang tersedia lewat lembaga keuangan pemberi pinjaman yang berpartisipasi untuk perusahaan investasi swasta yang memenuhi syarat. Dana Pinjaman Pertanian (ALF), di sisi lain, adalah fasilitas kredit untuk koperasi petani yang terlibat dalam proyek-proyek pertanian dan agribisnis. Kedua program itu membiayai proyek untuk industri pertanian dan pengolahan pertanian pangan, termasuk produksi dan pengolahan minyak sawit.

Yang lebih baru, LBP meluncurkan skema pembiayaan baru bagi petani kelapa sawit yang terorganisir dalam koperasi tahun lalu, yang kabarnya lebih mudah diakses dan lebih menarik bagi koperasi. Skema pembiayaan baru itu memiliki beberapa ciri-ciri berikut:

- Disediakan pinjaman maksimum sebesar PhP 110.000/hektar yang akan menutup biaya dan tenaga kerja selama 3 tahun pertama pembangunan perkebunan. Sebagai gantinya, pemilik lahan/koperasi harus menyediakan ekuitas sekitar PhP 20.000/hektar. Pinjaman sebesar PhP 110.000 ini dianggap sebagai pinjaman jangka panjang dimana pembayaran pokok dan bunga akan dimulai pada tahun kelima setelah penanaman.
- Kebutuhan sarana produksi pertanian dan tenaga kerja sampai dengan tahun keempat (sekitar PhP 30.000) akan dikeluarkan oleh LBP sebagai pinjaman jangka pendek dan harus dibayar dalam tahun penjualan hasil panen tahun itu.
- Bank mengharuskan koperasi yang memohon pinjaman itu memiliki perjanjian pemasaran untuk TBS mereka dengan pabrik kelapa sawit tertentu.

Quedan and Rural Credit Guarantee Corporation (QUEDANCOR)

Mandat QUEDANCOR adalah untuk mempercepat aliran investasi dan sumber daya kredit ke pedesaan untuk memicu pertumbuhan dan pengembangan produktivitas pedesaan, lapangan kerja dan perusahaan untuk menghasilkan mata pencarian yang lebih baik dan peluang mendapatkan pendapatan. Dalam hal pembiayaan pembangunan perkebunan kelapa sawit, QUEDANCOR telah meluncurkan apa yang dianggap sebagai skema pembiayaan inovatif yang disebut Jendela Pinjaman Mandiri Kelapa Sawit (*Oil Palm Self Reliant Loan (SRT) Window*), yang dirancang untuk petani sawit kecil untuk mendapatkan kredit resmi. Berikut adalah tujuan SRT:

- 1) Untuk memberikan kesempatan bagi petani sawit untuk meningkatkan produktivitas mereka dengan memberikan bantuan kredit;
- 2) Untuk mendorong adopsi teknologi yang lebih baik dan memperkuat hubungan pasar antara petani sawit, pembeli-perusahaan dan pengolah;
- 3) Untuk membantu meningkatkan pendapatan petani sawit.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a) Ini adalah pinjaman bebas agunan.
- b) Petani akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 15 anggota. Ketua Tim yang dipilih harus menagih dan membayarkan pinjaman pada QUEDANCOR.
- c) Ketua Tim berhak mendapatkan insentif sebesar 25% dari bunga reguler yang akan dipotong dari amortisasi terakhir kelompok itu. Tidak ada biaya layanan yang akan dipotong dari pinjaman Ketua Tim.
- d) Petani harus menghadiri pelatihan dan/atau seminar orientasi nilai.
- e) QUEDANCOR akan membuka rekening koran untuk Ketua Tim dengan biaya bunga dan keseimbangan kredit (*maintaining balance*) dan akan menyediakan saldo minimum yang diperlukan oleh bank untuk membuka rekening giro.

Persyaratan kelayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk di komunitas/*barangay* atau dalam lokasi proyek selama setidaknya satu tahun;
- 2) Berusia 18 sampai 65 tahun;
- 3) Akreditasi QUEDANCOR;
- 4) Pengalaman/pengetahuan atau keinginan untuk menjalani pelatihan pada proyek itu;
- 5) Partisipasi dalam pelatihan/seminar orientasi nilai yang dilakukan oleh QUEDANCOR.

Proyek-proyek yang memenuhi syarat untuk program ini mencakup perkebunan kelapa sawit yang disetujui oleh Departemen Pertanian dan/atau QUEDANCOR. Untuk kedua cara pembiayaan LBP dan

QUEDANCOR ini, pihak bank lebih lanjut membutuhkan perjanjian tripartit antara lembaga pinjaman, perusahaan pabrik dan peminjam, koperasi atau individu pemilik lahan kecil. Syarat dan tanggung jawab dasar sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tripartit adalah sebagai berikut:

1. Institusi Pemberi Pinjaman

- Akan memberikan pinjaman kepada pelamar yang memenuhi syarat
- Akan memberikan bantuan teknis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan koperasi

2. Pabrik Kelapa Sawit

- Akan menyediakan bahan tanam berkualitas dengan biaya yang wajar
- Akan memberikan dukungan teknis dalam pemeliharaan perkebunan
- Akan membeli semua TBS yang dihasilkan oleh peminjam dengan harga pasar yang berlaku
- Akan mengurangi jumlah potongan pinjaman pra-persetujuan dari penjualan TBS yang dikirim oleh pihak peminjam, dan akan menyerahkan potongan pinjaman itu kepada lembaga pemberi pinjaman.

3. Peminjam (Koperasi/Pemegang Hak Tanah)

- Akan rajin mengurus pertumbuhan dan perawatan perkebunan
- Akan mengikuti saran teknis dari teknisi pertanian yang diberikan oleh pabrik
- Akan menjual TBS mereka hanya ke pabrik dengan siapa perjanjian pemasaran ditandatangani

Joint DA-DAR-DENR Convergence Initiative

Pada tanggal 18 Juni 2007, Surat Edaran bersama oleh Departemen Pertanian (DA), Departemen Pembaruan Agraria (DAR) dan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR) menguraikan "Aturan dan Kebijakan Umum yang mengatur Investasi/Perjanjian Agribisnis/Agro-ehutan Dataran Tinggi dalam Kerangka Konvergensi". Edaran ini ditujukan untuk

membimbing perencana, pelaksana lapangan, petani, investor dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam usaha investasi agribisnis.

Seperi yang ditekankan dalam Bab Agribisnis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Filipina tahun 2004-2010, sekitar dua juta hektar lahan agribisnis harus dikembangkan dalam waktu 6 tahun melalui upaya pengembangan pedesaan dari tiga lembaga nasional. Memegang komitmennya pada inisiatif konvergensi ini, DAR telah mengidentifikasi 1,24 juta hektar lahan potensial untuk pengembangan agribisnis, DENR telah mengidentifikasi 1.9333 hektar di bawah Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM) dan DA telah menargetkan 1,3 juta hektar lahan kelapa untuk tumpangsari dan sekitar 0,07 juta hektar lahan yang dimiliki swasta dan Unit Pemerintah Daerah.

Dalam inisiatif konvergensi ini, DA-DAR-DENR akan memfasilitasi usaha investasi pada agribisnis dan wanatani. Beberapa pernyataan kebijakan penting dalam inisiatif ini termasuk: ketahanan dan kecukupan pangan sebagai prioritas utama yang seharusnya tidak dikurangi dalam produksi bahan mentah atau bahan baku untuk bahan bakar nabati; hanya metode, peralatan dan input teknologi pertanian yang aman secara ekologi yang akan diadopsi; daerah prioritas adalah lahan yang didistribusikan dalam CARP dan CBFM; kesejahteraan pemukim/penghuni harus selalu dilindungi dan dijamin dalam hal peluang mata pencaharian; pembagian risiko, biaya dan manfaat di antara petani dan investor harus selalu demi manfaat terbaik dari semua pihak dalam kontrak; investor harus memberikan layanan sosial perusahaan dalam bidang investasi.

Kerangka kerja hukum dan kecenderungan pembebasan lahan

Kerangka kerja hukum dan kebijakan mengenai tanah dan sumber daya alam

Undang-undang Filipina mengenai tanah membagi tanah menjadi dua jenis: tanah publik dan pribadi. Tanah pribadi adalah tanah yang dimiliki individu atau perusahaan dan digunakan untuk keperluan

perumahan, industri/komersial dan pertanian. Tanah publik, di sisi lain, adalah tanah yang dimiliki Negara. Tanah publik diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam sub-divisi berikut: tanah hutan, tanah mineral, tanah pertanian dan taman alam. Selain tanah pertanian, semua tanah lainnya berada di bawah kontrol dan yurisdiksi eksklusif Negara. Semua eksplorasi, pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam berada di bawah penguasaan penuh dan pengawasan Negara.¹⁷ Namun, hukum dan kebijakan Negara telah berevolusi selama bertahun-tahun untuk mengakomodasi legislasi sosial yang memberikan hak kepemilikan dan/atau kepastian tenurial bagi petani tanpa lahan, masyarakat adat dan migran jangka panjang lainnya.

Instrumen tenurial di lahan-lahan hutan

Karena dipaksa untuk mengatasi masalah kepastian tenurial yang terus-menerus bagi masyarakat adat dan penghuni migran lainnya di dataran tinggi, Negara telah mengembangkan programnya dari kekhusukannya akan eksploitasi hutan untuk tujuan komersial ke masalah yang berorientasi sosial. Daripada merelokasi atau menggusur masyarakat dari kawasan hutan, hak pengelolaan diberikan kepada penghuni hutan yang memenuhi syarat, yang kemudian berfungsi sebagai pelopor bagi "program kehutanan yang berbasis masyarakat dan yang berorientasi pada manusia atau kehutanan sosial."

Pilihan tenurial di dataran tinggi yang ada selama tahun 1980-an dan 1990-an mencakup Program Kehutanan Sosial Terpadu (*Integrated Social Forestry Program/ISF*), Program Reboisasi Kontrak (*Contract Reforestation Programs/CR*), Program Pengelolaan Kawasan Hutan (*Forest Land Management Program/FLMP*) dan Program Kehutanan Masyarakat (*Community Forestry Programs/CFP*). Semua kontrak atau perjanjian kehutanan adalah selama 25 tahun, yang bisa diperpanjang untuk 25 tahun lagi. Pengembangan dan pengelolaan suatu kawasan hutan tertentu tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR).

Tahun 1995, Presiden Fidel Ramos mengeluarkan Perintah Eksekutif yang mengadopsi pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai strategi nasional untuk mencapai kehutanan yang berkelanjutan dan keadilan sosial.¹⁸ Selanjutnya, DENR mengeluarkan Peraturan Pelaksana dari program baru yang disebut Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM).¹⁹ CBFM menjadi program strategi reboisasi pokok dan pada saat yang sama langkah keadilan sosial bagi kelompok masyarakat terpinggirkan yang penghidupan dan mata pencarhianya bergantung pada sumber daya hutan, sehingga secara efektif mengganti instrumen pengelolaan hutan lama yang dikeluarkan oleh DENR.

Dalam program CBFM, masyarakat yang diberikan Kesepakatan CBFM (CBFMs) dipastikan mendapatkan tenurial jangka panjang,²⁰ tetapi pada gilirannya bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jasa lingkungan seperti penanaman kembali daerah yang rusak, menindak perburuan liar dan menjalankan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.²¹ Sementara CBFM juga dianggap sebagai strategi pengentasan kemiskinan, pelaksanaannya dibatasi oleh berbagai tantangan. Hambatan utama yang dihadapi termasuk kurangnya dukungan keuangan dan teknis untuk masyarakat untuk melakukan Community Resource Management Framework/Kerangka Manajemen Sumber Daya Masyarakat (CRMF) mereka dan fakta bahwa kegiatan mereka diatur oleh DENR secara berlebihan.²²

Hak tanah masyarakat adat

Masyarakat adat di Filipina berjumlah sekitar 14-15 juta orang dari keseluruhan 90 juta penduduk. Mereka merupakan kelompok yang beragam dengan lebih dari 35 kelompok etno-lingistik utama, masing-masing dengan sub-sukunya sendiri, yang tersebar di tiga pulau utama negara itu: Luzon, Visayas dan Mindanao. Umumnya, sebagian besar masyarakat adat menunjukkan keterikatan yang sangat kuat pada tanah mereka dan sumber daya di dalamnya. Aneka adat dan tradisi sering dibentuk menurut cara mereka memiliki dan melindungi tanah dan sumber daya yang utuh bagi kelangsungan hidup mereka. Sebagai sebuah kelompok, mereka terpinggirkan dari populasi utama dan telah menderita berbagai

pelanggaran hak asasi manusia, ketidakpastian tenurial, kemiskinan dan pengabaian pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sebagian besar masyarakat adat ditemukan di desa-desa terpencil dan dalam ancaman terus menerus dari proyek kehutanan dan pertambangan yang didukung pemerintah, kawasan konservasi yang dinyatakan pemerintah dan perkebunan pertanian komersial.

Instrumen tenurial sebelumnya yang dikembangkan oleh DENR dalam program kehutannya gagal untuk menyelesaikan banyak konflik tanah dalam wilayah-wilayah masyarakat adat. Selain menyediakan jaminan yang sangat terbatas pada masyarakat adat, program ini tidak memiliki kekuatan untuk memberikan kepemilikan penuh atas tanah karena tanah tetap menjadi milik Negara, sehingga mengurangi hak-hak masyarakat adat untuk mengelola dan menguasai wilayah mereka secara mandiri.

Hasil yang signifikan dari advokasi untuk mendapatkan pengakuan Negara atas hak masyarakat adat adalah *Republic Act No. 7381* atau Undang-Undang Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Rights Act/IPRA*), yang ditandatangani oleh Presiden Fidel V. Ramos pada tahun 1997. IPRA dianggap sebagai terobosan besar dalam sistem hukum Filipina karena akhirnya mengakui hak-hak masyarakat adat yang telah diabaikan selama lebih dari 300 tahun.

IPRA mengimplementasikan ketentuan dalam Konstitusi Filipina yang mengakui dan memajukan hak-hak komunitas budaya adat di dalam kerangka kesatuan dan pembangunan nasional. Diantara hak-hak penting yang dilindungi oleh hukum itu adalah: hak milik adat, hak-hak sipil dan politik semua anggota masyarakat adat, dan hak-hak sosial dan budaya semua anggota adat.²³ Secara signifikan, IPRA juga mencakup ketentuan mengenai partisipasi perempuan yang secara strategis menunjukkan adanya celah dalam kebanyakan kebijakan pemerintah yang membatasi, jika tidak meniadakan, dimensi gender.

IPRA menyebabkan pembentukan Komisi Nasional Masyarakat Adat (*National Commission on Indigenous Peoples/NCIP*), yang memiliki mandat untuk menerapkan hukum serta otoritas akhir

dalam pengeluaran sertifikat wilayah leluhur dan sertifikat tanah, sehingga menawarkan pada masyarakat adat cara mengamankan kepemilikan atas tanah mereka. IPRA membedakan dua jenis wilayah masyarakat adat: wilayah leluhur dan tanah leluhur. Wilayah leluhur didefinisikan sebagai "daerah yang umumnya dimiliki komunitas budaya adat/masyarakat adat, yang terdiri dari tanah, perairan pedalaman, pesisir, dan sumber daya alam, yang dipegang di bawah klaim kepemilikan, yang diduduki atau dimiliki oleh masyarakat adat, oleh mereka sendiri atau melalui nenek moyang mereka, secara komunal atau individu sejak zaman dahulu, terus menerus sampai sekarang, kecuali saat terganggu oleh perang, keadaan terpaksa (*force majeure*) atau penggusuran paksa dengan kekerasan, penipuan/tipu daya atau sebagai akibat dari proyek-proyek pemerintah atau adanya transaksi sukarela lainnya yang disetujui pemerintah dan individu/perusahaan, dan yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya mereka." Menurut IPRA, wilayah leluhur tidak hanya mencakup tanah tetapi juga sumber dayanya. Sedang untuk proses untuk mendapat CADC, komunitas adat diwajibkan untuk menyerahkan bukti klaim mereka atas daerah tertentu. NCIP memberikan Sertifikat Wilayah Leluhur (*Certificate of Ancestral Domain Title/CADT*) untuk pemohonan yang disetujui.

Tanah leluhur, di sisi lain, adalah "tanah yang diduduki, dimiliki dan digunakan oleh individu, keluarga dan klan yang merupakan anggota masyarakat adat sejak zaman dahulu, oleh mereka sendiri atau lewat kepentingan pendahulu mereka, berdasar klaim kepemilikan individu atau kelompok tradisional, terus menerus sampai sekarang, kecuali ketika terganggu oleh perang, keadaan memaksa (*force majeure*) atau penggusuran paksa, penipuan/tipu daya atau sebagai akibat dari proyek-proyek pemerintah atau adanya transaksi sukarela lainnya yang disetujui pemerintah dan individu/perusahaan, termasuk, namun tidak terbatas pada, kapling rumah, sawah, hutan pribadi, pertanian ladang dan kapling pohon." NCIP memberikan Sertifikat Tanah Leluhur (*Certificate of Ancestral Land Title/CALT*) untuk permohonan tanah leluhur yang disetujui.

Perlindungan signifikan yang diberikan oleh IPRA adalah keputusan bebas tanpa tekanan, didahului dan diinformasikan (FPIC). IPRA mendefinisikan FPIC sebagai "konsensus dari semua anggota komunitas budaya adat/masyarakat adat akan ditentukan sesuai dengan hukum dan kebiasaan adat masing-masing yang bebas dari manipulasi, campur tangan dan paksaan pihak luar, dan diperoleh setelah sepenuhnya mengungkapkan maksud dan ruang lingkup kegiatan, dalam bahasa dan proses yang dimengerti oleh masyarakat."²⁴ Menurut Pasal 59 dari IPRA, "semua departemen dan lembaga pemerintah lainnya selanjutnya akan secara tegas dilarang mengeluarkan, memperbarui atau memberikan konsesi, lisensi atau sewa apapun, atau menandatangani perjanjian bagi hasil apapun tanpa sertifikasi terlebih dahulu dari NCIP bahwa daerah tersebut itu tidak tumpang tindih dengan wilayah leluhur." Pada tahun 2006, NCIP mengeluarkan panduan FPIC yang menjelaskan proses rinci yang akan harus dilakukan pendukung atau pemohon proyek untuk mendapatkan akses ke wilayah leluhur atau tanah leluhur.²⁵

Namun, sampai saat ini, berbagai isu dan pengaduan telah didokumentasikan dan diajukan terhadap proses FPIC sebagaimana yang dilaksanakan oleh NCIP, antara lain tuduhan manipulasi, penyuapan dan pelanggaran serius hak-hak masyarakat adat untuk membuka jalan bagi kegiatan ekonomi seperti pembalakan skala besar, pertambangan, bendungan serbaguna, perkebunan agribisnis dan proyek-proyek pembangunan lainnya.²⁶

Program Reforma Agraria

The Comprehensive Agrarian Reform Law/CARL (UU Reforma Agraria Komprehensif), yang disetujui pada tanggal 10 Juni 1988, berusaha untuk memajukan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan bagi petani dan buruh tani untuk meningkatkan martabat dan kualitas hidup mereka melalui peningkatan produktivitas tanah pertanian. Baik tanah pertanian publik maupun swasta tercakup dalam CARL untuk didistribusikan. Petani penerima dengan demikian diberi tanah oleh pemerintah yang dibuktikan dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah (*Certificate of Land Ownership Award/CLOA*). Calon penerima manfaat refoma

agraria (ARB) diharuskan membentuk koperasi atau asosiasi, yang upaya kolektifnya adalah untuk membuat tanah menjadi produktif. Meskipun dianggap sebagai kebijakan penting dalam perjuangan mendapatkan tanah dan keadilan sosial oleh para petani tanpa tanah, pelaksanaan UU ini menemui perlawanan sengit dari para tuan tanah dan dalam beberapa kasus, konfrontasi berdarah telah terjadi antara petani/pekerja ladang dan tuan tanah.²⁷

Pembebasan lahan dan kecenderungan ekspansi kelapa sawit

Secara historis, perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di perkebunan besar seperti perkebunan-perkebunan yang sebelumnya dipegang oleh NDC-Guthrie (misalnya NGEI dan NGPI) dan Agumill di Agusan del Sur dan Kenram di Sultan Kudarat. Karena CARP, perkebunan-perkebunan besar ini dihapuskan dan kepemilikannya diberikan kepada petani-pekerja yang membentuk koperasi. Mengkonsolidasikan perkebunan besar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit sulit karena kendala yang disebabkan oleh hukum Filipina atas kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Yang biasa menjadi target adalah mereka yang memegang CLOA, sertifikat tanah pribadi, perjanjian pengelolaan hutan (misalnya ISFP, CBFMA) dan pemegang CADT.

Skema kepemilikan tanah yang berbeda telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Berikut adalah skema berbeda yang dibuat oleh perusahaan kelapa sawit dalam kaitannya dengan pemilik tanah:

1. Filipinas Palm Oil Plantations, Inc. (FPPIC)

Skema	Ciri-ciri
Sewa	<ul style="list-style-type: none">- tingkat sewa tetap atau meningkat secara bertahap sampai periode tertentu (25 tahun dan bisa diperpanjang apabila disetujui oleh pemilik tanah);- pihak perusahaan yang mengelola perkebunan/perkebunan inti (baik teknis dan keuangan);- pemilik lahan/pemegang CLOA/anggota koperasi dipekerjakan sebagai buruh/pekerja- ini adalah jenis perjanjian yang disepakati oleh NGEI dan NGPI
Plasma	<ul style="list-style-type: none">- petani kecil mampu membiayai sendiri, membeli bibit dari pabrik dan membiayai pengembangan lahan- petani kecil juga dapat menerima bantuan keuangan (pembelian bibit) dan bantuan teknis dari perusahaan- petani mengirimkan TBS ke pabrik

2. Kenram Industrial & Development, Inc. (KIDI)

Skema	Ciri-ciri
Plasma	<ul style="list-style-type: none">- pemilik pabrik menyediakan bibit hibrida dan teknologi- petani mengeluarkan uang untuk pembukaan perkebunan- semua hasil produksi dikirim ke pabrik dengan harga pabrik yang berlaku- biaya bibit atau sarana produksi dipotong selama periode tertentu, dengan atau tanpa bunga

	<p>Pilihan:</p> <p>1. Tanam sekarang, bayar nanti</p> <ul style="list-style-type: none"> -sehat/siap tanam tanpa biaya, tanpa beban bunga -Pupuk-pupuk tanpa biaya, tanpa beban bunga selama 4 tahun pertama -Bebas layanan agronomi <p>Perjanjian Pembelian dan Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Petani menjual TBS secara eksklusif kepada perusahaan, berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama dari kedua belah pihak -TBS harus sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan dalam perjanjian -Petani membayar biaya bibit dan pupuk tanpa bunga dengan memotong 30% pada pengiriman TBS mulai dari pengiriman TBS pertama sampai pembayaran penuh -Setelah dukungan pengembangan selama 4 tahun dan atas kesepakatan antara petani dan KIDI, perusahaan memasok petani dengan sarana produksi pertanian tanpa bunga dan dibayarkan dalam waktu 30 hari. Setiap jumlah yang belum dibayar setelah 30 tahun memperoleh bunga sebesar 12% per tahun sampai lunas. <p>2. 100% dibiayai sendiri oleh petani</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ petani membayar bibit secara tunai dan membayar tenaga kerja dan bahan ▪ KIDI menyediakan layanan gratis konsultasi agronomi selama 4 tahun pertama pengembangan tanaman
--	---

3. AGUMILL Philippines, Inc. (API)

Skema	Ciri-ciri
Plasma	Opsi:

	<p>1. 100% dibiayai sendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ termasuk bibit kelapa sawit ▪ biaya tenaga kerja dan input material <p>2. Pinjaman bibit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tenaga kerja dan input material dibiayai sendiri <p>Kesepakatan tripartit - bahan tanam dan bantuan teknis Bank Tanah menyediakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman pengembangan</p>
Sewa - 1.200 hektar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sewa tanah per tahun selama 25 tahun ▪ fasilitasi pinjaman pembiayaan dari <i>First Consolidated Bank</i> (FBC) dan <i>Land Bank of the Philippines</i> (LBP) ▪ Bibit kelapa sawit ▪ Tenaga kerja ▪ input material <p>Dalam skema pembiayaan bank, pemilik tanah menyetujui sebuah kontrak dengan perusahaan dan diberikan bibit tanaman siap tanam dengan biaya tertentu dan layanan teknis sepanjang masa kontrak 25 tahun. Sebagai imbalannya, para pemilik tanah/petani diwajibkan menjual semua TBS mereka kepada perusahaan yang berdasar pada standar kualitas tanaman yang ditetapkan dalam perjanjian mereka.</p>

1. ABERDI, Inc.

Skema	Ciri-ciri
Plasma	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sebagian besar dibiayai sendiri terdiri dari petani kecil dan juga anggota Unit Pemerintah Daerah
Sewa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wilayah CBFM

Eksansi kelapa sawit di kawasan hutan

Karena terbatasnya daerah yang terbuka untuk ekspansi kelapa sawit di dataran rendah Filipina, investor kelapa sawit memindahkan rencana pengembangannya ke daerah dataran tinggi. Masalahnya, beberapa daerah di mana perkebunan kelapa sawit telah berekspansi dan daerah yang potensial untuk pengembangan ke depan, terletak di lahan hutan yang dilindungi oleh instrumen tenurial DENR dan di wilayah leluhur masyarakat adat.

Akibat lobi industri kelapa sawit terhadap DENR untuk "mempertimbangkan kelapa sawit Afrika sebagai tanaman tambahan untuk pengembangan perkebunan kehutanan", Menteri Eliseo Gozun mengeluarkan Surat Edaran No 2004-12 pada bulan Agustus 2004 yang menguraikan "Pedoman yang direvisi yang Mengatur Identifikasi Kawasan Hutan untuk Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit Afrika."²⁸ Berdasarkan pedoman ini, perkebunan kelapa sawit dibuka di kawasan hutan dengan "instrumen tenurial seperti, namun tidak terbatas pada, IFMA, SIFMA, CBFMA dan perjanjian penggunaan hutan lainnya." Namun demikian, pedoman ini juga menyediakan "tindakan pencegahan yang tepat guna" dengan memperhitungkan "kebutuhan teknis dan ekologis yang penting/mendesak dari spesies yang dibicarakan". Menurut DENR, tindakan-tindakan pencegahan yang diperlukan adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Pembukaan perkebunan kelapa sawit Afrika diperbolehkan di daerah terbuka/lahan semak belukar di kawasan hutan dengan kemiringan tidak lebih dari 50% (sekitar 26 derajat) dan yang bukan bagian dari kawasan lindung, termasuk zona penyangganya. Dalam kasus apapun, perkebunan kelapa sawit Afrika tak boleh diizinkan dalam Kawasan Lindung yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Nomor 7586 atau Sistem Kawasan Lindung Terpadu Nasional (*National Integrated Protected Area System / NIPAS*);
- 2) Daerah yang diusulkan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit Afrika harus dinyatakan cocok dan tersedia untuk pengembangan kelapa sawit secara bersama oleh Kantor Provinsi Otoritas Kelapa Filipina dari Departemen Pertanian

(*Provincial Office of the Philippine Coconut Authority, the Department of Agriculture/PCA-DA*) dan Kantor Provinsi DENR;

- 3) Perkebunan kelapa sawit Afrika yang akan dibuka di dalam wilayah yang sudah dilindungi oleh instrumen tenurial yang ada, seperti IFMA dan SIFMA, akan dibatasi hingga hanya 10% dari daerah-daerah ini sesuai dengan rencana pengembangan dan manajemen yang komprehensif dan atas persetujuan dari Menteri DENR;
- 4) Untuk kawasan CBFM, penanaman kelapa sawit Afrika akan diizinkan dengan syarat harus tunduk pada Kerangka/Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat (*Community Resource Management Framework/Annual Work Plan/CRMF/AWP*) (yang disetujui atau diubah, dan mengikuti kriteria No 1 dan sertifikasi dalam kriteria No 2 sebagaimana diuraikan di atas);
- 5) Untuk instrumen tenurial kehutanan lain yang ada, kebijakan dan pedoman yang mengatur instrumen tenurial tersebut harus diikuti secara ketat di daerah yang diijinkan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit Afrika;
- 6) Dalam kasus apapun, tak diperkenankan mengkonversi hutan alam dan hutan tanaman yang ada (dalam hutan produksi dan hutan lindung) untuk membuka perkebunan kelapa sawit Afrika, dan
- 7) Pembukaan setiap perkebunan kelapa sawit Afrika di kawasan hutan harus tunduk pada proses kajian dampak lingkungan.

Pedoman kebijakan ini dengan begitu menginformasikan bantuan yang diberikan oleh DENR kepada Organisasi Rakyat pemegang CBFMA dalam memfasilitasi investasi sektor swasta, badan pemerintah lainnya dan individu untuk pemanfaatan dan pengembangan bagian-bagian dari seluruh wilayah CBFM. Menariknya, Surat Edaran No 98 yang dikeluarkan oleh DENR pada tanggal 24 Juni 1998 sudah ada, yang menetapkan "Pedoman mengenai Persetujuan di dalam Wilayah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM)." Hal ini dilihat sebagai bagian dari upaya DENR "untuk mempercepat dan mensistematiskan kontrak di

kawasan CBFM" dalam rangka "mendorong investasi sektor swasta dalam Program CCBFM." Berdasarkan pedoman ini, ada dua jenis kontrak yang dapat disepakati untuk wilayah CBFM, yaitu.

- 1) Kontrak Layanan, yang meliputi ekstraksi hasil hutan seperti penebangan dan *bucking*; pembangunan jalan, pengangkutan kayu besar dan kecil, kegiatan pengolahan atau penggergajian; reboisasi dan perbaikan tegakan kayu (penyingkiran spesies invasif); pemasaran hasil hutan dan layanan profesional atau bantuan teknis.
- 2) Kontrak Pengembangan, yang meliputi pengembangan kayu dan non kayu; pengembangan wanatani; pengembangan pertanian, produksi ternak dan ekowisata.

Kontrak yang berkaitan dengan pengembangan kelapa sawit masuk dalam kategori 2 atau yang disebut Kontrak Pengembangan. DENR. Namun, DENR sangat menekankan bahwa "semua kontrak harus senantiasa konsisten dengan Perjanjian CBFM PO dan CRMF yang disetujui." Jangka waktu Kontrak Pengembangan harus jangka waktu yang disepakati para pihak tetapi dalam kasus apapun tidak boleh melebihi jangka waktu CBFMA atau perpanjangannya, jika ada.³⁰

Eksplansi kelapa sawit di lahan ARB dan lahan pribadi

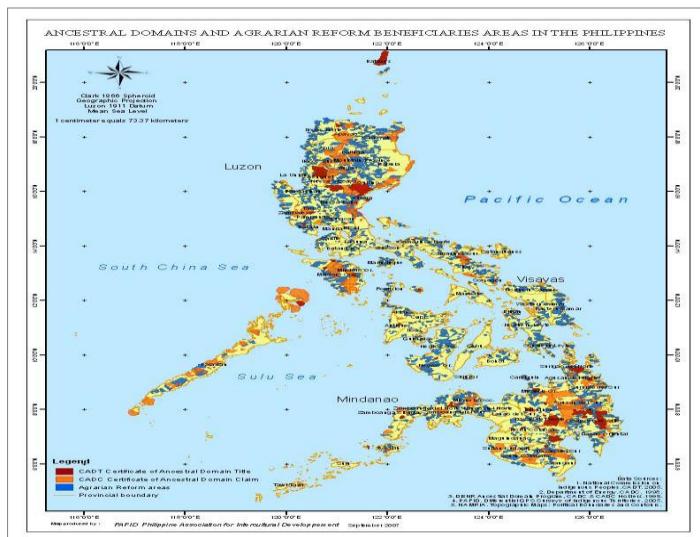
Eksplansi sawit sebagian besar terkonsentrasi di tanah milik pribadi petani kecil dan juga di antara Penerima Manfaat Reforma Agraria (ARB) pemegang CLOA. Tanah pemegang CLOA diserahkan kepada perusahaan kelapa sawit melalui perjanjian penyewaan kembali. Flores-Obanil dan Manahan mendefinisikan perjanjian penyewaan kembali sebagai "mekanisme utama bagi reforma agraria di sektor perkebunan di mana koperasi atau pekerja penerima manfaat atau petani individu menyerahkan kontrol atas tanah mereka melalui kontrak sewa pada perusahaan multinasional atau agribisnis atau mantan pemilik tanah untuk mendapat sewa dan pekerjaan di pertanian itu sebagai pekerja."³¹ Pada tahap awal industri minyak sawit, perjanjian penyewaan kembali menjadi cara

yang mendominasi pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

Pada tahun 1998, DAR, melalui Menteri Horacio Morales, mempromosikan beberapa skema seperti penyewaan kembali, usaha patungan dan kontrak tumbuh sebagai strategi resmi pelaksanaan reforma agraria. Strategi ini telah banyak dikritik sebagai bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan petani kecil seperti "penyewaan kembali" dan perjanjian kontrak tumbuh petani kepada perusahaan-perusahaan agribisnis multinasional seperti Dole dan Del Monte.³² Beberapa masalah dari program reforma agraria mencakup kurangnya dukungan keuangan kepada petani penerima, kerentanan pemegang CLOA/ARB terhadap skema penyewaan kembali di mana mereka menerima sewa yang rendah, janji-janji lapangan kerja dan tunjangan lain yang tak terpenuhi, dan seterusnya. Jadi, banyak petani yang menyetujui skema seperti itu tetap miskin walau telah melepaskan akses dan kontrol mereka atas tanah mereka.

Eksplansi kelapa sawit di daerah Wilayah Leluhur

Beberapa perkebunan kelapa sawit yang ada yang terletak di dalam di atau tumpang tindih dengan wilayah leluhur dapat ditemukan di Bukidnon, Sultan Kudarat, Augusan, Cotabato dan Palawan. Isu-isu khusus mengenai FPIC dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat lainnya akan dibahas dalam lima studi kasus yang dimasukkan dalam riset ini. Sementara tanah yang luas sangat dibutuhkan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit, beberapa anggota Dewan Pengembangan Kelapa Sawit tidak terlalu tertarik untuk mengembangkan daerah wilayah leluhur karena menurut mereka proses persyaratannya panjang dan rumit. Namun, di lapangan, "fasilitator" atau calo, baik yang dipekerjakan oleh perusahaan kelapa sawit atau bekerja sendiri, secara agresif mencari tanah yang layak untuk perkebunan kelapa sawit di daerah wilayah leluhur, yang banyak di antaranya merupakan padang rumput yang luas, yang dianggap cocok untuk pengembangan kelapa sawit.



Peta ARB dan CADT

Pengalaman dan isu di lahan perkebunan kelapa sawit

STUDI KASUS 1. Kasus penerima manfaat perkebunan kelapa sawit di Sultan Kudarat, Mindanao

Koperasi Multi Guna Penerima Manfaat Reforma Agraria Kenram (KARBEMPCO) di Isulan, Sultan Kudarat, adalah salah satu dari dua penerima 1.600 hektar perkebunan kelapa sawit yang sebelumnya dimiliki oleh Kenram Filipina, Inc (KPI) dan *the First Southern Land Development Corporation, Inc.* di Isulan, Sultan Kudarat.³³ Koperasi itu menerima CLOA kolektif pada tahun 2002. Meski ada sedikit ruang untuk pemain kecil di industri yang dipimpin pasar seperti industri sawit, masih ada peluang yang belum dimanfaatkan oleh ARB untuk memaksimalkan dana abadi mereka. Pengalaman KARBEMPCO menunjukkan bahwa meskipun skema pengalihan lahan berorientasi pasar membatasi peluang untuk reforma yang ditawarkan CARP, keuntungan yang diperoleh oleh aksi kolektif ARB tidak boleh diabaikan.



Kebun pembibitan kelapa sawit yang didirikan Kenram di Sultan Kudarat

Pengembangan kelapa sawit di Sultan Kudarat

Sultan Kudarat memainkan peran kunci dalam industri sawit Filipina. Pada tahun 1966, KPI mendirikan perkebunan kelapa sawit

kedua Filipina di provinsi ini. Perusahaan itu mengembangkan perkebunan inti seluas kira-kira 1.600 hektar dengan fasilitas pengolahan berkapasitas 20 ton yang didirikan di jantung perkebunan itu. Perusahaan itu memperluas perkebunan melalui skema plasma dengan beberapa keluarga di Tacurong, Isulan, Esperanza dan Presiden Quirino. Skema plasma dirancang untuk memperluas perkebunan itu, dengan KPI memberikan pinjaman untuk bahan tanam dan input pertanian sebagai ganti atas hak tunggal untuk membeli TBS yang dihasilkan oleh petani.

Tidak ada ekspansi besar terjadi di Sultan Kudarat sampai tahun 1999 ketika Agusan Milling Corporation (Agumil), bekerja sama dengan Dewan Pengembangan dan Perdamaian Cotabato Tengah, membuka kebun pembibitan mereka yang pertama untuk memperluas perkebunan mereka di Sultan Kudarat, Maguindanao dan provinsi Cotabato. Hal ini diikuti oleh pembukaan kebun pembibitan KIDI, KARBEMPCO dan KPI. Perkebunan kelapa sawit di Sultan Kudarat kini mencakup daerah seluas kira-kira 11.000 hektar dan diperkirakan akan meluas seiring meningkatnya minat pada produksi minyak sawit.

Cakupan Daerah

Pada tahun 1999, daerah yang ditanami kelapa sawit di Sultan Kudarat hanya seluas 4.800 hektar. Daerah ini kini telah berkembang menjadi sekitar 11.000 hektar, termasuk perkebunan Kenram. Kebun pembibitan terus menghasilkan bahan tanam dan kegiatan ekspansi perkebunan terus berlangsung.

Kotamadya	KIDI ^a (termasuk koperasi)	KPI	Agumil
Tacurong		43,37	397,83
Isulan		30,73	118,10
Esperanza		18,83	61,81
Bagumbayan		49,43	399,59
Palimbang		4,29	
Columbio		38,95	922,81
President Quirino		39,79	501,49
Lutayan			107,94
Lambayong		3,13	34,47
Senator Ninoy			77,09
Total	6,994.00	228,52	2.621,13

Total luas ekspansi kelapa sawit di Sultan Kudarat bulan Mei 2010 (rincian luasan lahan tidak tersedia)

Pabrik pengolahan

Sultan Kudarat memiliki fasilitas pengolahan kedua yang didirikan di Filipina dengan kapasitas 20 ton per jam. Fasilitas pengolahan pertama didirikan di Basilan dan melayani perkebunan seluas 280 hektar. Agumil dan Filipinas Palm Oil mendirikan fasilitas pengolahan ketiga dan keempat masing-masing di provinsi Agusan. Baru-baru ini, dua pabrik tambahan didirikan di Mindanao, satu di provinsi Maguindanao yang dimiliki oleh Agumil dan satu lagi di Bukidnon yang dimiliki Aberdi. Pabrik ini mengolah TBS menjadi CPO dan minyak biji sawit untuk keperluan pangan dan industri. Semua fasilitas pengolahan dimiliki oleh para investor, yang merupakan mantan pemilik tanah dalam kasus Sultan Kudarat. Dua fasilitas pengolahan berada dekat dengan KARBEMPCO, satu di Sultan Kudarat yang dimiliki dan dioperasikan oleh KIDI dan satu lagi di Buluan, Maguindanao, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Agumil. KARBEMPCO hanya berurusan dengan KIDI dalam pemasaran TBS. Koperasi itu melakukan pengiriman setiap hari ke pabrik dan dibayar dalam jangka waktu 15 hari berdasarkan harga

minyak yang berlaku dan hasil tingkat pemulihan minyak dari laboratorium.

Harga

Harga kelapa sawit sangat tergantung pada pasar dunia dan nilai tukar yang berlaku. Harga lokal dipandu oleh rumus yang tertulis di bawah ini. Asumsi lain yang dipertimbangkan dalam perhitungan ini adalah tingkat perasan buah dan biaya pengolahan, yang ditanggung oleh produsen. Biaya pengolahan di saat penulisan laporan ini dipatok pada PhP 600/ton di KIDI dan kontrak penawaran terbaru dari Agumil dipatok pada PhP 750.

[(A x B) + (C x D) - P750/MT] x 85%, di mana:

- A Harga penjualan per ton minyak sawit mentah atau CPO (Setelah dikurangi Ppn)
- B tingkat ekstraksi minyak berdasarkan OER rata-rata di pabrik atau beberapa penanaman baru
(berdasarkan #1 di bawah ini jika kualitas tanaman tidak melebihi batas seperti yang ditunjukkan dalam jadwal B)
- C Harga jual per ton biji (setelah dikurangi PPN)
- D tingkat ekstraksi biji rata-rata KER

*Biaya pengolahan per ton (tergantung pada tinjauan tahunan yang didasarkan pada eskalasi biaya tenaga kerja dan bahan yang diperkirakan sebesar 2% per tahun).

15% Pemasaran minyak berdasarkan pada indeks minyak dan lemak mingguan.

Rumus harga (dari kontrak terbaru Agumil)

CATATAN:

1. Tingkat Ekstraksi Minyak (Oil Extraction Rate/OER) didasarkan sebagai berikut:

3-4 tahun dari penanaman	15,0%
4-5 tahun dari penanaman	17,0%
5-6 tahun dari penanaman	18,0%
6 tahun lebih dari penanaman	berdasarkan OER Aktual Pabrik

2. Tingkat Ekstraksi Biji (Kernel Extraction Rate/KER) didasarkan sebagai berikut:

3-4 tahun dari penanaman	3,0%
4-5 tahun dari penanaman	3,4%
5 tahun lebih dari penanaman	berdasarkan KER Aktual Pabrik

CATATAN: OER dan KER di atas adalah untuk referensi. Ekstraksi yang sebenarnya didapat dari analisa pabrik.

Tren harga kelapa sawit 92008-2009) (Sumber: KARBEMPCO)



Situasi saat ini dari sudut pandang koperasi

Hak kolektif atas hak individu

Pendistribusian tanah di mana terletak perkebunan Kenram terjadi pada tahun 2002. Dibandingkan dengan perjuangan yang sulit dan

kadang keras seperti yang dilaporkan terjadi di perkebunan pisang, pemberian tanah kepada ARB di perkebunan di atas relatif berjalan lancar dan difasilitasi oleh kemitraan antara Organisasi Rakyat (PO), NGO dan Departemen Reforma Agraria. Pemilik tanah juga tidak menunjukkan banyak perlawanan dan dilaporkan menunjukkan keterbukaan untuk melakukan negosiasi yang terkait dengan distribusi lahan, pilihan manajemen dan perjanjian pemasaran. Itu tentu membantu bila pemilik tanah tetap menguasai kepemilikan dan kontrol atas fasilitas pengolahan meskipun itu terletak dalam wilayah yang dikuasai oleh perkebunan.

Selama periode ini, kegiatan persiapan sosial dilakukan untuk mempercepat proses distribusi lahan. Pembentukan PO melalui pengorganisasian koperasi menjadi fokus utama dari kegiatan ini. Kegiatan berikutnya diluncurkan untuk membangun kesadaran dan memperkuat kapasitas anggota PO untuk berpartisipasi dengan aktif. PO diyakinkan bahwa anggotanya akan menjadi calon penerima manfaat. Koperasi dikelola dan bertindak sebagai organisasi-organisasi penuntut. Selagi penguatan organisasi rakyat dilakukan, usaha advokasi, jaringan kerja, lobi dan negosiasi juga mendapat perhatian untuk mempercepat proses.

Koperasi KARBEMPCO dan MAPARBEMPCO menerima Sertifikat Kepemilikan Tanah (CLOA) kolektif mereka pada tahun 2002. KARBEMPCO memiliki 413 anggota (2 perempuan dan 411 laki-laki) sedangkan MAPARBEMPCO memiliki 295 anggota (59 perempuan dan 236 laki-laki). Pada saat itu juga kelangsungan dan kelayakan operasi perkebunan yang dikelola PO diputuskan oleh penerima manfaat. Saat ini, *barangay* Kenram dan Mapantig berada dalam sebuah Komunitas Reforma Agraria (*Agrarian Reform Community/ARC*) dan menerima dukungan prioritas dari pemerintah untuk pengembangan masyarakat melalui DAR dan Unit-unit Pemerintah Daerah.

Koperasi ini mengatur mekanisme untuk mempertahankan operasi perkebunan. Para pekerja, kini ARB, tetap dipertahankan. Kenaikan upah dan pemberian tunjangan termasuk pembagian keuntungan juga dilaksanakan. Manajemen perkebunan berada di bawah majelis umum (*General Assembly*) tetapi Dewan Direksi juga membuat

keputusan di antara pertemuan-pertemuan majelis. Seorang direktur umum mengelola semua proyek ekonomi koperasi sedangkan manajer lapangan mengawasi operasi perkebunan.

Perkebunan yang dikelola koperasi

Tabel di bawah ini menunjukkan dividen tahunan anggota-anggota, tidak termasuk gaji dan manfaat-manfaat lainnya. Pada tahun 2008, setiap anggota menerima PhP 10.000 tapi menurun menjadi PhP 4.500 pada tahun 2009 karena penurunan pendapatan bersih koperasi yang dihasilkan dari produksi kelapa sawit.

Penurunan pendapatan produksi pada tahun 2008 dan 2009 dikaitkan dengan fluktuasi harga TBS selama periode tersebut. Produksi TBS juga mengalami penurunan karena program penanaman kembali koperasi dari tahun 2005 sampai 2009, yang mencakup total 559,39 hektar (72 hektar pada 2005, 348 hektar pada 2006, 140 hektar pada 2009), yang merepresentasikan lebih dari setengah total daerah produksi koperasi. Produksi di 72 hektar daerah yang ditanami kembali telah dimulai dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun ke-12.

Pendapatan koperasi 2002-2009

KARBEMPCO	Akhir tahun 2002	Akhir tahun 2003	2008	2009
Pendapatan:				
Produksi/Pemasaran	9.544.787,94	34.935.253,77	13.914.010,48	6.118.899,94
Penambahan Modal	565.098,00	2.023.899,67	15.932.800,00	15.932.800,00
Dividen/Anggota	16.426,65	34.878,62	10.169,63	4.500,00
Aset total	74.280.392,24	97.769.537,29	174.115.174,02	160.961.604,76
Anggota	413	413	413	413

Data perbandingan: selama pengambilalihan (2002-2003) dan yang terakhir (2008-2009)

Melalui pendapatan mereka dari produksi kelapa sawit, para anggota koperasi mampu meningkatkan modal mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan diversifikasi usaha setelah baru dua tahun beroperasi. KARBEMPCO saat ini menyediakan

kredit kepada anggotanya, manajemen toko konsumen, peternakan dan penggemukan babi, dan pemasaran bahan tanam.

Selain dividen tahunan yang diterima oleh anggota koperasi (lihat tabel di atas), upah harian buruh telah meningkat dari Php 170 menjadi PhP 218 (upah minimum wajib) dengan tunjangan hidup PhP 15/hari. Koperasi juga mampu menyediakan kesempatan kerja tambahan. Dari 180 tenaga kerja di masa lalu, KARBEMPCO sekarang memiliki 190 pekerja perkebunan, sebagian besar laki-laki. Kesempatan kerja juga dihasilkan melalui inisiatif ekonomi lainnya dari koperasi yang dijelaskan di atas. Koperasi juga telah mampu memenuhi kebutuhan dasar anggota dalam hal perumahan. Sebelum pengambilalihan perkebunan kelapa sawit, sebagian besar pekerja tinggal di barak yang dimiliki oleh KPI. Setelah koperasi mengambil alih, daerah seluas 27 hektar dialokasikan untuk perumahan. Setiap anggota menerima lahan seluas 500 meter persegi untuk perumahan.

Sejak dua *barangay* (Kenram dan Mapantig) menjadi Komunitas Reforma Agraria (ARC), mereka telah menjadi daerah prioritas untuk proyek-proyek pemerintah melalui DAR. Pengembangbiakan dan penggemukan babi di KARBEMPCO merupakan salah satu proyek yang didanai oleh program DAR. Proyek air minum juga salah satu proyek pendukung yang kini langsung dikelola oleh koperasi. Layanan lain yang mereka bisa dapatkan adalah dukungan untuk fasilitas listrik, sistem telepon dan saluran kabel TV.

Keuntungan ini tidak terbatas pada anggota koperasi. Koperasi juga menyediakan gaji dan subsidi untuk satu katekis (pembimbing calon baptis) dan dua guru di sekolah dasar umum *barangay*. Proyek pengembangbiakan dan penggemukan babi juga menyediakan pemberian anak babi kepada penduduk *barangay*. Penerima manfaat proyek ini ditentukan oleh sebuah komite gabungan yang terdiri dari perwakilan koperasi dan pejabat *barangay*.

ARB optimis bahwa mereka akan mampu mengubah koperasi menjadi pemain utama dalam rantai industri sawit. Sebuah langkah awal menuju hal ini adalah pembukaan kebun pembibitan untuk program peremajaan dan ekspansi mereka. Koperasi telah

memperoleh biji sebelum berkecambah berkualitas dari Papua Nugini. Koperasi juga siap memulai uji coba untuk proyek produksi pupuk organik menggunakan limbah kandang babi dan limbah dari pabrik, sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia di perkebunan.

Namun, ada keterbatasan yang masih harus mereka atasi, terutama adalah keterampilan bisnis yang terbatas dan modal yang tersedia bagi anggota koperasi. Seminar pendidikan bagi para pemimpin serta anggota telah dilaksanakan sejak koperasi mengambil alih perkebunan. Namun, meskipun mendapat pelatihan dan seminar ini, masalah-masalah tertentu dalam organisasi dan manajemen bisnis masih ditemui. Hal ini mungkin bisa dimengerti mengingat bahwa ARB masih dalam tahap peningkatan diri dari operasi perkebunan tunggal menjadi beberapa operasi bisnis. Keterbatasan modal menghambat ekspansi perkebunan dan ekspansi bisnis koperasi saat ini. Contoh nyata dari hal ini adalah pembangunan kebun pembibitan. Meskipun koperasi telah membangun kebun pembibitan, kebun ini dibatasi hanya untuk program peremajaan wilayah koperasi yang ada. Akibatnya, wilayah lain untuk ekspansi perkebunan tidak dapat diakomodir.

Kesimpulan

Para ARB perkebunan kelapa sawit Kenram bekerja dalam sebuah industri yang dikendalikan oleh pemain besar di mana harga tergantung pada harga dunia dan bibit berasal dari luar negeri. Namun, mereka memiliki kendali atas lahan yang merupakan anugerah penting dan sumber produk yang paling dibutuhkan pabrik dan pembeli. Manfaat yang diperoleh, seperti yang terlihat dari sudut pandang koperasi, tidak dapat diremehkan. Namun, situasi mereka saat ini membawa kekhawatiran tertentu yang layak dipertimbangkan oleh koperasi, mitra NGO, dan pemerintah.

Pertama, sertifikasi kolektif, bila diikat ke skema yang dipimpin pasar, merusak prinsip-prinsip redistributif dari reforma agraria. Hal ini terlihat jelas sekali ketika kita melihat kondisi perempuan penerima manfaat yang mengalami pengabaian dalam banyak hal. Mereka tidak dipekerjakan di perkebunan, juga tidak memiliki suara

dalam kepemimpinan koperasi. Perempuan memperoleh penghasilan dengan mengumpulkan buah yang jatuh dari tandan buah sawit dan menjual ini ke koperasi dengan harga PhP 30-40 per kilo. Hanya satu perempuan yang bekerja di kantor koperasi itu. Sebagai anggota minoritas, belum ada laporan tentang proyek yang secara khusus menguntungkan perempuan. Sebagai pemilik tanah, mereka praktis kehilangan akses dan kendali atas tanah yang mereka miliki.

Dalam kasus sejumlah perkebunan pisang yang didistribusikan secara individual, alasan anti-reformasi jelas keliru dalam menyatakan bahwa memecah perkebunan besar menjadi perkebunan kecil akan mengakibatkan kerugian bagi industri ekspor pisang. Di tengah tantangan, situasi menunjukkan potensi pengentasan kemiskinan di bawah sistem perkebunan kecil dan meningkatnya kemampuan ARB untuk secara langsung melibatkan dan mempengaruhi pasar.³⁴ Di beberapa perkebunan ini, perempuan dan laki-laki penerima manfaat bekerja di pertanian mereka masing-masing dan memasok volume produksi yang dibutuhkan oleh koperasi mereka yang bertanggung jawab atas pemasaran.

Karena skema pengalihan lahan yang berorientasi pasar, pembayaran tahunan untuk potongan mencapai jutaan peso. Pemotongan angsuran KARBEMPCO didasarkan pada Produksi Bruto Rata-Rata perkebunan itu, yang dihitung sebesar 5% selama 5 tahun pertama dan 10% dari tahun ke-6 hingga ke-30. Jika dihitung berdasarkan tabel pendapatan yang ditunjukkan sebelumnya, pada tahun 2003 misalnya, sebanyak PhP 1.747.000 akan dipergunakan untuk membayar potongan dari pendapatan koperasi yang dilaporkan mencapai PhP 34.395.000. Jumlah ini dengan mudah bisa membiayai rehabilitasi perkebunan itu atau proyek mata pencaharian bagi perempuan dan anggota lain yang tidak dapat diserap di perkebunan itu. Perusahaan juga membuat langkah bijaksana dengan mempertahankan fasilitas pengolahan dan mentransfer biaya produksi ke koperasi.

Sebagian besar dari produksi kelapa sawit yang ada di provinsi ini ada di tangan KARBEMPCO. Mereka bisa memaksimalkan posisi ini sebagai daya ungkit dalam bernegosiasi dengan perusahaan.

Kedekatan mereka dengan dua pabrik minyak harus bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk produksi mereka karena fasilitas pengolahan sekarang bekerja di bawah kapasitas karena pasokan yang rendah. Pengembangan kebun pembibitan adalah inisiatif yang bagus tetapi ini sebaiknya tidak dibatasi pada kebutuhan koperasi tersebut. Mereka bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam menyediakan pengangkutan dan bibit untuk petani kelapa sawit lainnya, khususnya para petani kecil. Hal ini akan membantu diversifikasi pendapatan mereka sambil memberikan dukungan kepada komunitas terdekat mereka di luar keanggotaan koperasi.

Penerima manfaat akan bisa mengatasi tantangan dalam reforma agraria yang dipimpin pasar jika ada penyatuhan gerakan sosial yang kuat dan tindakan pemerintah yang memberi perlindungan terhadap tekanan yang diberikan perusahaan transnasional dan tuan tanah dalam pertanian komersial. Borras mengutip Fox dalam merujuk ini sebagai strategi *bibingka* dimana "interaksi yang saling memperkuat antara kekuatan masyarakat dan pasukan pro-reformasi negara" bisa melawan tindakan anti-reformasi.³⁵ Hal ini telah dialami pada tahap pendistribusian CARP untuk sejumlah perkebunan di Mindanao, termasuk yang dimiliki Kenram.

Sebuah strategi yang sama diperlukan dalam hal pasca-distribusi. Pemerintah sebaiknya tidak meninggalkan fungsi regulasinya. Tidak boleh ada kontrak, misalnya, dilakukan antara investor/bekas pemilik tanah dan penerima manfaat tanpa upaya pemerintah menyeimbangkan kesenjangan dalam kemampuan negosiasi di antara kedua belah pihak. Pengalihan lahan juga harus "dilengkapi dengan kebijakan lain yang memberikan petani kecil akses ke pasar, sarana dan insentif produksi yang lebih baik."³⁶ Dalam kasus Kenram, penerima manfaat koperasi juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa keuntungan dari reforma agraria bisa dirasakan oleh semua – pimpinan dan anggota, laki-laki dan perempuan.

STUDI KASUS 2. Ekspansi kelapa sawit di Impasugong, Bukidnon.

Impasugong terletak di timur laut provinsi Bukidnon dan secara politis dibagi menjadi 13 *barangay*. Kedekatannya dengan Malaybalay City, ibukota Bukidnon, dan Cagayan de Oro City dianggap sebagai keuntungan dalam hal perdagangan. Berdasarkan Rencana Penggunaan Lahan Komprehensif Impasugong tahun 2010-2019, penduduk kota itu terdiri dari suku Higaonon 65% dan suku campuran 35%. Impasugong memiliki luas lahan keseluruhan 107.167 hektar, dimana 83% -nya diklasifikasikan sebagai hutan sedangkan 17% sisanya dianggap lahan yang bisa dialihkan dan sekali pakai. Lahan terbesar kedua dan kawasan hutan terbesar (18% dari keseluruhan hutan total) di kotamadya tersebut terletak di *barangay* Kalabugao.

Rencana Penggunaan Tanah Komprehensif juga menunjukkan bahwa jagung dan padi adalah dua tanaman pangan utama yang dihasilkan di Impasugong yang masing-masing ditanam di lahan seluas sekitar 2.000 hektar dan 645 hektar. Tanaman perkebunan seperti nanas, tebu, dan pisang dihasilkan pada lahan seluas 3.000 hektar. Kelapa sawit ditanam di atas lahan seluas paling tidak 800 hektar. Pemerintah daerah Impasugong mempromosikan kelapa sawit sebagai tanaman wanatani bersama dengan *abaca* dan pisang. Impasugong membanggakan diri sebagai "ibukota minyak sawit di Mindanao Utara" dengan produksi minyak sawit menjadi prioritas utama untuk 5 tahun ke depan.

Para pelaku yang terlibat

Unit pemerintah daerah dan institusi Negara lainnya

Kebijakan negara memberikan suasana kondusif untuk ekspansi kelapa sawit di Impasugong. Pemerintah daerah telah menjadikan kelapa sawit tanaman prioritas yang dibayangkan akan mendorong pembangunan ekonomi untuk kotamadya ini. Karena itu kotamadya ini telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan petani dan lembaga pembiayaan pemerintah seperti QUEDANCOR untuk bertindak sebagai pemberi pinjaman bagi petani pekebun kecil yang

ingin terlibat dalam produksi minyak sawit. Kantor Pengembangan Ekonomi dan Perusahaan Kotamadya (*Municipal Enterprise and Economic Development Office*/MEEDO) Impasugong juga memberikan bantuan teknis untuk petani dan memimpin kegiatan promosi untuk mendorong para petani lokal memproduksi minyak sawit. Rencana untuk membangun sebuah pusat perdagangan agro-industri juga kabarnya sedang dilakukan untuk mendukung kegiatan ekonomi lainnya yang terkait dengan produksi kelapa sawit seperti tenun *amakan*.

Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR) telah menyediakan peta yang mengidentifikasi lahan yang tersedia untuk perkebunan. Departemen Pertanian (DA) telah menguji kesesuaian lahan untuk produksi minyak sawit. Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat (NCIP) di sisi lain, bertanggung jawab untuk menegaskan apakah tanah yang telah diidentifikasi berada di dalam atau di luar batas-batas wilayah leluhur.

Perusahaan

A. Brown Company, Inc. bergerak di bidang perdagangan, pengembangan dan produksi sumber energi/listrik, penggalian dan pertambangan, dan pembangunan real estat. Meskipun dikenal sebagai perusahaan milik Amerika, seorang pejabat perusahaan itu mengklaim bahwa perusahaan itu 100% milik Filipina, dengan pemilik yang berbasis di Cagayan de Oro City.

Perusahaan ini memiliki dua anak perusahaan, yaitu, *Nakeen Development Corporation* dan *A. Brown Energy Resources Development, Inc.* (ABERDI), yang berturut-turut bergerak di pengembangan perkebunan kelapa sawitnya dan produksi minyak sawit. Di atas lahan seluas 5 hektar di Barangay Poblacion, ABERDI mengoperasikan pabrik dengan kapasitas 10 ton/jam dan menghasilkan CPO. Dihadapkan dengan pasokan yang tidak memadai dari dalam Impasugong, perusahaan itu mencari TBS dari lahan perkebunan seluas sekitar 600 hektar hingga ke provinsi Cotabato untuk memenuhi target produksinya. Minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh ABERDI didistribusikan ke pabrik pakan

lokal di Manila, Cebu dan Bukidnon. Sejumlah kecil CPO juga diekspor ke Malaysia.



Pabrik pengolahan minyak sawit ABERDI di Impasugong, Bukidnon

Meskipun saat ini beroperasi di bawah kapasitas karena pasokan yang rendah, ABERDI telah berencana untuk memperluas operasi dan mendirikan sebuah pabrik penyulingan yang kompak untuk memproduksi CPO. ABERDI menargetkan produksi CPO sebanyak 520 metrik ton sebulan dan berniat untuk memperluas perkebunannya hingga 2.500 hektar. Pejabat perusahaan optimis bahwa ini bisa dicapai, terutama karena Nakeen merencanakan lokasi ekspansi seluas 5.000 hektar di Opol, Misamis Oriental. Perusahaan ini telah melakukan konsultasi di tingkat sitio (bagian dari *barangay*), kotamadya dan provinsi dalam persiapan untuk pembukaan perkebunan di Opol.

Nakeen dilaporkan memiliki 70 hektar perkebunan kelapa sawit (40 hektar di Maluko, Bukidnon; 27 hektar di Dalirig dan 3 hektar di Lunocan, Manolo Fortich). Nakeen juga mengoperasikan kebun pembibitan sawit seluas 9 hektar yang terletak di Lunocan, Manolo Fortich, dan kebun pembibitan utama seluas 10 hektar di Impasugong. Namun, pejabat Nakeen yang diwawancara untuk studi ini mengakui bahwa klaim atas tanah menghalang upaya ekspansi mereka. Sebagai contoh, daerah yang dilaporkan sebagai daerah tak berpenghuni di peta DENR ternyata dihuni oleh masyarakat yang menanam tanaman permanen di daerah tersebut. Namun, pejabat itu juga menyatakan bahwa wilayah leluhur yang

bersertifikat bukan prioritas bagi perusahaan itu karena persyaratan yang bertele-tele dari NCIP tersebut.

Masyarakat

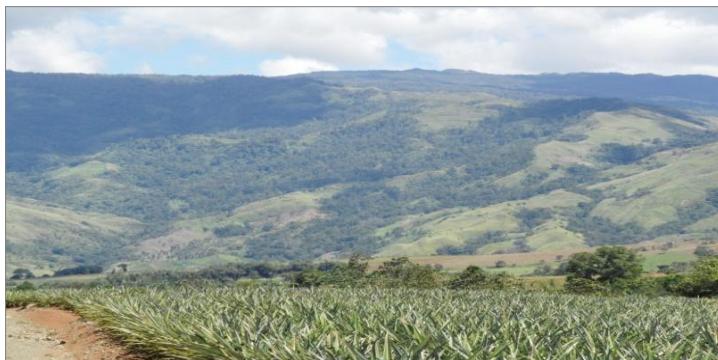
Wilayah leluhur dan lahan publik di bawah beragam pengaturan tenurial seperti sewa pengelolaan dan padang rumput diincar oleh kegiatan ekspansi yang ada. Kelapa sawit kini ditanam di setidaknya 6 dari 13 *barangay* di Impasugong. Perkebunan patungan LGU dengan petani berada di *barangay* Guihean, Sayawan, Poblacion, dan Pinaanan. Nakeen memiliki investasi di *barangay* Hagpa dan Kalabugao. Sebelum penanaman kelapa sawit, para petani menghasilkan jagung, beras, *abaca* dan kopi, terutama untuk konsumsi rumah tangga dan perdagangan lokal.

Kontrak pengembangan Nakeen

Sekitar sepertiga dari keseluruhan wilayah hutan (atau 5.000 hektar dari Barangay Kalabugao) telah dinyatakan cocok untuk kelapa sawit oleh DENR. Pada tahun 2006, *Kapunungan Sa Top Mag-Uuma sa Kaanibungan* (KASAMAKA - Asosiasi Petani di Kaanibungan) bersama-sama dengan LGU dan DENR mengembangkan rencana pembangunan 5 tahun untuk *barangay* tersebut, yang mencakup produksi kelapa sawit sebagai proyek prioritas. Proses ini telah disetujui oleh DENR sebagai persyaratan untuk pemberian Kesepakatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFMA) yang diajukan oleh masyarakat, yang meliputi daerah seluas sekitar 2.100 hektar.

Berdasarkan CBFMA, KASAMAKA diberi mandat untuk mengembangkan, mengelola dan melindungi wilayah proyek hutan masyarakat yang dialokasikan. Selain itu, KASAMAK boleh menandatangi perjanjian atau kontrak dengan pihak swasta atau pemerintah untuk pengembangan seluruh atau sebagian dari kawasan CBFM. Nakeen terlibat pada tahun 2006 ketika berunding dengan KASAMAKA mengenai pemanfaatan 1.200 hektar kawasan CBFMA untuk produksi minyak sawit.

Sebuah kontrak pengembangan selama 25 tahun tak lama kemudian ditandatangani antara Nakeen dan KASAMAKA dan penanaman kelapa sawit dimulai pada 2007. Dihargai PhP 6.000/hektar, Nakeen dilaporkan membayar anggota organisasi rakyat itu sebesar total PhP 7,2 juta dalam bentuk tunai untuk mendapatkan wewenang tunggal untuk mengembangkan kawasan tersebut. Seorang anggota mengklaim bahwa KASAMAKA mengambil PhP 1.000/hektar dari biaya sewa PhP 6.000.



Perkebunan nanas Del Monte terletak di bawah lereng perbukitan yang ditanami dengan kelapa sawit di Impasugong, Bukidnon.

Mengutip ketentuan kontrak, seorang pejabat perusahaan menyatakan bahwa "penggugat melepas hak untuk mengembangkan kawasan tersebut kepada perusahaan." Kontrak ini kabarnya berisi ketentuan untuk pemberian pelayanan sosial seperti bantuan medis sebesar PhP 10.000 per tahun, pembangunan sistem air di Sitio Kaalibungan, perbaikan sekolah, tenun *amakan* sebagai proyek mata pencaharian, dan pembiayaan produksi beras. Para pejabat perusahaan juga mengklaim bahwa 8 *datu* (kepala desa, biasanya pejabat tertinggi dalam struktur politik tradisional adat) di komunitas tersebut diberikan kompensasi bulanan sebesar PhP 1.500 "untuk menjaga perdamaian di kawasan tersebut".

Perusahaan memberikan prioritas kerja bagi anggota KASAMAKA atau anggota rumah tangga mereka. Untuk setiap 5 hektar yang

dimiliki oleh anggota KASAMAKA, keluarganya berhak untuk mencalonkan satu pekerja untuk bekerja di perkebunan secara tetap. Rata-rata, pekerja mendapatkan PhP 200 sehari. Organisasi ini juga berfungsi sebagai kontraktor tenaga kerja selama musim panen dan tanam, yang menagih biaya layanan sebesar 15% pada buruh musiman yang disewa oleh perusahaan. Meskipun mayoritas penduduk *barangay* adalah suku Higaonon, sebagian besar anggota KASAMAKA adalah suku Dumagat atau pendatang dari daerah lain.

Barangay Hagpa adalah target lain dari ekspansi perusahaan. Tidak seperti *barangay* Kalabugao, *barangay* Hagpa dengan 13 sítios dikelilingi wilayah leluhur seluas 14.000 hektar yang sudah mendapat CADT pada 2008. Tidak seperti penggugat CADT lainnya, suku Agtulawon-Mintapod Higaonon Cumadon (AGMIHICU - "Suku Higaonon murni di wilayah leluhur Mintapod dan Agtulawon") memiliki 2 pemimpin, penggugat kepala untuk CADT dan seorang Presiden yang bertanggungjawab atas kegiatan pengembangan ekonomi. Sang Presiden, Agilio Nanolan, adalah mantan pemimpin *barangay* dan kini anggota dewan kota. Dia dilaporkan memfasilitasi penandatanganan kontrak antara AGMIHICU dan Nakeen meskipun mendapat penolakan dari sejumlah *datu*, termasuk penggugat kepala, *datu* Amay Mantangkilan Cumatang.

Meskipun baru 200 hektar dari wilayah leluhur telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, konflik sudah terjadi antara mereka yang menentang kehadiran kelapa sawit di wilayah leluhur mereka dan mereka yang tertarik dengan penawaran perusahaan. Dilaporkan bahwa banyak anggota dewan suku dari 13 sítios *barangay* Hagpa mendukung kontrak pengembangan itu. Pihak Dumagat menyatakan keprihatinan bahwa ada beberapa pemimpin Higaonon mendukung ekspansi kelapa sawit. Seperti yang diungkapkan seorang pejabat setempat, "*nisugot mi ato nga mag CADT mapangalagaan ang yutang kabilin apan ang usa ka datu nga hinuon mag-una una sugot nga mapasulod ang A. Brown dinh*" ("Kami mengajukan CADT untuk melindungi tanah leluhur. Namun, seorang *datu* menyetujui masuknya A. Brown di sini"). Anggota masyarakat lainnya, Hiagaonon dan Dumagat, menentang

ekspansi karena lokasi ekspansi adalah hutan lindung mereka sementara bagian lainnya digunakan untuk usaha-usaha pertanian.

Daerah ekspansi seluas 200 hektar telah dijual oleh Higaonon kepada beberapa keluarga Dumagat tapi Organisasi Rakyat, AGMIHICU-lah, yang menandatangani kontrak pengembangan dengan perusahaan. Biaya sewa PhP 8.000/hektar untuk 25 tahun di *barangay* Hagpa sedikit lebih tinggi daripada harga yang diterapkan di *barangay* Kalabugao. Uang tunai yang diberikan oleh perusahaan diterima oleh AGMIHICU tetapi diserahkan kepada Dumagat yang kini dianggap pemilik lahan itu. Higaonon dilaporkan senang untuk bekerja sebagai karyawan di perkebunan itu. Sekitar 50 Higaonon diberi pelatihan tentang dasar pengelolaan hutan untuk menjadi penjaga hutan yang dipekerjakan oleh Nakeen dan dibayar PhP 3.000 setiap bulannya. Buruh menerima PhP 200 per hari. Pemilik tanah yang berhasil mendapatkan pekerjaan di pertanian hanya dibayar PhP 120 per hari. Perempuan bekerja sebagai pekerja musiman dan dibayar hanya PhP 80 per hari.

Perjanjian usaha bersama petani-LGU

Tertarik dengan layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh QUEDANCOR pada tahun 2004, LGU Impasugong memperkenalkan Proyek Produksi Kelapa Sawit kepada petani kecil. Dalam proyek ini, LGU akan mengajukan kontrak usaha bersama selama 25-30 tahun dengan petani yang dibentuk menjadi *seven-member self-reliant teams/SRT* (tim mandiri beranggotakan tujuh orang). Kebijakan LGU adalah tidak boleh ada kegiatan ekspansi yang dilakukan di daerah aliran sungai. Daerah produksi yang diincar adalah daerah yang dicakup oleh perjanjian sewa padang rumput dan tidak dimanfaatkan.

LGU berkomitmen untuk menyediakan bantuan teknis, membiayai pembangunan dan pemeliharaan jalan, dan membayar bunga pinjaman 4 tahun pertama petani. Para petani diharuskan untuk mendapatkan pinjaman sebesar PhP 50.000 dari QUEDANCOR sebagai mitra mereka untuk menutup biaya tenaga kerja. Biaya bibit, pengangkutan, sarana dan pengelolaan akan dibayarkan kepada LGU sebesar PhP 5.000/hektar. Menariknya, petani juga

diharuskan membayar LGU sebesar Php 6.000/hektar per tahun untuk pemeliharaan jalan meskipun LGU telah berkomitmen untuk mensubsidi biaya ini. Pinjaman petani akan dikeluarkan secara angsuran ke LGU yang bertindak sebagai manajer proyek. Pembagian laba bersih antara petani dan LGU yang disepakati adalah 60:40 untuk keuntungan petani dari mulai panen sampai periode penghentian proyek. Nakeen adalah satu-satunya pemasok bibit kelapa sawit dan pembeli tunggal atas panen kelapa sawit.

Usaha bersama ini dimulai dengan 51 petani yang memiliki total luas lahan 128 hektar. Angka-angka ini kini telah menurun menjadi 10 petani dengan lahan produktif seluas 34 hektar. QUEDANCOR tiba-tiba berhenti mengeluarkan uang 2 tahun setelah usaha itu dimulai pada tahun 2004 karena kekurangan dana. LGU dilaporkan mengeluarkan sekitar PhP 500.000 sebagai mitra untuk melanjutkan pembiayaan proyek itu. Untuk menyelamatkan investasi itu, LGU saat ini sedang melakukan negosiasi dengan Nakeen untuk merehabilitasi pertanian dengan kemungkinan perjanjian bagi hasil dari pendapatan. Sementara itu, anggota SRT yang tidak seberuntung 10 anggota yang tersisa masih memiliki pinjaman. Para petani yang investasinya gagal dikabarkan telah kembali menanam jagung.

Isu-isu dan kesimpulan

Kasus Impasugong menggambarkan beberapa isu dari keperihatinan yang saat ini melingkupi ekspansi kelapa sawit. Pertama adalah fakta bahwa lahan yang diklaim pemerintah sebagai lahan marginal dan tidak dibudidayakan sehingga menjadi target ekspansi pada kenyataannya adalah lahan pertanian dan wilayah leluhur, di mana sudah ada berbagai perjanjian tenurial adat.

Kedua, petani dan masyarakat adat akhirnya memikul biaya sosial dan lingkungan dari kegiatan ekspansi sedangkan keuntungan lari ke pihak investor. Masyarakat kehilangan akses dan kontrol atas tanah dan sumber daya lainnya sebagai akibat dari perjanjian yang mereka tandatangani dengan perusahaan atau LGU. Meskipun kita juga dapat melihat variasi dalam bentuk perjanjian usaha agribisnis yang ada, ketentuan-ketentuannya pada dasarnya tetap sama, yaitu

berpihak pada investor. Elemen perjanjian sewa muncul dalam kontrak pengembangan antara Nakeen dan daerah ekspansinya. Kontrak 25 tahun sebagai ganti PhP 6.000-8.000/hektar jelas perjanjian yang berat sebelah, yang mengeksplorasi kemampuan negosiasi masyarakat yang lemah. Dalam skema sewa, petani dan masyarakat adat hanya menjadi pekerja perusahaan dan tidak diperbolehkan menggunakan lahan untuk usaha ekonomi lain untuk jangka waktu yang lama.

Ketiga, konversi penggunaan lahan menekankan hubungan kekuasaan tak seimbang yang ada antara laki-laki dan perempuan dan mengarah ke pengabaian lebih lanjut terhadap hak perempuan atas tanah. Perempuan semakin terpinggirkan lewat pengucilan dari kesempatan untuk bekerja di perkebunan.

Keempat, konversi penggunaan lahan juga menghadirkan kekhawatiran atas ketahanan pangan karena tanaman pangan yang dihasilkan oleh petani digantikan oleh produksi tanaman industri dengan kedok reboisasi. Kelima, fakta bahwa kelapa sawit tidak ditanam secara organik berarti bahwa penggunaan input berbasis kimia dapat mencemari daerah aliran sungai yang ada di tanah leluhur yang juga akan mempengaruhi persediaan air di dataran rendah, keprihatinan yang dirasakan bersama baik oleh penduduk Higaonon dan Dumagat. Meskipun riset sejauh ini belum mendokumentasikan kasus pelecehan pada pekerja perkebunan dan petani kecil, pengalaman dalam pengembangan perkebunan di wilayah Mindanao lainnya memberikan pelajaran yang harus dipertimbangkan dan sebaiknya dihindari.

Selain pekerjaan tetap di perkebunan, tidak ada banyak bukti untuk menunjukkan bagaimana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari perjanjian agribisnis. Tampaknya juga kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan produksi minyak sawit seperti erosi tanah dan perusakan keanekaragaman hayati karena budidaya monokultur amatlah kecil. 6 tahun setelah kegiatan ekspansi dimulai, pertanyaannya tetaplah apakah ini memang akan membawa perkembangan ekonomi seperti yang diharapkan oleh pemerintah setempat.

Tak diragukan lagi, ada kekhawatiran ekonomi, sosial, dan lingkungan yang jelas yang perlu ditangani dalam kaitannya dengan kehadiran perkebunan kelapa sawit di Impasugong. Kemitraan yang dibayangkan untuk pengembangan ekonomi lokal bisa berhasil jika kebijakan dapat memastikan bahwa manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh kaum papa dan sektor-sektor yang rentan dan bahwa pemangku kepentingan berunding dalam posisi yang setara. Ini jauh dari kenyataan dalam kasus Impasugong.

STUDI KASUS 3. Budidaya kelapa sawit di Palawan: Status investasi dan dampak pada masyarakat dan lingkungan

Dengan total luas lahan 1.489.626 hektar, Palawan merupakan provinsi terbesar di Filipina, setara dengan 5% dari wilayah Filipina. Merupakan kepulauan yang terdiri dari 1.768 pulau, dengan garis pantai yang tak teratur, Palawan berbatasan dengan Laut Sulu di timur, Mindoro Pass di timur laut, Laut Cina di sebelah barat, dan perairan teritorial Pulau Kalimantan di selatan. Secara politis, Palawan dibagi menjadi satu kota komponen, 12 kotamadya daratan dan 11 kotamadya pulau. Jumlah penduduk terbaru di Palawan adalah 892.660. Perekonomiannya sebagian besar berbasis pertanian. Tanaman pertanian utama yang ditanam adalah padi, jagung dan kelapa.

Sementara sejarah penanaman kelapa sawit Filipina dimulai pada tahun 1950-an dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Basilan, pembukaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Palawan, yang dianggap sebagai Batas Ekologi Terakhir negara itu, dimulai dengan pembicaraan dan diskusi yang terjadi baru pada tahun 2003. Ide memperkenalkan kelapa sawit dan kemungkinan dampak lingkungannya diterima dengan keprihatinan yang mendalam baik oleh sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Pengalaman dari negara-negara tetangga Indonesia dan Malaysia dalam hal dampak buruk penanaman kelapa sawit pada lingkungan merupakan sumber ketidakpastian tersebut. Namun, Pemerintah Provinsi Palawan tetap tertarik untuk membuka daerah-daerah tertentu di Palawan untuk

budidaya kelapa sawit dengan keyakinan bahwa itu akan menguntungkan perekonomian pedesaan.

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Otoritas Kelapa Filipina (PCA) dan Dewan Pengembangan Industri Kelapa Sawit Palawan (PPOIDC) bagi investor asing,³⁷ dari 454.405 hektar daerah pertanian di Palawan, 208.997 hektar cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Sumber terakhir mengungkapkan bahwa pada awalnya, pemerintah provinsi Palawan mengidentifikasi sekitar 80.000 hektar untuk budidaya kelapa sawit. Namun, dari 100.000 hektar target nasional untuk produksi minyak sawit di negara itu, Palawan diberikan jatah 20.000 hektar untuk ditanami hingga 2011. Agusan Plantations Group, Palawan Palm and Vegetable Oil Mills Inc. (PPVOMI) dan Agumil Philippines Inc. (AGPI) mendominasi industri kelapa sawit di Palawan dan berniat untuk menutupi 15.000 hektar dengan perkebunan kelapa sawit.³⁸

Saat ini, lebih dari 3.746,31 hektar di Palawan Selatan sudah ditanami dengan kelapa sawit, dan sisa 2.000 hektar direncanakan untuk ditanami tahun depan.³⁹ Perkebunan kelapa sawit saat ini ditemukan di kotamadya Aborlan, Narra, Quezon, Rizal, Sofronio Espanola, Brooke's Point dan Rizal. Daerah-daerah ini ditanami dan dimiliki oleh petani swadaya individu, koperasi dan PPVOMI (disebut daerah jangkar oleh perusahaan). Dalam rentang waktu 7 tahun, investor kelapa sawit telah membawa masuk investasi senilai PhP 1,2 miliar ke Palawan, seperti yang diungkapkan dalam Laporan PCA tahun 2009. Meskipun minyak sawit dikenal sebagai bahan baku untuk bahan bakar nabati, sebuah permintaan yang pasti akan mempertahankan dan meningkatkan harga komoditas karena pasar biodiesel yang berkembang, produksi minyak sawit di Palawan utamanya dimanfaatkan sebagai minyak makan (*edible oil*).

Sebuah studi sebelumnya yang mengkaji proyek pengembangan bahan bakar nabati di Palawan mengidentifikasi *jatropha* dan kelapa sawit sebagai tanaman bahan bakar nabati yang saat ini sedang diinvestasikan di Palawan,⁴⁰ dan menyatakan bahwa kelapa sawit memiliki pengembangan perkebunan bahan baku yang paling matang. Sayangnya, studi itu juga menunjukkan bahwa para pemilik

perkebunan tidak melalui jalur peraturan biasa. Studi itu lebih lanjut melihat sikap bermasalah dari lembaga peraturan lingkungan hidup dalam hal menghentikan konversi lahan lebih lanjut atau memaksakan pengawasan lebih ketat dan mekanisme kontrol. Studi itu mengutip pengalaman di daerah pertambangan dimana zona yang telah ditetapkan dimodifikasi agar sesuai dengan proposal pembangunan dan menyimpulkan dengan menyatakan keprihatinan mengenai kemungkinan ilmu pengetahuan dikalahkan oleh tuntutan politik dan ekonomi. Studi itu juga mengemukakan implikasi dari penanaman kelapa sawit bagi masyarakat adat dalam kaitannya dengan kepastian tenurial mereka, termasuk pengaturan pembagian keuntungan antara perusahaan dan masyarakat anggota koperasi.

Pengembangan budidaya kelapa sawit di Palawan

Dalam sebuah pertemuan antara investor kelapa sawit dan Presiden Gloria Arroyo, dilaporkan bahwa Filipina mengimpor minyak sawit senilai sekitar PhP 840 juta (14 juta USD). Pemerintah Filipina telah menemukan cara untuk mengurangi biaya impor dan memberikan solusi terhadap permintaan pasar domestik akan minyak sawit yang terus meningkat; untuk membangun industri minyak sawitnya sendiri. Pada tahun 2002, produksi minyak sawit rata-rata adalah 54.333 metrik ton, sementara kebutuhan konsumsi rata-rata adalah 94.400 metrik ton.⁴¹ Permintaan untuk minyak sawit diperkirakan akan mencapai 134.500 ton pada 2010 dan 171.700 ton pada tahun 2015.⁴²

Kegiatan-kegiatan awal mulai membentuk industri kelapa sawit di Palawan pada tahun 2003. Pemerintah Provinsi Palawan mengundang Kelompok Perusahaan Perkebunan Agusan dan Dewan Pengembangan Kelapa Sawit Filipina (PPODC) ke Palawan, menurut Ponciano Narciso, Direktur PPVOMI/Agumil-Palawan (juga Ketua PPODC saat itu). Kunjungan pertama ke Palawan dilakukan sekitar bulan Februari. Kunjungan berturut-turut dilakukan untuk melakukan studi mendalam mengenai potensi Palawan untuk proyek kelapa sawit. Sebuah forum yang diadakan di Palawan State University (PSU) menjadi tempat di mana peserta dari sektor pemerintah menunjukkan minat mereka dan berjanji mendukung pelaksanaan proyek.

Menurut Ponciano, sekitar bulan Oktober 2004, Kelompok Perusahaan Perkebunan Agusan memulai gerakan informasi intensifnya di Palawan Selatan dan melakukan studi terutama untuk menilai dan merangsang minat penduduk lokal dan LGU dalam pelaksanaan proyek itu. Seorang personil lapangan dikirim ke Palawan untuk berkeliling mencari daerah untuk perkebunan, berbicara dengan penduduk setempat, menilai penerimaan terhadap proyek dan melaksanakan persiapan yang diperlukan. Palawan Utara adalah wilayah pertama yang dipertimbangkan untuk budidaya kelapa sawit. Namun, Romasanta mengklaim bahwa LGU di Palawan Selatan lebih aktif dan kotamadya Brooke's Point dengan cepat menyumbangkan sebidang tanah di *Barangay* Maasin untuk kebun pembibitan perusahaan. Namun, Sombra Nelson, seorang pemimpin adat di Brooke's Point, sebelumnya berpendapat daerah itu hanya untuk kebun pembibitan perusahaan. Daerah tersebut kini juga menjadi perkebunan kelapa sawit. Sombra mengklaim daerah itu seharusnya untuk pemanfaatan di masa depan tapi kini masuk ke dalam Memorandum Kesepakatan (MOA) selama 25 tahun. Ketika pembibitan didirikan, sekitar 600.000 biji kecambah dari Kimbi, Papua Nugini, tiba di Maasin. Selama waktu ini juga, perusahaan mulai mendapatkan daerah-daerah untuk menjadi daerah jangkar perusahaan.

Menurut Romasanta, fokus perusahaan tersebut adalah Mindanao, namun lobi yang dilakukan oleh koperasi, petani kelapa dan walikota sedikit mendorong Agumil untuk memantapkan diri di Palawan, dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi yang membentuk Dewan Pengembangan Industri Kelapa Sawit Palawan melalui undang-undang provinsi (Proincial Ordinance No 739-04) pada bulan Januari 2004.⁴³ Perda tersebut menyatakan bahwa Dewan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi industri pertanian. Tugas dan fungsi Dewan adalah: untuk merumuskan kebijakan dan rencana untuk pengembangan industri minyak sawit di Palawan dan merekomendasikan hal yang sama kepada Panlalawigan Sangguniang untuk langkah-langkah legislasi yang tepat jika diperlukan, untuk memulai riset tentang pengembangan kelapa sawit, untuk mendukung mempromosikan dan melembagakan pembangunan industri minyak sawit di Palawan, untuk mendorong investasi dan kemajuan pengembangan

industri sawit, khususnya pembangunan pabrik pengolahan dan petani bibit; untuk memantau, evaluasi dan merekomendasikan langkah-langkah dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi mengenai pengembangan industri sawit, untuk menentukan wilayah yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit di Palawan, dan untuk melakukan tugas dan fungsi lain yang diperlukan demi efektifitas pelaksanaan program itu.

Pemerintah Provinsi menunjukkan dukungannya dengan memasukkan kelapa sawit dalam rencana pembangunan Palawan. Rencana Pembangunan Komprehensif Provinsi Palawan untuk tahun 2005 memiliki visi "untuk menjadi provinsi di mana orang-orang, budaya, agama dan ekonomi hidup selaras dengan lingkungan dan sumber daya alam dan penduduk tinggal dalam masyarakat yang damai, tertib dan sejahtera." Dua dari program dan proyek prioritas yang teridentifikasi adalah mengenai kelapa sawit sebagai bagian dari pengembangan tanaman perkebunan dengan investor swasta dan pabrik pengolahan. Ini juga merupakan saat yang tepat bagi sektor kelapa sawit karena Bank Tanah Filipina (LBP) telah membuat program pendanaan untuk proyek-proyek tersebut. Menurut Narciso, Pemerintah Provinsi, melalui Gubernur Joel Reyes dan Wakil Gubernur Dave Ponce De Leon, telah membentuk tim investasi yang mengunjungi Mindanao untuk menyampaikan potensi Palawan dan proposal bisnis untuk pengembangan kelapa sawit.

Ringkasan proyek: proyek pengolahan minyak sawit terpadu

Lokasi: Kotamadya Aborlan, Narra, Quezon, Sofronio Espanola, Brooke's Point, Rizal dan Bataraza

Investor/Pendukung: Palawan Palm & Vegetable Oil Mills Inc. (PPVOMI), AGUMIL Philippines, Inc. (API) – Palawan Operation

Komponen proyek:

Pabrik Minyak Sawit - Biaya: PhP 390.000.000,00

Kebun Pembibitan Kelapa Sawit - Operasi: PhP 49.043.817,08

Perkebunan Kelapa Sawit - Operasi: PhP 84.682.694,2.

Biaya proyek: PhP 523.726.511,33

Tujuan produksi: minyak makan (*edible oil*)

Sertifikat Kepatuhan Lingkungan (ECCs) yang dikeluarkan:

ECC R4B 1006 0102 yang mencakup pabrik minyak sawit Agumil Phils. Inc (AgPI), dikeluarkan 1 Juli 2010

ECC R4B 0901 025 3909 yang mencakup perkebunan kelapa sawit di: (1) Bgys.

Mabini, Sagpangan dan Iraan di Aborlan, dan (2) So. Mariwara, Bgy. Putri Urduja di Narra

ECC R4B 0807 0178 3909 yang mencakup perkebunan kelapa sawit di Bgys. Isugod, Panitian, Aramaywan dan Tagusao di Quezon

ECC R4B 0807 0177 3909 yang mencakup perkebunan kelapa sawit di So. Salungsong, Bgy. Iraan di Rizal

ECC R4B 0807 0170 3909 yang mencakup perkebunan kelapa sawit di Bgys. Pulot Interior, Punang, Labog dan Iraray di Espanola

ECC R4B 0811 327 3909 yang mencakup perkebunan kelapa sawit di Bgys. Calasaguen, Maasin, Pangobilian dan Samarinana di Brooke's Pt.

ECC R4B 0901 024 3909 yang mencakup perkebunan kelapa sawit di Bgys. Sandoval, Tarusan dan Igang-Igang di Bataraza

Ijin PCSD-SEP yang dikeluarkan:

25 Maret 2010 untuk Proyek Pengolahan Minyak Sawit Terpadu

Sumber: Pertemuan Reguler PCSD ke-165. Ikhtisar Laporan Evaluasi untuk Dewan. 25 Maret 2010.

Menjelang bulan Desember 2005, PPVOMI dibentuk dan didaftarkan sebagai perusahaan lokal dan bagian dari Kelompok Perusahaan Perkebunan Agusan. Perusahaan ini mulai resmi beroperasi pada bulan Januari 2006. Narciso mengklaim bahwa perusahaan mengejar proyek di Palawan hanya setelah pembangunan pabrik pengolahan mereka di Bohol selesai karena keterbatasan keuangan. Namun, proyek ini tidak diterima secara positif oleh semua; Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR), Dewan Palawan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PCSD) dan Pusat Bantuan Hukum Lingkungan (ELAC) khususnya mengemukakan banyak masalah lingkungan. Namun, perusahaan terus dilanjutkan dan mendapatkan persyaratan dan dokumen yang diperlukan, termasuk Sertifikat Kepatuhan Lingkungan (ECC) untuk perkebunan dan proyek. Narciso juga mengemukakan bahwa setelah mendapatkan ECC pertama mereka pada tahun 2007, menjadi lebih mudah bagi perusahaan untuk melanjutkan karena proyek itu diklaim sebagai proyek Pemerintah Provinsi.

Saat ini, banyak pohon kelapa sawit itu sedang berbuah. Untuk saat ini, panen dibiarkan membusuk dan digunakan sebagai kompos, karena perjanjian produksi adalah untuk tahun 2011. Pabrik pengolahan dengan kapasitas untuk memproses 15 ton buah kelapa sawit per jam menjadi CPO masih dalam pembangunan. Menurut Narciso, pabrik itu akan dapat memproses TBS dari kebun kelapa sawit seluas 15.000 hektar.

Proyek dan investasi kelapa sawit saat ini

Saat ini, industri kelapa sawit di Palawan didominasi oleh PPVOMI dan AGPI yang saat ini melaksanakan Proyek Pengolahan Kelapa Sawit Terpadu. Kedua perusahaan itu merupakan bagian dari Kelompok Perusahaan Perkebunan Agusan, yang juga termasuk *Agusan Plantations, Inc.* (API) dan *Philippine Agriculture Land Development and Mill, Inc.* (PALM, Inc.). Misi mereka adalah "untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Filipina di daerah yang kondusif untuk budidaya tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan partisipasi petani dalam program plasma, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di pedesaan"⁴⁴. Kelompok ini membayangkan menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit

terbesar di Filipina. Narciso mengklaim bahwa mereka diperkirakan memegang 50% dari pangsa pasar minyak sawit domestik, tidak termasuk operasi di Palawan. PPVOMI dan AGPI berbagi pangsa pasar dengan *Pilipinas Palm Oil Plantation Inc.* dan *Kenram Industrial Development Inc.*

Selama wawancara dengan masyarakat, nama perusahaan konstruksi *Cavite Ideal International Construction and Development Corporation* (Cavdeal) muncul beberapa kali. Cavdeal berbasis di Cavite dan dimiliki Tn. Lamberto Lee, Jr. Perusahaan konstruksi itu menjadi kontroversial setelah Bank Dunia memasukkannya dalam daftar hitam karena "praktek kolusi" yang melibatkan penawaran untuk *the Philippines' National Road Improvement and Management Program/NRIMP* (Program Manajemen dan Perbaikan Jalan Nasional Filipina) Tahap 1. Cavdeal terlibat dalam proyek pembangunan jalan senilai Php 1,8 miliar di Palawan Selatan. Sumber mengklaim bahwa CavDeal membeli tanah di Palawan Selatan, dan menurut agen CavDeal, kuota target adalah seluas 500 hektar. Meskipun demikian tidak jelas apakah daerah yang dibeli ini dimaksudkan untuk pendirian perkebunan kelapa sawit. Namun, Manajer Umum PPVOMI menegaskan bahwa CavDeal bermaksud untuk berinvestasi dalam kelapa sawit. PPVOMI atau AGPI tidak memiliki hubungan bisnis dengan CavDeal. Namun, Narciso mengklaim bahwa mereka sudah didekati oleh perusahaan itu dan bahwa mereka bisa membantu CavDeal di bagian teknis. Namun, dia juga menunjukkan bahwa akan sulit untuk mendapatkan lahan yang cukup luas untuk mengoperasikan sebuah pabrik minyak sawit.

Status proyek

Kebun pembibitan kelapa sawit

Kebun pembibitan ini terletak di lokasi proyek seluas 13 hektar. Ini adalah sumber bibit untuk petani dan perkebunan. Kebun pembibitan ini telah diakreditasi PCA. Persyaratan ini membantu PCA untuk memantau sumber bahan tanam dan apakah mereka memenuhi persyaratan atau tidak.

Berlokasi di Bgy, Sandoval, Bataraza, luas daerah yang ditanami kelapa sawit adalah 250 hektar.



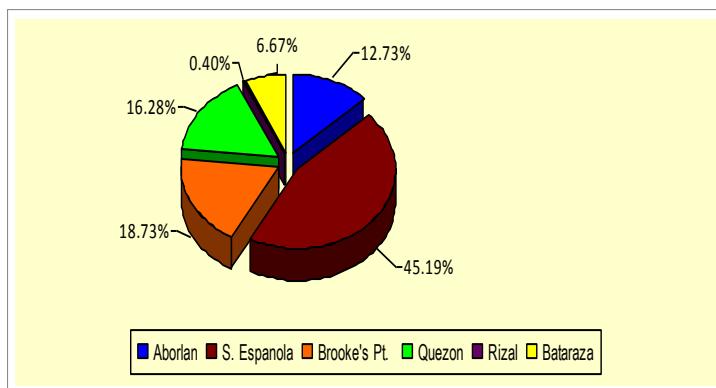
Perusahaan juga harus mematuhi pasyaratan karantina dan pedoman impor bahan tanam kelapa sawit dari *Bureau of Plant Industry/BPI* (Biro Industri Tanaman). Terutama, bahan tanam kelapa sawit harus bebas dari virus *Chlorotic Ringspot*, *Lethal Yellowing* dan *Brontispa longissima*. Pengendalian hama dan penyakit memiliki dampak penting pada produktivitas dan profitabilitas kelapa sawit. Kelapa sawit rentan terhadap serangan hama seperti *bagworm*, ulat *nettle* dan kumbang badak (dikenal di Palawan sebagai *bagangan*).

Biji kecambah PPVOMI/Agumil berasal dari Kimbi, Papua New Guinea, pemasok bibit sawit terbesar kelima di dunia. Pemasok perusahaan itu adalah *New Britain Palm Oil Limited*. Perusahaan menganggap mengimpor biji kecambah dari Papua New Guinea (PNG) lebih murah daripada terlibat dalam produksi bibit di Filipina. Bibit disediakan untuk petani sebagai bagian dari pinjaman mereka. Petani membeli bibit dari kebun pembibitan seharga PhP 117 per bibit. Setiap hektar tanah dapat ditanami 120-130 pohon kelapa sawit. Satu pohon kelapa sawit dengan hasil yang bagus bisa menghasilkan 45 kilo dan lebih, sementara 15 kilo atau kurang dianggap gagal. Panen dilakukan 2-3 kali sebulan. Pendapatan kotor per hektar diperkirakan PhP 9.000 untuk pohon kelapa sawit berusia 4-10 tahun; PhP 72.000 untuk pohon kelapa sawit berusia 10-14 tahun dan PhP 60.000 untuk pohon kelapa sawit berusia 15-25 tahun.

Perkebunan kelapa sawit

Lokasi target untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit terletak di kotamadya Aborlan, Narra, Quezon, Sofronio Espanola, Brooke's Point, Rizal dan Bataraza, semua terletak di Palawan Selatan. Target luas lahan keseluruhan adalah 15.000 hektar.

Data dari perusahaan mengenai luasan lahan adalah 3.750,71 hektar per tanggal 31 Desember 2009 dan 3.746,31 hektar per tanggal 31 Juli 2010, sedangkan data dari PCA per Desember 2009 adalah 3.687,39 hektar. Perlu dicatat bahwa angka-angka ini tidak termasuk 12 hektar (perkiraan sumber) di *barangay* Sumbiling dan Taratak, Bataraza. Selain itu, selama wawancara pada tanggal 14 Oktober 2010, Direktur PPVOMI menyebutkan bahwa total lahan yang ditanami adalah 3.790 hektar. Terlepas dari perbedaan ini, data menunjukkan bahwa secara keseluruhan luas lahan penanaman kelapa sawit di Palawan adalah sekitar 4.000 hektar.



Gambar 1: Budidaya Kalapa sawit – total luas lahan menurut lokasi

Penanaman tersebar di 6 kotamadya, kecuali Narra. Saat ini, perkebunan terbesar terletak di S. Espanola (lihat Gambar 1). Semua perkebunan dikelola dan dimiliki oleh petani swadaya, koperasi petani dan PPVOMI (lihat Gambar 2). Perkebunan

PPVOMI mewakili sekitar 25% dari total lahan yang ditanami sedangkan 75% sisanya merupakan perkebunan milik petani kontrak dari AGPI, yang kebanyakan adalah koperasi dengan individu yang sangat sedikit.⁴⁵ Puerto Princesa City segera akan ditambahkan ke dalam daftar karena 10.000 hektar telah disurvei dan ditawarkan oleh *Iwahig Prison and Penal Farm* (salah satu penjara di Filipina) untuk pembangunan kelapa sawit dan sekitar 1.500 hektar ditawarkan oleh pemerintah kota.⁴⁶ Diperkirakan akan ada tambahan seluas 2.000 hektar di tahun mendatang.

Pabrik minyak sawit

Pabrik pengolahan, yang memiliki kapasitas untuk memproses 15 ton buah sawit menjadi minyak sawit mentah per jam menjadi CPO, saat ini sedang dalam pembangunan. Pabrik tersebut akan berlokasi di lahan seluas 7 hektar di dalam lokasi proyek seluas 13 hektar di Bgy. Maasin, Brooke's Point. Produk tanaman olahan adalah CPO dan Biji Sawit (*Palm Kernel*) yang dijual ke pengolah dan penyuling, termasuk *San Miguel Corporation* dan *Philippine Refining Company*.



Jalan menuju ke pabrik pengolahan yang sedang dibangun di perkebunan kelapa sawit PPVOMI di Bgy. Maasin, Brooke's Point

Minyak sawit sebagai minyak makan dan bahan baku bio-diesel

Eksplansi kelapa sawit di Palawan diarahkan pada produksi minyak sawit sebagai pengganti minyak goreng untuk pasar domestik. PPVOMI mampu bersaing secara lokal karena menghasilkan produk berkualitas, menurut Direktur PPVOMI Ponciano Narciso.

Minyak sawit jarang diekspor karena membutuhkan waktu untuk mengangkut minyak sawit dan kualitasnya menurun seiring waktu.

Pada sekitar 2008 dan 2009, perusahaan merasakan tekanan yang disebabkan oleh diskusi-diskusi dan keprihatinan atas perubahan iklim. Namun, Narciso menjelaskan bahwa itu memudar ketika harga bensin jatuh. Dia menilai penggunaan minyak sawit untuk biodiesel sebagai pilihan terakhir. Manajer PCA Palawan Romasanta lebih lanjut menyatakan bahwa produksi minyak sawit untuk biodiesel mungkin tidak akan disetujui karena ketahanan pangsa Palawan akan terpengaruh sebagai akibatnya.



Perkebunan kelapa sawit bersebelahan dengan persawahan, Maasin-Calasauen, Brooke's Point.

Perjanjian kontrak

Dua perjanjian yang ada adalah Perjanjian Produksi, Teknis dan Pemasaran dan Perjanjian Layanan Manajemen. Keduanya adalah perjanjian yang dibuat antara AGPI dan Petani Kontrak (Koperasi atau individu). Paket proyek PPVOMI untuk Palawan adalah paket yang sama yang diperkenalkan oleh PPVOMI di Mindanao; teknologi, kualitas bahan tanam yang terjamin, dan jaminan pasar, menurut Narciso. Perjanjian Produksi, Teknik dan Pemasaran, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian tersebut, dimasukkan untuk memastikan keberhasilan budidaya kelapa sawit dan penjualan produk. Beberapa syarat dan ketentuan penting antara koperasi dan AGPI adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa bidang tanah yang diberikan ke koperasi dan digunakan untuk budidaya kelapa sawit oleh petani tidak dapat dijaminkan, dijual, dialihkan, ditugaskan atau disewakan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari AGPI;
- 2) Bahwa pekebun memperoleh bibit F1 langsung dari AGPI;
- 3) Bahwa mematuhi hukum perburuhan adalah tanggung jawab pekebun;
- 4) Bahwa bimbingan dan izin dari AGPI dibutuhkan jika ada rencana untuk melakukan penanaman tumpangsari; dan bahwa tumpangsari padi/beras dataran rendah tidak diperbolehkan;
- 5) Bahwa jika bagi AGPI proyek tersebut tidak dikelola oleh petani secara memuaskan, petani akan menyerahkan pengelolaan proyek pada AGPI (tercakup dalam Perjanjian Manajemen Layanan);
- 6) Bahwa pelaksanaan Perjanjian Layanan Manajemen adalah dalam waktu 7 hari sejak diterimanya surat dari AGPI atau Pengambilalihan Manajemen;
- 7) Bahwa AGPI memberikan bantuan teknis, melatih petani dan buruh taninya dalam semua usaha pertanian itu, dan membantu petani dalam pelaksanaan dan pemeliharaan akuntansi dan sistem pengendalian internal yang efisien;
- 8) Bahwa pembelian TBS dilakukan berdasar syarat berikut yang ditetapkan berdasarkan standar kualitas tanaman dan formula harga;
- 9) Bahwa akan ada biaya jika AGPI menghabiskan untuk restorasi proyek (14% bunga gabungan per tahun) dan biaya manajemen 10% atau biaya operasional 10%, tergantung mana yang lebih tinggi.



Perkebunan kelapa sawit di Bgy. Iraray, Sofronio Espanola, yang memiliki area penanaman kelapa sawit terluas di Palawan.

Selain itu, dalam Perjanjian Layanan Manajemen, penanam memberi kewenangan pada AGPI untuk mengambil alih pengelolaan lahan dan menggunakan dana pinjaman pengembangan kelapa sawit yang disediakan oleh LBP dan AGPI untuk pengembangan lahan itu menjadi perkebunan kelapa sawit, termasuk urusan teknis dan keuangan yang berkaitan dengan proyek itu. Ada beberapa pandangan mengenai dua perjanjian yang disebutkan di atas. PPVOMI mengklaim bahwa koperasi akan selalu menampilkan diri mampu mengelola perkebunan, namun pada kenyataannya, mereka tidak bisa. Hal ini, menurut dia, adalah alasan bagi keberadaan Perjanjian Layanan Manajemen. AGPI mengembalikan manajemen proyek itu kepada petani pada saat berakhirknya jangka waktu Perjanjian Layanan Manajemen. Penandatanganan dua perjanjian itu sendiri secara bersamaan adalah tanda bahwa kemungkinan manajemen proyek berubah buruk sudah diantisipasi. Seorang petani kontrak di Bataraza mengatakan bahwa kontrak tampak bagus di atas kertas tetapi tidak dalam pelaksanaan sebenarnya. Petani lain mempertanyakan soal biaya manajemen dan mengapa kedua perjanjian itu harus ditandatangani pada saat yang bersamaan. Masalah selanjutnya adalah bahwa perjanjian ini telah ditandatangani tanpa penjelasan yang jelas pada para penduduk setempat mengenai isi dan konsekuensinya.

Sewa lahan

PPVOMI telah menyewakan sebagian lahan mereka sebagai daerah jangkar untuk perkebunan kelapa sawit. Tarif sewa adalah PhP 1.000/tahun untuk 3 tahun pertama; PhP 2.000/tahun sampai dengan tahun ke-10, dan PhP 3.000/tahun untuk tahun ke-11 hingga ke-25. Andres Colegio dari Asosiasi Irigasi di Calasaguen di Brooke's Point, yang telah lama bekerja di perkebunan gula di Negros, mengemukakan kemungkinan mengadopsi pembagian sewa dalam reforma agraria (*Republic Act 6657*). Dia menyarankan pembagian persentase 75:25. Colegio menjelaskan bahwa dari tahun pertama sampai tahun kelima, semua pendapatan masuk ke perusahaan. Pada tahun keenam dan seterusnya, pembagian AR 75% (perusahaan) dan 25% (petani), atau bahkan 70-30 atau 65-35 dianjurkan.

Pekebun-pekebun kontrak: Koperasi, lahan perkebunan dan pinjaman mereka

PPVOMI mengaku bahwa komitmen mereka kepada koperasi cukup rumit. Semua koperasi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari LBP. Jika koperasi mencoba meminjam, mereka diminta harus memiliki ekuitas 20%. Di Palawan, AGPI telah memutuskan untuk memberikan ekuitas itu pada koperasi agar LBP mau memberikan ekuitas 80%. Akibatnya, koperasi memiliki pinjaman ganda, baik dari AGPI maupun dari LBP. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan akan diawasi secara ketat telah diberikan kepada perusahaan mengingat adanya komitmen pembiayaan dari LBP.

Ketika koperasi memberikan suatu daerah tertentu untuk ditanami, perusahaan harus menilai apakah itu benar-benar ada, menurut Narciso. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa fotokopi sertifikat tanah (atau sertifikasi *barangay*) digunakan sebagai acuan untuk pemeriksaan dan validasi awal daerah, kalau-kalau lahan itu berbukit-bukit atau berbatu. Ketika fotokopi itu telah sepenuhnya diteliti, bank membutuhkan penyerahan sertifikat yang asli. Narciso

menjelaskan bahwa pada awalnya sertifikat asli harus disimpan di bank. Tapi kemudian, LBP menyerahkan tanggung jawab itu ke koperasi yang diminta untuk menyimpannya. Kelompok sertifikat pertama disimpan di LBP dan kelompok sertifikat yang datang kemudian disimpan oleh perusahaan. Ini seperti agunan, tetapi Narciso menjelaskan bahwa perbedaannya adalah bahwa dalam agunan yang sebenarnya itu akan diperlakukan sebagai jaminan perumahan dan dicap. Dokumen-dokumen koperasi yang disimpan oleh koperasi adalah untuk diamankan dan tak membutuhkan cap.

Begitu pinjaman koperasi disetujui, koperasi akan memiliki rekening untuk proyek kelapa sawit mereka. Rekening itu membutuhkan tanda tangan dari koperasi dan satu tanda tangan dari perusahaan. Begitu pekerjaan yang sebenarnya selesai, dan pada akhir periode penggajian, pemimpin menyampaikan laporan yang diperiksa, divalidasi dan disertifikasi teknisi. Dokumen-dokumen itu masuk kantor dan proses pembayaran dimulai. Hal ini dilakukan, menurut PPVOMI, untuk memastikan bahwa dana yang ditarik dari bank adalah dana yang digunakan untuk membayar pekerjaan yang sudah selesai.

Proyek pengolahan minyak sawit terpadu

Ijin SEP: syarat dan ketentuan

(dikeluarkan 25 Maret 2010)

- Membatasi operasi proyek pembibitan dan pabrik minyak dalam wilayah seluas 13 hektar yang telah disetujui.
- Mendapatkan ijin dari instansi yang bersangkutan sebelum konstruksi dan operasi proyek itu.
- Membentuk Tim Pemantau Multi Partit (*Multi-Partite Monitoring Team / MMT*) untuk memantau udara, kualitas air, pembuangan limbah dan limbah lain yang akan dihasilkan oleh proyek.
- Melaksanakan tindakan mitigasi sebagaimana diatur dalam EIS yang diajukan.
- Jika pelaksanaan proyek menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan dan menimbulkan gangguan bagi kesehatan publik dan keselamatan seperti yang ditentukan oleh PCSDS, faktor-faktor ini akan menjadi alasan yang cukup untuk membatalkan dan menangguhkan ijin tersebut.
- Para pemegang ijin akan bertanggung jawab penuh atas kerusakan hak milik pribadi/umum yang disebabkan oleh proyek itu.
- Jika ketentuan lain dibutuhkan untuk memastikan integritas lingkungan dan keselamatan publik sebagai hasil dari inspeksi pemantauan berkala, ini akan diterapkan oleh PCSD tersebut.
- Untuk melaksanakan hak kunjungan mereka, pejabat/personel PCSD/S yang ditunjuk akan diizinkan untuk melakukan pemantauan/inspeksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Setiap perluasan proyek harus mendapatkan ijin SEP terpisah.
- Ijin ini tidak dapat dipindah tangankan.

Dalam hal akuntabilitas koperasi, PPVOMI menjelaskan bahwa jika seseorang adalah anggota koperasi, akuntabilitasnya adalah proporsional sesuai tingkat partisipasinya. Sebagai contoh, dalam pinjaman PhP 100.000 untuk lahan seluas 100 hektar, Anggota A dengan 1 hektar akan menerima pinjaman PhP 1.000 sementara Anggota B dengan 10 hektar akan menerima pinjaman PhP 10.000. Narciso lebih lanjut menyatakan bahwa koperasi sadar akan pinjaman mereka. Buku-buku keuangan dan akuntansi merupakan bahan yang bisa digunakan siapa pun untuk mencari informasi.

Secara teratur, salinan laporan-laporan keuangan ini akan disediakan bagi koperasi.

Program pembiayaan Bank Tanah Filipina untuk proyek kelapa sawit terbuka hanya untuk koperasi. Koperasi pemohon harus memiliki 100 anggota dan reputasi 3 tahun, modal disetor (*paid-up capital*), manajemen inti yang lengkap, dan persyaratan lainnya. Bank memberikan bantuan keuangan 80% sedangkan 20% sisanya menjadi ekuitas peminjam. Perusahaan jangkar (perusahaan bersangkutan) menanggung 10% dari ekuitas itu. Ekuitas 80% itu untuk satu hektar kelapa sawit dengan biaya produksi PhP 144.000; biaya pengembangan dan penanaman PhP 109.310, modal kerja PhP 34.690, input tenaga kerja PhP 21.740 dan bahan PhP 122.260. Bank tidak memerlukan jaminan tetapi memerlukan sertifikat tanah asli untuk diamankan.

Kebijakan PCSD dan ijin SEP

Dari hutan hingga laut dan pantainya, keanekaragaman hayati Palawan sangat kaya dan unik tak ada bandingnya, tetapi juga sangat rentan. Untuk alasan inilah sebuah undang-undang khusus disahkan, yaitu *Republic Act 7611*, atau Rencana Lingkungan Strategis untuk UU Palawan (*Strategic Environmental Plan for Palawan Act*), populer disebut UU SEP. Strategi utama dari hukum ini adalah penggambaran Jaringan Kawasan Ekologi Kritis (*Environmentally Critical Areas Network / ECAN*) yang terdiri dari wilayah darat atau hutan, pesisir/laut dan tanah leluhur/suku dalam zona-zona sebagai berikut: zona multi guna, zona terbatas, zona penyanga dan zona inti. Kegiatan tertentu diperbolehkan atau dilarang dalam zona yang berbeda Dewan Palawan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Palawan Council for Sustainable Development/PCSD*) mengawasi pelaksanaan dan realisasi dari UU SEP, dengan dukungan dari Staf PCSD (PCSDS). Semua proyek-proyek pengembangan dan usaha yang akan diterapkan di Palawan harus terlebih dahulu mendapatkan Ijin SEP dari PCSD.

Menurut PCSDS, saat ini PCSD tidak memiliki kebijakan khusus mengenai bahan bakar nabati. Ketika proyek seperti Proyek Pengolahan Minyak Sawit Terpadu mulai berlaku, Ijin SEP

diperlukan pada tingkat kebijakan. Namun, tidak ada klausul khusus yang mengacu pada bahan bakar nabati. Jika penggunaan dan pembukaan lahan adalah untuk produksi minyak makan (*edible oil*) tetapi bio-diesel yang dihasilkan, proyek ini perlu mengajukan izin SEP lain.

PPVOMI-Agumil telah memperoleh satu izin SEP untuk Proyek Pengolahan Minyak Sawit Terpadu mereka, yang terdiri dari kebun pembibitan, pabrik kelapa sawit dan perkebunan. Perkebunan yang dimiliki oleh, dan proyek yang dilaksanakan oleh koperasi petani tidak termasuk dalam ijin SEP. Penjelasan untuk ini oleh PCSDS adalah bahwa tanggung jawab untuk mengelola petani kontrak adalah tanggung jawab perusahaan. Sebuah koperasi dengan proyek perkebunan kelapa sawit tidak akan lolos proses mendapatkan ijin SEP karena perusahaan/pendukung itu telah diberi izin SEP dan itu merupakan perusahaan yang mengontrak petani. Sebagaimana dapat dipahami di tingkat PCSDS, kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan ijin SEP berlaku tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk petani. Ini berarti bahwa petani juga harus menyadari syarat dan ketentuan ijin SEP dan bahwa perusahaan harus memberi mereka informasi yang memadai dalam hal ini. Karena PCSDS belum melakukan kegiatan pemantauan sehubungan dengan petani, mereka belum bisa menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan dan ketentuan dan apakah ini juga dikenakan pada petani dalam prakteknya.



Pohon kelapa sawit dengan buahnya di Bgy. Tagusao, Quezon. Tagusao memiliki 150 hektar perkebunan kelapa sawit.

Isu yang kritis adalah soal lahan perkebunan pemberian yang diatur oleh ijin SEP. Dalam kasus ini, perusahaan menargetkan 15.000 hektar untuk perkebunan sawit mereka tetapi menurut syarat dan ketentuan ijin SEP, operasi proyek kebun pembibitan dan pabrik minyak harus dibatasi pada daerah seluas 13 hektar yang telah disetujui. Oleh karena itu, lahan 15.000 hektar itu, yang dianggap tanah pribadi dari koperasi, sebenarnya adalah perkebunan kelapa sawit yang tidak tercakup oleh ijin SEP manapun. PCSDS menganggap pembukaan perkebunan kelapa sawit di Palawan sebagai perubahan penggunaan lahan serius. Namun usulan seperti ini dievaluasi berdasarkan proyek; ijin SEP dikeluarkan "per proyek".

Lembaga keuangan telah diminta oleh PCSD/S untuk memasukkan izin SEP sebagai bagian dari persyaratan mereka untuk menjamin kelangsungan hidup lingkungan daerah tersebut dan proyek pembangunan. Perlu disebutkan bahwa dalam studi bahan bakar nabati sebelumnya, Pejabat PCSDS Atty, Adel Villena dan Eksekutif PCSDS Romeo Dorado mengklaim bahwa LBP telah membiayai proyek kelapa sawit seluas 3.740 hektar dari 4.245 hektar yang ditargetkan akan dibiayai. Mereka mempertanyakan mengapa LBP telah mencairkan dana yang besar untuk proyek-proyek yang tidak lolos proses pemberian lisensi dan perijinan yang tepat. Diasumsikan bahwa pernyataan ini dibuat ketika proyek itu belum memiliki izin SEP.

Perkebunan kelapa sawit dan wilayah/tanah leluhur

Menurut Pejabat Provinsi NCIP Engr. Parangue, persetujuan untuk perubahan dalam penggunaan lahan dan pembangunan tidak diperlukan jika tanah adalah milik pribadi. Proses mendapatkan persetujuan menghilang ketika tanah milik pribadi telah dimasukkan ke dalam koperasi, bersama dengan tanah lain yang dimiliki oleh anggota koperasi untuk ditanami kelapa sawit. Namun, ada kasus, seperti di Tagusao, di mana penduduk lokal telah meminta sejumlah daerah dari lahan CALC. Dalam kasus ini, memasuki wilayah komunal tidak memerlukan izin dari masyarakat, yang untuk

mendapatkannya butuh waktu lama. Oleh karena itu, Parangue menyarankan penduduk setempat untuk membatasi penggunaan lahan mereka pada lahan mereka sendiri di luar CALC mereka. Dilaporkan permohonan para penghuni untuk daerah CALC gagal disetujui.

Namun, tampaknya memang ada bagian-bagian dari perkebunan kelapa sawit seluas 150 hektar di Tagusao yang masuk ke daerah CALC. Menurut salah satu anggota koperasi, sekitar 40 hektar kawasan CALC seharusnya menjadi bagian dari 150 hektar proyek perkebunan kelapa sawit koperasi, namun daerah CALC yang ditanami sudah mencapai 150 hektar. Ada juga bagian dari CALC yang dijual oleh masyarakat adat pada non-masyarakat adat, meskipun ini bukan disebabkan oleh proyek kelapa sawit karena itu tanah yang dijual sebelumnya. Namun, daerah tersebut kini ditanami dengan kelapa sawit. Parangue mengklaim bahwa dia tidak menyadari bahwa sebagian daerah CALC itu telah dijual. Sebidang tanah yang dia sendiri telah jual bukan bagian dari daerah CALC. Dia juga menyatakan bahwa jika memang ada bagian dari daerah CALC yang telah dijual, itu akan jadi kerugian si pembeli karena dia tidak akan lagi memiliki tanah itu.

Parangue juga menjelaskan kasus lain di Berong, juga di Quezon, di mana penduduk setempat ingin berinvestasi di perkebunan kelapa sawit dan mendapatkan sekitar 500 hektar untuk mendirikan perkebunan itu. Sertifikasi NCIP diperlukan bagi mereka untuk bisa mengikat kontrak dengan perusahaan minyak sawit itu. Namun, perusahaan itu dilaporkan berusaha menghindari tanggung jawab untuk mengajukan permohonan sertifikasi ini karena prosesnya memakan banyak waktu. Menurut Direktur PPVOMI, perusahaan itu berupaya membangun perkebunan kelapa sawit di daerah CADC, tetapi mendapati bahwa prosesnya jauh lebih rumit karena mereka harus berurusan dengan NCIP dan berkonsultasi dengan masyarakat adat. Jika, di sisi lain, masyarakat mengajukan aplikasi itu, proyek itu menjadi proyek yang dimulai komunitas dimana tidak perlu melalui proses FPIC. Proyek itu hanya perlu divalidasi oleh NCIP kepada masyarakat. Jika suatu perjanjian diperlukan, perjanjian tersebut akan menjadi tanda persetujuan mereka akan

syarat dan ketentuannya. Dalam kata-kata Parangue, "itu pengelakan dari proses FPIC, yang mana tidaklah ilegal".

Kasus lainnya adalah kasus CBFM di Iraan, Rizal, di mana sebagian dari daerah yang diajukan untuk kawasan CBFM juga diklaim sebagai tanah leluhur, meskipun belum ada permohonan formal untuk klaim ini dari masyarakat lokal. Pemohon CBFM (koperasi) terdiri dari masyarakat adat dan non-masyarakat adat yang telah memperoleh sertifikasi prasyarat untuk proyek sawit dari NCIP.

Perkebunan kelapa sawit dan instrumen tenurial DENR

Menurut Caluya, Kepala DENR-FMS di Palawan Selatan, DENR mendukung pengolahan instrumen tenurial yang diperlukan oleh proyek-proyek minyak kelapa sawit dan merekomendasikan bahwa pendukung proyek minyak sawit berkonsentrasi pada tanah A&D (tanah yang bisa dialihkan dan sekali pakai). Jika daerah tersebut berupa hutan, DENR mendukung proyek itu dengan mengeluarkan instrumen tenurial yang tepat dalam hutan itu. Di kawasan CBFM, pendukung proyek didorong untuk berkoordinasi dengan Organisasi Rakyat (PO) yang merupakan pemegang CBFM. Namun, jika daerah tersebut belum terjangkau oleh instrumen tenurial, mereka boleh mengajukan permohonan untuk instrumen tenurial yang sesuai, seperti SIFMA atau sewa jenis apapun dari pemerintah. Jangka waktu tenurial adalah 25 tahun, dan bisa diperpanjang selama 25 tahun lagi. Pemohon instrumen tenurial wajib untuk melakukan studi kelayakan dan menyerahkan hasilnya ke DENR. ECC juga harus diserahkan, terutama untuk instrumen tenurial hutan, karena daerah yang dibutuhkan seringkali luas, seperti halnya untuk proyek perkebunan kelapa sawit.

Menurut Caluya, perkebunan kelapa sawit di Palawan terkonsentrasi pada tanah A&D yang dilindungi sertifikat. Caluya juga mengklaim belum ada perkebunan kelapa sawit di kawasan CBFM dan perencanaan untuk pembukaan perkebunan di daerah-daerah tersebut masih berlangsung. Di CBFM di Isugod, Quezon, misalnya, proses perencanaan dan koordinasi dengan PO masih berlangsung. Di Iraan, Rizal, permohonan CBFM sedang dalam proses persetujuan oleh Kantor Pusat DENR.

PPVOMI mencoba untuk membangun sebuah perkebunan kelapa sawit di Iraan, Rizal, daerah yang saat ini mengajukan permohonan CBFM. Menurut Direktur PPVOMI, satu klausul disertakan dalam pedoman pelaksanaan PHBM bahwa tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai daerah produksi pertanian. Pernyataan terbaru dari luasan lahan menunjukkan bahwa lebih dari 15 hektar kelapa sawit telah ditanam di kawasan Iraan. Seorang sumber mengatakan bahwa daerah-daerah yang ditanami dengan kelapa sawit adalah daerah yang dihuni oleh masyarakat adat. Namun, Caluya mengklaim bahwa tiap perkebunan kelapa sawit akan berada di tanah A&D, di mana permohonan CBFM bisa ditarik karena tanah tidak lagi digunakan untuk tujuan kehutanan tetapi untuk produksi pertanian. Jika kayu akan ditebang selama masa pembukaan, terlepas dari apakah itu adalah daerah A&D atau bukan, pemilik masih diharuskan untuk berkoordinasi dengan DENR. Segala dampak pada kayu atau pohon yang diakibatkan pembukaan perkebunan kelapa sawit menjadi perhatian Layanan Manejemen Hutan (FMS) dari DENR yang perannya adalah untuk memantau apakah dan bagaimana pohon yang ditebang digunakan dan apakah penebangan berlangsung sesuai dengan peraturan kehutanan.

Caluya mengklaim bahwa tidak ada perkebunan di wilayah MMPL, tapi ada perkebunan dekat dengan zona penyangga, seperti di kawasan Espanola (Pulot Interior) dan Brooke's Point (Maasin dan Calasaguen). Ketika ditanya apakah 20.000 hektar yang ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Palawan bisa secara khusus diketahui, Caluya mengatakan bahwa diperlukan verifikasi lebih lanjut mengenai tanah itu. Data mengenai penggambaran dan verifikasi aktual daerah tersebut tidak tersedia pada saat penulisan. Dengan demikian, tidak ada angka pasti yang tersedia mengenai lokasi daerah-daerah ini.

Direktur PPVOMI menjelaskan bahwa fokus mereka untuk pengembangan kelapa sawit adalah daerah antara lahan sawah dan kawasan hutan, yaitu daerah yang menurutnya jarang digunakan orang. 80.000 hektar calon daerah yang disebutkan tersebar di sepanjang Palawan Utara dan Selatan. Namun hanya satu modul proyek seluas 15.000 hektar telah dikonfirmasi. Sementara melampaui luasan 15.000 hektar adalah hal yang menggoda,

Narciso mengatakan bahwa kapasitas lokal terbatas. Taytay dan Roxas, keduanya kotamadya di Palawan Utara, telah menyatakan keinginan mereka untuk membangun proyek perkebunan kelapa sawit mereka sendiri tetapi akan menghadapi kendala kapasitas yang sama.

Dampak pada masyarakat dan lingkungan serta isu-isu yang muncul dalam budidaya kelapa sawit

Dampak social ekonomi dan isu-isu yang muncul: perspektif lokal

Di tingkat masyarakat, Goyok Tiang, seorang pemimpin adat dari Iraan di Rizal, melaporkan bahwa dia telah didekati untuk terlibat dalam perkebunan kelapa sawit. Namun, dia dan beberapa *panglima* (pemimpin adat) lainnya memutuskan untuk tidak melakukannya karena mereka tidak merasa bahwa mereka memahami sistemnya dengan cukup baik dan sudah puas dengan konsesi *almaciga* (damar) yang diberikan kepada mereka. Calib Tingdan, seorang pemimpin adat dari Sowangan di Quezon, mengatakan tidak ada proyek atau perkebunan kelapa sawit di daerahnya karena masyarakat setempat mampu memantau ini sejak awal dan telah memutuskan untuk menolak sejak itu. Setelah melihat sebuah film yang menunjukkan dampak dari pengembangan kelapa sawit pada masyarakat lokal, mereka mengkhawatirkan dampak merugikan dari bahan kimia dan limbah yang digunakan pada perkebunan kelapa sawit pada daerah persawahan mereka. Terutama, penduduk setempat tidak mau mengambil risiko pohon kelapa mereka terserang *Brontispa*. Seperti yang dijelaskan Tingdan, antara pohon kelapa dan pohon kelapa sawit, *Brontispa* akan hampir pasti menyerang pohon kelapa karena pohon kelapa sawit pasti sudah dilindungi oleh pestisida semprot.

Pada awalnya, Fermin Queron dari Espanola berpikir untuk menggunakan lahannya untuk menanam kelapa sawit tetapi memutuskan menolaknya kemudian setelah seorang teman dari Mindanao memperingatkannya akan dampak negatifnya. Dia juga diberitahu bahwa kebanyakan petani kelapa sawit telah kehilangan tanah mereka ke bank dan bahwa butuh waktu beberapa tahun

sebelum tanah mereka menjadi produktif, dimana saat itu bunga pinjaman mereka telah menumpuk. Ini semua adalah alasan utama mengapa banyak di antara masyarakat tidak mengejar budidaya kelapa sawit. Daerah mereka bersih dari penanaman kelapa sawit, meskipun Fermín adalah anggota koperasi di Punang yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

Otol Odi, seorang pemimpin adat dari Punta Baja di Rizal, mengatakan bahwa dia belum bisa memutuskan akan menyetujui atau tidak menyetujui untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di daerah CADC-nya. Menurutnya diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan para pejabat dan anggota CADC. Jika MOA positif dan prosesnya dilakukan secara adil, menurutnya perkebunan kelapa sawit mungkin bukanlah ide yang buruk.



*Pohon kelapa sawit dengan buahnya di
Bgy. Malatgao, Quezon.*

Di sisi lain, Kepala suku Paldina Japil dari Pulot Interior di Espanola mengaku agak bingung mengenai manfaat sebenarnya dari proyek kelapa sawit bagi penduduk lokal. Dia telah diberitahu oleh sekelompok orang yang datang mengunjunginya bahwa "bahkan pemilik sebidang kecil tanah bisa menjadi jutawan". Karena merasa bahwa dia tidak sepenuhnya memahami proyek tersebut serta

implikasinya, Paldina memutuskan menolak penanaman kelapa sawit di tanahnya sendiri, meskipun daerah persawahannya sudah dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit. Meskipun tidak ada konversi lahan di pihaknya, konversi lahan yang telah terjadi di tanah yang berdekatan pasti memiliki implikasi pada ketahanan pangan lokal masyarakat di daerah tersebut.

Meski ada konsekuensi-konsekuensi negatif itu, satu keuntungan yang jelas dari pembukaan perkebunan kelapa sawit seperti yang dilihat oleh PCA adalah penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Pada Laporan Akhir Tahun 2009 mereka, diperkirakan bahwa jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh proyek kelapa sawit adalah satu pekerja per hektar. Ini berarti bahwa jika total lahan yang ditanami dengan kelapa sawit adalah 3.790 hektar, proyek kelapa sawit bisa menyediakan 3.790 pekerjaan untuk anggota masyarakat. Laporan itu juga menyebutkan bahwa kemampuan beli meningkat secara signifikan. Namun, Bonifacio Tompong dari Tagusao di Quezon, yang bekerja di perkebunan sebagai pemimpin tim/pencatat waktu, menyuarakan keprihatinannya atas upah pekerja perkebunan. Dia telah berhasil melobi untuk meningkatkan gaji buruh dari PhP 120 menjadi PhP 150/hari, yang bertahan sejak itu dan pernah jatuh kembali ke PhP 120.

Jelas penciptaan lapangan kerja bukan hanya soal jumlah pekerjaan yang diciptakan bagi masyarakat tetapi juga soal berapa upah yang didapatkan pekerja setiap hari. Bekerja di perkebunan kelapa sawit bisa sebagai pemimpin/mandor (*kapatas*), kepala atau buruh. Mandor dan kepala keduanya anggota koperasi tetapi mandor dipilih oleh koperasi sementara kepala dipilih oleh perusahaan. Pekerjaan dibayar berdasar upah harian yang berkisar antara PhP 100-PhP 150 untuk pemimpin tim dan buruh dan PhP 180 untuk kepala. Upah harian bervariasi dengan koperasi yang berbeda. Peningkatan atau perubahan dalam upah harian bisa dimintakan melalui resolusi oleh koperasi kepada perusahaan, yang meminta perusahaan dan koperasi untuk mendiskusikan dengan bank untuk membuat perubahan tersebut. Namun, perusahaan dan/atau bank berkilah bahwa tingkat upah standar atau upah minimum tidak dapat diberikan karena uangnya dipinjam dari bank.



Pohon kelapa sawit yang berbatasan dengan persawahan di Bgy. Panitian, Quezon.

Meningkatkan upah harian akan sama dengan peningkatan biaya gaji, bunga dan pinjaman. Di sisi lain, rendahnya tingkat upah harian adalah salah satu alasan mengapa banyak yang berhenti bekerja di perkebunan. Alasan lain adalah keterlambatan pembayaran yang berulang kali terjadi.

Di Maasin, mengambil cuti dari kegiatan koperasi dulu digunakan sebagai pemberian untuk pemotongan gaji. Di Espanola, pembukaan lahan yang luas (*rabas*) dilakukan oleh pekerja, muda dan tua, yang hanya dibayar PhP 130 per hari. Kebanyakan dari mereka harus berjalan dari rumah mereka ke daerah di mana mereka ditugaskan saat fajar. Sumber melaporkan bahwa selama waktu itu, beberapa pekerja mengeluh bahwa mereka belum dibayar untuk semua hari kerja mereka dan menerima kurang dari yang mereka harapkan. Sebelumnya, kasus penipuan gaji juga telah dilaporkan di kawasan Bataraza.

Tompong adalah pekerja perkebunan yang menerima gaji yang sangat rendah untuk kerjanya di perkebunan kelapa sawit. Namun, Tompong, yang memasukkan satu hektar tanahnya (yang merupakan bagian dari daerah CALC) di perkebunan, mengamati bahwa sebelum pembukaan perkebunan kelapa sawit, kehidupan

sangat sulit. Namun, seiring bertambahnya jumlah pekerjaan yang tersedia sejak saat itu, kehidupan menjadi sedikit lebih mudah. Dia merasa sangat positif akan nasibnya di tahun mendatang karena saat itu pabrik sudah akan selesai dibangun dan panen akan dimulai. Dia diberitahu oleh pengawas perkebunan bahwa selama 2 tahun pertama, petani akan memiliki hak istimewa untuk menerima penghasilan penuh panen mereka karena mereka belum perlu membayar bank kembali dan pemotongan untuk pinjaman baru akan dimulai di tahun ketiga. Dia mengetahui bahwa akan ada pengurangan 75% dan 25% sisanya akan untuk mereka. Situasi ini tampaknya berbeda dengan yang terjadi di Bataraza dimana, menurut salah satu petani, para pekerja baru akan mulai menerima bagian dari hasil panen dua tahun lagi (yaitu 2012).



Perkebunan kelapa sawit di kaki sebuah gunung di Iraray, S. Espanola.

Sejumlah petani beralasan bahwa proyek minyak sawit bermanfaat dalam hal membuat lahan kosong menjadi produktif. Sebagai contoh, Danny Ayson, Ketua CFC FAMICO di Quezon, tidak

khawatir telah memasukkan 15 hektar lahannya menjadi perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya, "*Ang nakakatakot ay kung hindi mo matataniman, isang kasalanan yan, na mayroon kang area na nagiging masukal at walang silbi*". ("Yang lebih buruk adalah jika Anda tidak menanami lahan Anda. Adalah kesalahan serius jika Anda membiarkan lahan Anda menjadi tidak subur dan tidak berguna.") Kegilaan akan ekspansi kelapa sawit telah mengakibatkan pembelian dan penjualan tanah besar-besaran di Espanola dan Brooke's Point. Suede, seorang pemimpin adat di Espanola, mengamati bahwa banyak pemilik tanah yang tinggal di tempat lain kembali pulang semata-mata untuk menjual tanah mereka ketika mereka mendengar bahwa orang-orang tertentu ingin membeli tanah, lalu pergi lagi.



Ember untuk kumbang badak di tengah perkebunan kelapa sawit di Espanola.

Kepala suku Paldina, juga di Espanola, melaporkan bahwa beberapa masyarakat pribumi menjual tanah mereka dengan harga yang sangat murah PhP 1.000/hektar. Di kawasan Pulot Interior, sekitar lima sampai enam keluarga pribumi menjual lebih dari 30 hektar tanah mereka, yang kini ditanami kelapa sawit, meskipun dia tidak yakin siapa yang memiliki tanah tersebut. Menurutnya sulit untuk melakukan sesuatu mengenai situasi itu karena keputusan terletak pada pemilik tanah adat. Dia menambahkan bahwa akan menjadi lebih sulit jika pemilik tanah telah dibayar sebagian. Ketika dalam tekanan untuk menjual tanah mereka, beberapa masyarakat adat juga telah ditipu dan diberi informasi yang terbatas mengenai syarat dan ketentuan

aktual penjualan mereka. Menurut Paldina, seorang pribumi kecewa ketika dia membaca Akta Jual. Itu menyatakan bahwa dia menjual tanah seharga PhP 40.000/hektar namun agen baru membayarnya PhP 10.000 sebagai uang muka dan PhP 10.000 lagi sebagai pembayaran akhir. Dalam kata-kata Kepala suku Paldina, "Sudah sikap kami sebagai orang Palawan bahwa ketika kami dihadapkan pada tekanan seperti ketika kami menemukan diri kami di tengah-tengah daerah yang sudah dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit, kami dipaksa untuk menjual. Meski itu terjadi pada saya, saya tidak ingin menjual tanah saya karena saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Tapi ini menimbulkan masalah karena ketika orang lain menjual tanah mereka, mereka tidak punya tempat lain untuk pergi selain merambah wilayah hutan. Ini menjadi ancaman bagi hutan."

Dampak lingkungan

Menurut Narciso, masalah lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh pengembangan kelapa sawit dirasakan bersama baik oleh perusahaan maupun oleh buruh. Menyeimbangkan antara produktivitas dan skala perkebunan serta keberlanjutan lingkungan juga penting untuk tanaman itu sendiri. Narciso berargumen bahwa pembukaan perkebunan kelapa sawit adalah pilihan yang lebih baik karena hanya satu pembukaan (*clearing*) yang diperlukan dibandingkan dengan kebakaran tahunan yang disebabkan oleh *kaingen*. Di antara dampak positif perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan, PCA melaporkan bahwa vegetasi telah meregenerasi dirinya dan bahwa burung, lebah dan fauna lainnya sering terlihat di daerah tersebut. PCA tidak memiliki masalah lingkungan yang sama seperti Malaysia atau Indonesia. Menurut Romasanta, hal ini karena jenis sistem dan pengelolaan sumber daya di Filipina berbeda. Selain itu, Dewan itu ada bagi petani agar mereka bisa mengemukakan keluhan apapun.

Salah satu pemimpin adat di Maasin menyatakan bahwa saat ini, pengaruh dari ekspansi kelapa sawit belum terasa. ("Sa ngayon, ang oil palm hindi pa laganap na nararamdaman ang epektu"). Dampak negatif tidak selalu terjadi seperti yang dikatakan PPVOMI kepada masyarakat setempat bahwa sama sekali tidak akan ada limbah yang

akan dihasilkan oleh produksi minyak sawit, menurut PCSDS. Namun, ini hanya akan terbukti ketika operasi perkebunan dimulai. Untuk satu ton minyak olahan, dilaporkan bahwa 2,5 ton limbah dibuang. Sebagai provinsi kepulauan, semua limbah di Palawan diperkirakan akan mengalir ke wilayah laut dan pesisir, dan merugikan keanekaragaman hayati yang kaya yang tumbuh subur di lingkungan ini.

Menurut PCSDS Abigail Cruz, pembentukan dan persetujuan MMT (Tim Pemantau Multi Partai) proyek itu ditunda setelah ada pengaduan yang diterima terkait dengan serangan *brontispa* pada sekitar 4.000 pohon kelapa di Bataraza. Pertemuan-orientasi pertama anggota MMT diadakan pada minggu pertama Oktober. Pembentukan MMT adalah salah satu kondisi yang biasa dalam setiap ECC. Namun, tampaknya pohon-pohon kelapa tidak hanya menderita serangan *brontispa* tetapi juga kumbang badak, yang dikenal sebagai "*bagangan*". Suede Taiban, pemimpin adat yang telah tinggal di Espanola selama hidupnya, menyaksikan bagaimana pohon kelapanya dihancurkan oleh kumbang ini. Di kawasan Iraray saja, lebih dari 1.000 pohon kelapa milik 20 petani terkena dampak. Sambil menunjuk ke satu pohon yang penuh kumbang, Taiban menjelaskan, "*Kagaya nyan o, yung katabi nyan, katabi ng oil palm, ubos na nyog diyam. Papunta doon sa itaas.*" ("Seperti pohon yang ada di samping kelapa sawit itu, buah kelapa di sana juga mati. Itu sampai ke atas.")

Banyak penduduk setempat percaya bahwa kelapa sawitlah yang harus disalahkan untuk penyakit yang membinasakan pohon-pohon kelapa. Menurut Taiban, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengatakan,

"Kami punya pohon kelapa, kami memiliki *buri* (*Corypha Elata*, spesies pohon palem besar) di sini. Tapi ketika mereka menanam kelapa sawit itulah saat semuanya dimulai. Hama di sini bukan *brontispa*, tapi *bagangan*. *Brontispa* adalah hama yang menyerang di Bataraza di Brooke's Point. Kami menderita dan mengalami kesulitan karena kumbang yang menyerang kelapa kami. Menurut saya, itu adalah karena kelapa sawit. Kumbang berkembang dan

tumbuh di dalam buah kelapa. Ketika kami mencari penjelasan, mereka mengatakan kumbang datang dari *buri*. Mereka semua menebangi *buri* dan kumbang-kumbang bertelur dan menjadi banyak. Meskipun banyak yang tidak puas dengan penjelasan ini, kami tak bisa berbuat apa-apa."

Namun, Danny Ayson Quezon mengatakan adalah salah jika menyalahkan kelapa sawit sebagai sumber *brontispa*. Dia mengatakan,

"Sejauh yang saya tahu, bibit datang dari negara-negara lain. Kami memiliki karantina. Jika memang bibit-bibit tersebut mengandung penyakit, mereka tidak akan mengangkut bibit-bibit itu. Lalu ada proses di kebun pembibitan, yang dikelola oleh PCA. Merekalah yang membiarkan ini terjadi. Jika bukan karena mereka, kami menyalahkan PCA karena mengijinkan bibit-bibit ini diangkut ke Filipina. Bahan tanam harus mempunyai izin. PCSDS sadar bahwa bibit Agumil yang diimpor sebelumnya yang dibawa ke pembibitan Bukidnon terinfeksi hama. Orang hanya bisa mengaitkan pengenalan kelapa sawit di Palawan dengan kondisi pohon-pohon palem yang menderita hama."

Dalam catatan lain, PCSDS mengemukakan keprihatinannya terhadap dampak dari mengubah suatu daerah yang luas yang ditanami dengan beragam tanaman menjadi lahan mono kultur. PCSDS Luz Maria Martinez menjelaskan bahwa daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi lebih tahan beradaptasi dengan perubahan iklim, dan mempertanyakan bagaimana sistem mono kultur bisa dibandingkan dalam hal ketahanan. Pada tahun 1980-an, sejumlah besar dana dihabiskan untuk memperkenalkan tanaman tahunan tumpangsari seperti kelapa dan kopi; mengubah sistem ini menjadi sistem mono kultur bisa menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Penggunaan insektisida dan pestisida untuk meningkatkan hasil produksi juga dapat menimbulkan risiko lingkungan dan kesehatan. Isu lingkungan lainnya yang ditunjukkan oleh PCSDS termasuk intrusi kelapa sawit di antara spesies lokal, habisnya nutrisi oleh kelapa sawit dan pelepasan karbon dari perkebunan skala besar.

Terakhir, seorang petani di Brook's Point mengamati bahwa kelapa sawit rentan terhadap serangan tikus. Dia mengklaim ini belum menjadi masalah serius karena pabrik pengolahan belum selesai. Selanjutnya, dia menyatakan,

"Seorang teman saya dari Mindanao mengatakan kepada saya bahwa ketika pabrik selesai dibangun dan kelapa sawit tidak berbuah, insektisida akan disemprotkan yang akan memberi pengaruh pada serangga yang melakukan kontak dengan bunga. Mereka akan menggunakan lebah eksotis yang tahan terhadap [insektisida] tetapi akan membantu proses pembuahan. Saya berharap lebah-lebah ini tidak akan mempengaruhi lebah-lebah asli kami yang menghasilkan madu yang sangat baik. Kami tidak akan tahu sampai pabrik itu beroperasi. Tapi kami harus melakukan upaya pencegahan daripada menggunakan banyak bahan kimia dan spesies eksotis untuk memaksanya berbuah."

Masa depan produksi bahan bakar nabati di Palawan

Diharapkan bahwa kegiatan kelapa sawit akan meningkat di tahun-tahun mendatang, terutama dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan penyelesaian pembangunan pabrik-pabrik. Jika usaha seperti ini didukung oleh pemerintah, seperti yang terjadi di Palawan, tidak akan ada instansi atau kantor pemerintah yang akan menentangnya. PCSDS, misalnya, mengemukakan banyak masalah lingkungan namun proyek telah mendapatkan izin SEP dari PCSD, yang mana tidaklah mengejutkan.

Selain kelapa sawit dan jarak pagar, proposal telah diserahkan untuk bio-diesel dari bunga matahari di kotamadya Quezon. Ini dipimpin oleh proyek Serikat Koperasi Filipina (*Cooperative Union of the Philippines/CUP*) dan diharapkan bisa mencakup lahan seluas sekitar 500 hektar. Koperasi lokal yang baru terbentuk, Koperasi Produksi Bunga Matahari Palawan Selatan (*Southern Palawan Sunflower Production Cooperative*), juga memiliki rencana untuk melaksanakan proyek serupa yang mana target lembaga pembiayaannya adalah juga LBP. Koperasi itu berencana untuk

memperoleh sertifikasi dari DENR dan sudah mengidentifikasi daerah-daerah di Quezon untuk pembukaan perkebunannya, yang meliputi wilayah di sekitar jalan kotamadya, kawasan CBFM di Bgy. Isugod dan beberapa kawasan terpencil lainnya. Pasar belum sepenuhnya terbentuk namun CUP akan berusaha untuk mengembangkannya baik di dalam negeri atau luar negeri. Ada juga proposal untuk mendirikan sebuah pabrik pengolahan. Danny Ayson, ketua koperasi dan ketua CFC-FAMICO yang memiliki proyek perkebunan kelapa sawit di Quezon, menjelaskan bahwa ini akan membawa banyak investasi ke Quezon untuk memperluas pilihan lapangan kerja petani dan menjadikan lahan kosong produktif.

Kesimpulan dan rekomendasi

Lebih dari apa pun, investasi atau proyek kelapa sawit di Palawan harus dianalisa dalam konteks kelestarian lingkungan, karena kepentingan global, nasional dan lokal lingkungan Palawan. Perdebatan mengenai penerimaan terhadap kelapa sawit di Palawan akan berbeda jika produksi minyak sawit dimaksudkan untuk bahan bakar nabati bukan sebagai bahan baku minyak makan (*edible oil*) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Hal ini akan menyajikan sebuah tantangan kebijakan untuk PCSD karena PCSDS jelas mengakui bahwa mereka tidak memiliki kebijakan bahan bakar nabati. Namun demikian, studi ini menghasilkan poin-poin kunci sebagai berikut:

Penanaman kelapa sawit difokuskan di Palawan Selatan, dan meskipun ada beberapa inkonsistensi data mengenai luasan pasti aktualnya, diperkirakan bahwa luasannya mendekati 4.000 hektar. Karena kawasan budidaya yang ada belum mencapai bahkan setengah dari target perusahaan, diduga akan ada lebih banyak kasus penjualan tanah, konversi lahan dan perambahan pada daerah yang dihuni dan digunakan oleh masyarakat adat (misalnya, daerah yang dilindungi oleh instrumen tenurial hukum dan daerah yang dimiliki secara individu dan pribadi oleh masyarakat adat), pemanfaatan kawasan CBFM dan wilayah yang tercakup oleh CLOA yang dijual di bawah periode larangan sepuluh tahun. Daerah yang saat ini sedang digunakan untuk budidaya kelapa sawit

harus dikaji berdasarkan pada kemiringan lahannya, instrumen tenurial (yang ada atau yang diusulkan) dan status lahan mereka (lahan hutan atau A&D), dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan ketahanan pangan. Jika tidak, ada risiko ekosistem alami dan daerah penghasil tanaman pangan utama beras, jagung dan kelapa akan menjadi korban.

Data yang ada dan durasi riset tidak cukup memadai untuk memberikan analisis mendalam tentang konsistensi lahan budidaya kelapa sawit serta penggunaan lahan yang ada dan yang diusulkan oleh kotamadya Palawan Selatan. Koordinat geografis dari lahan budidaya aktual dan dokumen EIS tentang proyek itu akan menjadi referensi yang berguna. Oleh karena itu sangat dianjurkan bahwa badan-badan berikut: PCSD/S, DENR, DA, DAR dan NCIP, termasuk NGO, mengkoordinasikan dan mengidentifikasi daerah-daerah mana yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit. Daerah untuk budidaya kelapa sawit juga harus memiliki kriteria yang konsisten dengan ECAN Zoning dan CLUP. Hal ini pada gilirannya menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang dikhawatirkan untuk bahan bakar nabati.

Wawancara dengan masyarakat tentang pembebasan lahan (baik lewat pembelian atau sewa) untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit menunjukkan adanya transaksi meragukan yang dibuat oleh agen-agen pembeli. Beberapa penduduk pribumi menjadi rentan karena mereka kurang memiliki pemahaman yang jelas akan transaksi tanah. Beberapa orang mungkin meremehkan nilai budaya tanah mereka jika mempertimbangkan keuntungan ekonomi yang cepat. Akses ke informasi amat penting untuk memperluas berbagai pilihan mereka untuk membuat tanah mereka produktif tanpa mengorbankan lingkungan. Sangat penting bagi koperasi-petani untuk memahami perjanjian yang mereka setujui. Anehnya, tidak satu responden pun berkomentar bahwa kontrak mereka tidak adil. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kontrak benar-benar adil karena belum ada panen atau produksi.

Beberapa dampak yang telah diidentifikasi diperkirakan akan terjadi di masa depan. Seperti yang dikatakan secara akurat oleh salah satu pemimpin adat, "Kita belum merasakan efeknya karena masih

dalam tahap awal." Tapi kegiatan awal seperti pembukaan perkebunan kelapa sawit, mekanisme pembebasan tanah, implikasi perubahan penggunaan lahan, dan klaim yang menghubungkan *brontispa* dan *badak kumbang* yang menginfeksi pohon kelapa dengan pengenalan kelapa sawit di Palawan, sudah menimbulkan dampak awal baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Diharapkan bahwa MMT proyek itu akan memainkan peran penting seiring berlangsungnya dan meluasnya proyek.

STUDI KASUS 4. Kesengsaraan koperasi ARB dan pekerja kelapa sawit di Agusan del Sur

Wilayah Caraga terdiri dari provinsi Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte dan Surigao del Sur. Wilayah ini membanggakan dirinya sebagai "rumah bagi perkebunan kelapa sawit skala besar perintis." Saat ini, dua dari pabrik kelapa sawit terbesar berada di Agusan del Sur, di mana juga bisa ditemukan konsentrasi terbesar dari perkebunan inti dan petani plasma besar. Data industri menunjukkan bahwa sekitar 50% dari total luas lahan kelapa sawit di negara ini terletak di kawasan ini.

Konsolidasi lahan skala besar untuk perkebunan kelapa sawit dimulai di Agusan del Sur selama periode Darurat Militer di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos. Pembatasan Konstitusi pada kepemilikan tanah oleh perusahaan asing dengan mudah dielakkan, sehingga memungkinkan konsolidasi sekitar 8.000 hektar lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit melalui kerjasama *the National Development Corporation* (NDC) dan Guthrie Corporation, yang saat itu dimiliki Inggris. Proklamasi Presiden yang memungkinkan adanya kerjasama ini dikritik karena mengarah ke pelanggaran hak-hak tanah dan warisan nasional.

Cerita tentang "perampasan tanah" yang mendahului pembukaan perkebunan kelapa sawit cukup terkenal di kalangan warga tua di Agusan del Sur. AFRIM melaporkan bahwa "pembukaan perkebunan kelapa sawit di tahun 1980an telah menggusur dan mengenyahkan beberapa komunitas." Tercatat bahwa sekitar 400

petani dan keluarga Manobo di Kotamadya Rosario, Agusan del Sur, digusur ketika NGPI membuka daerah itu untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit seluas 4.000 hektar. Perusahaan telah "menawarkan" pembelian tanah dengan harga yang sangat murah. Perusahaan juga didukung oleh kelompok paramiliter (juga dikenal sebagai *Lost Command*) yang terdiri dari sekitar 250 mantan tentara dan dipimpin oleh seorang pensiunan Kolonel.⁴⁷

Selain menyediakan keamanan untuk perkebunan itu, *Lost Command* melakukan tekanan-tekanan dan intimidasi terhadap mereka yang tidak mau menjual tanah mereka ke perkebunan itu. Paramiliter itu juga didakwa dengan kekejaman lain seperti "penganiayaan, pembunuhan, pemeriksaan, pencurian dan perampukan." Lebih jauh AFRIM melaporkan "Kejahatan yang dilakukan oleh *Lost Command* atas nama NGPI begitu mengerikan hingga *the Commonwealth Development Corporation*, kreditur NDC dan Guthrie, mensyaratkan agar *Lost Command* digantikan oleh perusahaan keamanan baru sebelum mengucurkan dana baru untuk perluasan perkebunan kelapa sawit."⁴⁸

Bagi mereka yang terlibat dalam memajukan industri sawit saat ini, sisi gelap dari sejarah sawit di Agusan ini sebaiknya dilupakan. *Lost Command* dibenarkan sebagai tindakan yang diperlukan karena banyaknya pemberontak bersenjata (Tentara Rakyat Baru) di daerah itu selama periode ini. Isu negatif yang mempengaruhi masyarakat, pekerja dan koperasi lokal tak bisa ditemukan dalam dokumentasi atau catatan industri sawit.

Saat ini, dua perusahaan kelapa sawit terbesar beroperasi di Agusan del Sur. Filipinas Palm Oil Plantation, Inc. (FPPI), sebuah perusahaan Filipina-Singapura, didirikan setelah menggabungkan NDC-Guthrie Plantations, Inc (NGPI) dan NDC-Guthrie Estates, Inc (NGEI). Perusahaan itu mengelola perkebunan seluas 8.000 hektar di San Francisco dan Rosario. Pada tahun 1988, berdasar CARP, lahan 8.000 hektar itu didistribusikan ke para pekerjanya. Membentuk koperasi lokal, NGEI dan NGPI menyewakan tanah mereka kepada FPPI, sehingga memungkinkan FPPI untuk melanjutkan budidaya dan operasi perkebunan kelapa sawit. FPPI juga mengoperasikan pabrik minyak sawit berkapasitas 40 ton.

Sementara FPPI mempertahankan perkebunan inti berupa perkebunan kelapa sawit seluas 8.000 hektar, perusahaan ini secara aktif mendorong penanaman kelapa sawit di antara petani pekebun individu dan perusahaan perkebunan lain di wilayah Caraga dan provinsi lain yang berdekatan.

Sementara itu, Agusan Plantations, Inc. (API), juga sebuah perusahaan patungan Filipina-Singapura, mengoperasikan 1.815 hektar perkebunan dan mengelola sebuah pabrik kelapa sawit di Trento, Agusan del Sur. Dalam mengkonsolidasikan perkebunan inti mereka, mereka juga menyewa lahan dari Penerima Manfaat Reforma Agraria (ARB) lain yang terletak di Brgy. Manat, Trento. API juga dikenal sebagai pemain yang paling agresif di industri sawit, karena memimpin ekspansi kelapa sawit di Luzon (Palawan), Visayas (Bohol) dan di banyak wilayah lain di Mindanao. Mereka memiliki pabrik minyak sawit terbaru (dan dianggap paling canggih) di Buluan, Maguindanao.

Berikut adalah cerita yang melibatkan tiga koperasi lokal dan satu serikat pekerja di Agusan del Sur yang akan memberikan beberapa isu seputar "kompensasi yang adil," praktik kerja yang adil, kepemilikan dan kontrol tanah yang melemah, dan beberapa penipuan yang diduga dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit di Agusan.

Tuntutan hukum terhadap FPPI

NGEI Multi-purpose Cooperative, Inc. adalah koperasi pekerja reforma agraria di San Francisco, Agusan del Sur, yang mengakuisisi kepemilikan 3.996,6940 hektar lahan pertanian yang ditanami kelapa sawit di bawah CARP pada tahun 1988. Pada tahun 1990, NGEI menandatangani Perjanjian Sewa dengan NDC-Guthrie Estates, Inc., yang kini diambil oleh *Filipinas Palm Oil Plantations, Inc.*, tentang kelanjutan operasi perkebunan minyak sawit FPPI di tanah itu untuk periode 25 tahun. Perjanjian sewa itu berisi hal-hal berikut:

- a) Bawa masa perjanjian sewa akan dimulai dari 27 September 1988 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;

- b) Sewa tetap senilai PhP 635/hektar per tahun;
- c) Komponen variabel setara dengan 1% dari penjualan bersih 1988-1996 dan 0,5% dari 1997-2007.

Pada tanggal 29 Januari 1998, NGEI, melalui Ketuanya, Antonio Dayday, memasukkan sebuah Penambahan ke Perjanjian Sewa itu yang memperpanjang kontrak asli selama 25 tahun lagi dari 1 Januari 2008 hingga Desember 2032, dengan biaya sewa tahunan tetap pada PhP 635/hektar.

NGEI berpendapat bahwa penambahan pada perjanjian sewa itu tidak sah karena Ketua yang memimpin negosiasi itu dan menandatangani perjanjian yang diubah itu tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian itu, terutama dalam hal memperpanjang masa sewa. Alasan lain untuk pengaduan yang disebutkan oleh NGEI meliputi:

- 1) Penambahan itu tidak disetujui oleh anggota koperasi dan Komite PARC seperti yang disyaratkan dalam Surat Perintah DAR No 5, seri tahun 1997;
- 2) Biaya sewa tahunan bersama-sama dengan paket manfaat ekonominya adalah murah, berat, tidak adil dan bertentangan dengan *Republic Act 3844*.

NGEI juga menekankan bahwa periode sewa yang sangat panjang akan merenggut hak petani penerima manfaat untuk secara pribadi mengerjakan tanahnya, yang bertentangan dengan maksud sebenarnya dari *Republic Act 6657* atau CARL. Pemohon meminta penambahan itu dibatalkan, daerah sewa dikembalikan kepada mereka dan agar FPPI membayar semua biaya sewa yang masih harus dibayar dan manfaat ekonomi lainnya berlaku surut hingga tanggal perjanjian sewa.

FPPI, di sisi lain, berpendapat bahwa penambahan itu sah, bahwa Ketua yang merundingkan kontrak itu diberi wewenang untuk melakukannya dan bahwa dari lahan seluas 3.913,5951 yang disewa, mereka hanya akan membayar untuk seluas 3.231,1571 hektar karena sisa lahan itu masih tunduk pada segregasi dan survei

atau diklasifikasikan sebagai daerah bermasalah. Akhirnya, jumlah sewa yang ditambahkan pada manfaat ekonomi lebih besar dari yang disebutkan dalam Surat Perintah (AO) DAR Nomor 5, seri tahun 1997. Perubahan dalam komponen variabel (paket ekonomi) adalah sebagai berikut:

Tahun yang dicakup	Jumlah (per hektar dalam Php)
1998-2002	1,865
2003-2006	2,365
2007-2011	2,865
2012-2016	3,365
2017-2021	3,865
2022-2026	4,365
2027-2031	4,865
2032	5,365

DARAB, dalam tinjauannya terhadap kasus ini, mengeluarkan keputusan pada tanggal 3 Februari 2004 "menyatakan penambahan perjanjian sewa tidak sah; menyatakan perjanjian sewa yang asli sah dan mengikat kedua belah pihak; bahwa setiap negosiasi ulang dari perjanjian sewa yang ada harus sesuai sepenuhnya dengan Surat Perintah No. 5 seri tahun 1997." Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah itu, "syarat dan ketentuan perjanjian sewa termasuk penentuan dan perhitungan biaya sewa lahan kelapa sawit harus disepakati bersama oleh para pihak yang mengikat kontrak, harus mendapat persetujuan dari Komite Eksekutif PARC atas rekomendasi dari PARCCOM dan sertifikasi DAR bahwa perjanjian sewa itu tidak melanggar kebijakan dan prinsip-prinsip agraria." Selanjutnya, berdasarkan Surat Perintah yang sama, dinyatakan bahwa "Negosiasi ulang jumlah biaya sewa harus dilakukan oleh para pihak setiap lima tahun, dan tunduk pada rekomendasi dari PARCCOM dan tinjauan oleh DAR."

Keputusan pertama menguntungkan NGEI, tetapi FPPI mengajukan mosi peninjauan kembali ke DARAB. Pada tanggal 22 Maret 2004, DARAB mengeluarkan resolusi, yang benar-benar membalikkan

keputusan sebelumnya. Berikut adalah kutipan dari keputusan DARAB:

"Sejurnya, fakta dan bukti yang ada secara tak sengaja terlewatkan oleh Jaksa Wilayah, dan vonis yang diberikan dengan kesalahan dan ketidaktahuan yang tak disengaja tersebut tak hanya akan menjadi tak adil bagi responden, tetapi juga akan memberikan keuntungan yang tak patut kepada pihak penggugat. Karena itulah, keputusan Jaksa Wilayah pada 3 Februari 2001 dikesampingkan dan keputusan tersebut mensahkan validitas Addendum yang diambil pada tanggal 29 Januari 1998 dan selanjutnya membatalkan kasus ini atas dasar kurangnya tindakan hukum yang diambil."

NGEI mengajukan banding atas keputusan ini ke Pengadilan Banding (CA). Pada tanggal 9 Mei 2008, CA mengumumkan keputusannya yang "menguatkan" resolusi akhir DARAB pada kasus ini. NGEI telah membawa kasus ini ke Mahkamah Agung, meminta peninjauan keputusan dari Pengadilan Banding. Petisi NGEI pada Mahkamah Agung didaftarkan sebagai GR No. 184950. Saat ini, belum ada keputusan yang diambil mengenai kasus ini. NGEI dan anggotanya mengharapkan resolusi yang cepat untuk kasus ini. Sementara itu, FPPI telah menahan semua pembayaran sewa dan manfaat ekonomi yang harus dibayarkan ke koperasi karena kasus yang belum terselesaikan yang masih tertunda di Mahkamah Agung.

Terlepas dari gugatan hukum ini, sehubungan dengan perjanjian sewa itu, FPPI dihadapkan berbagai kasus perburuan yang diajukan oleh anggota koperasi/pekerja FPPI ke Departemen Tenaga Kerja (DOLE), khususnya mengenai pemecatan karyawan/pekerja secara ilegal. Ketua NGEI saat ini, Kim Ronquillo, telah meminta NGO dan organisasi pendukung lainnya untuk mendukung mereka secara nasional maupun internasional dalam kasus mereka melawan FPPI.⁴⁹

Pelanggaran atas perjanjian

Koperasi Multiguna Penerima Manfaat Reforma Agraria Cuevas (*Cuevas Agrarian Reform Beneficiaries Multi-Purpose Cooperative* CARBEMPCO) adalah Penerima Manfaat Reforma Agraria (ARB) terdaftar beranggotakan 39 orang. Pada tahun 2003, mereka masuk ke dalam proyek kelapa sawit dengan AGUMIL Philippines, Inc. (API). Koperasi itu menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen dengan AGUMIL, dimana pihak yang terakhir menyediakan manajemen teknis dan menjamin koperasi itu mendapat pinjaman PhP 10 juta dari Bank Tanah Filipina. CARBEMPCO, di sisi lain, akan mengembangkan dan mengoperasikan perkebunan kelapa sawit seluas 220 hektar. Menurut pejabat CARBEMPCO, awal operasi perkebunan kelapa sawit dan manajemen koperasi adalah masa yang bergolak karena tuntutan anggota yang kekurangan uang agar bagian awal mereka dibayarkan sebelum periode potongan. AGUMIL dan LBP enggan untuk memenuhi permintaan itu dan serangkaian dialog dan konfrontasi menyusul. Barulah pada bulan Oktober 2007 bagian itu diberikan kepada anggota dari hasil TBS yang dijual ke AGUMIL.

Selain bertualang di minyak sawit, CARBEMPCO telah memulai program-program dan proyek-proyek lain sebelumnya. Rencana pembangunan lima tahun CAMBEMPCO menguraikan desakan koperasi itu untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Anggota koperasi dan pekerjanya sudah diberikan tunjangan seperti Layanan Jaminan Sosial (SSS), Philhealth dan bantuan medis darurat. Itu juga menerima berbagai hibah seperti DAR dan Proyek Pendukung Reforma Agraria (*Agrarian Reform Support Project/ARSP*) dari Uni Eropa, yang mendukung rehabilitasi jalan dari pertanian ke pasar di Brgy. Cebolin dan Cuevas, dan pembukaan kebun pembibitan dan proyek wanatani. Bantuan mata pencaharian diberikan oleh PATSSARD, dimana mereka menerapkan pemeliharaan kambing, sistem air pabrik pakan dan pembesaran babi. Dari DOLE, mereka menerima bantuan keuangan untuk proyek kebun sayuran bagi anggota koperasi perempuan. Hingga saat ini, CARBEMPCO telah secara aktif mengejar kerjasama dengan LGU dan instansi pemerintah lainnya seperti DAR, CDA, TESDA dan dengan NGO.

Meskipun periode awal operasi CARBEMPCO itu umumnya lancar, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan itu telah mengalami masalah dengan AGUMIL dalam kaitannya dengan pelanggaran beberapa syarat dan ketentuan dari Manajemen dan Perjanjian Layanan, seperti pembayaran yang tertunda, bunga pinjaman dan biaya tambahan, perbedaan harga dan pemecatan semena-mena buruh/pekerja perkebunan kelapa sawit. Koperasi secara resmi mengemukakan masalah ini dengan perusahaan dan dalam Kongres Nasional Kelapa Sawit, tetapi hingga saat ini, masalah itu tetap belum terselesaikan.

Koperasi lain, Koperasi Multiguna Pribumi Petani Dataran Tinggi Kabingwangan (*Kabingwangan Upland Farmers Tribal Multi-Purpose Cooperative/KUFTRIMCO*) juga memiliki kontrak dengan API dan LBP, Produksi, Teknis dan Perjanjian Pemasaran tripartit, yang mereka tandatangani pada tahun 1998. KUFTMC sebagian besar terdiri dari masyarakat adat yang mendapat kontrak pengelolaan dengan DENR di bawah Program Pengelolaan Hutan Terpadu (*Integrated Forest Stewardship Program/ISFP*) atas sekitar 440 hektar lahan hutan. Mereka saat ini berbagi kantor dengan pusat layanan lokal NCIP di Brgy. Libertad, Bunawan, Agusan del Sur.

Serupa dengan kontrak pemasaran CARBEMPCO, KUFTMC menyediakan lahan dan sarana pertanian lainnya seperti tenaga kerja, sementara API memberikan bantuan teknis gratis dan secara eksklusif membeli semua hasil produksi perkebunan kelapa sawit pada harga yang dijamin atau yang berlaku untuk jangka waktu 25 tahun. LBP, di sisi lain, menyediakan persyaratan kredit proyek. Dalam hal ini, LBP memberikan PhP 20,5 juta pinjaman pengembangan di bawah Program Pembiayaan Todo-Unlad-nya. Pada tahun 2006, KUFRIMCO membayar potongan angsuran triwulan sebesar PhP 1.425.722.

Selama bertahun-tahun, KUFRIMCO mengalami kesulitan memenuhi kewajiban finansialnya terhadap LBP. Alasan kegagalan mereka untuk membayar adalah gagal panen, tingginya biaya operasi dan pembayaran dari API yang tertunda untuk pengiriman TBS mereka. Mengikuti permintaan dari LBP bahwa API harus mengambil alih pengelolaan perkebunan untuk mengembalikan

operasi proyek ke standar produksi normal dan sampai mereka mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka, KUFTRIMPFCO menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen dengan API pada bulan Nopember 2006. Berdasarkan perjanjian ini, API diberikan kebebasan untuk mengelola proyek dan sebagai imbalan atas jasa dan pengeluarannya, API membebankan KUFTRIMPCO 14% gabungan bunga per tahun. Hal ini juga berlaku untuk setiap jumlah yang masih harus dibayar yang mewakili biaya manajemen API. Perjanjian Layanan Manajemen akan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun atau sampai target produksi API dan kewajiban pinjaman KUFTRIMPCO pada LBP dan API telah dilunasi. Jadi, KUFTRIMPCO kini dalam posisi di mana dia terperosok dalam pinjaman yang belum dibayar dan telah kehilangan kendali atas pengelolaan perkebunan kelapa sawitnya. Hal ini pada gilirannya memperburuk situasi keuangan para anggotanya, dimana banyak dari mereka sudah merupakan petani miskin.

Pelanggaran atas hak-hak pekerja

Serikat Pekerja Minyak Sawit Filipina-Serikat Pekerja Federasi Nasional - Kilusang Mayo Uno (*Filipinas Palm Oil Workers Union-National Federation Labour Union-Kilusang Mayo Uno/FPIWU-NAFLU-KMU*) secara resmi mewakili pekerja perkebunan dan pabrik FPPI dalam perundingan untuk Perjanjian Perundingan Kolektif mereka dengan perusahaan sejak tanggal 19 Januari 2007. Mayoritas pejabat dan anggota serikat pekerja adalah juga anggota NGEI dan NGPI, koperasi ARB yang menyewakan CLOA kolektif mereka pada Filipinas Palm Oil, Inc. (FPPI). Komposisi serikat pekerja itu saat ini terdiri dari 348 pekerja tetap dan 588 pekerja kontrak.

Pada tanggal 4 Oktober 2010, FPIWU melakukan pemogokan, menyatakan dua isu terhadap perusahaan itu: 1) kebuntuan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA) dan 2) praktik-praktik perburuhan yang tidak adil yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam CBA. Serikat buruh menuduh bahwa manajemen FPPI tidak serius akan negosiasinya dan mengintimidasi pekerjanya. Pada kebuntuan tentang CBA, hal-hal berikut ini diidentifikasi sebagai keputusan perusahaan yang "tidak dapat

diterima": 1) kenaikan upah dari PhP 4 pada 2010 dan kenaikan gaji PhP 4 lagi pada tahun 2011 dan 2) subsidi beras tambahan sebesar PhP 1.000 atau subsidi beras PhP 6.000 setiap tahunnya. Kebuntuan tentang CBA selama tiga tahun terakhir sangat menyulitkan kehidupan pekerja mengingat bahwa pekerja "kontrak" hanya menerima PhP 150 per hari dan pekerja tetap menerima rata-rata PhP 223-272 per hari. Karena biaya makanan dan kebutuhan dasar lainnya telah meningkat sekitar 12% dan perusahaan dilaporkan mendapatkan laba bersih PhP 1.231.606.674,80 miliar pada periode 2008-2009, serikat buruh percaya bahwa tuntutan mereka adalah wajar dan dapat dengan mudah dipenuhi oleh perusahaan.

Pelanggaran lain dalam CBA yang didokumentasikan oleh Serikat Buruh selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: 1) tidak mengangkat pekerja berposisi menjadi pekerja tetap; 2) kurangnya kepatuhan terhadap perjanjian untuk membayar perbaikan rumah-rumah pekerja; 3) tidak mengangkat pekerja "kontrak" yang menggantikan mereka yang telah pensiun, yang cacat atau telah meninggal menjadi pekerja tetap, 4) pemecatan atas seorang pekerja kontrak perempuan (yang menggantikan suaminya yang meninggal) tanpa alasan yang jelas; 5) kurangnya pemberian Tunjangan Biaya Hidup (COLA) bagi pekerja seperti yang disyaratkan oleh hukum; 6) pekerja "kontrak" mendapat upah di bawah standar; 7) tidak memberikan kenaikan gaji sebagaimana diatur dalam CBA; 8) 13 bulan tak membayar pekerja tetap; 9) tak membayar insentif layanan dan cuti libur bagi pekerja kontrak, dan 10) tunjangan wajib seperti Layanan Jaminan Sosial (SSS) dan Dana Bersama Pembangunan Rumah *Pag-Ibig* (*Pag-Ibig Home Development Mutual Fund*)⁵⁰ tidak diberikan oleh perusahaan.

FPIWU menuduh bahwa perusahaan minyak sawit itu telah gagal untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam CBA dan belum menganggap serius tuntutan mereka sejak mereka mengajukan keluhan mereka mengenai praktik-praktek perburuan yang tidak adil. Sebaliknya, perusahaan meminta Kantor Departemen Tenaga Kerja (DOLE) untuk mulai menggunakan yurisdiksi (*Assumption of Jurisdiction*) pada kasus ini. *Assumption of Jurisdiction* (AJ) akan memberikan kekuasaan kepada DOLE

untuk mencegah "pemogokan" buruh dan memerintahkan pekerja untuk segera kembali bekerja. FPWU tidak melihat ini sebagai respon yang tepat atas tuntutan mereka, yang berasal dari anggota yang sebagian besar didorong oleh rasa lapar dan menuntut pemenuhan hak-hak mereka berdasarkan hukum.

Sejak para pekerja memulai "pemogokan", operasi perkebunan maupun pabrik benar-benar berhenti. Menurut pemimpin serikat, para pengunjuk rasa siap untuk melanjutkan protes mereka selama perusahaan gagal untuk menjawab tuntutan mereka.

STUDI KASUS 5: Meninjau kembali proyek kelapa sawit Tabung Haji

Dalam catatan industri kelapa sawit, orang hampir tidak dapat menemukan cerita proyek kelapa sawit yang mengalami kegagalan semencolok kisah Tabung Haji. Kisah proyek Tabung Haji menggambarkan kasus perjanjian bilateral (antara Malaysia dan Filipina) yang tidak beres dan bagaimana CARP dimanipulasi untuk merampas tanah dari masyarakat adat yang polos. Atty. Ibarra Malonzo memberikan cerita rinci tentang kasus itu di artikelnya yang diterbitkan dalam *Daily Inquirer* Filipina⁵¹:

"Kasus perusahaan Malaysia Tabung Haji akan menggambarkan kebodohan investor asing yang ingin berbuat baik dengan berinvestasi pada pengembangan kelapa sawit di Mindanao. Tabung Haji mengelola dana Haji umat Islam yang dikumpulkan oleh pemerintah Malaysia untuk membayai kewajiban naik haji mereka ke Mekah. Itu telah menjadi proyek-proyek pengembangan kelapa sawit besar di banyak negara.

Pada tahun 1996, Perdana Menteri Malaysia Mahathir mengarahkan Tabung Haji untuk melakukan proyek pembukaan perkebunan kelapa sawit seluas 30.000 hektar di Lanao del Sur berikut pabrik dan penyulingan CPO untuk mempercepat laju usaha perdamaian dan pembangunan menyusul adanya perjanjian perdamaian antara Front

Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan pemerintah Filipina. Tabung Haji akan membiayai seluruh proyek itu.

Sebagai proyek awal, Tabung Haji menandatangani perjanjian usaha bersama dengan Janoub Philippines, Inc., sebuah perusahaan yang dimiliki oleh mantan Duta Besar Abdul Khayr Alonto. Janoub bertanggungjawab untuk memperoleh sertifikat atas lahan seluas 5.500 hektar yang terletak di kotamadya Tagoloan II, Lanao del Sur dan untuk memperoleh hak untuk dan atas nama perusahaan patungan, Tabung Haji Janoub Filipina, Inc (THJP). Untuk kontribusinya pada usaha patungan itu, Janoub diberi 40% saham THJP, sementara Tabung Haji memiliki 60% saham. Selain itu, THJP membayar sejumlah besar uang untuk Janoub untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat dan hak guna atas lahan seluas 5.500 hektar itu.

Tanah ini merupakan pemukiman reforma agraria yang dikenal sebagai pemukiman Kapai, yang diberikan oleh Presiden Marcos pada tahun 1978 kepada Tn. Alonto dan sekelompok pengikut MNLF sebagai bagian dari proses perdamaian menyusul pakta perdamaian yang ditengahi oleh Presiden Libya Ghaddafi pada tahun 1974. Tak lain dari Presiden Ramos sendiri mengerahkan sumber daya pemerintah nasional untuk memfasilitasi sertifikasi pemukiman Kapai oleh DAR.

Tanpa menunggu keluarnya Sertifikat Kepemilikan Tanah (CLOA) oleh Departemen Agraria Reforma-Daerah Otonomi Mindanao Muslim (*Department of Agrarian Reform-Autonomous Region of Muslim Mindanao/DAR-ARMM*) dan pendaftaran CLOA di Otoritas Pendaftaran Tanah (yang tanpa itu tidak ada sertifikat yang sah), THJP mulai membersihkan lahan dan menanam kelapa sawit pada tahun 1997. Namun segera, penentangan terhadap proyek muncul dari penghuni Muslim dan *lumad* (masyarakat adat) dari tanah pemukiman itu yang dipimpin oleh walikota Tagoloan dan Talakag, yang terakhir terletak di provinsi Bukidnon. Kedua walikota mengklaim bahwa konstituen mereka memiliki tanah pemukiman itu. Para penerima manfaat yang sebelumnya diidentifikasi oleh DAR-ARMM

semuanya adalah pengikut dan kerabat Tn. Alonto yang bukan penduduk dari pemukiman Kapai.

Selain itu, ternyata sebanyak 2.200 hektar pemukiman Kapai berada dalam batas kotamadya Talakag yang diduduki oleh anggota suku Higaonon. Baik Higaonon maupun penduduk pribumi Muslim Tagoloan tidak diidentifikasi sebagai penerima manfaat oleh DAR-ARMM dan bahkan tidak diajak berunding oleh Janoub mengenai proyek itu.

Selama tiga tahun, perusahaan patungan itu ngotot melakukan pembersihan lahan dan menanam 1.000 hektar kelapa sawit meskipun penentangan semakin meluas. Di tengah ketiadaan sertifikat yang jelas, instansi dari pemerintah ARMM mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa CLOA itu akan segera terbit.

Karena dihadapkan dengan perlawanan yang tidak dapat diatasi dan tidak memegang sertifikat yang terdaftar atas pemukiman Kapai, pada bulan Januari 2000, Tabung Haji memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut, tetapi hanya setelah menginvestasikan total PhP 200 juta. Kini, pohon kelapa sawit berusia 3 sampai 4 tahun, dipilih dari bibit hibrida terbaik dari kebun pembibitan Malaysia, sudah berbuah. Tapi tidak ada yang memanennya karena status kepemilikan lahan dan perkebunan itu tetap tak jelas. Sementara itu, pohon-pohon kelapa sawit itu sedang dihimpit sampai mati oleh semak, tanaman merambat dan hutan yang kembali muncul.

Dua tahun lalu, Presiden Arroyo mengunjungi perkebunan Tabung Haji setelah Perdana Menteri Mahatir meminta dia memperhatikan proyek yang gagal itu dalam kunjungan kenegaraannya ke Malaysia untuk memohon bantuan pengembangan kelapa sawit. Seorang saksi yang saya wawancara melaporkan bahwa Presiden Arroyo, dengan *taray* (ketegasan) yang menjadi ciri khasnya, mencaci Tn. Alonto karena mengklaim kepemilikan 5.500 hektar lahan itu, dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin Anda memiliki tanah ini? Ini adalah tanah CARP. Seorang penerima manfaat hanya bisa memiliki maksimal 3 hektar."

Tiga bulan lalu, saya berbicara dengan kepala *barangay* dari daerah yang ditutupi oleh perkebunan kelapa sawit seluas 1.000 hektar. Menariknya, dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang *lumad* muslim. Dia mengklaim bahwa *lumad* Muslim Tagoloan dan suku Higaonon dari Talakag adalah pemilik sah dari lahan yang di atasnya terletak pemukiman Kapai. Mereka mendukung proyek kelapa sawit dengan syarat bahwa mereka tercantum dalam CLOA dan mendapat bagian yang adil dari hasil panen. Tapi, jika masalah CLOA itu tidak diselesaikan segera, mereka akan menebang semua pohon kelapa sawit itu dan menanam padi dan jagung untuk hidup.

Sebagai akibat dari bencana investasi Tabung Haji, Filipina menjadi bahan tertawaan di Malaysia. Jika tiga presiden tidak bisa mengurus sertifikat tanah sederhana untuk lahan seluas 5.500 hektar sebagai saham lokal, kenapa menganggap serius sasaran cita-cita ambisius Presiden GMA untuk mengembangkan 2 sampai 3 juta hektar untuk agribisnis?"

Keprihatinan dan isu umum terkait kelapa sawit

Sekitar 50.000 hektar atau lebih lahan di Filipina yang saat ini dikhususkan untuk perkebunan kelapa sawit adalah jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan jutaan hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia. Dengan demikian, ancaman dari skala dan jumlah perkebunan kelapa sawit tidak seberat seperti yang terjadi di kedua negara itu. Namun, meski begitu, temuan dalam riset ini telah menunjukkan beberapa masalah serius yang berkaitan dengan konversi lahan pertanian utama dan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, perampasan tanah di Agusan dan di Lanao, pelanggaran terhadap masyarakat adat dalam kasus Bukidnon dan di Palawan, isu-isu lingkungan yang diangkat dalam kasus Palawan dan Bohol, pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perkebunan kelapa sawit dan pelanggaran syarat perjanjian antara koperasi ARB dan API di Agusan.

Janji-janji dan kenyataannya

Dari perspektif industri minyak sawit dan pemerintah, kelapa sawit memiliki potensi untuk secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal karena ada permintaan domestik dan global yang sangat tinggi untuk CPO. Dengan demikian, dorongan untuk ekspansi kelapa sawit telah memungkinkan promosi agresif industri tersebut dan adanya negosiasi-negosiasi dengan petani, ARB dan masyarakat adat yang merupakan pemegang CADT atau CALT, pemegang CBFM dan juga Unit-Unit Pemerintah Daerah (LGU).

Ketika industri itu mempromosikan keharusan memperluas industri sawit, pembukaan lahan untuk penanaman kelapa sawit menjanjikan pendapatan dan manfaat yang akan sulit disaingi tanaman pertanian lainnya. Beberapa yang mempromosikan industri tersebut sampai mengklaim bahwa pembangunan kelapa sawit akan membawa kekayaan yang tak terhitung bagi mereka yang terlibat. Mempertimbangkan permintaan yang besar saat ini baik di dalam negeri maupun di pasar internasional yang sebagian besar belum dieksplorasi, memang ada potensi besar untuk industri minyak sawit untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi Filipina dan penciptaan lapangan kerja.

Saat ini, industri kelapa sawit dipimpin oleh sektor swasta, yang dengan sendirinya diatur oleh aturan pasar (global dan domestik) dan didorong oleh profit. Ini adalah kekuatan pendorong yang sama yang pernah menjadi tahapan sentral dari pengembangan ekonomi historis di Mindanao sebagai "tanah terjanji" pada tahun 1950-an, yang memicu serbuan pengumpulan tanah skala besar di tangan elit kaya dan punya pengaruh politik, dan perusahaan-perusahaan transnasional asing. Di sisi lain, realitas saat ini di lapangan dan konflik tanah kontemporer yang masih terjadi di banyak daerah di Filipina mencerminkan pengabaian hak yang sewenang-wenang, kegagalan untuk membagi kekayaan secara merata di antara kaum miskin dan terpinggirkan dan penghancuran lingkungan demi bisnis dan keuntungan.

Hak atas tanah dan kemiskinan

Hukum Filipina umumnya menjamin hak-hak tanah masyarakat terpinggirkan. Pengusahaan lahan seperti CLOA dan CADTs/CALTs, dan berbagai instrumen pengelolaan hutan DENR berupaya untuk mengatasi masalah ketidak punyaan tanah dan kemiskinan yang tetap meluas di negara itu. Namun, banyak pengalaman dari masyarakat menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah saja tidaklah cukup untuk memperbaiki kondisi mereka. Pada titik ini, perlu dicatat perdebatan menarik dari de la Rosa dan Malonzo mengenai pembangunan pertanian dan kemiskinan. De la Rosa berpendapat bahwa perusahaan pertanian di Mindanao, khususnya perusahaan pertanian "yang dipimpin oleh pemerintah dan tuan tanah transnasional di Mindanao belum memberantas kelaparan dan kemiskinan di Mindanao". Malonzo, di sisi lain, berpendapat bahwa kurangnya investasi di bidang pertanian di Mindanao-lah yang telah mengakibatkan kemacetan pembangunan pedesaan. Dalam kasus reforma agraria, program ini telah menjadikan akses ke tanah yang luas di Mindanao untuk pengembangan kelapa sawit oleh perusahaan agri-bisnis menjadi sulit, jika bukannya mustahil. Tidak akan ada investor agribisnis yang akan menginvestasikan ratusan juta peso untuk pembangunan perkebunan tanpa instrumen tenurial tanah yang pasti dan sah. Sebagai gantinya, Malonzo mengusulkan sebuah strategi konvergensi yang mengumpulkan para pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk pemilik tanah dan investor agribisnis yang memiliki modal dan pengetahuan.

Selama beberapa tahun belakangan ini, model perusahaan pertanian korporat-petani yang dirujuk de la Rosa telah mendominasi lanskap pengembangan pertanian di Mindanao. Begitulah yang terjadi untuk perkebunan besar pisang, nanas, kelapa sawit di Mindanao dan baru-baru ini, perkebunan bahan bakar nabati. Beberapa dari masalah yang dia kutip dari model ini adalah bahwa model tersebut cuma mencari laba dan bahwa kendali terutama berada di tangan para investor agribisnis transnasional dan Filipina. Mekanisme peraturan pemerintah entah tidak ada atau tak bisa berbuat banyak untuk melindungi hak-hak pemilik tanah kecil. Dalam kontrak agribisnis, seperti kontrak kelapa sawit, investor memiliki

kebebasan dalam menetapkan ketentuan yang dirancang untuk melindungi investasi mereka, tapi benar-benar mengabaikan kondisi pemilik tanah yang umumnya petani miskin dan petani kecil. Dalam kasus NGEI dan koperasi ARB lainnya, pemilik tanah ini hanya mendapat uang yang sangat sedikit dari sewa tanah mereka.

Tantangan-tantangan dan rekomendasi-rekomendasi penting

Minyak sawit semakin menjadi tanaman yang menjanjikan dalam hal potensi pendapatan dan manfaat bagi pemilik tanah serta memberikan sumbangan pada industri dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja. Namun, berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari ekspansi kelapa sawit dirasakan berbeda oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk koperasi lokal yang terlibat dalam industri ini, masyarakat adat dan masyarakat sipil. Akses terhadap keadilan bagi individu yang haknya telah dilanggar sebagai akibat dari perluasan perkebunan kelapa sawit menjadi keprihatinan utama. Penyelesaian hukum telah tersedia, tetapi tidak selalu berfungsi. Dengan kata lain, "urusan hukum bersifat politis". Selain itu, kerangka kerja kebijakan dan undang-undang Negara mengenai tanah dan sumber daya umumnya mendukung perluasan perkebunan kelapa sawit, tetapi sering bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat (misalnya UNDRIP, IPRA) dan UU lingkungan karena tumpang tindih dengan penggunaan lahan lainnya seperti wilayah leluhur, lahan pertanian untuk pangan (misalnya beras, jagung), hutan dan kawasan lindung. Selain itu, ekspansi minyak sawit terjadi di tengah-tengah konflik hak tanah yang tumpang tindih dalam hubungannya dengan pertambangan, penebangan dan perkebunan bahan bakar nabati/pertanian lainnya.

Ekspansi kelapa sawit menimbulkan banyak pertanyaan:

- Bagaimana kita mengatur industri kelapa sawit dan membatasi praktek-praktek "buruk"-nya?
- Prinsip dan standar apa yang harus didesakkan pada industri kelapa sawit?
- Apa saja standar minimum yang harus mengatur operasi dan praktek industri kelapa sawit?

- Bagaimana cara membuat sistem hukum responsif terhadap ketidak-adilan yang diciptakan oleh sektor industri kelapa sawit?
- Bagaimana kita menekan agar Negara bertanggung gugat atas kegagalannya mengatasi isu-isu hak atas tanah, kurangnya dukungan mata pencaharian pada petani miskin dan terpinggirkan, kegagalan untuk mendukung program kehutanan komunitas (misalnya CBFM, ISFP) dan wilayah leluhur?
- Pendekatan apa yang dapat diambil terhadap badan-badan pemerintah yang bersekongkol dengan perusahaan kelapa sawit?
- Apakah kelapa sawit merupakan pilihan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi petani dan masyarakat adat yang miskin dan terpinggirkan?
- Apakah kelapa sawit tanaman ramah ekologi?
- Apakah itu tanaman yang layak secara ekonomi dibanding tanaman lain dalam hal pembagian keuntungan yang adil dan merata bagi pemilik tanah dan pemerintah?
- Pendekatan pengembangan apa yang harus kita tempuh untuk mengembangkan komoditas utama ini yang mempertimbangkan penggunaan lahan yang tepat guna, pembagian manfaat yang merata, dampak lingkungan dan yang paling penting penghormatan terhadap hak asasi manusia?
- Apa peran masyarakat sipil dalam menangani isu-isu kelapa sawit?
- Apa bentuk-bentuk kerjasama seperti apa yang perlu dibentuk di antara pemangku kepentingan yang berbeda (misalnya pemilik tanah dan penanam, masyarakat adat, makelar industri, pemerintah)?
- Apa strategi didalam dan diluar yang harus diambil untuk menangani isu-isu industri kelapa sawit dan bentuk kerjasama seperti apa yang perlu diambil di tingkat lokal/nasional dan regional/internasional?

Menanggapi kekhawatiran ini, rekomendasi berikut telah dirancang untuk membantu mengatasi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit di Filipina.

- Mendokumentasikan cerita-cerita "sukses" di seluruh Filipina, tidak hanya dalam hal keuntungan moneter, tetapi juga nilai-nilai penting lainnya seperti hak asasi manusia, pelestarian ekologi, penghormatan terhadap norma-norma budaya dan sebagainya. Cerita dan pengalaman seperti itu dalam berbagai wilayah kebun kelapa sawit harus dibagi untuk mendorong adanya dialog antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat
- Mendokumentasikan studi kasus (pelanggaran dan kekerasan) untuk tujuan advokasi dan lobi
- Membangkitkan kesadaran masyarakat yang lebih besar tentang hak-hak hukum mereka
- Mengembangkan kapasitas masyarakat lokal untuk membuat pilihan-pilihan yang dipahami ketika akan terlibat dalam kontrak atau perjanjian dengan investor, perusahaan kelapa sawit dan bank
- Mereformasi sistem hukum sehingga responsif terhadap ketidakadilan yang diciptakan oleh sektor industri kelapa sawit
- Melakukan analisis rinci terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari bahan bakar nabati; sambil menunggu itu, perlu dilakukan moratorium atas pengembangan bahan bakar nabati
- Mengkaji setiap "insentif jahat" dari industri bahan bakar nabati
- Melobi pemerintah untuk menyediakan mekanisme peraturan dan penegakan untuk mencegah degradasi hutan

dan semua konsekuensi sosial, ekonomi, dan budaya yang ditimbulkannya pada masyarakat setempat

- Mengembangkan studi dokumen atau studi kasus dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi di Filipina untuk disebarluaskan dan dipublikasikan dan untuk mendorong advokasi.
- Membuat dokumen kasus mengenai hak asasi manusia dan kelapa sawit bagi Komisi Hak Asasi Manusia nasional dan mengaktifkan aksi bersama melalui Komisi Hak Asasi Manusia nasional
- Membentuk jaringan bagi masyarakat adat untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran
- Mengajukan kasus Palawan ke Mahkamah Nasional
- Menghubungkan NGO-NGO Filipina dengan jaringan-jaringan advokasi tingkat regional
- Melakukan kampanye untuk menghentikan ekspansi perkebunan, menegakkan hak-hak petani dan pekerja perkebunan, menyediakan akses terhadap keadilan, memberikan pengakuan terhadap kepemilikan masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, dan mengakui hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk hidup
- Menyerukan perbaikan dalam standar industri melalui proses sertifikasi seperti RSPO
- Terlibat di tingkat nasional melalui advokasi, pemetaan partisipatif komunitas, proyek reboisasi/multi-kultur/pertanian berkelanjutan, negosiasi dengan perusahaan dan pemerintah, pertemuan dan konsultasi dengan investor publik dan swasta
- Menginformasikan dan melibatkan anggota parlemen dalam isu kelapa sawit

- Membuat laporan-laporan polisi mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia hak dan pekerja
- Mengirim petisi, memorandum dan surat
- Melobi untuk perlindungan masyarakat dengan menggunakan hukum nasional dan internasional
- Menggunakan RSPO untuk mendapatkan ruang dan suara politik untuk kelompok yang tak berdaya

Catatan akhir

¹ PPODO 2006

² *ibid.*

³ Derequito 2005

⁴ Dari *Keynote Speech* tentang “Pursuing Palm Oil Potentials” oleh Menteri DAR Luis Lorenzo, Jr. dalam Kongres Minyak Sawit Nasional Ke-3 yang diselenggarakan di Butuan City, 16-17 Juli 2003.

⁵ Presidential Decree 1468, Article 1, Section 2.

⁶ Draf dokumen dari Otoritas Kelapa Filipina yang disajikan dalam Kongres Minyak Sawit.

⁷ Dari pidato “Seizing the Oil Palm” oleh Danilo Coronacion, Administrator Otoritas Kelapa Filipina, dalam Kongres Minyak Sawit Nasional Ke-3 yang diselenggarakan di Butuan City, 16-17 Juli 2003.

⁸ Sebagian dari ketentuan-ketentuan yang menonjol dari UU ini mencakup: a) penghentian penggunaan aditif bensin yang berbahaya b) pemanfaatan bahan bakar nabati wajib dengan persyaratan sebagai berikut: 1% campuran biodiesel dan 5% campuran bioetanol untuk seluruh bahan bakar diesel dan bensin yang dijual di Filipina.

⁹ PPODO 2006

¹⁰ *ibid.*

¹¹ *ibid.*

¹² *ibid.*

¹³ Mini-Workshop on Oil Palm Development di Mindanao, 18 Juni 2009.

¹⁴ Palm Oil Industry Situationer Report oleh the Department of Agriculture-Agribusiness and Marketing Assistance Service 2007.

¹⁵ The Philippine Oil Palm Development Plan 2004-2010. Pabrik pengolahan yang akan dibangun entah yang berkapasitas 30 ton TBS untuk setiap 7.000 hektar atau yang berkapasitas 20 ton TBS untuk setiap 5.000 hektar.

¹⁶ David et al. 2003; Llanto & Estanislao 1993

¹⁷ 1987 Philippine Constitution, Article 7, Section 2-3.

¹⁸ Executive Order No. 263, 1996.

¹⁹ DENR Administrative Order No. 29, 1996 Series.

²⁰ Periode yang dicakup oleh CBFMA adalah 25 tahun, yang dapat diperpanjang selama 25 tahun lagi.

²¹ Lamcheck 2006

²² Program kehutanan komersial DENR seperti *the Industrial Forest Management Agreement* (IFMA) dan *the Socialised Forest Management*

Agreement (SIFMA) mendapatkan dana dari *the General Appropriations* (GA) yang disetujui oleh Kongres Filipina. Pendanaan untuk CBFM sangat tergantung pada donor di bawah *the Foreign Assisted Projects* (FAPs). Jadi, kurangnya pembiayaan yang pasti atau yang terjamin untuk melaksanakan program ini telah mengakibatkan kegagalan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah dinyatakan.

²³ Republic Act 8371

²⁴ *ibid.* section 3.

²⁵ Pedoman FPIC tentang Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan tahun 2006 berlaku mulai tanggal 10 Oktober 10 2006.

²⁶ 2003 Philippine Country Report of UN Special Rapporteur on Indigenous Peoples; ICERD 2009

²⁷ Flores-Obanil & Manahan 2006

²⁸ Menurut Direktur Teknis Wilayah 10 FMB, ini adalah satu-satunya kebijakan yang mengatur kelapa sawit.

²⁹ Memorandum Circular No. 2004-12, August 2004.

³⁰ *ibid.*

³¹ Flores-Obanil & Manahan 2006

³² de la Rosa 2005

³³ Koperasi penerima manfaat lainnya adalah *the Mapantig Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative* (MAPARBEMPCO).

³⁴ Clamonte 2002; Pacaba-Deriquito 2004

³⁵ Fox dikutip dalam Borras 1998:9

³⁶ Griffin et al 2002:314

³⁷ Dikutip dalam Dalabajan 2010

³⁸ Berdasarkan Wawancara Informan Kunci dengan Tuan Ponciano Narciso, General Manager, PPVOMI/AGPI-Palawan Operations, 14 Oktober 2010.

³⁹ Agumil Phils. Inc. – Palawan Operations. Pernyataan Luasan sampai 31 Juli 2010. Penting untuk dicatat di sini bahwa angka ini tidak termasuk sekitar 12 hektar lahan di kotamadya Bataraza (total luas berdasarkan perkiraan dari sumber), yang berdasarkan informasi awal yang di dapat ditanami oleh kelapa sawit oleh pemilik tanah. Perkebunan-perkebunan ini dapat ditemui di *barangay* Sumbiling dan Taratak. Selain itu, angka ini tidak sesuai dengan Pernyataan Luasan bulan Desember 2009 yang dikeluarkan perusahaan yang melaporkan sekitar 3.790 hektar, yang sesuai dengan angka yang disebut saat wawancara dengan General Manager PPVOMI bulan Oktober 2010.

⁴⁰ Dalabajan 2010

⁴¹ *Palm Oil Industry Destined for the Philippines* 2002

⁴² Department of Agriculture 2009

⁴³ PPOIDC terdiri dari Gubernur sebagai Ketua, Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua Eksekutif, PCA sebagai Badan Pimpinan, bersama anggota lainnya – Office of the Provincial Agriculturist, DENR, PCSD, Provincial Cooperative Development Office, DAR, Land Bank of the Philippines, Palawan State University, Provincial Assessor, PPVOMI, BPI, LGUs, DTI, ELAC, NCIP dan the City Agriculture Office.

⁴⁴ Agusan Plantations Group 2010

⁴⁵ PCA Palawan Field Office 2009

⁴⁶ PCA- Palawan Field Office 2009

⁴⁷ Derequito 2005:21

⁴⁸ *ibid.*

⁴⁹ Philipine Oil Palm Meeting di Brgy. Bayanga, Cagayan de Oro City, 23-24 Agustus 2010.

⁵⁰ The *Pag-Ibig* Home Development Mutual Fund adalah sebuah manfaat mandatori bagi seluruh pegawai Filipina baik di perusahaan swasta maupun perusahaan negara di mana baik pengawai maupun majikan memberikan kontribusi bulanan yang diambil dari gaji bulanan pegawai dan kontribusi tambahan dari majikan. Manfaat yang didapat pegawai mencakup pinjaman rumah dan gaji.

⁵¹ Malonzo 2010

Tentang Mitra

SawitWatch

SawitWatch adalah organisasi non-pemerintah Indonesia yang menfokuskan diri pada isu-isu minyak sawit lewat pemberdayaan gerakan-gerakan yang sinergis dari masyarakat adat, masyarakat lokal, petani dan buruh sawit untuk mendorong perubahan sosial menuju keadilan ekologis di industri minyak sawit. Anggota-anggota individual SawitWatch ada di 17 provinsi tempat pengembangan kelapa sawit. Aktifitas-aktifitas kunci organisasi ini ditujukan untuk 1) membentuk, menyediakan dan mengelola data dan informasi tentang isu-isu sawit; 2) meningkatkan kapasitas petani kecil, buruh dan masyarakat adat; 3) memfasilitasi penyelesaian konflik antara petani kecil, buruh dan masyarakat adat di perkebunan sawit skala besar; 4) membentuk gerakan-gerakan yang sinergis dari petani kecil, buruh dan masyarakat adat; 5) mendorong munculnya kebijakan negara yang berpihak pada petani kecil, buruh dan masyarakat adat. SawitWatch memiliki komitmen untuk memberdayakan petani kecil, menguatkan pekerja dan serikat buruh; menguatkan akuntabilitas rejim minyak sawit berkelanjutan; menguatkan akuntabilitas industri minyak sawit global dan mendorong investasi yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.sawitwatch.or.id

Forest Peoples Programme (FPP)

Forest Peoples Programme adalah NGO internasional yang didirikan pada tahun 1990 yang mendukung hak-hak masyarakat yang tinggal di hutan dan mengantungkan kehidupannya pada hutan. FPP berupaya menciptakan ruang politik bagi masyarakat hutan untuk melindungi hak-hak mereka, mengendalikan tanah mereka dan memutuskan masa depan mereka sendiri dengan berupaya mendapatkan pengakuan hak dan kepentingan mereka dalam undang-undang, kebijakan dan program; mendukung masyarakat hutan untuk mengembangkan kapasitas mereka sendiri untuk mengklaim dan menjalankan hak-hak asasi mereka; melawan kebijakan dan proyek-proyek dari atas yang mengancam hak-hak

masyarakat hutan; mempromosikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan; memastikan ada keadilan, melawan diskriminasi dan mempromosikan keadilan gender; memberitahukan aksi-aksi NGO di bidang kehutanan sesuai dengan visi-visi masyarakat hutan; dan menghubungkan gerakan-gerakan masyarakat adat dan masyarakat hutan di tingkat regional dan internasional. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.forestpeoples.org

Samdhana Institute

The Samdhana Institute dibentuk oleh sekelompok individu, aktifis, pemerhati masalah konservasi dan praktisi pembangunan, dengan komitmen untuk “mengembalikan” apa yang mereka ketahui untuk generasi mendatang; dan menyatukan keahlian, pengetahuan, pengalaman, jaringan, rekan sejawat dan teman-teman; membentuk kematangan, kekuatan dan keberlanjutan atas kerja-kerja Samdhana. Saat ini, ada 64 Anggota yang menyumbangkan waktu dan sumber daya mereka untuk membangun kapasitas masyarakat lokal lewat pelatihan, mentoring, dan fasilitasi pemikiran dan strategi dengan kelompok masyarakat dan pembela. *The Samdhana Institute* beroperasi di dua kantor, yaitu Kantor Regional di Cagayan de Oro City, Filipina dan Kantor Indonesia di Bogor, Indonesia. Samdhana adalah anggota dari dana Aliansi Global Asia Tenggara – sebuah mitra *Global Greengrants Fund Network*. Lembaga ini mengelola program penghibahan kembali lewat Hibah-Hibah Kecil sebesar US\$100 - \$10.000 untuk mendanai masyarakat dan organisasi akar rumput di daerah-daerah pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat; penguatan kelembagaan dan kepemimpinan; dan menyelesaikan konflik lingkungan dan mediasi. Di Filipina, *Indigenous Peoples Support Fund* memfokuskan diri untuk membantu masyarakat dan organisasi adat. Dana awal disediakan untuk proyek-proyek masyarakat adat yang ditujukan untuk pembangunan domain leluhur dan pengelolaan berkelanjutan, konservasi lingkungan, kepemimpinan dan pembangunan kelembagaan. Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.shamdhana.org

RECOFTC (The Center for People and Forests)

RECOFTC menempati tempat yang unik di dunia hutan kemasyarakatan di Asia dan Pasifik sebagai satu-satunya organisasi nirlaba internasional yang mengkhususkan diri pada pengembangan kapasitas dan pendeklasian pengelolaan hutan dari tingkat akar rumput sampai ke tingkat tertinggi.

Mulai sebagai sebuah organisasi pembelajaran di tahun 1987, lembaga ini telah mendukung secara aktif pengembangan institusi, kebijakan dan program kehutanan masyarakat di kawasan tersebut. Dalam perjalannya, kerja-kerja RECOFTC telah berevolusi lewat empat bidang tematik yang ditangani, yaitu meluaskan kehutanan masyarakat; masyarakat, hutan dan perubahan iklim; mentransformasi konflik dan melindungi mata pencarian masyarakat lokal. Wanatani komersial, seperti kebun kelapa sawit, membawa dampak pada keempat bidang tematik ini dan pendekatan RECOFTC dipandu oleh prinsip-prinsip hak yang jelas dan kuat, tata kelola yang baik dan manfaat yang adil bagi jutaan masyarakat pengguna hutan. RECOFTC berupaya mencapai tujuannya lewat jaringan kerja yang aktif bersama masyarakat, mitra, donor, NGO dan institusi pemerintah di tingkat lokal dan internasional lewat kantor-kantor mereka di Thailand, Vietnam, Indonesia dan Kamboja. Untuk informasi lebih banyak, silakan kunjungi www.recoftc.org

RRI (Rights and Resources Initiative)

The Rights and Resources Initiative (RRI) adalah sebuah koalisi strategis yang terdiri dari organisasi-organisasi internasional, regional dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pembangunan, penelitian dan konservasi untuk memajukan penguasaan hutan, kebijakan dan reformasi global pasar. Misi dari RRI adalah untuk mendukung perjuangan masyarakat lokal dan masyarakat adat melawan kemiskinan dan pem Margiran dengan mempromosikan komitmen dan aksi global yang lebih besar menuju reformasi kebijakan, pasar dan hukum yang dapat menjamin hak-hak mereka untuk memiliki, mengontrol dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam, terutama sumber daya tanah dan hutan. RRI

dikoordinasikan oleh *the Rights and Resources Group*, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington, D.C. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.rightsandresources.org

Daftar kata

Adat: kebiasaan, seringkali tidak tertulis, hukum masyarakat adat Indonesia dan Malaysia, yang mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial, penguasaan dan pemanfaatan lahan yang inklusif (lihat “customary law”)

Alienated land: alienasi, dalam hukum benda hak milik (property law), adalah kapasitas suatu properti (property) atau hak atas properti untuk dijual atau dialihkan dari satu pihak ke pihak lain. *Alienated land* adalah tanah yang telah diambil alih dari pemilik tradisional oleh pemerintah, untuk dimanfaatkan sendiri atau untuk pembangunan pihak swasta yang membutuhkan agunan atau bentuk jaminan lainnya.

Agro-fuels/bio-fuels/bio-diesels: bahan bakar yang utamanya dibuat dari biomassa atau limbah bio yang biasa digunakan di sektor transportasi dan dipandang sebagai bentuk energi yang lebih ramah lingkungan dan salah satu cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Bahan bakar ini sering dipandang sebagai salah satu ketahanan energi yang berfungsi sebagai alternatif dari bahan bakar berbasis fosil yang terbatas dalam ketersediaannya, penggunaannya telah berkembang di seluruh dunia, dan memiliki ekspansi produk pertanian yang ditanam secara khusus untuk menghasilkan bahan bakar nabati seperti kelapa sawit, kedelai, jagung, singkong dan jarak (*jatropha*, lihat “*jatropha curcas*”)

Bagangan: nama lokal untuk “kumbang badak” (“rhinoceros beetles”) di Palawan, Filipina. *Bagangan* disebut sebagai salah satu hama yang banyak merusak kelapa sawit.

Berondol: biji buah kelapa sawit yang terlepas.

Buri: *Corypha Elata*, atau Talipot Palm. Sejenis pohon kelapa sawit yang besar yang tumbuh di Filipina.

Cadastre (kadastral): sebuah register yang komprehensif dari batas-batas geografi suatu daerah atau kawasan. Sebuah kadastral umumnya mencakup uraian lengkap kepemilikan (ownership), penguasaan lahan (tenure), lokasi persisnya, rupa muka bumi dan daerah, ladang jika itu adalah kawasan pedesaan, dan nilai (value) dari masing-masing lahan.

Crude Palm Oil (CPO): terminologi pasar komoditas untuk minyak makan lemak nabati nabati yang diperas dari biji buah pohon kelapa sawit lewat proses penggilingan.

Customary law: aturan-aturan tradisional bersama (common) atau praktek-praktek (practice) tradisional yang membentuk bagian makna terdalam dari perilaku (conduct) yang diterima dan diharapkan dalam berbagai masyarakat adat yang diakui negara (lihat “*adat*”).

Datu: pemimpin desa di Filipina, biasanya merupakan pejabat tertinggi dalam struktur politik tradisional.

“Degraded” land: lihat “Idle land”

Doi moi reforms: reformasi ekonomi di seluruh negeri yang digagas tahun 1980-an di Vietnam sebagai cara untuk memungkinkan adanya transisi negara menuju sebuah ekonomi pasar. Reformasi kebijakan tenurial merupakan bagian dari *doi moi* dan mencakup de-kolektivisasi (lawan dari penguasaan kolektif yang dilakukan pemerintah komunis) produksi pertanian dan perbaikan kepastian tenurial seiring dengan liberalisasi pasar dan promosi insentif-insentif ekonomi yang baru

Economic Land Concession (ELC): sebuah mekanisme untuk memberikan tanah pribadi negara untuk eksplorasi pertanian dan pertanian-industri di Kamboja. Tujuan ini mencakup investasi di bidang pertanian, membuka lapangan kerja di desa dan diversifikasi peluang-peluang mata pencarian, dan menghasilkan devisa negara. *Economic land concessions* hanya berlaku untuk lahan milik negara selama maksimal 99 tahun. Konsesi-konsesi ini tidak memberikan hak kepemilikan atas lahan. Namun, meskipun tidak termasuk hak untuk mengalihkan lahan tersebut, pemilik konsesi diberikan hak-hak lainnya yang terkait dengan kepemilikan selama konsesi berlaku.¹

Elaeis guineensis: Kelapa sawit asal Afrika Barat dan digunakan dalam pertanian (agriculture) komersial dalam produksi minyak sawit (palm oil). Perkebunan besar *Elaeis guineensis* saat ini utamanya ditujukan untuk memproduksi minyak (yang diekstraksi dari bagian daging buahnya) dan minyak biji (yang didapat dari kacang bijinya)

Engineered consent: Manipulasi terhadap masyarakat tanpa persetujuan atau kesadaran untuk mengarahkan keputusan-keputusan yang mereka buat dan berbagai tindakan yang mereka tempuh, umumnya disesuaikan dengan kepentingan manipulatornya.

Environmental Impact Assessment (EIA): Sebuah studi awal yang biasanya dilakukan konsultan AMDAL untuk mengumpulkan data terkait dampak lingkungan dari sebuah pembangunan sebelum memutuskan apakah pembangunan tersebut perlu dilaksanakan atau tidak. Kajian lingkungan selayaknya menghasilkan standar-standar pembangunan dan dalam beberapa kasus pembangunan malah tidak dilaksanakan sama sekali. Di mana pembangunan tetap dilaksanakan, kajian lingkungan dapat membantu mengusulkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.²

Free, Prior and Informed Consent (FPIC): prinsip bahwa sebuah komunitas memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas usulan proyek yang mungkin berdampak pada lahan yang mereka miliki, tempati atau gunakan secara adat. FPIC kini menjadi sebuah prinsip kunci dalam hukum dan jurisprudensi internasional yang terkait dengan masyarakat adat. FPIC minyaratkan adanya negosiasi/perundingan dipahami tanpa paksaan antara investor, perusahaan atau pemerintah dan masyarakat adat sebelum pembangunan dan pembuatan kebun kelapa sawit, perkebunan kayu atau usaha pembangunan apapun dilaksanakan di tanah adat mereka (lihat “self-determination”)

Fresh Fruit Bunches (FFB): tandan kelapa sawit yang tumbuh setelah 24-30 bulan; minyak sawit diperas dari buahnya

Gazetttement: penerbitan sebuah pengumuman resmi tentang penetapan suatu daerah atau kawasan. Dalam hutan, *gazetttement* (pengukuhan) umumnya mengindikasikan bahwa suatu kawasan berhutan telah ditetapkan untuk dilindungi negara atau pihak berwenang publik lainnya sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku.

“Idle” land: tanah yang didefinisikan negara sebagai lahan yang nyaris tidak berpenghuni, tidak produktif, tidak dimanfaatkan, dan “menganggu” yang dapat diubah menjadi zona produksi untuk bahan pangan dan bahan bakar nabati untuk memecahkan masalah

pangan dan energi dunia tanpa merugikan kebutuhan pangan setempat. Dalam kenyataannya, daerah-daerah seperti ini mungkin adalah kawasan pertanian atau wilayah adat yang digunakan komunitas-komunitas setempat.

Independent smallholder: petani kecil mandiri meskipun berbeda-beda situasinya dicirikan oleh kebebasan mereka untuk memilih bagaimana mereka hendak memanfaatkan lahan mereka, tanaman apa yang hendak mereka tanam dan bagaimana mereka akan mengelola lahannya; diorganisir, dikelola dan didanai sendiri; dan tidak terikat kontrak dengan pabrik pengolahan atau asosiasi mana pun. Meskipun demikian, mereka dapat saja menerima dukungan atau layanan penyuluhan dari lembaga pemerintah.

***Jatropha curcas*:** jenis tanaman usia panjang yang tahan kekeringan dan mengandung minyak, atau jenis semak yang berasal dari kawasaan tropis Amerika dan kini banyak ditanam di kawasan tropis dan subtropis di seluruh dunia, karena kemampuannya untuk tumbuh baik di tanah yang marginal atau miskin hara, dan sebagai bahan baku biodiesel bermutu tinggi.

Kaingin: “perladangan berpindah” (Filipina)

Kepata: kepala kerja atau mandor kebun kelapa sawit (Filipina)

Konsep baru: juga dikenal sebagai “New Concept”, *Konsep baru* adalah sebuah skema pembangunan lahan Hak Adat Orang Asli (Native Customary Rights/NCR) yang dikenalkan pemerintah negara bagian Sarawak tahun 1995. Dalam skema ini, seluruh tanah NCR di suatu daerah akan digabungkan menjadi satu kesatuan besar dan menghapus batas-batas yang ada dan hanya akan diberi satu sertifikat tanah. Dalam hal kebun besar, konsep ini adalah konsep model usaha patungan (*joint-venture*) di mana *the Sarawak Land Custody and Development Authority* (LCDA) atau *the Sarawak Land Development Board* (SLDB) mewakili kepentingan pemilik tanah NCR yang dipercayakan kepada mereka, dan lalu lembaga ini akan membentuk sebuah usaha patungan (JVC) dengan sebuah perusahaan swasta besar yang disetujui pemerintah.

Land grabbing: umumnya merupakan suatu pengambil-alihan hak milik secara cepat (seperti hak atas lahan atau paten) oleh perusahaan dalam negeri dan transnasional, sering kali dengan

dorongan dan dukungan dari pemerintah nasional dan sering kali ditujukan untuk pengembangan pertanian atau industri.

Land tenure: hubungan, yang didefinisikan secara hukum atau secara adat, antar masyarakat, secara individu atau kelompok, terkait lahan. Kategori-kategori dalam penguasaan lahan mencakup pribadi, komunal, akses terbuka dan Negara. Aturan-aturan penguasaan mendefinisikan pengalokasian hak milik atas lahan dalam masyarakat. Aturan-aturan ini mendefinisikan bagaimana akses diberikan terhadap hak untuk memanfaatkan, mengendalikan dan mengalihkan lahan, serta tanggung jawab dan batasan-batasan terkait. Dalam terminologi sederhana, sistem penguasaan lahan menetapkan siapa dapat memanfaatkan sumber daya apa selama berapa lama dan dalam kondisi apa.

Leaseback: sebuah transaksi finansial, di mana orang menjual suatu aset, seperti tanah dan menyewanya untuk suatu periode yang panjang. Karenanya, sang penjual masih terus dapat memanfaatkan aset tersebut tapi sudah tidak memiliki hak milik atasnya. Setelah membeli suatu aset, sang pemilik membuat kesepakatan jangka panjang di mana aset tersebut disewakan kepada sang penjual dengan harga yang disepakati.

Leasehold: real property (real estate) yang dipegang oleh pengguna/penyewa (tenant atau lessee) berdasarkan sebuah perjanjian sewa selama periode tertentu, umumnya dengan syarat-syarat yang tertulis dalam kesepakatan tersebut, setelah masa sewa berakhir, properti itu akan dikembalikan kepada pemiliknya (freehold owner) atau kepada pemberi sewa (lessor).

Legal pluralism: keberadaan bersama dan interaksi antara beberapa tata tertib hukum seperti hukum internasional, negara, adat, agama, proyek dan lokal, yang seluruhnya dapat bertindak sebagai landasan untuk mengklaim hak milik. Dalam sebuah proses yang disebut sebagai “forum shopping”, orang mungkin cenderung untuk memilih salah satu kerangka kerja hukum ini sebagai basis klaim mereka atas sebuah sumber daya. Keberadaan beberapa kerangka kerja hukum, dengan demikian, dapat memungkinkan adanya fleksibilitas yang cukup bagi orang untuk bergerak bebas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan tanah. Pluralisme hukum juga mencerminkan dinamika hak milik, karena kerangka kerja hukum

yang berbeda tidaklah berdiri sendiri namun saling mempengaruhi dan dapat bertransformasi dalam perjalannya. Meskipun demikian, pluralisme hukum juga dapat menciptakan ketidakpastian, terutama dalam kasus konflik atas sumber daya yang sama, seperti tanah, karena tiap orang tidak mungkin memiliki pengetahuan atas seluruh jenis hukum yang mungkin relevan, dan karena pihak lawan dapat menggunakan jenis pengetahuan hukum yang berbeda sebagai landasan klaimnya.³ (lihat “*adat*” dan “*customary law*”)

Lumad: sebuah istilah dari Cebuano untuk sekelompok masyarakat adat non-muslim di Mindano, Filipina.

Mono-cropping: praktik pertanian yang memberikan hasil besar lewat penanaman satu jenis tanaman di sebidang tanah, seperti yang dilakukan pada kelapa sawit, jagung, kedele dan gandum.

Monopsonistic relationship: sebuah bentuk pasar di mana hanya satu pembeli menghadapi banyak penjual dalam hubungan di mana permintaan datang hanya dari satu sumber. Sebuah implikasi teoritis umum dari sebuah hubungan monopsonistik adalah bahwa harga barang tertekan mendekati ongkos produksi. Hal ini menunjukkan kompetisi tidak sempurna, yang serupa dengan sebuah monopoli, di mana hanya satu penjual menghadapi banyak pembeli.

Nuclear Estate Scheme (NES): sebuah skema di mana perkebunan negara bertindak sebagai pusat pemasaran/pemrosesan dengan sebuah kebun percontohan untuk penyuluhan teknis, sementara petani plasma diatur seperti dalam pertanian kontrak.

Orang asli: Istilah Malaysia yang berarti “masyarakat asli” atau “pribumi” dan kurang lebih sama artinya dengan istilah “masyarakat adat”. Kebanyakan *orang asli* tinggal di Semenanjung Malaysia dan terbagi ke dalam tiga kelompok suku utama, yaitu Semang (Negrito), Senoi, dan Proto-Malay (Melayu asli). Jumlah mereka mencapai sekitar 60.000 di mana 60%-nya tinggal di hutan hujan.

Outgrower scheme: sebuah kesepakatan yang dibentuk di Filipina antara petani dan perusahaan agrobisnis multinasional lewat mana konglomerat besar membeli semua hasil produksi anggota koperasi yang menanam jenis tanaman tertentu.

Pag-Ibig: *Home Development Mutual Fund* (Filipina). Sebuah manfaat wajib bagi seluruh pegawai Filipina baik di perusahaan swasta maupun perusahaan negara di mana baik pengawai maupun majikan memberikan sumbangsih bulanan yang diambil dari gaji bulanan pegawai dan kontribusi tambahan dari majikan.

Panglima: pimpinan adat di Palawan, Filipina.

Paraquat: sebuah herbisida ampuh yang umum digunakan di perkebunan kelapa sawit dan diketahui telah meracuni ribuan pekerja perkebunan dan petani kecil setiap tahunnya.

Peatland: akumulasi materi-materi vegetasi yang membosuk sebagian, sering kali terbentuk di rawa lahan basah dan hutan rawa gambut, yang mengandung banyak serapan karbon dan diambil sebagai sumber penting bahan bakar di wilayah-wilayah tertentu dunia.

Rabas: pembukaan lahan besar-besaran untuk pembangunan perkebunan (Filipina)

The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): sebuah badan nirlaba berbagai pemangku kepentingan yang dibentuk tahun 2004 dan terdiri dari pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit – produsen kelapa sawit, pengolah atau pedagang minyak sawit, penghasil barang-barang konsumen, pedagang eceran (ritel), bank dan investor, NGO lingkungan atau konservasi alam dan NGO sosial atau pembangunan – yang berupaya meningkatkan praktik-praktek perusahaan dalam hal ekspansi dan produksi kelapa sawit.⁴

Schemed smallholder: petani kecil (plasma) yang secara struktural terikat oleh kontrak, kesepakatan kredit atau perencanaan kepada sebuah pabrik pengolahan. Petani plasma diawasi teknis penanaman dan pengelolaannya dan sering kali diorganisir atau secara langsung dikelola oleh manajer pabrik pengolahan, kebun atau skema yang mengikat mereka secara struktural.

Self-determination: sebuah hak mendasar dari seluruh masyarakat yang menopang kerja PBB. Dalam kaitannya dengan masyarakat adat khususnya, hak ini ditetapkan dalam Deklarasi Hal-hak Masyarakat Adat (*the United Nations Declaration on the Rights of*

Indigenous Peoples/UNDRIP) dalam Pasal 3, yang berbunyi: masyarakat adat memiliki hak untuk “secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka” serta Pasal 4, yang berbunyi: “masyarakat adat, dalam melaksanakan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri, memiliki hak atas otonomi atau kelola mandiri dalam hal-hal terkait urusan-urusan didalam dan setempat mereka, serta jalan dan cara untuk mendanai fungsi otonomi mereka.” (lihat “Free, Prior and Informed Consent (FPIC)”)

Social Impact Assessment (SIA): sebuah prosedur yang membentuk bagian dari perencanaan formal dan proses persetujuan bagi proyek-proyek pembangunan di beberapa negara untuk menggolongkan dan mengkaji dampak pembangunan besar terhadap populasi, kelompok atau pemukiman.⁵ SIA sering kali dilakukan sebagai bagian dari, atau tambahan pada, Analisa Dampak Lingkungan, namun kajian ini masih belum diadopsi secara luas seperti halnya EIA dalam sistem perencanaan formal, sehingga sering kali memainkan peran kurang berarti dalam kombinasi penilaian-penilaian lingkungan dan sosial. (Lihat “Environmental Impact Assessment (EIA)”)

Smallholder: petani yang menanam kelapa sawit, kadang-kadang bersama produksi subsisten tanaman lainnya, di mana keluarga menyediakan sebagian besar tenaga kerja yang dibutuhkan dan lahan pertanian menyediakan sumber utama pendapatan dan di mana luasan kebun kelapa sawit umumnya kurang dari 50 hektar. (definisi RSPO) (lihat “schemed smallholder”, “independent smallholder”)

Special Agricultural and Business Lease (SABL): di Papua Nugini, yaitu sebuah proses yang disebut ‘lease-leaseback’ (sewa-disewakan kembali) di mana negara dapat menyewa tanah adat yang secara teoritis didapat atas persetujuan dari pemilik adatnya dan menyewakan kembali lahan tersebut untuk keperluan pengembangan pertanian atau ekonomi. Menurut kesepakatan sewa ini, pemerintah menyewa tanah adat dari pemilik tradisionalnya dan menyewakannya kembali, umumnya ke pihak ketiga, dengan penangguhan hak-hak adat atas lahan tersebut selama periode penyewaan.

Slash and burn agriculture: (Lihat “swidden agriculture”)

Swidden agriculture: sebuah teknik pertanian yang mencakup pembukaan hutan (untuk ladang) secara bergantian dan periode tanam yang singkat yang diselingi masa bera yang panjang agar hutan tumbuh dan tanah pulih kembali. *Swidden* (atau pertanian tebang dan bakar) melibatkan penebangan dan pembakaran hutan atau kawasan berhutan untuk membuat ladang.

“Vacant” land: lihat “idle” land”.

Catatan akhir

¹ OHCHR 2007

² FOE 2005

³ Meinzen-Dick & Pradhan 2002

⁴ Colchester & Lumuru 2005

⁵ International Association for Impact Assessment (IAIA)

Daftar pustaka

- Adnan H 2011 “*Palm oil board to play a role in certification scheme*” in The Star Online, August 9 2011. Available at: <biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2011/8/9/business/9262095&sec=business> Accessed August 12 2011.
- AgriSource Co. Ltd 2005 *Identifying Effective Interventions in Thailand's Palm Oil Industry*. Final Report. Prepared for GTZ Thai-German Partnership, Bureau of Supporting Industries Development. Unpublished.
- Agusan Plantations Group 2010 *Company Profile*.
- ARD Inc. 2007 *Land tenure and property rights: regional report volume 2.4: East and Southeast Asia*. ARD Inc. for review by USAID.
- Attorney General 2007 *Native Customary Laws and Native Rights over Land in Sarawak*. Prepared by the State Attorney-General's Chambers, Sarawak for Human Rights Commission in 2004, updated on January 15 2007. Available at: <rengah.c2o.org/assets/pdf/de0157a.pdf>
- AusAID 2001 *Vietnam: Land administration*. Australian Agency for International Development (AusAID), Canberra.
- BioCert Indonesia and Proforest 2010 *RSPO Standard for Group Certification*. August 26 2010.
- Borras S M 1998 *The bibingka strategy in land reform implementation: Autonomous peasant movements and state reformists in the Philippines*. Institute for Popular Democracy, Quezon City, Philippines.
- Borras S M & J C Franco 2011 *Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role*. Transnational Institute, Amsterdam.
- Borras S M Jr. & J C Franco, D Carranza, M L Alano 2011 *The fundamentally flawed 'marginal lands' narrative: insights from the Philippines*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, United Kingdom, April 6-8 2011.

Available at: <future-agricultures.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1552&limit=10&limitstart=50&order=hits&dir=DESC&Itemid=971>

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 2008 *2008 Human Rights Report: Thailand*. Available at: <state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eap/119058.htm> Accessed November 21 2010.

Butler R A 2010 *Amazon palm oil: Palm oil industry moves into the Amazon*. Mongabay, July 9 2008. Available at: <news.mongabay.com/2008/0709-amazon_palm_oil.html> Accessed May 18 2011.

2007 *The impact of oil palm in Borneo*. Mongabay News. Available at: <mongabay.com/borneo/borneo_oil_palm.html> Accessed June 2011.

Cambodia Business Intelligence
<cambodiabusinessintelligence.com/feed.php?news=58&output_type=txt>

Cambodia News Online, June 3 2009
<vuthanews.info/2009/06/kampot-villagers-protest-palm-oil-development/>

Cambodian Human Rights Action Committee (CHRAC) 2009 (n.p.)
Losing Ground: Forced Evictions and Intimidation in Cambodia, Phnom Penh.

Carrere R 2010 *Oil palm in Africa: Past, present and future scenarios*. World Rainforest Movement. Available at: <wrn.org.uy/countries/Africa/Oil_Palm_in_Africa.pdf> Accessed May 20 2011.

Childress M 2004 *Regional Study on Land Administration, Land Markets and Collateralized Lending*. Rural Development and Natural Resources East Asia and Pacific Region (EASRD). Available at: <siteresources.worldbank.org/INTEAPREGTOPRURDEV/Resources/573691-1141228934263/2280904->

1153493824735/RegionalStudyonLand +Administration.pdf >
Accessed November 21 2010.

Clamonte V A 2002 “Lessons from ALDA: Agrarian Reform Beneficiaries in Banana Plantations” in *Bantaaw socio-economic indicators in Mindanao*, Vol.15, Issue 9-10:1-11.

Colchester M 2011 *Palm Oil and Indigenous Peoples in South East Asia: Land acquisition, human rights violations and the indigenous people on the oil palm frontier*. Forest Peoples Programme & ILC. Available at:
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/palmoilindigenouspeoplesoutheastasiafinalmceng_0.pdf

2008 *Beyond Tenure: Rights-based approaches to peoples and forests. Some lessons from the Forest Peoples Programme*. Forest Peoples Programme, Rights & Resources Initiative. Available at: <landcoalition.org/pdf/08_FPP_RRI_beyond_tenure.pdf>

2004 “Indigenous Peoples and Communal Tenures in Asia” in *Land Reform Bulletin* 1. p. 29-43.

Colchester M & C Fay 2007a *Land, forest and people: facing the challenges in South-East Asia*. Rights and Resources Initiative, Listening, Learning and Sharing, Asia Final Report. Available at:
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/landforestandpeopleasiasept07eng.pdf

Colchester M & Wee Aik Pang, Wong Meng Chuo, T Jalong 2007b *Land is Life: Land Rights and Oil Palm Development in Sarawak*. Forest Peoples Programme & Perkumpulan SawitWatch. Available at: <forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/sarawaklandislifenov07eng.pdf>

Colchester M & N Jiwan 2006a *Ghosts on Our Own Land: Oil Palm Smallholders in Indonesia and the Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Bogor: Forest Peoples Programme and SawitWatch. Available at:

[<forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/02/ghostsonourownlandtxt06eng.pdf>](http://forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/02/ghostsonourownlandtxt06eng.pdf)

Colchester M & N Jiwan, Andiko, M Sirait, A Y Firdaus, A Surambo, H Pane 2006b *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Forest Peoples Programme, SawitWatch, HuMA and ICRAF, Bogor. Available at: <forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/promisedlandeng.pdf>

Colchester M & R Lumuru 2005 *The Roundtable on Sustainable Palm Oil: Analysis, Prospects and Progress*. Briefing Paper following Second Meeting of RSPO. Available at:
[<forestpeoples.org/documents/prv_sector/oil_palm/rspo_feb05_briefing_eng.shtml>](http://forestpeoples.org/documents/prv_sector/oil_palm/rspo_feb05_briefing_eng.shtml)

Cooke M F 2002 “Vulnerability, Control and Oil Palm in Sarawak: Globalization and a New Era?” in *Development and Change* 33(2): 189-211.

Corlin C 2004 “Hmong and the Land Question in Vietnam: national policy and local concepts of the environment” in N Tapp & J Michaud, C Culas, G Y Lee (eds.) *Hmong/Miao in Asia*, Silkworm Book, Bangkok. Pp. 295-320.

Dalabajan D 2010 *Losing the Frontier to Agrofuels-The Impacts of Feedstock Plantations in the Province of Palawan*. Environmental Legal Assistance Centre.

DAP-News 2010. *Malaysians look to invest in rice, rubber, palm oil in Cambodia*. Phnom Penh, Tuesday 22 June 2010.

David C et al 2003 *Land reform and land market transactions in the Philippines*. Terminal Report, Philippine Institute for Development Studies.

de Janvry A 1984 “The Role of Land Reform in Economic Development: Policies and Politics” in Eicher, C.K. and Staatz, J.M. (eds), *Agricultural Development in the Third World*, The Johns Hopkins University Press, Maryland.

- de la Rosa R 2004 *Agrarian Reform Movement in Mindanao: The Experience of Commercial Farms in Davao del Norte*. Manuscript, Quezon City, Institute for Popular Democracy.
- DENR Administrative Order No. 29, 1996 Series.
- Department of Agriculture 2009 *Monthly Publication of the Department of Agriculture*, August 2009. Aggie Trends Vol. 24 No. 8. Accessed October 3 2010. Available at: <da.gov.ph/Aggie_TrendsDownloads/2009_Issue/August_2009.pdf>
- Department of Agriculture-Agribusiness and Marketing Assistance Service 2007 *Palm Oil Industry Situationer Report*.
- Department of Lands and Physical Planning 2005 *Lease Leaseback Land Acquisition*. Papua New Guinea. Available at: <lands.gov.pg/Services/Land_Administration/LA_Services/Land_Acquisition/Lease_Leaseback.htm>
- Derequito F 2005 “Palm Reading: Taking the slick out of the oil palm sweet talk” in *Mindanao Focus*, No. 1, 2005 Series, AFRIM, Davao City.
- Donough C R & C Witt, T Fairhurst (n.d.) *Yield Intensification in Palm Oil using BMP as a Management Tool*. Available at: <[ipni.net/ppiweb/filelib.nsf/0/955A8115B42BDBB64825775700047F8E/\\$file/IPOC2010%20Donough%20BMP%20PAPER.pdf](http://ipni.net/ppiweb/filelib.nsf/0/955A8115B42BDBB64825775700047F8E/$file/IPOC2010%20Donough%20BMP%20PAPER.pdf)> Last accessed March 18 2011.
- Down to Earth (DTE) 2011a *100 years of oil palm*. No. 88, April 2011. Available at: <downtoearth-indonesia.org/story/100-years-oil-palm> Accessed May 25 2011.
- 2011b “Indonesian Sustainable Palm Oil scheme to speed up palm oil development”. April 2011. Available at: <downtoearth-indonesia.org/story/indonesian-sustainable-palm-oil-scheme-speed-palm-oil-development> Accessed April 20 2011.
- Dy R T 2009 *Food for Thought. How Agribusiness is Feeding the World*. University of Asia and the Pacific. Pasig.

- Economist (The) 2010 “The campaign against palm oil: The other oil spill” in *The Economist*, July 24 2010. Available at: <economist.com/node/16423833> Accessed August 10 2011.
- Fairhurst T et al 2009 *Report on Smallholder Oil Palm Production in Krabi Province, Thailand*. Unpublished.
- Faryadi E 2009 *Forest exploitations and expansion of agrofuel production and its impacts to the local people in Indonesia*. International Land Coalition Asia Regional Meeting in Jakarta, October 12 2009.
- Filer C 2011 *The Political Construction Of A Land Grab in Papua New Guinea*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, United Kingdom, April 6-8 2011.
- Flores-Obanil C & Manahan M A 2006 “An Agrarian Crisis in the Making” in *Focus on the Global South*. Available at: <landaction.org/spip/IMG/pdf/an_agrarian_crisis_in_the_making.pdf>
- Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) 2010 <faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor>
- 2002 *Land tenure and rural development*. FAO Land Tenure Studies, Rome, Italy. Available at: <[ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y4307e/y4307e00.pdf](http://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y4307e/y4307e00.pdf)>
- Forest Peoples Programme (FPP) 2011 *Indonesia: police shootings in palm oil estates*. Available at: <forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2011/02/indonesia-police-shootings-palm-oil-estates>
- 2008 *Free, Prior and Informed Consent and the Roundtable on Sustainable Palm Oil: a guide for companies*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Available at: <forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2009/12/fpicandrspocompaniestsguideoct08eng.pdf>

- Friends of the Earth (FOE) 2005 *EIA: a campaigner's guide*. FOE, London.
- General Statistics Office 2008 *Statistical Handbook of Vietnam*. Ha Noi, Vietnam.
- Giné X 2004 *Cultivate or Rent Out? Land Security in Rural Thailand*. Available at <neumann.hec.ca/neudc2004/fp/gine_xavier_sept_24.pdf> Accessed April 21 2011.
- Giovannucci, D & T Purcell 2008 *Standards and Agricultural Trade in Asia*. ADB Institute Discussion Paper No. 107. Asian Development Bank Institute. Tokyo. Available at: <adbi.org/discussion-paper/2008/05/22/2542.standards.agricultural.trade.asia> Accessed March 18 2011.
- Glenn K G % B P Johnson 2005 *Land Administration in East Timor Functions and Responsibilities: Lessons Learned from Albania, Mozambique, Rwanda, and Thailand*. East Timor Land Law Program report for USAID. Available at <pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADE797.pdf> Accessed April 21 2011.
- Gorre I R L & Y O Hatta, A G G Ballesteros (eds.) 1997 “Indigenous Peoples’ Rights” in *A Compilation of Laws on Natural Resources and Indigenous Peoples’ Rights: A Field Handbook*, vol.1. Legal Rights and Resources Centre.
- Greenpeace 2008 *United Plantations certified despite gross violations of RSPO standards*. Available at: <greenpeace.org.uk/files/pdfs/forests/UnitedPlantationsReport.pdf> Accessed August 10 2011.
- 2007 *Duta Palma: the oil palm industry’s recipe for climate change disaster*. Available at: <greenpeace.at/uploads/media/cookingtheclimate_part_2_lowres.pdf> Accessed August 10 2011.
- Guttal S 2006 “Land and Natural Resource Alienation in Cambodia” in *Focus on the Global South*. Available at: <focusweb.org/land-and-natural-resource-alienation-in-cambodia.html>

- GTZ (ed.) 2008 *Field Survey on Sustainable Palm Oil in Thailand and Compliance with International Standards*. A report paper prepared by South East Asia Consult & Resource Company Ltd., Bangkok/Krabi/Surat Thani/Chiang Mai, September 2008.
- Griffin K & A R Khan, A Ickowitz 2002 "Poverty and Distribution of Land" in *Journal of Agrarian Change*, 2(3): 279–330.
- Grimsditch M & N Henderson 2009 "*Untitled Tenure Insecurity and Inequality in the Cambodian land Sector*" in N Bugalski & D Pred (eds) Phnom Penh, Phnom Penh, and Geneva: Bridges Across Borders Southeast Asia, Centre on Housing Rights and Evictions, Jesuit Refugee Service.
- Hall D 2011 *Land Control, Land Grabs, and Southeast Asian Crop Booms*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, April 6-8 2011.
- Hance J 2011 *5 million hectares of Papua New Guinea forests handed to foreign corporations*. Mongabay News. Available at <news.mongabay.com/2011/0323-hance_png_sabls.html> Accessed June 2011.
- Ha Thuc Vien 2011 "The linkage between land reform and land use changes: A case of Vietnam" in *Journal of Soil Science and Environmental Management* Vol. 2(3) (pp. 88-96)
- Hirsch P 2011 *Titling against grabbing? Critiques and conundrums around land formalisation in Southeast Asia*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, April 6-8 2011. Available at: <rcsd.soc.cmu.ac.th/InterConf/paper/paperpdf1_328.pdf> Accessed June 2011.
- IDEAL 1999 *Tanah Penghidup Kitai – Our Land is our Livelihood*. Ideal, Sibu.
- Indigenous People NGO Networks 2010 *Submission for Consideration of the Situation of Indigenous People of Cambodia under the International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 76th Session 2010.

- International Association for Impact Assessment (IAIA) website
<iaia.org> Accessed March 20 2010.
- International Union for the Conservation of Nature (IUCN) 2008
Statutory and Customary Forest Rights and their Governance Implications: The Case of Viet Nam. Hanoi, Vietnam: IUCN.
- ISTA Mielke GmbH 2009 *Study on the Market Potential for Sustainable Palm Oil Produced in Thailand.* Special Report prepared for the GTZ in Eschborn Germany. Unpublished.
- Jakarta Post 2011 “Urgency to develop palm oil standards” April 27 2011. Available at:
<thejakartapost.com/news/2011/04/27/urgency-develop-palm-oil-standards.html>
- Japan Development Institute (JDI) 2007 *Cambodia Bio-energy Development Promotion Project.* Engineering and Consulting Firms Association, Japan.
- JOANGOHutan 2006 *Forest governance in Malaysia: an NGO perspective.* A report produced for FERN by JOANGOHutan. Available at: <rengah.c2o.org/assets/pdf/de0129a.pdf>
- Jomo K S & Y T Chang, K J Khoo 2004 *Deforesting Malaysia: The Political Economy and Social Ecology of Agricultural Expansion and Commercial Logging.* London: Zed Books.
- Jongskul A 2010 *Thailand Palm Oil Industry. Presentation for a Conference on Sustainability and Palm Oil: The Case of Thailand.* Berlin, March 18-19 2010. Available at:
<gtz.de/de/dokumente/en-apichart-iae-thailand-2010.pdf>. Accessed March 18 2011.
- Kingdom of Cambodia (KOC) 1999 Sub-decree on Environmental Impact Assessment Process, Kingdom of Cambodia. Phnom Penh. Available at:
<sithi.org/admin/upload/law/72%20on%20the%20Environmental%20Impact%20Assessment%20Process%20%281999%29.ENG.pdf>
- Kingdom of Thailand (KOT) 2007 *Constitution of the Kingdom of Thailand.* Available at

<senate.go.th/th_senate/English/constitution2007.pdf>
Accessed on November 16 2010.

2006 *National Report on Agrarian Reform and Rural Development in Thailand*. Agricultural Land Reform Office (ALRO) and Ministry of Agriculture and Cooperative (MOAC). Kingdom of Thailand, Agricultural Land Reform Office, Ministry of Agriculture and Cooperative, submitted to the International Conference on Agrarian Reform and Rural Development.
Available at
<icarrd.org/en/icard_doc_down/national_Thailand.pdf>
Accessed November 15 2010.

1983 *Land Development Act*. Available at
<asianlii.org/th/legis/consol_act/lda1983168/> Accessed on November 16 2010.

1975 *Agricultural Land Reform Act*. Available at
<ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=THA&p_classification=22.01&p_origin=SUBJECT>
Accessed November 212010.

1954 *Land Code*. Available at
<samuiforsale.com/index.php/translation-law-text-thailand-land-code-act.html> Accessed November 16 2010.

2004. *Land Readjustment Act, B.E. 2547*. Available at
<thailaws.com/index_thai_laws.htm> Accessed November 17 2010.

Kirk M & N D A Tuan 2009 [Land-tenure policy reforms: Decollectivization and the Doi Moi system in Vietnam](#). IFPRI Discussion Paper 927.

KOMNASHAM & SawitWatch 2010 *HAM & HGU*

Lamcheck J 2006 *Abandoning Community Forestry for Agro-forestry: Where do Upland Communities Fit In?* LRC-KSK.

Lang C 2008 *Taking the land, impoverishing the people: The pulp industry in the Mekong Region*. Published in Watershed, Vol. 12, No. 3, November 2008.

- 2005 *Cambodia: Plantations and the death of the forests*. Published in WRM Bulletin 101, December 2005.
- 2003 “*Land concessions in Cambodia*” in *Pulping the Mekong*. [Oxfam Mekong Initiative](#), [TERRA](#) & [World Rainforest Movement](#).
- 2002 *The Pulp Invasion: The international pulp and paper industry in the Mekong Region*. World Rainforest Movement.
- 2001 *The Bitter Fruit of Palm Oil: Dispossession and Deforestation*. World Rainforest Movement. Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay.
- 2001 *Cambodia: Unfulfilled promises of an oil palm plantation*. World Rainforest Movement Bulletin N° 47, June 2001.
- Liddle M 2008. *The Thailand Community Forest Bill. Rights and Resources Initiative: Rights and Tenure in the News*. Available at: <rightsandresources.org/blog.php?id=34> Accessed April 21 2011.
- Lieu P 2005. “The vegetable oil sector of Vietnam – a vision of the first 25 years of the 21st century” in *Study on developing oil plants and vegetable oils in Vietnam*. Agricultural Publishing House.
- Llanto G M & Estanislao B 1993. *The comprehensive agrarian reform programme and the collateral value of agricultural lands*. Agribusiness Assistance Program publication no. 1.09. Philippines, United States Agency for International Development.
- Malonzo 2010 “Breaking Mindanao’s gridlock in agricultural development” in *Philippine Daily Inquirer*, No. 42.
- MAFF 2010 *The Information Center Regarding to the Economic Land Concession (ELC) in Cambodia*. Available at: <elc.maff.gov.kh/index.html> Accessed July 5 2010.
- “General Crops” Available at: <stats.maff.gov.kh/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2> Accessed July 19 2010.

Meinzen-Dick R & L Nkonya 2005 *Understanding legal pluralism in water rights: lessons from Africa and Asia*. International workshop on ‘African Water Laws: Plural Legislative Frameworks for Rural Water Management in Africa’, January 26-28 2005, Johannesburg, South Africa. Available at:

[<nri.org/projects/waterlaw/AWLworkshop/MEINZEN-DICK-R.pdf>](http://nri.org/projects/waterlaw/AWLworkshop/MEINZEN-DICK-R.pdf) Accessed March 13 2010.

Minh L 2009 “Dream of oil palm” Available at:

[<laodong.com.vn/Home/Canh-canhh-uoc-mo-cay-co-dau/200910/158674.laodong>](http://laodong.com.vn/Home/Canh-canhh-uoc-mo-cay-co-dau/200910/158674.laodong) Accessed June 2011.

Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) 2001 *Synthesis Report, Five Million Hectare Reforestation Program Partnership*. Ministry of Agriculture and Rural Development, International Co-operation Department, Partnership for the 5 Million Hectare Reforestation Program. Hanoi.

2000 *Clarification of the five million hectare reforestation program, Task Force I Report*. Ministry of Agriculture and Rural Development, International Co-operation Department, Partnership for the 5 Million Hectare Reforestation Program. Hanoi.

Ministry of Industry and Trade 2010 *Development project for Vietnamese vegetable oil industry through 2020, vision to 2025*. Ministry of Industry and Trade, Ha Noi, Vietnam.

2003 *Development project for Vietnamese vegetable oil industry through 2010*. Ministry of Industry and Trade, Ha Noi, Vietnam.

Mishra P & P Parija 2011 “*India to Boost Oil-Palm Area to Lower \$8.4 Billion Cooking Oil Import Bill*”. Available at:
[<bloomberg.com/news/2011-01-07/india-to-boost-oil-palm-area-to-lower-8-4-billion-cooking-oil-import-bill.html>](http://bloomberg.com/news/2011-01-07/india-to-boost-oil-palm-area-to-lower-8-4-billion-cooking-oil-import-bill.html)
Accessed May 20 2011.

Mongabay 2011 *Alleged moratorium breach becomes test for RSPO*. June 24 2011. Available at:

<news.mongabay.com/2011/0623-rspo_breach_klk.html>
Accessed August 10 2011.

2008 “Malaysian palm oil industry accused of child slavery by Indonesia”. Available at: <news.mongabay.com/2008/0917-oil_palm.html> Accessed May 2011.

Mong Reththy Group website

<mongreththy.com/index.php?page=mong_reththy_invest>
Accessed July 19 2010.

NGO Forum on Cambodia 2010 *Statistical Analysis on Land Dispute Occurring in Cambodia 2009.*

NGO position papers on Cambodia's development in 2009-2010 to the 3rd Cambodia Development Cooperation Forum.

Monitoring the implementation of the National Strategic Development Plan and the 2008 CDCF Joint Monitoring Indicators. Available at:

<ngoforum.org.kh/eng/dip/dipdocs/DPP_NGOPositionPapers_May2010Eng.pdf> Accessed July 26 2010.

Ngo S & Chan S 2010 *Does Large Scale Agricultural Investment Benefit the Poor?* Cambodian Economic Association, Phnom Penh, Cambodia.

Nguyen T Q & N B Nguyen, T N Tran 2008a *Forest tenure reform in Vietnam: what lessons can be learned for policy implementation and poverty alleviation in forest communities?* Available at:

<iasc2008.glos.ac.uk/conference%20papers/papers/N/Nguyen_%20218802.pdf>

Nguyen Q T & V C Nguyen, V T Hanh 2008b *Statutory and Customary Forest Rights and their Governance Implications: The Case of Viet Nam.* IUCN, Gland, Switzerland and Hanoi, Viet Nam. Available at: <mtforum.org/fr/node/17485>

Nhiem T B September 28 2007 “Oil palm plantation to prevent storms - a possible project” Available at:
<monre.gov.vn/monrenet/default.aspx?tabid=214&idmid=&ItemID=33038>

- Ninh N H 2005 "Production and disappearance of vegetable oils in Vietnam" in *Study on developing oil plants and vegetable oils in Vietnam*. Agricultural Publishing House. (pp. 38-40)
- Ninh N N & Thang L Q, Tram T T, Thang N Q 2005 "Study on the adaptability of oil palm grown in Vietnam" in *Study on developing oil plants and vegetable oils in Vietnam*. Agricultural Publishing House. (pp. 265-273)
- Oberndorf R B, J D 2006 *Legal Analysis of Forest and Land Laws in Cambodia*. Community Forestry International. Available at: <communityforestryinternational.org/publications/research_reports/LEGALA.PDF>
- Office of Agricultural Economics (OAE) 2010a *Fundamental Information*. Agricultural Economics, Bangkok. (published in Thai).
- 2010b *Statistics on the Oil Palm Sector*. Unofficial, unpublished, internal document.
- 2009 *Agricultural Statistics of Thailand 2008*. Bangkok.
- Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 2007 *Economic Land Concession in Cambodia: A human rights perspective*. United Nations. Cambodia Office of the High Commissioner for Human Rights. Phnom Penh, Cambodia.
- Oil World Annual 2010*. CD.
- O'Keefe K 2009 *Land is Life: Land Conflict Interventions in Cambodia. A Review of Case Studies & NGO Perceptions*. Phnom Penh: NGO Forum on Cambodia.
- Pacaba-Deriquito T 2004 *The AVA-mode of CARP in Banana Commercial Farms: Business as Usual*. AFRIM.
- PCA Palawan Field Office 2009 *Year End Report on Palawan Palm Oil Industry Development*.
- Philippine Palm Oil Development Office (PPODO) 2006 *The Oil Palm Industry...In a Capsule*. Davao City, Philippines.

- 2003 *Philippine Country Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People.*
- 2009 *Philippines Indigenous Peoples ICERD Shadow Report.*
Submission to UN CERD, 75th Session.
- 2002 "Palm Oil Industry Destined for the Philippines" Available at:
<foodproductiondaily.com/Supply-Chain/Palm-oil-industry-destined-for-Philippines> Accessed October 1 2010.
- Preechajarn, S 2010a *Thailand, Oil Palm Situation Field Trip.*
GAIN Report Number TH0114. USDA Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network. Available at:
<gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Oil%20Palm%20Situation%20Field%20Trip_Bangkok_Thailand_8-9-2010.pdf> Accessed April 4 2011.
- 2010b *Thailand, Biodiesel Supply and Demand Outlook.* GAIN Report Number TH0079. USDA Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network. Available at:
<jordan-associates.com/Biodiesel%20Demand%20and%20Supply%20Outlook_Bangkok_Thailand_5-26-2010.pdf> Accessed March 18 2011.
- Proforest 2008 *An Assessment of Potential High Conservation Values in Northern Krabi Province.* September 2008.
Unpublished.
- Ratcliffe L A 1994 *Australia-Vietnam Community Forestry Project, Song Be and Dong Nai provinces*, Third progress report, June 1 1994 - November 30 1994.
- Reuters 2011 *Malaysia plans green palm oil certification scheme.*
Available at:
<af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL3E7J108220110801> Accessed August 14 2011.
- 2010 *French Retailer Casino to Ban Use of Palm Oil.* March 25, 2010. Available at: <reuters.com/article/2010/03/25/france>

casino-palmoil-idUSLDE62O25E20100325>; Accessed March 18 2011.

RSPO 2010a *E-mail newsletter of the Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Issue 14: November 2010.

2010b *E-mail newsletter of the Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Issue 13: November 2010.

Salmi J & Nguyen Xuan Nguyen, Le Quang Trung 1999 *Study on Financing Strategy for Sustainable Forest Management in Vietnam*, Ministry of Agriculture and Rural Development, UNDP Programme on Forests (PROFOR) Vietnam, Hanoi.

Sarnsamak P & J Pongrai 2011 *Special Report: Land Encroachers Blamed*. The Nation. April 4 2011. Available at: <nationmultimedia.com/2011/04/04/national/Land-encroachers-blamed-30152429.html> Accessed April 7 2011.

SawitWatch 2007 *Palm oil for Biofuels Increases Social Conflicts and Undermines Land Reform in Indonesia*. An Open Letter to the European Parliament, European Commission and citizens of the European Union.

Schneider A E 2011 *What shall we do without our land? Land Grabs and Resistance in Rural Cambodia*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, 6-8 April 2011. Available at: <iss.nl/content/download/24207/227508/version/2/file/49+Alison_Schneider.pdf> Accessed June 2011.

Schott C 2009 *Socio Economic dynamics of biofuel development in Asia Pacific*. Friedrich Ebert Stiftung (FES), Indonesia Office.

Seng L H 2000 “The land rights of the Orang Asli” in Consumer Association of Penang (ed.) *Land Issues on Malaysia CAP*, Penang. Pp. 170-195.

Sikor T & C Lund (eds.) 2009 *The Politics of Possession: Property, Authority, and Access to Natural Resources*. London, Wiley-Blackwell.

Sirait M 2009 *Indigenous Peoples and Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan, Indonesia*. Cordaid, The Hague.

Smolker R & B Tokar, A Petermann, E Hernandez 2009 *Devastated lands , displaced peoples: Agrofuel costs in Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea.* Pacific Ecologist, Pacific Institute of Resource Management.

Suehiro A 2007 “Land Reform in Thailand: The Concept and Background of the Agricultural Land Reform Act of 1975” in *Developing Economies*, 19(4). Available at: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1746-1049.1981.tb00700.x/pdf Accessed April 21 2011.

Thailand Environment Institute (TEI) 2009 *Baseline Study on the Oil Palm Industry in Thailand.* Unpublished.

Thang L Q n.d. “The results of oil palm researches in Vietnam” Available at: ioop.org.vn/vn/NCTK/Thanh-Tuu-Cua-Vien/Ban-Tin-Khoa-Hoc-Cong-Nghe/Ket-Qua-Nghien-Cuu-Co-Dau-Tai-Viet-Nam/

Tho L V 2005 “Palm Kernel cake (PKC) a by-product of palm oil used for animal feed and its market perspective in Vietnam” in *Study on developing oil plants and vegetable oils in Vietnam.* Agricultural Publishing House. Pp. 481-485.

Thoenes P 2006 *Biofuels and Commodity Markets – Palm Oil Focus.* Paper based on presentation made at AgraInforma conference “The impact of biofuels on commodity markets”, Brussels October 24-25 2006. Available at: fao.org/es/ESC/common/ecg/122/en/full_paper_English.pdf Accessed May 18 2011.

Thom C T 2006 *Oil palm – Planting Techniques.* Labour and Social Publishing House, Ha Noi, Vietnam.

Thongrak S & S Kiatpathomchai S Kaewrak 2011 *Baseline Study of the Oil Palm Smallholders in the Project Areas.* Final Report. Submitted to GIZ Thailand: Project on Sustainable Palm Oil Production for Bio-Energy. Unpublished.

Tiominar B 2011 *Plantations and poverty: notes from a village deep in oil palm territory.* Available at :<downtoearth-indonesia.org/sites/downtoearth-

indonesia.org/files/Plantations%20and%20poverty-eng.pdf>
Accessed 25 May 2011.

Tram T T 1996 *Study on developing oil palm as materials for processing industry and export in southern provinces of Vietnam*. Science Report, Ho Chi Minh, Vietnam.

United Nations 2009 *World investment report 2009: transnational corporations, agricultural production and development*. United Nations Conference on Trade and Industry, September 17 2009. Available at: <unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf> Accessed June 2011.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) n.d. *Human Settlements: Thailand*. Available at: <unescap.org/huset/lgstudy/country/thailand/thai.html> Accessed April 21 2011.

UNHCHR 2004 *Land concessions for economic purposes in Cambodia: A human rights perspective*. United Nations Cambodia Office of the High Commissioner for Human Rights. Phnom Penh, Cambodia. Available at: <cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/2-Thematic-Reports/Thematic_CMB12062007E.pdf>

United Palm Oil Industry Company Limited (UPOIC) 2011 *Plantations & Crushing Mill*. Available at: <upoic.co.th/plantations/index_en.php> Accessed March 18 2011.

USAID 2011 *USAID Country Profile: Thailand*. Available at: <usaidlandtenure.net/usaidlptrproducts/country-profiles/thailand/thailand-country-profile> Accessed April 21 2011.

USAID 2007 *Land tenure and property rights regional report*. Volume 2.4: East and Southeast Asia. Available at: <prrgp.com/tools/LTPR%202.4%20East%20and%20Southeast%20FINAL.pdf>

United States Department of State (USDOS) 2006 *2006 Country Reports on Human Rights Practices: Thailand*. Available at:

[Accessed
November 21 2010.](http://state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78792.htm)

Vejjajiva A 2008 *Policy Statement of the Council of Ministers*. Delivered 29 December 2008. Available at:
[Accessed November 21 2010.](http://eppo.go.th/admin/cab/gov-policy/pol_59-E.pdf)

Vermeulen S & N Goad 2006 *Towards better practice in smallholder palm oil production*. IIED, London.

Vietnamese Government 2008 *Labor law of Vietnam*. Labor and Social Publishing House, Ha Noi, Vietnam.

2003 *Land law of Vietnam*. Judicial Publishing House, Ha Noi, Vietnam.

Vietnam News 1999 “Imbalance in land ownership is getting bigger”. November 4 1999.

2000 *Vietnam – Attacking Poverty*, Vietnam Development Report Report to the Government of Vietnam-Donor-NGO Poverty Working Group, Consultative Group Meeting for Vietnam.

Watershed, Vol. 12, No. 3. November 2008.

White J & B 2011 *The gendered politics of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan, Indonesia*. Paper presented at the international conference on ‘Global Land Grabbing’ at the Institute of Development Studies, United Kingdom. Available at: [Accessed April 2011.](http://future-agricultures.org/index.php?option=com_docman&task=catview&gid=1552&limit=10&limitstart=50&order=hits&dir=DESC&Itemid=971)

World Bank 2010 *Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?* Washington DC. Available at:
[Accessed April 2011.](http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_final.pdf)

2008 *Doing Business: Thailand*. Available at:
[Accessed April 2011.](http://doingbusiness.org/ExploreTopics/RegisteringProperty/Details.aspx?economyid=186)

2000 *Vietnam – Attacking Poverty*, Vietnam Development Report
Report to the Government of Vietnam-Donor-NGO Poverty
Working Group, Consultative Group Meeting for Vietnam.
Available at:
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan005933.pdf Accessed March 2011.

World Rainforest Movement (WRM) 2009 *Women raise their voices against tree plantations: The role of the European Union in disempowering women in the South*. Forests and Biodiversity Program, Friends of the Earth International & World Rainforest Movement. Available at:
wrm.org.uy/subjects/women/fullreport.pdf

World Rainforest Movement (WRM) 2006 *Oil Palm: From cosmetics to biodiesel – Colonization lives on*. World Rainforest Movement, Montevideo, Uruguay. Available at:
wrm.org.uy/plantations/material/Palm2.pdf Accessed May 20 2011.

World Rainforest Movement Bulletin (WRM) N° 101. December 2005.

World Rainforest Movement Bulletin (WRM) N° 59. June 2002.

WWF Palm Oil
panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/
Accessed April 22 2010.

WWF Palm Oil Buyers' Scorecard 2009. Available at:
assets.panda.org/downloads/wwfpalmoilbuyerscorecard2009.pdf Accessed April 20 2011.

Xanthaki A 2003 "Land rights of indigenous peoples in South-East Asia" in *Melbourne Journal of International Law* 4 (2): 467-496.

Daftar kata

Adat: kebiasaan, seringkali tidak tertulis, hukum masyarakat adat Indonesia dan Malaysia, yang mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial, penguasaan dan pemanfaatan lahan yang inklusif (lihat “customary law”)

Alienated land: alienasi, dalam hukum benda hak milik (property law), adalah kapasitas suatu properti (property) atau hak atas properti untuk dijual atau dialihkan dari satu pihak ke pihak lain. *Alienated land* adalah tanah yang telah diambil alih dari pemilik tradisional oleh pemerintah, untuk dimanfaatkan sendiri atau untuk pembangunan pihak swasta yang membutuhkan agunan atau bentuk jaminan lainnya.

Agro-fuels/bio-fuels/bio-diesels: bahan bakar yang utamanya dibuat dari biomassa atau limbah bio yang biasa digunakan di sektor transportasi dan dipandang sebagai bentuk energi yang lebih ramah lingkungan dan salah satu cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Bahan bakar ini sering dipandang sebagai salah satu ketahanan energi yang berfungsi sebagai alternatif dari bahan bakar berbasis fosil yang terbatas dalam ketersediaannya, penggunaannya telah berkembang di seluruh dunia, dan memiliki ekspansi produk pertanian yang ditanam secara khusus untuk menghasilkan bahan bakar nabati seperti kelapa sawit, kedelai, jagung, singkong dan jarak (*jatropha*, lihat “*jatropha curcas*”)

Bagangan: nama lokal untuk “kumbang badak” (“rhinoceros beetles”) di Palawan, Filipina. *Bagangan* disebut sebagai salah satu hama yang banyak merusak kelapa sawit.

Berondol: biji buah kelapa sawit yang terlepas.

Buri: *Corypha Elata*, atau Talipot Palm. Sejenis pohon kelapa sawit yang besar yang tumbuh di Filipina.

Cadastre (kadastral): sebuah register yang komprehensif dari batas-batas geografi suatu daerah atau kawasan. Sebuah kadastral umumnya mencakup uraian lengkap kepemilikan (ownership), penguasaan lahan (tenure), lokasi persisnya, rupa muka bumi dan

daerah, ladang jika itu adalah kawasan pedesaan, dan nilai (value) dari masing-masing lahan.

Crude Palm Oil (CPO): terminologi pasar komoditas untuk minyak makan lemak nabati nabati yang diperas dari biji buah pohon kelapa sawit lewat proses penggilingan.

Customary law: aturan-aturan tradisional bersama (common) atau praktek-praktek (practice) tradisional yang membentuk bagian makna terdalam dari perilaku (conduct) yang diterima dan diharapkan dalam berbagai masyarakat adat yang diakui negara (lihat “*adat*”).

Datu: pemimpin desa di Filipina, biasanya merupakan pejabat tertinggi dalam struktur politik tradisional.

“Degraded” land: lihat “Idle land”

Doi moi reforms: reformasi ekonomi di seluruh negeri yang digagas tahun 1980-an di Vietnam sebagai cara untuk memungkinkan adanya transisi negara menuju sebuah ekonomi pasar. Reformasi kebijakan tenurial merupakan bagian dari *doi moi* dan mencakup de-kolektivisasi (lawan dari penguasaan kolektif yang dilakukan pemerintah komunis) produksi pertanian dan perbaikan kepastian tenurial seiring dengan liberalisasi pasar dan promosi insentif-insentif ekonomi yang baru

Economic Land Concession (ELC): sebuah mekanisme untuk memberikan tanah pribadi negara untuk eksplorasi pertanian dan pertanian-industri di Kamboja. Tujuan ini mencakup investasi di bidang pertanian, membuka lapangan kerja di desa dan diversifikasi peluang-peluang mata pencarian, dan menghasilkan devisa negara. *Economic land concessions* hanya berlaku untuk lahan milik negara selama maksimal 99 tahun. Konsesi-konsesi ini tidak memberikan hak kepemilikan atas lahan. Namun, meskipun tidak termasuk hak untuk mengalihkan lahan tersebut, pemilik konsesi diberikan hak-hak lainnya yang terkait dengan kepemilikan selama konsesi berlaku.¹

¹ OHCHR 2007

Elaeis guineensis: Kelapa sawit asal Afrika Barat dan digunakan dalam pertanian (agriculture) komersial dalam produksi minyak sawit (palm oil). Perkebunan besar *Elaeis guineensis* saat ini utamanya ditujukan untuk memproduksi minyak (yang diekstraksi dari bagian daging buahnya) dan minyak biji (yang didapat dari kacang bijinya)

Engineered consent: Manipulasi terhadap masyarakat tanpa persetujuan atau kesadaran untuk mengarahkan keputusan-keputusan yang mereka buat dan berbagai tindakan yang mereka tempuh, umumnya disesuaikan dengan kepentingan manipulatornya.

Environmental Impact Assessment (EIA): Sebuah studi awal yang biasanya dilakukan konsultan AMDAL untuk mengumpulkan data terkait dampak lingkungan dari sebuah pembangunan sebelum memutuskan apakah pembangunan tersebut perlu dilaksanakan atau tidak. Kajian lingkungan selayaknya menghasilkan standar-standar pembangunan dan dalam beberapa kasus pembangunan malah tidak dilaksanakan sama sekali. Di mana pembangunan tetap dilaksanakan, kajian lingkungan dapat membantu mengusulkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.²

Free, Prior and Informed Consent (FPIC): prinsip bahwa sebuah komunitas memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas usulan proyek yang mungkin berdampak pada lahan yang mereka miliki, tempati atau gunakan secara adat. FPIC kini menjadi sebuah prinsip kunci dalam hukum dan jurisprudensi internasional yang terkait dengan masyarakat adat. FPIC minyaratkan adanya negosiasi/perundingan dipahami tanpa paksaan antara investor, perusahaan atau pemerintah dan masyarakat adat sebelum pembangunan dan pembuatan kebun kelapa sawit, perkebunan kayu atau usaha pembangunan apapun dilaksanakan di tanah adat mereka (lihat “self-determination”)

Fresh Fruit Bunches (FFB): tandan kelapa sawit yang tumbuh setelah 24-30 bulan; minyak sawit diperas dari buahnya

Gazetttement: penerbitan sebuah pengumuman resmi tentang penetapan suatu daerah atau kawasan. Dalam hutan, *gazetttement*

² FOE 2005

(pengukuhan) umumnya mengindikasikan bahwa suatu kawasan berhutan telah ditetapkan untuk dilindungi negara atau pihak berwenang publik lainnya sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku.

“Idle” land: tanah yang didefinisikan negara sebagai lahan yang nyaris tidak berpenghuni, tidak produktif, tidak dimanfaatkan, dan “menganggur” yang dapat diubah menjadi zona produksi untuk bahan pangan dan bahan bakar nabati untuk memecahkan masalah pangan dan energi dunia tanpa merugikan kebutuhan pangan setempat. Dalam kenyataannya, daerah-daerah seperti ini mungkin adalah kawasan pertanian atau wilayah adat yang digunakan komunitas-komunitas setempat.

Independent smallholder: petani kecil mandiri meskipun berbeda-beda situasinya dicirikan oleh kebebasan mereka untuk memilih bagaimana mereka hendak memanfaatkan lahan mereka, tanaman apa yang hendak mereka tanam dan bagaimana mereka akan mengelola lahannya; diorganisir, dikelola dan didanai sendiri; dan tidak terikat kontrak dengan pabrik pengolahan atau asosiasi mana pun. Meskipun demikian, mereka dapat saja menerima dukungan atau layanan penyuluhan dari lembaga pemerintah.

***Jatropha curcas*:** jenis tanaman usia panjang yang tahan kekeringan dan mengandung minyak, atau jenis semak yang berasal dari kawasan tropis Amerika dan kini banyak ditanam di kawasan tropis dan subtropis di seluruh dunia, karena kemampuannya untuk tumbuh baik di tanah yang marginal atau miskin hara, dan sebagai bahan baku biodiesel bermutu tinggi.

Kaingin: “perladangan berpindah” (Filipina)

Kepata: kepala kerja atau mandor kebun kelapa sawit (Filipina)

Konsep baru: juga dikenal sebagai “New Concept”, *Konsep baru* adalah sebuah skema pembangunan lahan Hak Adat Orang Asli (Native Customary Rights/NCR) yang dikenalkan pemerintah negara bagian Sarawak tahun 1995. Dalam skema ini, seluruh tanah NCR di suatu daerah akan digabungkan menjadi satu kesatuan besar dan menghapus batas-batas yang ada dan hanya akan diberi satu sertifikat tanah. Dalam hal kebun besar, konsep ini adalah konsep model usaha patungan (*joint-venture*) di mana *the Sarawak Land*

Custody and Development Authority (LCDA) atau *the Sarawak Land Development Board* (SLDB) mewakili kepentingan pemilik tanah NCR yang dipercayakan kepada mereka, dan lalu lembaga ini akan membentuk sebuah usaha patungan (JVC) dengan sebuah perusahaan swasta besar yang disetujui pemerintah.

Land grabbing: umumnya merupakan suatu pengambil-alihan hak milik secara cepat (seperti hak atas lahan atau paten) oleh perusahaan dalam negeri dan transnasional, sering kali dengan dorongan dan dukungan dari pemerintah nasional dan sering kali ditujukan untuk pengembangan pertanian atau industri.

Land tenure: hubungan, yang didefinisikan secara hukum atau secara adat, antar masyarakat, secara individu atau kelompok, terkait lahan. Kategori-kategori dalam penguasaan lahan mencakup pribadi, komunal, akses terbuka dan Negara. Aturan-aturan penguasaan mendefinisikan pengalokasian hak milik atas lahan dalam masyarakat. Aturan-aturan ini mendefinisikan bagaimana akses diberikan terhadap hak untuk memanfaatkan, mengendalikan dan mengalihkan lahan, serta tanggung jawab dan batasan-batasan terkait. Dalam terminologi sederhana, sistem penguasaan lahan menetapkan siapa dapat memanfaatkan sumber daya apa selama berapa lama dan dalam kondisi apa.

Leaseback: sebuah transaksi finansial, di mana orang menjual suatu aset, seperti tanah dan menyewanya untuk suatu periode yang panjang. Karenanya, sang penjual masih terus dapat memanfaatkan aset tersebut tapi sudah tidak memiliki hak milik atasnya. Setelah membeli suatu aset, sang pemilik membuat kesepakatan jangka panjang di mana aset tersebut disewakan kepada sang penjual dengan harga yang disepakati.

Leasehold: real property (real estate) yang dipegang oleh pengguna/penyewa (tenant atau lessee) berdasarkan sebuah perjanjian sewa selama periode tertentu, umumnya dengan syarat-syarat yang tertulis dalam kesepakatan tersebut, setelah masa sewa berakhir, properti itu akan dikembalikan kepada pemiliknya (freehold owner) atau kepada pemberi sewa (lessor).

Legal pluralism: keberadaan bersama dan interaksi antara beberapa tata tertib hukum seperti hukum internasional, negara, adat, agama,

proyek dan lokal, yang seluruhnya dapat bertindak sebagai landasan untuk mengklaim hak milik. Dalam sebuah proses yang disebut sebagai “forum shopping”, orang mungkin cenderung untuk memilih salah satu kerangka kerja hukum ini sebagai basis klaim mereka atas sebuah sumber daya. Keberadaan beberapa kerangka kerja hukum, dengan demikian, dapat memungkinkan adanya fleksibilitas yang cukup bagi orang untuk bergerak bebas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan tanah. Pluralisme hukum juga mencerminkan dinamika hak milik, karena kerangka kerja hukum yang berbeda tidaklah berdiri sendiri namun saling mempengaruhi dan dapat bertransformasi dalam perjalannya. Meskipun demikian, pluralisme hukum juga dapat menciptakan ketidakpastian, terutama dalam kasus konflik atas sumber daya yang sama, seperti tanah, karena tiap orang tidak mungkin memiliki pengetahuan atas seluruh jenis hukum yang mungkin relevan, dan karena pihak lawan dapat menggunakan jenis pengetahuan hukum yang berbeda sebagai landasan klaimnya.³ (lihat “*adat*” dan “*customary law*”)

Lumad: sebuah istilah dari Cebuano untuk sekelompok masyarakat adat non-muslim di Mindano, Filipina.

Mono-cropping: praktek pertanian yang memberikan hasil besar lewat penanaman satu jenis tanaman di sebidang tanah, seperti yang dilakukan pada kelapa sawit, jagung, kedele dan gandum.

Monopsonistic relationship: sebuah bentuk pasar di mana hanya satu pembeli menghadapi banyak penjual dalam hubungan di mana permintaan datang hanya dari satu sumber. Sebuah implikasi teoritis umum dari sebuah hubungan monopsonistik adalah bahwa harga barang tertekan mendekati ongkos produksi. Hal ini menunjukkan kompetisi tidak sempurna, yang serupa dengan sebuah monopolis, di mana hanya satu penjual menghadapi banyak pembeli.

Nuclear Estate Scheme (NES): sebuah skema di mana perkebunan negara bertindak sebagai pusat pemasaran/pemrosesan dengan sebuah kebun percontohan untuk penyuluhan teknis, sementara petani plasma diatur seperti dalam pertanian kontrak.

³ Meinzen-Dick & Pradhan 2002

Orang asli: Istilah Malaysia yang berarti “masyarakat asli” atau “pribumi” dan kurang lebih sama artinya dengan istilah “masyarakat adat”. Kebanyakan *orang asli* tinggal di Semenanjung Malaysia dan terbagi ke dalam tiga kelompok suku utama, yaitu Semang (Negrito), Senoi, dan Proto-Malay (Melayu asli). Jumlah mereka mencapai sekitar 60.000 di mana 60%-nya tinggal di hutan hujan.

Outgrower scheme: sebuah kesepakatan yang dibentuk di Filipina antara petani dan perusahaan agrobisnis multinasional lewat mana konglomerat besar membeli semua hasil produksi anggota koperasi yang menanam jenis tanaman tertentu.

Pag-Ibig: *Home Development Mutual Fund* (Filipina). Sebuah manfaat wajib bagi seluruh pegawai Filipina baik di perusahaan swasta maupun perusahaan negara di mana baik pengawali maupun majikan memberikan sumbangsih bulanan yang diambil dari gaji bulanan pegawai dan kontribusi tambahan dari majikan.

Panglima: pimpinan adat di Palawan, Filipina.

Paraquat: sebuah herbisida ampuh yang umum digunakan di perkebunan kelapa sawit dan diketahui telah meracuni ribuan pekerja perkebunan dan petani kecil setiap tahunnya.

Peatland: akumulasi materi-materi vegetasi yang membusuk sebagian, sering kali terbentuk di rawa lahan basah dan hutan rawa gambut, yang mengandung banyak serapan karbon dan diambil sebagai sumber penting bahan bakar di wilayah-wilayah tertentu dunia.

Rabas: pembukaan lahan besar-besaran untuk pembangunan perkebunan (Filipina)

The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): sebuah badan nirlaba berbagai pemangku kepentingan yang dibentuk tahun 2004 dan terdiri dari pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit – produsen kelapa sawit, pengolah atau pedagang minyak sawit, penghasil barang-barang konsumen, pedagang eceran (ritel), bank dan investor, NGO lingkungan atau konservasi alam dan NGO sosial atau pembangunan – yang berupaya meningkatkan

praktek-praktek perusahaan dalam hal ekspansi dan produksi kelapa sawit.⁴

Schemed smallholder: petani kecil (plasma) yang secara struktural terikat oleh kontrak, kesepakatan kredit atau perencanaan kepada sebuah pabrik pengolahan. Petani plasma diawasi teknis penanaman dan pengelolaannya dan sering kali diorganisir atau secara langsung dikelola oleh manajer pabrik pengolahan, kebun atau skema yang mengikat mereka secara struktural.

Self-determination: sebuah hak mendasar dari seluruh masyarakat yang menopang kerja PBB. Dalam kaitannya dengan masyarakat adat khususnya, hak ini ditetapkan dalam Deklarasi Hal-hak Masyarakat Adat (*the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*) dalam Pasal 3, yang berbunyi: masyarakat adat memiliki hak untuk “secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka” serta Pasal 4, yang berbunyi: “masyarakat adat, dalam melaksanakan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri, memiliki hak atas otonomi atau kelola mandiri dalam hal-hal terkait urusan-urusan didalam dan setempat mereka, serta jalan dan cara untuk mendanai fungsi otonomi mereka.” (lihat “Free, Prior and Informed Consent (FPIC)’’)

Social Impact Assessment (SIA): sebuah prosedur yang membentuk bagian dari perencanaan formal dan proses persetujuan bagi proyek-proyek pembangunan di beberapa negara untuk menggolongkan dan mengkaji dampak pembangunan besar terhadap populasi, kelompok atau pemukiman.⁵ SIA sering kali dilakukan sebagai bagian dari, atau tambahan pada, Analisa Dampak Lingkungan, namun kajian ini masih belum diadopsi secara luas seperti halnya EIA dalam sistem perencanaan formal, sehingga sering kali memainkan peran kurang berarti dalam kombinasi penilaian-penilaian lingkungan dan sosial. (Lihat “Environmental Impact Assessment (EIA)’’)

⁴ Colchester & Lumuru 2005

⁵ International Association for Impact Assessment (IAIA)

Smallholder: petani yang menanam kelapa sawit, kadang-kadang bersama produksi subsisten tanaman lainnya, di mana keluarga menyediakan sebagian besar tenaga kerja yang dibutuhkan dan lahan pertanian menyediakan sumber utama pendapatan dan di mana luasan kebun kelapa sawit umumnya kurang dari 50 hektar. (definisi RSPO) (lihat “schemed smallholder”, “independent smallholder”)

Special Agricultural and Business Lease (SABL): di Papua Nugini, yaitu sebuah proses yang disebut “lease-leaseback” (sewa-disewakan kembali) di mana negara dapat menyewa tanah adat yang secara teoritis didapat atas persetujuan dari pemilik adatnya dan menyewakan kembali lahan tersebut untuk keperluan pengembangan pertanian atau ekonomi. Menurut kesepakatan sewa ini, pemerintah menyewa tanah adat dari pemilik tradisionalnya dan menyewakannya kembali, umumnya ke pihak ketiga, dengan penangguhan hak-hak adat atas lahan tersebut selama periode penyewaan.

Slash and burn agriculture: (Lihat “swidden agriculture”)

Swidden agriculture: sebuah teknik pertanian yang mencakup pembukaan hutan (untuk ladang) secara bergantian dan periode tanam yang singkat yang diselingi masa bera yang panjang agar hutan tumbuh dan tanah pulih kembali. *Swidden* (atau pertanian tebang dan bakar) melibatkan penebangan dan pembakaran hutan atau kawasan berhutan untuk membuat ladang.

“Vacant” land: lihat “idle” land”.

Tentang Penulis

Marcus Colchester



Marcus Colchester berkebangsaan Inggris dan menyandang gelar Doktor di bidang Antropologi Sosial dari Universitas Oxford. Dia adalah Direktur *Forest Peoples Programme*. Marcus memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bekerja sama dengan masyarakat hutan di kawasan tropis. Dia adalah pakar di bidang masyarakat adat, ekologi sosial dan politik, penetapan standar, hak asasi manusia, lingkungan, penguasaan lahan pembangunan, reformasi kebijakan dan advokasi, FPIC dan resolusi konflik. Dia telah membantu beberapa komite di *Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Marcus juga telah bekerja dengan intensif di bidang penebangan, perkebunan, minyak sawit, industri ekstraktif, bendungan, kawasan kolonisasi dan lindung.

Sophie Chao



Sophie Chao memiliki darah Perancis dan China. Dia menyandang gelar BA di bidang Budaya China dan Tibet, dan gelar Master di bidang Antropologi Sosial dari Universitas Oxford. Pengalamannya pertamanya bekerja dengan suku minoritas adalah di dataran tinggi Tibet, di mana dia menjadi penasehat kurikulum dan pengajar bahasa Inggris untuk kelompok nomaden di biara Nyampo Yurtse. Sophie telah bekerja sebagai untuk *Literacy and Non-Formal Education Division* di UNESCO (Paris) dan Asisten Direktur Forest Peoples Programme (UK). Cakupan bidang penelitiannya adalah hukum dan hak asasi manusia, penguasaan

tanah, keuangan yang bertanggung jawab, hukum adat, dan ekspansi minyak sawit di Asia Tenggara.

Jonas Dallinger



Jonas Dallinger adalah sarjana Manajemen Marketing Internasional dari *University of Cooperative Education* di Ravensburg dan menyandang gelar BA (Hons) di bidang Administrasi Bisnis dari *Open University London*. Setelah mendapatkan pengalaman awalnya di sektor swasta, Jonas melanjutkan studinya di bidang Geografi, Ekologi dan Ekonomi di Universitas Münster, Jerman, dan lulus tahun 2008. Sejak itu, dia bekerja dengan

German Development Cooperation dan sejak tahun 2009 Jonas mendukung proyek produksi minyak sawit berkelanjutan di Thailand, di mana dia bertugas sebagai pakar CIM untuk kantor ekonomi pertanian Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand.

HEP Sokhannaro



HEP Sokhannaro adalah spesialis kehutanan dan mata pencarian yang telah bekerja dengan masyarakat pengguna hutan selama lebih dari satu dekade di bidang pembangunan serta implementasi dan monitoring pengelolaan kehutanan masyarakat di tingkat nasional. Sokhannaro sebelumnya menjabat Koordinator Pusat Informasi Lahan sebuah Forum NGO di Kamboja selama beberapa tahun. Forum ini memainkan peranan

penting dalam advokasi kebijakan lahan dan sektor kehutanan di Kamboja di tingkat nasional dan internasional. Saat ini, Sokhannaro bekerja sebagai manajer proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) bekerja sama dengan *Group for Environment, Resources,*

Energy and Solidarity (GERES) Cambodia. Dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek berjalan menuju pemenuhan standar terakreditasi untuk menghasilkan kredit karbon yang sesuai dengan metodologi pengurangan emisi karbon sukarela yang disusun UNFCCC. Sokhannaro menyandang gelar Master di bidang Ilmu Pengetahuan Alam di Pengelolaan Sumber Daya Alam dari Institut Teknologi Asia di Bangkok, Thailand.

Vo Thai Dan



Vo Thai Dan adalah dosen senior di Fakultas Agronomi Universitas Nong Lam di Ho Chi Minh City, Vietnam. Dia meraih gelar PhD-nya dari *Georg-August University*, Goettingen, Jerman, tahun 2007 berdasarkan penelitiannya atas keragaman genetika teh Vietnam dengan menggunakan *morphology, inter-simple sequence repeat and microsatellite markers*. Pekerjaan Vo Thai Dan sebagai pakar agronomi melibatkan pemanfaatan

pengetahuan dan pengalaman agronomis untuk meningkatkan sektor pertanian Vietnam dan mata pencarian petani Vietnam. Bidang yang ditekuni Vo Thai Dan saat ini mencakup riset produksi tanaman komersial (*cash crop*), terutama dalam hubungannya dengan perubahan iklim, keragaman genetika serta konservasi dan pemanfaatan tanaman asli.

Jo Villanueva



Jo Villanueva adalah pembela hak asasi manusia dan masyarakat adat, feminis dan aktivis pertambangan. Selama 19 tahun terakhir, dia bekerja bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal, organisasi pembangunan dan gerakan sosial di Filipina dan negara Asia lainnya tentang isu-isu hak atas tanah, sumber

daya alam dan lingkungan, isu ekstraktif, gender perempuan and pengembangan organisasi. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Hak-hak Hukum dan Sumber Daya Alam *Friends of the Earth* Filipina. Dia juga anggota *Samdhana Institute*. Jo juga salah seorang penasehat regional Samdhana untuk *the Global Greengrants Fund* (GGF) dan penasehat/fasilitator untuk *the Indigenous Peoples Support Fund* (IPSF) di Filipina. Dia saat ini tinggal di Cagayan de Oro di Mindanao.

Tentang Mitra

SawitWatch

SawitWatch adalah organisasi non-pemerintah Indonesia yang menfokuskan diri pada isu-isu minyak sawit lewat pemberdayaan gerakan-gerakan yang sinergis dari masyarakat adat, masyarakat lokal, petani dan buruh sawit untuk mendorong perubahan sosial menuju keadilan ekologis di industri minyak sawit. Anggota-anggota individual SawitWatch ada di 17 provinsi tempat pengembangan kelapa sawit. Aktifitas-aktifitas kunci organisasi ini ditujukan untuk 1) membentuk, menyediakan dan mengelola data dan informasi tentang isu-isu sawit; 2) meningkatkan kapasitas petani kecil, buruh dan masyarakat adat; 3) memfasilitasi penyelesaian konflik antara petani kecil, buruh dan masyarakat adat di perkebunan sawit skala besar; 4) membentuk gerakan-gerakan yang sinergis dari petani kecil, buruh dan masyarakat adat; 5) mendorong munculnya kebijakan negara yang berpihak pada petani kecil, buruh dan masyarakat adat. SawitWatch memiliki komitmen untuk memberdayakan petani kecil, menguatkan pekerja dan serikat buruh; menguatkan akuntabilitas rejim minyak sawit berkelanjutan; menguatkan akuntabilitas industri minyak sawit global dan mendorong investasi yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.sawitwatch.or.id

Forest Peoples Programme (FPP)

Forest Peoples Programme adalah NGO internasional yang didirikan pada tahun 1990 yang mendukung hak-hak masyarakat yang tinggal di hutan dan mengantungkan kehidupannya pada hutan. FPP berupaya menciptakan ruang politik bagi masyarakat hutan untuk melindungi hak-hak mereka, mengendalikan tanah mereka dan memutuskan masa depan mereka sendiri dengan berupaya mendapatkan pengakuan hak dan kepentingan mereka dalam undang-undang, kebijakan dan program; mendukung masyarakat hutan untuk mengembangkan kapasitas mereka sendiri untuk mengklaim dan menjalankan hak-hak asasi mereka; melawan kebijakan dan proyek-proyek dari atas yang mengancam hak-hak

masyarakat hutan; mempromosikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan; memastikan ada keadilan, melawan diskriminasi dan mempromosikan keadilan gender; memberitahukan aksi-aksi NGO di bidang kehutanan sesuai dengan visi-visi masyarakat hutan; dan menghubungkan gerakan-gerakan masyarakat adat dan masyarakat hutan di tingkat regional dan internasional. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.forestpeoples.org

Samdhana Institute

The Samdhana Institute dibentuk oleh sekelompok individu, aktifis, pemerhati masalah konservasi dan praktisi pembangunan, dengan komitmen untuk “mengembalikan” apa yang mereka ketahui untuk generasi mendatang; dan menyatukan keahlian, pengetahuan, pengalaman, jaringan, rekan sejawat dan teman-teman; membentuk kematangan, kekuatan dan keberlanjutan atas kerja-kerja Samdhana. Saat ini, ada 64 Anggota yang menyumbangkan waktu dan sumber daya mereka untuk membangun kapasitas masyarakat lokal lewat pelatihan, mentoring, dan fasilitasi pemikiran dan strategi dengan kelompok masyarakat dan pembela. *The Samdhana Institute* beroperasi di dua kantor, yaitu Kantor Regional di Cagayan de Oro City, Filipina dan Kantor Indonesia di Bogor, Indonesia. Samdhana adalah anggota dari dana Aliansi Global Asia Tenggara – sebuah mitra *Global Greengrants Fund Network*. Lembaga ini mengelola program penghibahan kembali lewat Hibah-Hibah Kecil sebesar US\$100 - \$10.000 untuk mendanai masyarakat dan organisasi akar rumput di daerah-daerah pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat; penguatan kelembagaan dan kepemimpinan; dan menyelesaikan konflik lingkungan dan mediasi. Di Filipina, *Indigenous Peoples Support Fund* memfokuskan diri untuk membantu masyarakat dan organisasi adat. Dana awal disediakan untuk proyek-proyek masyarakat adat yang ditujukan untuk pembangunan domain leluhur dan pengelolaan berkelanjutan, konservasi lingkungan, kepemimpinan dan pembangunan kelembagaan. Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.shamdhana.org

RECOFTC (The Center for People and Forests)

RECOFTC menempati tempat yang unik di dunia hutan kemasyarakatan di Asia dan Pasifik sebagai satu-satunya organisasi nirlaba internasional yang mengkhususkan diri pada pengembangan kapasitas dan pendeklasian pengelolaan hutan dari tingkat akar rumput sampai ke tingkat tertinggi.

Mulai sebagai sebuah organisasi pembelajaran di tahun 1987, lembaga ini telah mendukung secara aktif pengembangan institusi, kebijakan dan program kehutanan masyarakat di kawasan tersebut. Dalam perjalannya, kerja-kerja RECOFTC telah berevolusi lewat empat bidang tematik yang ditangani, yaitu meluaskan kehutanan masyarakat; masyarakat, hutan dan perubahan iklim; mentransformasi konflik dan melindungi mata pencarian masyarakat lokal. Wanatani komersial, seperti kebun kelapa sawit, membawa dampak pada keempat bidang tematik ini dan pendekatan RECOFTC dipandu oleh prinsip-prinsip hak yang jelas dan kuat, tata kelola yang baik dan manfaat yang adil bagi jutaan masyarakat pengguna hutan. RECOFTC berupaya mencapai tujuannya lewat jaringan kerja yang aktif bersama masyarakat, mitra, donor, NGO dan institusi pemerintah di tingkat lokal dan internasional lewat kantor-kantor mereka di Thailand, Vietnam, Indonesia dan Kamboja. Untuk informasi lebih banyak, silakan kunjungi www.recoftc.org

RRI (Rights and Resources Initiative)

The Rights and Resources Initiative (RRI) adalah sebuah koalisi strategis yang terdiri dari organisasi-organisasi internasional, regional dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pembangunan, penelitian dan konservasi untuk memajukan penguasaan hutan, kebijakan dan reformasi global pasar. Misi dari RRI adalah untuk mendukung perjuangan masyarakat lokal dan masyarakat adat melawan kemiskinan dan pemunggiran dengan mempromosikan komitmen dan aksi global yang lebih besar menuju reformasi kebijakan, pasar dan hukum yang dapat menjamin hak-hak mereka untuk memiliki, mengontrol dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam, terutama sumber daya tanah dan hutan. RRI

dikoordinasikan oleh *the Rights and Resources Group*, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington, D.C. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.rightsandresources.org

Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara Kecenderungan dan implikasi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat

Sektor minyak sawit seluruh dunia berada dalam tahap ekspansi yang cepat namun mendapat tantangan yang kuat dari organisasi-organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional yang menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan dan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit yang tak pandang bulu menimbulkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies secara cepat, emisi gas rumah kaca yang mengkhawatirkan, perampasan milik masyarakat adat, dan penyengsaraan masyarakat miskin di pedesaan.

Studi yang penuh wawasan oleh Forest Peoples Programme, SawitWatch, *the Samdhana Institute* dan *the Centre for People and Forests* ini mendokumentasikan rincian dan untuk pertama kalinya bagaimana perkebunan kelapa sawit berekspansi di seluruh Asia Tenggara. Studi ini melengkapi pengalaman-pengalaman terbaik yang diketahui di Malaysia, Indonesia dan Papua Nugini dengan studi kasus-studi kasus baru tentang proses ekspansi perkebunan kelapa sawit di Thailand, Kamboja, Vietnam dan Filipina.

Meningkatnya permintaan global atas lemak nabati dan bahan bakar nabati, perdagangan global, lonjakan harga komoditas dan arus investasi internasional adalah beberapa hal yang mendorong ekspansi ini. Namun, pertimbangan-pertimbangan dalam negeri juga tak kalah penting. Pemerintah-pemerintah nasional sedang mempromosikan kelapa sawit untuk memenuhi lonjakan permintaan lemak nabati dalam negeri, untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar fosil dan untuk menahan hilangnya nilai tukar (mata uang) asing. Selain itu, di mana situasinya mendukung, petani kecil sendiri juga lebih memilih menanam kelapa sawit sebagai tanaman yang menguntungkan.

Dampak dari ekspansi kelapa sawit terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat dengan demikian tidak seragam. Perbandingan dari pengalaman nasional menunjukkan bahwa jika tanah petani dan masyarakat adat terlindungi dan dimana ada supremasi hukum, kelapa sawit cenderung berkembang dengan laju sedang-sedang saja karena tanaman petani memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat lokal dalam hal pendapatan, keadilan dan mata pencarian. Namun, jika hak tanah tidak terlindungi atau penegakan hukum lemah, kebun kelapa sawit skala besar cenderung berkembang pesat bersama permasalahan-permasalahan serius bagi penghuni penggarap lahan dan pekerja, yang kemudian disertai konflik tanah dan pelanggaran hak asasi manusia.

Implikasi dari temuan-temuan ini sudah jelas. Untuk menjamin agar kelapa sawit hanya berkembang secara menguntungkan, standar-standar sukarela dari organisasi-organisasi seperti *the Roundtable on Sustainable Palm Oil* perlu didukung oleh reformasi tenurial dan tata kelola nasional yang mewajibkan persyaratan-persyaratan yang bisa memastikan hak-hak masyarakat lokal benar-benar dihormati dan dilindungi. Tanpa perlindungan perlindungan tersebut, ekspansi mungkin hanya menguntungkan para investor, pedagang dan elit nasional dengan mengorbankan masyarakat miskin pedesaan dan ekosistem yang rentan.

